LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2026





DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanya perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Setiap instansi pemerintah perlu ditumbuh kembangkan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, efektifitas dan kinerja dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Selanjutnya, hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dari suatu unit kerja.

Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pada Triwulan III tahun 2026 telah menyusun dan melaksanakan program-program yang mencakup bidang pengembangan sarana, pengawasan dan pengendalian perawatan sarana, pengelolaan sarana milik negara, kelaikan sarana sesuai visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya dengan berpedoman pada program kerja tersebut dan pelaksanaan yang telah dilaksanakannya, disusun laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama tahun berjalan 2026 dalam bentuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dengan tersusunnya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini diharapkan dapat memberikan gambaran, evaluasi dan motivasi dalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang meliputi SDM, dana, dan waktu pelaksanaan kegiatan, hasil (*output*), manfaat (*outcomes*), dan dampak kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu sebagai bahan dalam rangka kesempurnaan laporan ini diharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang konstruktif.

Jakarta, 23 Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian



Ronald Jackson Simbolon
NIP 197903032005021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
I.1 LATAR BELAKANG 1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN 2
I.3 TUGAS DAN FUNGSI 3
I.3.1 Subdirektorat Pengembangan Sarana 4
I.3.2 Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana 5
I.3.3 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara 6
I.3.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I 6
I.3.5 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II 8
I.4 STRUKTUR ORGANISASI 9
I.5 REVISI PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2026 11
I.5.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian 11
I.5.2 Alokasi Anggaran Tahun 2026 23
BAB II 30
II.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA 30
II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN 32
II.2.1 Sasaran Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian dengan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian 34
II.2.2 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Bidang sarana Perkeretaapian dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian 43
II.2.3 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian 50
II.2.4 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian 57
II.2.5 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Presentase dengan Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan 80
II.2.6 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck 90

II.2.7 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Presentase Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti 95

II.2.8 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian 99

II.2.9 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian 102

II.2.10 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian 104

II.2.11 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian 108

II.2.12 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian 111

II.3 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA TRIWULAN III 113

II.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN DAN SDM) 121

II.4.1. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Manusia 121

II.4.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran 122

II.4.3. Analisis Atas Atas Perubahan Budaya Kinerja 123

BAB III 125

III.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA 125

III.2 KESIMPULAN 128

III.3 REKOMENDASI 129

LAMPIRAN 134

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja dan Renaksi Tahun 2026

Lampiran 2. Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Lampiran 3. Monitoring Rencana Aksi Per Bulan Pada Triwulan III

Lampiran 4. Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja

Lampiran 5. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian, termasuk didalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun secara manajerial kepemimpinan melalui aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Permenhub PM No 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka memenuhi Pemenhub PM No 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, maka dilaksanakan monitoring capaian kinerja triwulan II pada tahun 2026. Pelaksanaan monitoring tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

a. Memantau kemajuan pelaksanaan / *progress* indikator kinerja di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian per triwulan;

b. Mengidentifikasi kendala / hambatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan; dan
c. Mengindentifikasi perubahan capaian target indikator kinerja akibat adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan lingkungan strategis dan kemudian melakukan penyesuaian/ Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya laporan kinerja triwulan III ini adalah untuk memberikan data, informasi dan hasil evaluasi program/ kegiatan secara rinci yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan bidang sarana perkeretaapian dari unit kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode Juli hingga September 2026.

Monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

a. Memantau kemajuan pelaksanaan/ *progress* indikator kinerja di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian per triwulan;
b. Mengidentifikasi kendala/ hambatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan; dan
c. Mengindentifikasi perubahan capaian target indikator kinerja akibat adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan lingkungan strategis dan kemudian melakukan penyesuaian/ Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.

I.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian yang secara legalitas kedudukannya di bawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;

d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
e. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;dan
f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data dan rumah tangga Direktorat.

Rincian struktur organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut di atas terdiri dari:

I.3.1 Subdirektorat Pengembangan Sarana

Subdirektorat Pengembangan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian; dan
e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian.

I.3.2 Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi perawatan, standardisasi tempat dan peralatan perawatan, serta sertifikasi badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi

tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian;
e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

I.3.3 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

I.3.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian serta sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

I.3.5 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (rampcheck), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian, dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

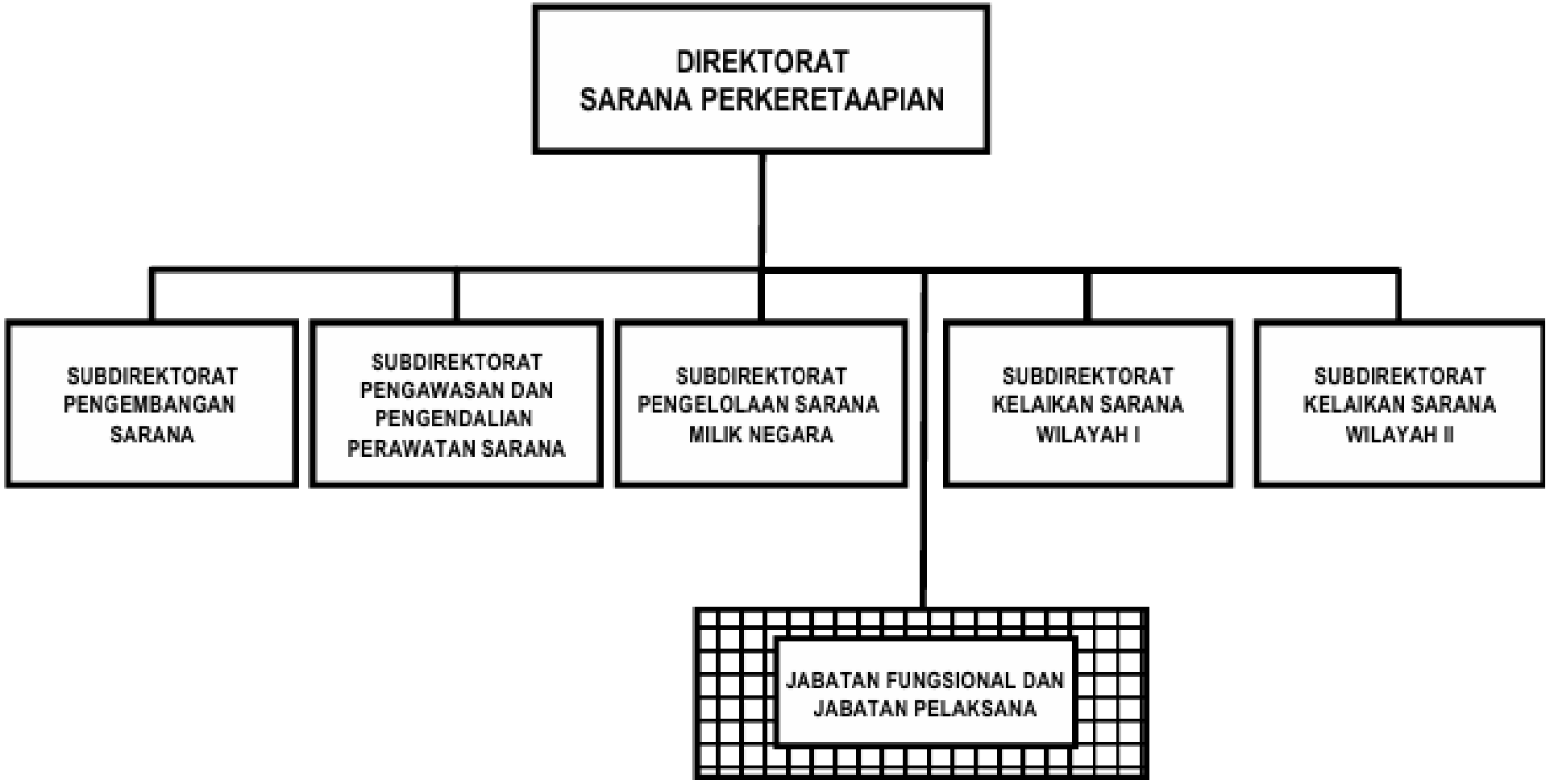
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan

pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan

I.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri dari:

a. Subdirektorat Pengembangan Sarana.
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana.
c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara.
d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I.
e. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian

I.5 REVISI PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

I.5.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026, dimana terdapat 4 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

a. Meningkatnya konektivitas Sarana Perkeretaapian:
   Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
b. Meningkatnya pelayanan bidang sarana perkeretaapian
   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
c. Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian:
   1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
   2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
   3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan.
   4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
   5. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti
d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan indikator kegiatan:
   1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
   2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
   3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
   4. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
   5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

Tabel 1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	78,08	65,73	70,79	74,72	78,08
Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25
Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,85	8,77	29,26	50,52	88,85
	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,25	37,03	37,03	37,03	59,25
	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	%	71,01	21,01	41,18	56,10	71,01
	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94,60	94,60	94,60	94,60	94,60
	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100,00	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,80	-	-	-	80,80
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	13,75	-	-	-	13,75
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,75	44,25	47,12	61,00	86,75
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,00	22,15	56,04	78,00	100
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,00	-	-	-	65,00

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 dengan menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome) beserta indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART. Dalam penentuan Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART yaitu Spesific (Tujuan Jelas dan Fokus), Measurable (terukur/jelas dan dapat dihitung), Achievable (Dapat dicapai), Relevant (Sesuai Kenyataan), Time Bound (Untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu).

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2 Metode Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan analisis SMART

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	**MEASURABLE (M)**	**ACHIEVABLE (A)**	**RELEVANT (R)**	**TIME-BOUND (T)**
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian.	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang sarana/fasilitas sarana mendukung konektivitas (DED, Spektek, rancang bangun dan lainnya) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029 $\frac{\text{Jumlah Perencanaan Teknis Bidang bidang sarana/fasilitas sarana periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan}}{\text{Kebutuhan Perencanaan Teknis Bidang Sarana/Fasilitas Sarana periode 2025–2029}} \times 100$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementeri-an Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara ber-tahap per-tahun s.d tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggaraka	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS *Case Survey Management System* Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness*	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td>Sarana Perkeretaapian</td><td>n oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian</td><td>
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00-2.5996</td><td>25.00-64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60-3.064</td><td>65.00-76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644-3.532</td><td>76.61-88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324-4.00</td><td>88.31-100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber : Peraturan MENPAN-RB No.14 Tahun 2017
</td><td>serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Direktorat Sarana Perkeretaapian</td><td></td></tr>
<tr><td>Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian</td><td>Merupakan salah satu parameter untuk mengukur kelaikan sarana perkeretaapian berupa sarana yang sudah disertifikasi</td><td>Jumlah sarana perkeretaapian yang tersertifikasi kelaikan dari tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian periode tersebut sesuai kebutuhan/aset sarana
$\textbf{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Sarana Perkeretaapian yang sudah Tersertifikasi Kelaikan dari Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian dan/atau Jumlah Aset Sarana Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} X \ 100\%$</td><td>Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran</td><td>Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
			yang tersedia		
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan serta perkembangaan kebijakan **Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian** = *Jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian* X 10	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur pemenuhan sarana	Penjumlahan antara pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 50% dan pemenuhan kebutuhan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 50%.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras	Target ditetapkan secara bertahap pertahun

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Mendukung Keselamatan	perkeretaapian milik negara	**Persentase *Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara*** = *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara* + *Persentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapia Milik Negara* ***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara*** = (*Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara pada Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Target atau Kebutuhaan Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara periode tahun 2025-2029 sesuai Renstra*) X 50% ***Persentase Pemenuhan Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara*** = (*Jumlah Realisasi Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan* / *Jumlah Kebutuhan Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan*) X 50%	yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	s.d tahun 2029
Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur sarana perkeretaapian yang laik operasi dengan cara pemeriksaan secara berkala pada periode	Jumlah sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti perbaikan/pemenuhan sesuai hasil *rampcheck* dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan *rampcheck dengan hasil tidak baik/temuan major/butuh perbaikan* pada tahun berjalan ***Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil Rampcheck*** = (*Jumlah Sarana yang Telah Ditindaklanjuti Perbaikan/Pemenuhan sesuai Hasil Rampcheck pada Tahun Berjalan* / *Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Tidak Baik/Temuan Major/Butuh Perbaikan pada Tahun Berjalan*) X 100	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	Lebaran dan Nataru		serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Sarana Perkeretaapian	
Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	Merupakan salah satu parameter untuk mengetahui perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian	Penjumlahan antara persentase pengawasan perawatan sarana perkeretaapian pada tahun berjalan dan pengawasan tempat perawatan sarana perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Presentase Pengawasan Perawatan dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian} = \text{Presentase Pengawasan Perawatan Sarana} + \text{Presentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana}$ $\text{Presentase Pengawasan Perawatan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Perawatan sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai Sispro}}{\text{Jumlah Rekomendasi perawatan sarana perkeretaapian yg dilakukan pengawasan}} \times 50\%$ $\text{Presentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Tempat Perawatan sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai PM 18 tahun 2019}}{\text{Jumlah Rekomenasi tempat perawatan sarana perkeretaapian yang dilakukan pengawasan}} \times 50\%$	Target ditetapkan mengacu pada KAK dan RAB yang telah ditetapkan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai AKIP Direktorat	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Sarana	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024.	Target ditetapkan mengacu pada capaian	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian	Target ditetapkan secara bertahap

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Sarana Perkeretaapian	Perkeretaapian (Nilai Skala 1-100)	***Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian =*** *(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)*	tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	pertahun s.d tahun 2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai 0-30)	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + T P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15 $\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$ Keterangan : P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian</td><td>Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Satker PPSP (Skala 0-100%)</td><td>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:
• Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik;
• 80 - 90 : Kategori Baik;
• 60 - 80 : Kategori Cukup;
• 50 - 60 : Kategori Kurang;
• Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.

NKA= (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)</td><td>Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian	Realisasi perolehan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan $\%\ \text{Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun berja}}{\text{Target PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun berjal}} 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang perubahan Kepka Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan pada Direktorat teknis dilakukan pada Unit Pengolah (UP) dengan bobot sebagai Unit Pengolah (UP): • Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) • Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik);	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		• > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).			

I.5.2 Alokasi Anggaran Tahun 2026

Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke-10 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2026 adalah sebesar Rp 68.090.836.000 yang terdiri dari:

Tabel 3 Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
A.	Program Infrastruktur Konektivitas	57.769.323.000	57.316.106.000
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	57.769.323.000	57.316.106.000
B.	Program Dukungan Managemen	16.340.845.000	10.774.730.000
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	15.323.340.000	9.860.576.000
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	1.017.505.000	914.154.000
Total		**74.110.168.000**	**68.090.836.000**

Tabel 5 Alokasi anggaran berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	
					Semula	Menjadi
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian		**370.957.000**	**185.805.000**
			1	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	370.957.000	185.805.000
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian			
			1	Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)	800.000.000	800.000.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	
					Semula	Menjadi
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian		**1.768.014.000**	**1.138.865.000**
			1	Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	150.448.000	150.448.000
			2	Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II	345.200.000	345.200.000
			3	Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	486.115.000	310.689.000
			4	Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	786.251.000	332.528.000
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian		**20.113.564.000**	**20.113.564.000**
			1	Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000	1.145.761.000
			2	Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	1.200.000.000	1.129.016.000
			3	Studi Standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun	1.000.000.000	1.044.705.000
			4	Studi penyusunan konsep SNI yang bersumber dari JIS E4041 : 2019 dan IEC 61133-2016 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction An	1.200.000.000	1.327.511.000
			5	Studi Standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian	1.500.000.000	1.500.000.000
			6	Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel	0	1.000.000.000
			7	Kajian alternatif skema pengadaan sarana perkeretaapian	1.000.000.000	0

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	
				Semula	Menjadi
		8	Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem	0	1.457.775.000
		9	Studi Standar Spesifikasi Teknis Kereta Levitasi Magnet	1.500.000.000	0
		10	Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000	1.200.000.000
		11	Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	1.200.000.000	1.108.086.000
		12	Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000	1.160.283.000
		13	Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi	970.016.000	1.014.000.000
		14	Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur	965.072.000	1.013.631.000
		15	Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	978.476.000	1.047.673.000
		16	Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	1.000.000.000	917.193.000
		17	Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	2.000.000.000	1.950.057.000
		18	Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA Railroad	1.000.000.000	950.049.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	
					Semula	Menjadi
			19	Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.000.000.000	1.047.930.000
			20	Studi Kapasitas Produksi Manufaktur Sarana Perkeretaapian PT INKA	-	99.894.000
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara		**4.500.000.000**	**4.046.783.000**
			1	pengoperasian sarana milik negara	4.500.000.000	4.046.783.000
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck		**617.568.000**	**341.387.000**
			1	pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	468.614.000	341.387.000
			2	pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang	148.954.000	0
		IKK 7	Persentase pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian		**223.487.000**	**120.065.000**
			1	Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	223.487.000	120.065.000
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian		**204.183.000**	**52.477.000**
			1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	37.090.000	7.849.000
			2	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	167.093.000	44.628.000
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana		**60.428.000**	**24.207.000**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	
				Semula	Menjadi
		Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian		60.428.000	24.207.000
	IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian		**45.322.866.000**	**41.195.218.000**
		1	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	158.207.000	160.707.000
		2	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	74.841.000	72.341.000
		3	Honor Operasional Satuan Kerja	1.712.724.000	1.004.044.000
		4	Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	186.084.000	126.344.000
		5	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.214.580.000	693.580.000
		6	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	753.632.000	1.269.312.000
		7	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	380.271.000	238.845.000
		8	Kegiatan pengadaan 1 paket peralatan inspeksi kelaikan sarana wilayah I	375.000.000	375.000.000
		9	Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	301.390.000	45.924.000
		10	Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	559.317.000	493.191.000
		11	Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	628.620.000	341.455.000
		12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	613.208.000	213.369.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	
				Semula	Menjadi
		13	Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	61.870.000	30.255.000
		14	Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II	232.998.000	41.748.000
		15	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I	807.400.000	310.791.000
		16	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	616.795.000	202.205.000
		17	Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian	180.095.000	150.639.000
		18	Bimbingan teknis tata cara pelaksanaan inspeksi dan supervisi sarana perkeretaapian	151.623.000	24.567.000
		19	Monitoring dan rekonsiliasi data identitas sarana perkeretaapian	197.197.000	73.829.000
		20	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I	114.600.000	14.200.000
		21	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	137.800.000	9.087.000
		22	Bimbingan teknis penjaminan kualitas proses manufaktur sarana perkeretaapian	344.576.000	258.125.000
		23	Bimbingan Teknis pengembangan teknologi sarana perkeretaapian	229.033.000	165.232.000
		24	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	199.449.000	196.457.000
		25	Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis	1.307.339.000	1.234.364.000
		26	Penyusunan rancangan peraturan menteri bidang kelaikan sarana perkeretaapian	112.695.000	26.723.000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	
				Semula	Menjadi
		27	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang sarana perkeretaapian	177.528.000	81.252.000
		28	Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)	61.350.000	40.053.000
		29	Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)	59.380.000	31.666.000
		30	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Dit. Sarana	17.005.000	17.005.000
		31	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP	180.500.000	77.149.000
		32	Langganan software multimedia	20.000.000	20.000.000
			Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian	0	2.290.000.000
		33	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	1.100.000.000	3.450.000.000
		34	Pemelliharaan Lori	2.037.000.000	1.521.000.000
		35	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	19.018.759.000	16.948.342.000
		36	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, dan Kereta Kedinasan Milik Negara	6.000.000.000	6.000.000.000
		37	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	5.000.000.000	2.946.417.000
	IKK 11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian			
	IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian		**129.101.000**	**72.465.000**
		1	Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	129.101.000	72.465.000

BAB II
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinyu yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja secara berkala melalui monitoring triwulan dengan mengacu pada Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 dengan menggunakan salah satu perangkatnya, yaitu sistem aplikasi E-Performance.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2026 menyajikan data capaian kinerja secara triwulanan pada tahun 2026 sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.

II.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

a. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan tidak tercapai sesuai dengan target, maka formula yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran, maka formula yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{(Realisasi – Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah:

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III terhadap target Triwulan III Tahun 2026 dan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
b. Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan III Tahun 2026;
c. Identifikasi Kendala dan Hambatan yang dihadapi.

II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Pada awal tahun 2026 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian dimana target tersebut mengacu pada target Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pengukuran capaian kinerja triwulan III Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Tabel 6 Capaian Kinerja Triwulan III Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK1 S1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	78,08	65,73	70,79	74,72	78,08	81,25	87,5	79,77		104,46	112,49	106,76		102,16
IKK2 SK2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	99,5	98	98,28		104,46	102,89	103,18		103,18
IKK3 SK3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,85	8,77	29,26	50,52	88,85	8,65	29,26	45,70		224,67	181,18	90,46		51,43
IKK4 SK3	Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	%	59,25	37,03	37,03	37,03	59,25	37,03	37,03	37,03		100	100	100		62,5
IKK5 SK3	Persentase Pemenuhan Sarana Milik Negara	%	71,01	21,01	41,18	56,1	71,01	21,01	146,01	52,47		85,89	596,88	93,53		73,89

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK6 SK3	Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	97,79	97,79	97,79		103,37	103,37	103,37		103,37
IKK7 SK3	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		100
IKK8 SK4	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,8	-	-	-	80,8	-	-	-		-	-	-		-
IKK9 SK4	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	13,75	-	-	-	13,75	-	-	-		-	-	-		-
IKK10 SK4	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	86,75	44,25	47,12	61	86,75	44,25	47,12	49,17		526,79	234,66	80,61		56,68
IKK11 SK4	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	%	100	22,15	56,04	78	100	22,15	56,04	81,11		88,6	112,08	103,99		81,11
IKK12 SK4	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65	-	-	-	65	-	-	-		-	-			-

II.2.1 Sasaran Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian dengan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian

Sasaran kegiatan meningkatnya perencanaan teknis bidang sarana yang mendukung konektivitas perkeretaapian :

a. Peningkatan Efektivitas Perumusan Kebijakan Sarana Perkeretaapian.
   Strategi Implementasi agar tercapai adalah dengan :
   - Pelaksanaan studi dan analisis kondisi sarana perkeretaapian yang mencakup usia operasional, kapasitas, efisiensi, dan tingkat utilisasi sarana.
   - Peningkatan sistem digitalisasi data sarana perkeretaapian untuk mendukung proses pengambilan kebijakan.
   - Peningkatan publikasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dengan melibatkan portal publik dan laporan reguler kepada stakeholders utama
b. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Regulator: Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab: Operator sarana: KAI, KCI, KCIC, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro, Produsen sarana: INKA). Strategi Implementasi dengan Mengoptimalisasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan

A. Analisis Capaian Kinerja Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian target kinerja sebesar 78,08%.

Penetapan target kinerja mengacu pada revisi perjanjian kinerja tahun 2026 dengan kebutuhan perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian sebanyak 178 dokumen untuk periode renstra 2025-2029.

Realisasi kinerja dan capaian kinerja triwulan III pada IKK ini 79,77%
Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Perencanaan Teknis bidang saranal fasilitas sarana yang telah disusun dan disahkan dari Tahun 2025 s.d. Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perencanaan Teknis bidang saranal fasilitas sarana yang telah disusun dan disahkan pada periode Renstra 2025 - 2029}} \times 100\%$$

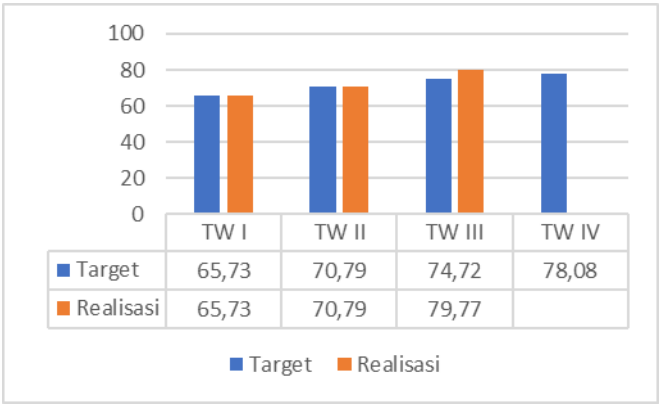
Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\left(\begin{array}{c}\text{Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian}\end{array}\right) = \frac{112+30}{178} \times 100\% = 79{,}77\%$$

Secara jelas Capaian Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian dapat dilihat dalam tabel 6 berikut :

Tabel 7 Capaian Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKKS1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	78,08	65,73	70,79	74,72	78,08	65,73	70,79	79,77	-	100	100	106,76	-	102,16



B. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Sesuai dengan PM No. 16 Tahun 2022, proses rancang bangun sebuah sarana perkeretaapian meliputi tahapan perencanaan, perancangan, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen, uji simulasi,

dan pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian. Untuk pelaksanaan rekayasa sarana perkeretaapian meliputi tahapan perencanaan, perancangan, dan perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen. Pelaksanaan kegiatan monitoring pengendalian mutu, rancang bangun, dan rekayasa meliputi:

a. Klarifikasi dan pembahasan dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian;
b. Validasi gambar teknis, tahapan produksi, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian;
c. Monitoring dan supervisi terhadap uji prototipe dan uji konstruksi terhadap sarana perkeretaapian dalam rangka uji rancang bangun dan rekayasa;
d. Kegiatan lain yang diperlukan dalam proses pengesahan dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian; dan
e. Pengesahan oleh Direktur Sarana Perkeretaapian terhadap dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana.

Dalam 1 (satu) tahun monitoring pengendalian mutu, rancang bangun, dan rekayasa memiliki target 12 (dua belas) dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian yang telah disahkan dalam 1 (satu) tahun. Sampai dengan September 2026 terdapat 30 dokumen yang telah disahkan oleh Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut :

No	Judul Spektek, Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana	Tanggal Persetujuan
1	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi Heritage Eksekutif (K1) tipe 1 Milik PT KAI (Persero)	30 Januari 2026

No	Judul Spektek, Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana	Tanggal Persetujuan
2	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi Heritage Eksekutif (K1) tipe 2 Milik PT KAI (Persero)	30 Januari 2026
3	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan rel Vehicle Exavator RailRoad Milik Balai Perawatan Perkeretaapian	26 Februari 2026
4	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Perawatan Jalan Rel Jenis Alat Pengangkut (Transport Gerat) Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2 Maret 2026
5	Perpanjangan Spesifikasi Teknis Gerbong Terbuka - Berat Muat (BM) 50 T Pintu Bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero)	10 Maret 2026
6	Spesifikasi Teknis Rekayasa Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Pembangkit (P)	14 April 2026
7	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Sleeper (T) Advance Class (A-Class)	14 April 2026
8	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif menjadi Kereta Sleeper (T) Compact Class (C-Class)	14 April 2026
9	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Sleeper (T) Signature Class (S-Class)	14 April 2026
10	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif menjadi The Grand Restaurant (M)	14 April 2026

No	Judul Spektek, Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana	Tanggal Persetujuan
11	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Kitchen and Crew (M)	14 April 2026
12	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Makan (M) Lounge	14 April 2026
13	Spesifikasi Teknis Gerbong Terbuka Pengangkut Balas Lebar Jalan Rel 1435 Berat Muat (BM) 70 T Milik PT KCIC	9 Mei 2026
14	Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik KecepatanOperasi 120KM/Jam Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	30 Juni 2026
15.	Spesifikasi Teknis Kereta Derek (Railway Crane) Kapasitas 120 Ton Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2 Juli 2026
16.	Rekayasa Teknis Kereta Penumpang Menjadi Kereta Penumpang Wisata Versi Heritage Eksekutif (K1) Tipe 1	23 Juli 2026
17.	Rekayasa Teknis Kereta Penumpang Menjadi Kereta Penumpang Wisata Versi Heritage Eksekutif (K1) Tipe 2	23 Juli 2026
18.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Ekonomi K3 Tipe 1 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3 Agustus 2026
19.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Ekonomi K3 Tipe 2 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3 Agustus 2026

No	Judul Spektek, Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana	Tanggal Persetujuan
20.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Advance Class (A-Class)* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
21.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Compact Class (C-Class)* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
22.	Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Signature Class (S-Class)* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
23.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi *Kereta The Grand Restaurant* (M) Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
24.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Kitchen and Crew* (M) Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
25.	Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Makan (M) *Lounge* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
26.	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan Rel Jenis *Track Motor Car Milik* Balai Perawatan Perkeretaapian	31 Agustus 2026
27.	Rekayasa Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Pembangkit (P) Milik PT KAI (Persero)	2 September 2026
28.	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan Rel Penarik Lori Gerinda Rel Milik PT MRT (Perseroda)	21September 2026

No	Judul Spektek, Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana	Tanggal Persetujuan
29.	Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik untuk Angkutan Barang Sumatera Selatan Milik PT KAI (Persero)	21September 2026
30.	Rancang Bangun Peralatan Khusus Pemeliharaan Jalan Rel Jenis Lori Gerinda Rel Milik PT MRT Jakarta	21September 2026

Target Kinerja sampai bulan September adalah sebesar 74,72% dengan realisasi Kinerja sampai bulan September adalah 79,77%. Sehingga Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian sampai bulan September adalah sebesar 106,76%. Dengan rincian baseline dokumen perencanaan teknis tahun 2025 sebanyak 112 dokumen dan realisasi sampai bulan September adalah sebanyak 30 dokumen yang telah di sahkan.

Sampai dengan tahun 2026 periode triwulan III telah dilakukan percepatan dalam proses penyelesaian pemenuhan dokumen perencanaan teknis bidang sarana perkeretaapian (**Penyesuaian Aktivitas**) diantaranya sebagai berikut :

1. Spesifikasi Teknis Gerbong Terbuka Pengangkut Balas Lebar Jalan Rel 1435 Berat Muat 70T Milik PT Kereta Cepat Indonesia China. Sebagai tindak lanjut atas rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam pengadaan Gerbong Terbuka Pengangkut Balas 70T untuk mendukung kegiatan perawatan dan perbaikan jalur Jakarta–Bandung, Direktorat Sarana Perkeretaapian melaksanakan pembahasan dan evaluasi Dokumen Spesifikasi Teknis (Spektek). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen tanggal 4 Mei 2026, dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong, sehingga Direktur Sarana Perkeretaapian

memberikan persetujuan Dokumen Spesifikasi Teknis pada tanggal 9 Mei 2026 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan operasional PT KCIC.

2. Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik Kecepatan Operasi 120KM/Jam Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagai tindak lanjut atas rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengadakan 119 lokomotif untuk angkutan penumpang dan/atau barang guna menggantikan lokomotif yang telah berusia lebih dari 30 tahun, mengalami keterbatasan ketersediaan suku cadang (obsolete), dan penurunan performa operasional, Direktorat Sarana Perkeretaapian melaksanakan pembahasan dan evaluasi Dokumen Spesifikasi Teknis (Spektek) yang disampaikan PT KAI. Setelah dilakukan pembahasan dan verifikasi kesesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Perkeretaapian, Dokumen Spesifikasi Teknis memperoleh persetujuan Direktur Sarana Perkeretaapian pada tanggal 30 Juni 2026 sebagai penyesuaian aktivitas dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian nasional.

Pelaksanaan pembahasan, evaluasi, dan persetujuan Dokumen Spesifikasi Teknis (Spektek) Gerbong Terbuka Pengangkut Balas milik PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) serta Lokomotif Angkutan Penumpang dan/atau Barang milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan bentuk kolaborasi lintas fungsi antara Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan operator perkeretaapian dalam memastikan setiap sarana yang akan diadakan telah memenuhi standar spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini menjadi fondasi bagi proses pengadaan sarana yang memenuhi aspek keselamatan, keandalan, interoperabilitas, dan kelaikan operasi sehingga mendukung terciptanya sistem transportasi perkeretaapian yang aman dan berkelanjutan.

Dari sisi **crosscutting kinerja** di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hasil persetujuan Spektek memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam penyusunan standar teknis, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi acuan dalam proses pengujian, sertifikasi, dan penerbitan sertifikat kelaikan sarana sebelum dioperasikan. Pada tahap operasional, keberadaan lokomotif dan gerbong yang telah memenuhi spesifikasi teknis mendukung kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas angkutan penumpang maupun barang, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan keandalan operasi perkeretaapian. Untuk sarana Gerbong Pengangkut Balas PT KCIC, pengadaan tersebut juga mendukung efektivitas kegiatan pemeliharaan prasarana sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan keandalan jalur kereta cepat.

Analisis Risiko

Terdapat Risiko pada IKK ini : Ketidakpatuhan Pemohon/Operator memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian

Penanganan risiko : Berkoordinasi dan melaksanakan pembahasan bersama/ rapat dengan pemohon/ operator

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan evaluasi terhadap penetapan target dan Rencana Aksi (Renaksi) Indikator Kinerja Kegiatan mengingat target bulanan yang digunakan masih mengacu pada target tahunan yang sama setiap bulan, sehingga belum mencerminkan proyeksi capaian secara bertahap. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi hingga bulan September telah melampaui target tahun 2026. Oleh karena itu, akan dilakukan penyesuaian distribusi target bulanan dan reviu terhadap target indikator sesuai mekanisme yang berlaku agar lebih realistis, terukur, serta selaras dengan kapasitas pelaksanaan dan proyeksi capaian hingga akhir tahun.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK S1 Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, diantaranya:

1) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

   Untuk meningkatkan IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian perlu adanya penyesuaian strategi kedepannya.

2) **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran**

   Untuk mendukung Indikator kinerja kegiatan Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, sehingga dilakukan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Melakukan koordinasi untuk memastikan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian yang telah selesai dilakukan penyusunan untuk mendapatkan pengesahan.

3) **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai**

   Pada IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian pada Direktorat Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh jabatan fungsional analis kebijakan dan dikoordinasikan dengan PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian.

II.2.2 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Bidang sarana Perkeretaapian dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

Kegiatan yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan bidang sarana perkeretaapian adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. Sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana, pada IKK ini memiliki target nilai IKM sebesar 95,25 atau Sangat Baik. Adapun IKM didapat dari pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diberikan kepada Operator yang bekerja sama atau menerima pelayanan dengan Direktorat Sarana

Perkeretaapian. Pengisian SKM dilakukan melalui aplikasi 3AS *Case Survey Management System.* Variabel yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik adalah terkait Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Respon serta Konsultasi dan Pengaduan.

A. Analisis Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

IKK ini memiliki kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. Dasar penentuan kategori penilaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian bersumber dari Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah berikut :

Tabel 8 Skala Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\textit{Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian} = \frac{\textit{Jumlah Nilai IKM sampai periode bulan berjalan}}{\textit{Jumlah periode bulan berjalan}}$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\left(\begin{array}{c}\textit{Indeks Kepuasan Masyarakat}\\ \textit{Terhadap Pelayanan Publik}\\ \textit{yang Diselenggarakan}\\ \textit{Direktorat Sarana Perkeretaapian}\end{array}\right) = \frac{100 + 100 + 98{,}13 + 94{,}38 + 97{,}50 + 96{,}25 + 100 + 100}{8} = 98{,}28$$

Bulan	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat	Responden
Januari	17.50	100	4	Sangat Baik	3
Februari	17.50	100	4	Sangat Baik	1
Maret	17.17	98.13	3.93	Sangat Baik	2
April	16.52	94.38	3.78	Sangat Baik	2
Juni	17.06	97.50	3.90	Sangat Baik	6
Juli	16.84	96.25	3.85	Sangat Baik	4
Agustus	17.50	100	4	Sangat Baik	1
September	17.50	100	4	Sangat Baik	2

Pada pelaksanaan survei periode Januari-September 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,28. Realisasi kinerja pada triwulan III pada IKK ini sebesar 98,28 dengan kategori Sangat Baik dengan Persentase capaian kinerja Triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 103,18% terhadap target Triwulan III dan 103,18% terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Secara jelas perbandingan dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

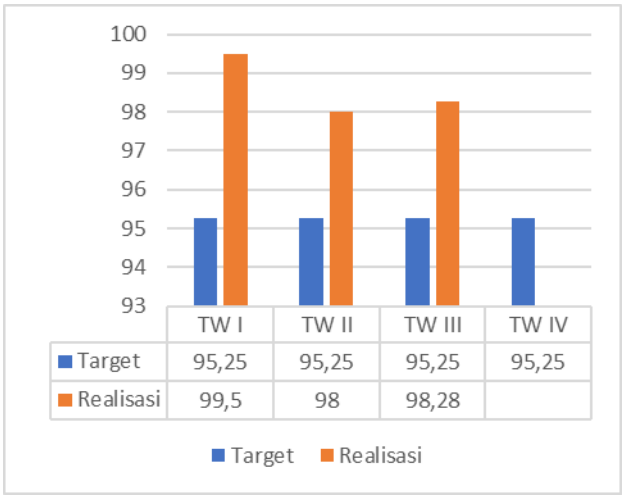
Tabel 9 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK S3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	99,5	98	98,28		104,46	102,89	103,18		103,18

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d September 2026. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	17.20	98.28	3.93	Sangat Baik
Persyaratan	17.20	98.28	3.93	Sangat Baik
Prosedur/Alur	17.20	98.28	3.93	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	17.36	99.22	3.97	Sangat Baik
Tarif/Biaya	17.20	98.28	3.93	Sangat Baik
Sarana Prasarana	17.20	98.28	3.93	Sangat Baik
Respon	17.20	98.28	3.93	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	17.04	97.34	3.89	Sangat Baik
IKM	**17.20**	**98.28**	**3.93**	**Sangat Baik**

Diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 2 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

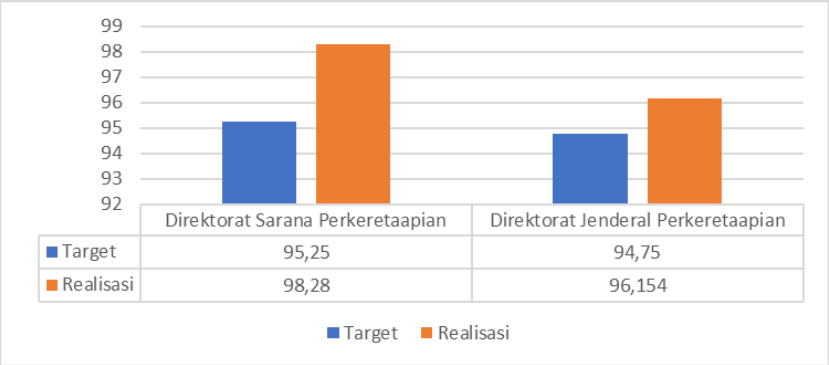
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional **(Benchmarking Kinerja)**

Realisasi Kinerja Triwulan III untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian diketahui berkontribusi untuk kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan capaian sebesar 98,28% . Dibawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perbandingan (benchmarking) kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian dan unit kerja lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 Benchmarking Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
Dit LLAKA	86,880	95,810	90,630	97,630	98,240	97,930	98,530	97,430	96,560
Dit Prasarana	100,000	91,940	100,000	94,380	100,000	99,300	96,020	96,250	96,880
Dit Sarana	100,000	100,000	98,130	94,380		97,500	96,250	100,000	100,000
Dit Keselamatan	97,690	94,590	100,000	96,920	94,710	96,810	97,590	95,580	97,500
Balai Pengujian	96,570	97,310	97,180	96,700	96,660	96,730	96,620	97,040	97,410
Balai Perawatan	92,500	95,630	92,970	92,500	91,880	96,250	93,250	95,000	93,910
BPKARS MANDIRI	91,320	92,080	92,900	93,190	93,090	92,490	93,450	90,890	90,190
BPKARS	98,020	98,520	98,210	98,100	98,320	97,650	98,750	98,750	99,100
BPKA SS	96,430	96,290	96,670	96,730	95,580	96,810	96,190	97,510	97,030
Average	95,490	95,797	96,299	95,614	96,060	96,830	96,294	96,494	96,509
Realisasi	**95,490**	**95,644**	**95,862**	**95,800**	**95,852**	**96,015**	**96,055**	**96,110**	**96,154**

Diagram perbandingan Benchmarking Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 3 Diagram perbandingan benchmarking Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

C. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk menilai persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan. Survei ini menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d. September 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,28 dalam skala 100 dengan jumlah responden sebanyak 21 responden. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori sangat baik.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan sasaran responden berfokus pada pengguna jasa layanan di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian, seperti operator sarana perkeretaapian. Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner *QRCode* dan *link* survei yang diisi langsung oleh responden setelah menerima pelayanan dari Direktorat Sarana Perkeretaapian

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara keseluruhan pada Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai berikut :

Tabel 11 Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat yang diselenggaraka oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Waktu Pelaksanaan Perbaik	Tindak Lanjut	Tantangan dan Hambatan
		Indeks	Mutu Layanan			
1	Informasi Pelayanan	98,75	Sangat Baik			
2	Persyaratan	98,75	Sangat Baik			
3	Waktu Pelayanan	98,75	Sangat Baik	1 hari	Agar petugas dapat bekerja lebih cepat tanggap	Pengguna layanan mengajukan pelayanan diluar jam pelayanan sehingga petugas lambat merespon
4	Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan	98,75	Sangat Baik	1 hari	Percepatan pelaksanaan approval berjenjang pada aplikasi sisaka	Approval berjenjang pada proses sertifikasi dinilai lambat
5	Tarif / Biaya	98,75	Sangat Baik			
6	Sarana dan Prasarana	98,75	Sangat Baik	Periode 2(	Akan ada pengembangan aplikasi untuk menunjang sertifikasi KA	Kesulitan dalam mengunggah dokumen (ada batas besaran ukuran dokumen yang menyulitkan pengguna aplikasi sisaka)
7	Produk Layanan	-	-			-
8	Respon/Perilaku Petugas	98,75	Sangat Baik			
9	Penanganan Konsultasi, Saran, dan Masukan	98,75	Sangat Baik			

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil analisis survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2026, maka beberapa langkah kebijakan dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dilakukan dengan skala prioritas

dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. **Waktu Pelayanan**
   Pengguna layanan mengajukan pelayanan diluar jam pelayanan sehingga petugas lambat merespon. Memberikan informasi kepada operator sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan pada waktu operasional kantor (08.00-16.00 WIB). Agar petugas dapat bekerja lebih cepat tanggap
2. **Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan**
   Approval berjenjang pada proses sertifikasi dinilai lambat. Akan dilakukan Percepatan pelaksanaan approval berjenjang pada aplikasi SISAKA.
3. **Sarana dan Prasarana**
   Kesulitan penggunana layanan dalam mengunggah dokumen pada aplikasi SISAKA (ada batas besaran ukuran dokumen yang menyulitkan pengguna aplikasi SISAKA). Akan ada pengembangan aplikasi untuk menunjang sertifikasi sarana KA.
4. **Estimasi Tindak Lanjut**
   Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, pelaksanaan perbaikan akan dilakukan secara berkelanjutan selama periode tahun 2026 (pemantauan triwulan dan evaluasi tahunan).

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian, diantaranya:

1) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**
   Adapun strategi/kebijakan yang akan dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian untuk meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :
   - Kegiatan penyusunan laporan Tindak Lanjut Hasil Survei kepuasan Masyarakat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika memungkinkan survei dilakukan secara berkala minimal 3 bulan dan maksimal 1 Tahun secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya Direktorat Sarana Perkeretaapian;

- Pengoptimalan penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System dan pelaksanaan pengembangan fitur pembelajaran dalam rangka peningkatan hasil survei.

2) Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran

Guna meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian, maka dilakukan beberapa penyesuaian aktivitas diantaranya melakukan analisis hasil Survei IKM Tahun 2026 berdasarkan indikator pelayanan publik (respon, konsultasi, informasi, waktu penyelesaian, dan nondiskriminasi) dan menyisipkan tautan survei IKM pada setiap kegiatan Direktorat seperti Supervisi Kelaikan Sarana, Bimbingan Teknis, Pengujian Sarana, dan Rampcheck Sarana Perkeretaapian.

3) Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai

Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian, sosialisasi survei dilakukan oleh pegawai dengan jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dan pegawai yang tercantum dalam SK Tim Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

II.2.3 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian untuk Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian memiliki target kinerja sebesar 88,85% sertifikat terbit dari 14.217 sarana aktif. Dengan target kinerja sebanyak 5582 sertifikat kelaikan terbit dari Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 7051 sertifikat kelaikan terbit dari Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

A. Analisis Capaian Presentase Pemenuhan Sertifikasi Sarana

Perkeretaapian

Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar 45,70%. Dengan capaian jumlah kumulatif hingga bulan September sebanyak 6.586 sertifikat, dengan rincian 3.506 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3.080 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Jumlah sarana aktif di wilayah I dan wilayah II Tahun 2026 diperkirakan sebesar 14.217.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian} = \frac{\textit{Jumlah Sarana yang sudah tersertifikasi Kelaikan pada tahun berjalan}}{\textit{Jumlah Sarana aktif di Wilayah I dan Wilayah II}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

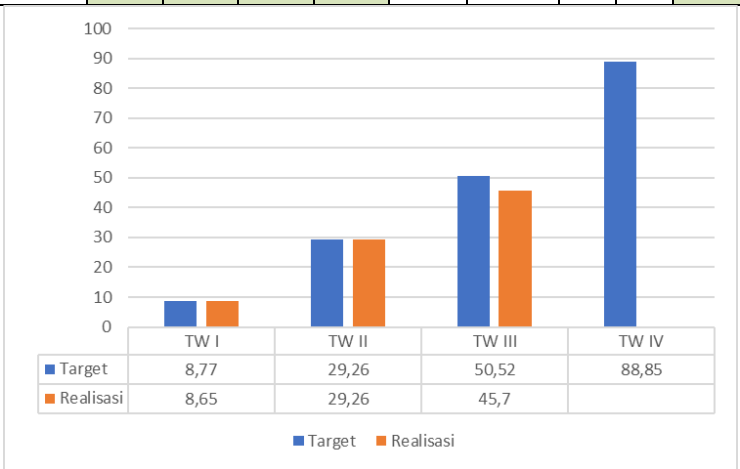
$$\begin{pmatrix} Presentase\ Pemenuhan \\ Sertifikasi\ Kelaikan \\ Sarana \end{pmatrix} = \frac{(3506 + 3080)}{14217} \times 100\% = 45{,}70\%$$

Perhitungan Persentase Pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana dilakukan dengan menjumlahkan capaian sertifikat yang telah diterbitkan di Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dengan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II yaitu 3506 sertifikat terbit dari Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3080 sertifikat yang diterbitkan di Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II sehingga total keseluruhan sertifikat terbit sampai bulan September adalah 6.586 sertifikat. Kemudian dibandingkan dengan Jumlah sarana aktif pada tahun berjalan (sesuai Perjanjian kinerja) yaitu 14.217 sarana aktif pada awal tahun. Sehingga Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana sampai bulan September adalah sebesar 45,70%. Persentase capaian kinerja Triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 90,46% terhadap target Triwulan III dan 51,44% terhadap target revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Rincian Capaian Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Capaian Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Target Kinerja Triwulan	Realisasi Kinerja Triwulan	Capaian Kinerja Triwulan (%)	Capaian Kinerja

		Satuan	Tahunan	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tahunan (%)
IKK3 SK3	**Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian**	%	88,85	8,77	29,26	50,52	88,85	8,65	29,26	45,70		98,63	100	90,46		51,44



Gambar 4 Target dan Realisasi Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian

Untuk mendukung IKK ini sudah dilakukan kegiatan supervisi pengujian sarana perkeretaapian di Depo dan Balai Yasa milik Operator Sarana Perkeretaapian antara lain Depo KRL Depok, Daop 2 Bandung, Daop 7 Madiun, Depo LRT Jabodebek.

Namun pelaksanaan kegiatan supervisi belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan supervisi. Kondisi tersebut memengaruhi cakupan dan intensitas pelaksanaan supervisi sehingga pelaksanaan pengendalian terhadap proses pengujian sarana belum dapat dilakukan secara maksimal.

Tabel 13. Data Capaian Sertifikasi Kelaikan Sarana

Row Labels	Approv Kasi Sarana	Approv Kasubdit	Ditolak	Menunggu TTE	Proses Pembayaran Biaya Uji	Proses Pembayaran PNBP Sertifikasi	Proses Pengujian Sarana	Proses Verifikasi	SELESAI	Validasi Permohonan	Grand Total
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN		2									2
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri		2									2
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	473	195	207	97	1803	50	327	637	3660	588	8037
Gerbong	443	103	138	76	1191	50	325	384	2301	468	5479
Kereta	28	74	33	7	385		2	239	990	112	1870
KRD			4		32			9	31		76
KRL			1						41		42
Lokomotif	2	10	28	14	163			2	225	2	446
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri		8	2		13				71	1	95
Peralatan Khusus Tanpa Penggerak			1		19			3	1	5	29
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) - LRT JABO					48				37		85
KRL					48				37		85
PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA					19			1			20
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri					19			1			20
PT KERETA COMMUTER INDONESIA		70	43	39	143	129		12	385	9	830
KRL		70	43	39	143	129		12	385	9	830
PT MRT JAKARTA					42	18					60
KRL					42	18					60
PT RAILINK									16		16
KRD									16		16
SATKER PPSP									4		4
KRL									4		4
Grand Total	**473**	**267**	**250**	**136**	**2055**	**197**	**327**	**650**	**4160**	**597**	**9054**

B. Analisis Capaian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I

Pelaksanaan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian pada Triwulan III menunjukkan capaian kinerja IKK sebesar 97,09%. Realisasi sertifikasi tercatat sebanyak 3.506 sarana (55,69% dari 6.295 sarana aktif), sedangkan target Triwulan III sebanyak 3.611 sarana (57,36%), sehingga masih terdapat selisih 105 sarana. Dari 5.512 permohonan yang masuk, 3.506 sarana (63,61%) telah tersertifikasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemantauan dan supervisi berkala terhadap progres sertifikasi, koordinasi dengan unit kerja dan pihak terkait, serta pengendalian pemenuhan persyaratan sertifikasi. Upaya ini terlihat dari selesainya seluruh permohonan LRT Jabodebek (85 sarana), Satker PPSP (4 sarana), dan Balai

Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (2 sarana), serta kontribusi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebanyak 2.718 sertifikat dan PT Kereta Commuter Indonesia sebanyak 679 sertifikat.

Target belum tercapai penuh karena terdapat 2.006 sarana yang belum menyelesaikan seluruh tahapan sertifikasi sampai dengan Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:

a. 1.222 sarana telah lulus uji tetapi masih dalam proses administrasi, yaitu penerbitan billing PNBP (694 sarana), TTE (458 sarana), pelaporan ke Ditsar (57 sarana), dan validasi Ditsar (13 sarana).
b. 601 sarana belum diuji karena menunggu pembayaran pengujian, terutama milik PT KAI (476 sarana) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (101 sarana).
c. 133 sarana tidak lulus uji, milik PT Kereta Commuter Indonesia (109 sarana) dan PT KAI (24 sarana), sehingga memerlukan pengujian ulang.
d. 50 sarana PT KAI masih dalam proses verifikasi.

Sebagai tindak lanjut, penyelesaian difokuskan pada 1.222 sarana yang sudah lulus uji, khususnya tahap penerbitan billing PNBP dan TTE, karena penyelesaian sebagian kecil saja (105 sarana) sudah cukup untuk memenuhi target Triwulan III. Selain itu dilakukan koordinasi dengan operator untuk percepatan pembayaran pengujian 601 sarana, penjadwalan pengujian ulang 133 sarana yang tidak lulus uji, dan penyelesaian proses verifikasi 50 sarana. Sampai dengan Triwulan III telah terbit 3.506 sertifikat, sehingga masih terdapat 2.076 sertifikat yang harus diselesaikan untuk mencapai target tahunan 5.582 sertifikat. Karena permohonan yang masih diproses berjumlah 2.006, diperlukan tambahan sedikitnya 70 permohonan baru.

Dari sisi anggaran, realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp102.362.500 atau 68,04% dari pagu Rp150.448.000. Sisa anggaran sebesar Rp48.085.500 akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan kegiatan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Bulan September 2026, pada Triwulan III dilakukan **penyesuaian aktivitas** dengan fokus pada percepatan penyelesaian backlog permohonan sertifikasi serta peningkatan efektivitas koordinasi antar unit kerja. Aktivitas diarahkan pada:

1. Melaksanakan monitoring mingguan terhadap seluruh permohonan sertifikasi yang masih berada pada tahapan persetujuan administrasi, pembayaran biaya uji, pembayaran PNBP, pelaksanaan pengujian, dan proses verifikasi.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan Balai Pengujian Perkeretaapian untuk percepatan pelaksanaan pengujian terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga waktu tunggu pengujian dapat dikurangi.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian dalam pemutakhiran data sarana yang akan habis masa berlaku sertifikat sebagai dasar penyusunan prioritas pelayanan sertifikasi.
4. Melakukan pendampingan kepada operator perkeretaapian yang masih memiliki jumlah permohonan tertinggi, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero), agar percepatan pembayaran PNBP, kelengkapan dokumen, dan kesiapan pengujian dapat dilakukan secara paralel.
5. Melaksanakan evaluasi terhadap permohonan yang ditolak untuk mengidentifikasi penyebab utama penolakan, menyusun rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta menyampaikan umpan balik kepada operator guna meningkatkan kualitas pengajuan sertifikasi.
6. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen yang masih menunggu Tanda Tangan Elektronik (TTE) agar segera memasuki tahapan penerbitan sertifikat.
7. Menyusun laporan monitoring capaian sertifikasi secara berkala sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam pengendalian pencapaian indikator Persentase Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian.

Pencapaian indikator ini merupakan hasil **crosscutting kinerja** beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dimana Direktorat Sarana Perkeretaapian melaksanakan evaluasi, verifikasi, validasi, dan penerbitan

sertifikat; Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung melalui pelaksanaan pengujian teknis sarana; Balai Teknik Perkeretaapian melakukan pengawasan serta pemantauan masa berlaku sertifikat di wilayah kerja; dan Balai Perawatan Perkeretaapian memastikan kesiapan sarana milik pemerintah untuk dilakukan pengujian. Selain itu, keberhasilan penyelesaian sertifikasi juga dipengaruhi oleh kesiapan operator perkeretaapian dalam melengkapi persyaratan administrasi, melakukan pembayaran biaya pengujian dan PNBP, serta menyiapkan sarana untuk diuji. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit kerja serta operator menjadi faktor utama dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi, mengurangi backlog permohonan, dan mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian pada Tahun 2026.

Crosscutting

Adapun kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian yang bersifat Crosscutting yang terdapat keterlibatan pihak eksternal di luar Direktorat Sarana Perkeretaapian, semisal dengan Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, maupun dengan Operator yang terkait dengan IKK Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian adalah bersama Balai Pengujian Perkeretaapian melakukan pengujian sarana perkeretaapian, baik uji pertama maupun uji berkala

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan operator sarana perkeretaapian, optimalisasi perencanaan dan penjadwalan kegiatan sertifikasi, peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap progress pelaksanaan sertifikasi, serta percepatan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian target tahunan secara optimal.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian, diantaranya

1) Penyesuaian Strategi/Kebijakan

Untuk meningkatkan pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian dilakukan dengan menggunakan aplikasi SISAKA yaitu aplikasi yang dirancang untuk menangani proses pengajuan sertifikasi atau pengujian berkala sarana KA. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pemohon/operator terkait kelengkapan data dukung proses sertifikasi seperti *checksheet* perawatan. Kemudian melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala dengan melakukan sinkronisasi data sertifikasi (data pengujian sarana yang sudah diuji dan telah dan telah diupload aplikasi) dengan Balai Pengujian Perkeretaapian serta melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian, Sesditjen dan pengembangan aplikasi terkait perbaikan aplikasi SISAKA dan SIAPKA milik Balai Pengujian Perkeretaapian.

2) Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran

Setiap sumber daya atau fasilitas dikelola secara akuntabel, di mana inventaris yang ada dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kegiatan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

3) Penyesuaian Penempatan Pegawai/Jabatan

Penempatan pegawai guna mendukung IKK Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian antara lain :

a. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya
b. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda
c. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahi Pertama
d. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil
e. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil

II.2.4 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan DIPA Tahun 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian memiliki target 17 kegiatan NSPK yaitu :

a. Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian
b. Kajian Pelaksanaan Standarisasi Dan Sertifikasi Peralatan Perawatan Di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian
c. Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara
d. Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara
e. Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara
f. Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian
g. Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)
h. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur Kereta Api (Railroad)
i. Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana Pada Sarana Otomatis
j. Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus
k. Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun
l. Studi Penyusunan Konsep SNI Yang Bersumber Dari JIS E4041 dan IEC 61133 (Testing Of Rolling Stock On Completion Of Construction An
m. Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian
n. Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel
o. Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem
p. Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian
q. Studi Standar Peralatan, Fasilitas Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal
r. Kajian Penyusunan Kriteria dan Tata Cara Penilaian Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian

A. Analisis Capaian Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana

Dalam pelaksanaannya sampai September 2026 Direktorat Sarana sudah mengesahkan sejumlah 33 NSPK yang menjadi baseline untuk perhitungan capaian IKK ini. Lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Baseline NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian

BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN		
1	PM.153 Tahun 2016	Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Kereta Api
2.	KM.41 Tahun 2010	Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif
3.	PM.175 Tahun 2015	Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak
4	KM.43 Tahun 2010	Standar Spesifikasi Teknis Gerbong
5	KM.44 Tahun 2010	Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus
6	PM.54 Tahun 2016	Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
7	PM.49 Tahun 2023	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri
8	PM.14 Tahun 2011	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif
9	PM.15 Tahun 2011	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif
10	PM.16 Tahun 2011	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus
11	PM.17 Tahun 2011	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong
12	PM.37 Tahun 2014	Standar Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian Monorel
13	PM.83 Tahun 2016	Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas
14.	PM 18 Tahun 2019	Standar Tempat dan Perawatan Sarana Perkeretaapian
15.	PM. 7 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi
16	PM. 60 Tahun 2020	Pengawasan Prasarana Dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi
17	PM. 16 Tahun 2022	Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian
18	Tahun 2022	Standar Persyaratan Teknis Lembaga Pengujian Sarana Perkeretaapian
19	Tahun 2022	Nilai dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian

20	Tahun 2023	Studi Standar Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian
21	Tahun 2023	Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan Railroad
22	Tahun 2023	Studi Penyusunan Pedoman Evaluasi Rancang Bangun Konstruksi Rangka Dasar, Badan, Alat Perangkai dan Bogie Sarana Perkeretaapian
23	Tahun 2023	Kajian Optimalisasi Pengelolaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara untuk mendukung pembangunan transportasi perkeretaapian
24	Tahun 2023	Kegiatan Validasi Umur Data Perawatan dan Pemeriksaan untuk digunakan data pengujian berkala sarana perkeretaapian
25	Tahun 2023	Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Gantung
26	Tahun 2024	Studi Penyusunan Standar Kriteria dan Pedoman dalam Pengoperasian Perawatan dan Penempatan Sarana Milik Negara Kereta Ukur dan Kereta Inspeksi
27	Tahun 2024	Kajian Penilaian Biaya dan Evaluasi Manfaat Penyediaan Sarana Milik Negara Untuk Mendukung Pembangunan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
28	Tahun 2024	Kajian teknis penilaian kelaikan operasi peralatan khusus yang beroperasi di Indonesia
29	Tahun 2024	Kegiatan Penerapan ISO 9001 2015 Kelaikan Sarana Perkeretaapian
30	Tahun 2024	Studi Penyusunan Petunjuk dan Pedoman Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri
31	Tahun 2024	Studi Penyusunan Petunjuk dan Pedoman Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif
32	KP-K4 DJKA 4 Tahun 2025	Keputusan Direktur Sarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
33	2025	Studi Kelayakan Pengadaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara di Wilayah Sumatera dan Sulawesi

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan} + \text{Target Penyususunan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian Tahun berjalan}}{\text{Jumlah NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan} + \text{Jumlah Target NSPK bidang Sarana Perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

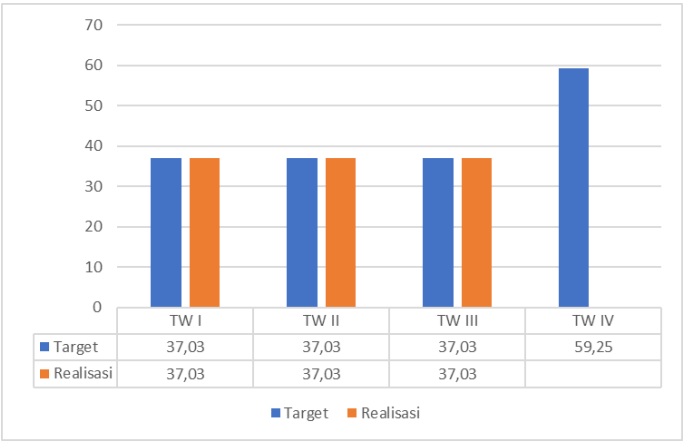
$$\begin{pmatrix} Presentase\ Pemenuhan \\ NSPK\ Bidang\ Sarana \\ Perkeretaapian \end{pmatrix} = \frac{(33)}{(31+51)} \times 100\% = 37{,}03\%$$

Perhitungan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang sarana perkeretaapian dilakukan dengan menjumlahkan baseline NSPK Direktorat sarana perkeretaapian yaitu 33 NSPK dengan capaian pada tahun berjalan, dibandingkan dengan Baseline NSPK ditambah target penyusunan NSPK pada konsep Renstra 2025-2029 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Rincian Capaian Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Capaian Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK 4 SK3	Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	%	59,25	37,03	37,03	37,03	59,25	37,03	37,03	37,03		100	100	100		62,49



B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

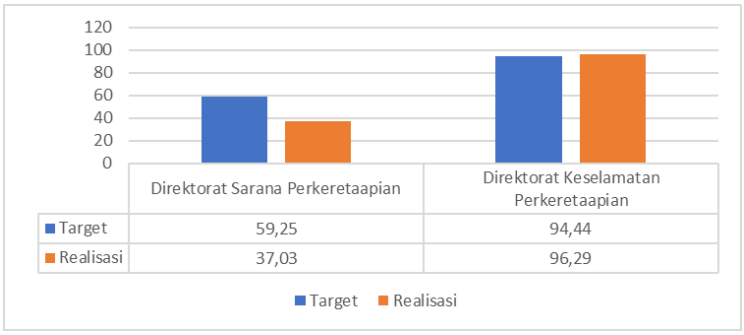
Realisasi Kinerja Triwulan III untuk indikator kinerja Presentase Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian dibandingkan dengan indikator kinerja Pemenuhan NSPK bidang Keselamatan Perkeretaapian dengan perbandingan (benchmarking) kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15 Benchmarking Kinerja Presentase Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian

Unit Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Direktorat Sarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	%	59,25	37,03	62,49
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pemenuhan NSPK bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	94,44	96,29	101,95

Hingga Triwulan III Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian sudah merumuskan 33 NSPK sedangkan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sudah merumuskan 52 NSPK.

Diagram perbandingan Benchmarking Presentase Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian dengan indikator kinerja Pemenuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 5 Diagram perbandingan benchmarking Kinerja Presentase Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian

Dengan melakukan benchmarking kinerja dengan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sehingga Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Berdasarkan DIPA Tahun 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian memiliki target 17 kegiatan NSPK dengan progres sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kontrak	Status s.d. Triwulan II	Progress/Keterangan
1	Kajian Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	12 Mei 2026	Termin I	Laporan Pendahuluan telah dibahas pada 17 Juni 2026 dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan kajian.
2	Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	12 Mei 2026	Tahap awal pelaksanaan	SK Tim Pengarah dan Tim Pendamping diterbitkan pada 9 Juni 2026 sebagai persiapan pelaksanaan kajian.
3	Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara	13 Mei 2026	Tahap awal pelaksanaan	SK Tim Pengarah dan Tim Pendamping diterbitkan pada 3 Juni 2026 untuk mendukung koordinasi dan pengendalian mutu.
4	Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara	2 Maret 2026	Termin I	Laporan Pendahuluan dibahas pada 11 Mei 2026 dengan masukan terhadap metodologi, ruang lingkup, dan rencana kerja.
5	Kajian Kebutuhan SDM dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	2 April 2026	Termin I	Laporan Pendahuluan dibahas pada 12 Mei 2026 dengan masukan terhadap metodologi dan analisis kebutuhan SDM.
6	Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	13 Mei 2026	Tahap awal pelaksanaan	SK Tim Pendamping belum ditetapkan sehingga pendampingan teknis dan pengendalian mutu belum optimal.
7	Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	8 April 2026	Termin I	SK Tim diterbitkan 26 Mei 2026. Laporan Pendahuluan dibahas pada 8 Juni 2026.
8	Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad)	31 Maret 2026	Termin I	SK Tim diterbitkan pada 18 April 2026 sebagai dasar koordinasi dan pengendalian mutu.
9	Kajian Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana pada Sarana Otomatis	8 Mei 2026	Termin I	SK Tim diterbitkan 26 Mei 2026. Laporan Pendahuluan dibahas pada 15 Juni 2026.
10	Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	8 Mei 2026	Termin I	SK Tim diterbitkan 21 Juni 2026. Laporan Pendahuluan dibahas pada 2 Juli 2026.
11	Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun	20 April 2026	Termin I	SK Tim diterbitkan 7 Mei 2026, namun Laporan Pendahuluan belum disampaikan penyedia jasa.

12	Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133	16 April 2026	Termin I	SK Tim diterbitkan 6 Mei 2026. Laporan Pendahuluan dibahas pada 4 Juni 2026.
13	Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian	25 Mei 2026	Tahap awal pelaksanaan	SK Tim Pendamping belum ditetapkan dan Laporan Pendahuluan belum dibahas.
14	Reviu Peraturan tentang Standar Spektek Monorel	31 Maret 2026	Termin I	Laporan Pendahuluan dibahas pada 3 Juni 2026.
15	Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem	22 Mei 2026	Tahap pelaksanaan kontrak	Penyusunan dokumen awal masih berlangsung dan belum dilakukan pembahasan bersama.
16	Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	29 Juni 2026	Tahap awal pelaksanaan	Kontrak baru efektif, masih dalam koordinasi awal dan persiapan pekerjaan.
17	Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	28 April 2026	Termin I	Belum dilakukan pembahasan Laporan Pendahuluan sehingga pembahasan metodologi dan ruang lingkup belum dimulai.

Analisa Capaian

Secara umum pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi telah berjalan sesuai jadwal kontrak dan sebagian besar telah mencapai Termin I melalui penyusunan serta pembahasan Laporan Pendahuluan. Beberapa kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan karena proses administrasi, seperti penetapan Tim Pendamping, penyampaian Laporan Pendahuluan oleh penyedia jasa, maupun kontrak yang baru efektif pada akhir Triwulan III. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian output substansi belum dapat memasuki tahapan analisis secara optimal sehingga pada Triwulan III diperlukan percepatan pelaksanaan, penguatan koordinasi, serta pengendalian terhadap jadwal kontrak agar target penyelesaian kajian tetap tercapai.

Sebagai tindak lanjut **penyesuaian aktivitas** akan dilakukan percepatan pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa konsultansi melalui penguatan koordinasi antara Direktorat Sarana Perkeretaapian, penyedia jasa, Tim Pengarah, dan Tim Pendamping guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal kontrak. Kegiatan difokuskan pada penyelesaian penyempurnaan Laporan

Pendahuluan berdasarkan hasil pembahasan, pelaksanaan *kick-off meeting* bagi pekerjaan yang belum memulai tahapan substansi, percepatan penetapan Surat Keputusan Tim Pendamping pada kegiatan yang masih terkendala administrasi, serta pengumpulan dan validasi data teknis melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, penyedia jasa diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi regulasi, standar nasional maupun internasional, pengumpulan data lapangan, analisis kondisi eksisting, identifikasi kesenjangan regulasi dan kebutuhan teknis, serta penyusunan Laporan Antara sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Direktorat Sarana Perkeretaapian juga akan meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan kontrak melalui rapat koordinasi berkala, pengendalian mutu hasil kajian, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas setiap hasil pembahasan agar target output dan serapan anggaran Triwulan III dapat tercapai sesuai rencana.

Selain itu, hasil setiap kajian akan mulai disinergikan dengan penyusunan standar, pedoman teknis, spesifikasi teknis, serta kebutuhan penyusunan regulasi di bidang sarana perkeretaapian sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pelaksanaan kegiatan kajian dan studi di Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan bentuk ***crosscutting*** kinerja yang melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Koordinasi dilakukan dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam penyelarasan standar teknis, interoperabilitas sarana dan prasarana, serta penyusunan ketentuan yang mendukung keselamatan operasi. Sinergi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian diperlukan untuk memperoleh masukan mengenai kebutuhan operasional, pelayanan, pengoperasian sarana, dan implementasi hasil kajian pada penyelenggaraan angkutan perkeretaapian.

Pelaksanaan kajian juga didukung oleh Balai Teknik Perkeretaapian melalui penyediaan data teknis, kondisi eksisting di lapangan, serta fasilitasi kegiatan survei dan verifikasi implementasi standar. Dari aspek tata kelola, Satker

Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perkeretaapian berperan dalam pengelolaan administrasi kontrak, keuangan, pengadaan, BMN, serta penyusunan pelaporan kinerja dan akuntabilitas. Sementara itu, fungsi Perencanaan dan Kinerja melakukan monitoring capaian kegiatan, pengendalian target kinerja, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta memastikan keterkaitan hasil kegiatan dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kolaborasi juga dilakukan dengan Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Teknis SNI, operator, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan asosiasi profesi sebagai penyedia data, referensi teknis, serta masukan terhadap pengembangan standar dan teknologi sarana perkeretaapian. Sinergi tersebut memastikan bahwa hasil kajian tidak hanya memenuhi target kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian, tetapi juga mendukung penyusunan regulasi, peningkatan kualitas sertifikasi dan standardisasi, pengembangan industri perkeretaapian nasional, peningkatan keselamatan, keandalan, serta pelayanan transportasi perkeretaapian secara berkelanjutan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, Direktorat akan memastikan pelaksanaan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana kerja dan jadwal yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan meliputi percepatan pelaksanaan pengumpulan data, analisis teknis, koordinasi secara berkala dengan penyedia jasa dan para pemangku kepentingan, serta pemantauan terhadap kemajuan masing-masing kegiatan. Dengan langkah tersebut, diharapkan seluruh tahapan penyusunan NSPK dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi teknis yang berkualitas sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan NSPK bidang sarana perkeretaapian.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
1	Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian	Kegiatan Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.136.067.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan telah mencapai pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara, masih diperlukan penyempurnaan terhadap pemenuhan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK, khususnya penyelesaian ruang lingkup G sampai dengan K. Selain itu, masih diperlukan pendalaman terhadap beberapa aspek teknis, antara lain standardisasi definisi dan metodologi pengujian, kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, perlakuan terhadap sarana yang telah berumur, penggunaan simulasi dalam pengujian, pengujian distribusi beban bogie, serta penyempurnaan parameter pengujian. Dengan demikian, meskipun progres kegiatan telah berjalan sesuai jadwal, masih diperlukan penyempurnaan substansi agar seluruh output kajian dapat memenuhi ruang lingkup dan kualitas yang dipersyaratkan.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara, penyedia jasa akan melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian seluruh ruang lingkup studi, khususnya ruang lingkup G sampai dengan K. Pendalaman juga akan dilakukan melalui perluasan benchmarking terhadap standar dan praktik pengujian sarana perkeretaapian internasional, termasuk China Railway Standards, serta penyempurnaan definisi, metodologi, parameter, dan kriteria pengujian. Selain itu, akan disusun kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, termasuk pengaturan terhadap sarana yang telah berumur dan pemanfaatan simulasi sebagai bagian dari pendekatan pengujian. Penyedia jasa juga diarahkan untuk menyusun draft pedoman/Juknis, tata cara pengujian, dan checksheet yang spesifik untuk setiap jenis sarana sebagai bahan penyelesaian Laporan Akhir dan penyusunan Draf Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan pemantauan dan pembahasan secara berkala untuk memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Laporan Antara ditindaklanjuti dan penyelesaian pekerjaan tetap sesuai dengan target kontrak.	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada penyelesaian seluruh ruang lingkup kajian, pendalaman dan penyempurnaan hasil analisis berdasarkan masukan pembahasan Laporan Antara, perluasan benchmarking terhadap standar perkeretaapian internasional, serta finalisasi metodologi dan parameter pengujian uji pembebanan statis dan dinamis. Selanjutnya, kegiatan diarahkan pada penyusunan dan pembahasan draft pedoman/Juknis, tata cara pengujian, dan checksheet untuk masing-masing jenis sarana, penyempurnaan rekomendasi teknis, penyusunan Laporan Akhir, serta penyusunan Draf Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Penyesuaian aktivitas ini dilakukan untuk memastikan seluruh catatan dan kekurangan yang teridentifikasi pada pembahasan Laporan Antara dapat diselesaikan pada Triwulan IV, sehingga output akhir kajian dapat memenuhi seluruh ruang lingkup KAK dan dapat menjadi dasar yang memadai dalam penyusunan pedoman serta regulasi pengujian uji pembebanan statis dan dinamis pada sarana perkeretaapian.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
2	Kajian Pelaksanaan Standarisasi Dan Sertifikasi Peralatan Perawatan Di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	Kegiatan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.068.819.000. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, ditandai dengan telah dilaksanakannya pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 7 Juli 2026 sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, masih diperlukan penyempurnaan substansi kajian, khususnya terkait standarisasi tempat perawatan pada Depo (light maintenance) dan Balai Yasa (heavy maintenance), standar dan tata cara sertifikasi peralatan perawatan, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi beserta lembaga sertifikasinya, serta kajian terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, diperlukan pendalaman terkait alternatif kajian pembentukan unit kerja di lingkungan DJKA yang dapat melaksanakan sertifikasi dan kalibrasi, analisis kemampuan dan kompetensi sertifikasi DJKA, benchmarking dengan praktik di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi. Hasil evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan data lapangan pada beberapa lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi, serta penyempurnaan tata naskah dan penyeragaman nomenklatur dalam dokumen kajian.	Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, penyedia jasa akan melakukan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan dan hasil evaluasi rapat. Selanjutnya dilaksanakan pengumpulan dan analisis data pada lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi yang telah ditentukan, kajian terhadap standar nasional dan internasional, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi, identifikasi lembaga sertifikasi, serta analisis terhadap mekanisme dan kompetensi sertifikasi. Selain itu, kajian akan diperdalam melalui analisis alternatif pembentukan unit kerja sertifikasi dan kalibrasi di lingkungan DJKA, benchmarking terhadap praktik standarisasi dan sertifikasi di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi peralatan perawatan. Hasil dari seluruh tindak lanjut tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kajian dan penyusunan Laporan Antara serta menjadi dasar untuk tahapan penyelesaian pekerjaan berikutnya.	Pada Triwulan IV, aktivitas kegiatan akan difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, pengumpulan dan pengolahan data lapangan, pendalaman analisis standar nasional dan internasional, serta penyempurnaan kajian mengenai standarisasi tempat perawatan, sertifikasi dan kalibrasi peralatan perawatan. Selanjutnya dilakukan penyusunan dan pembahasan Laporan Antara, termasuk penyempurnaan terhadap inventarisasi peralatan dan lembaga sertifikasi serta analisis mekanisme dan kompetensi sertifikasi. Pada tahap selanjutnya, kegiatan diarahkan pada penyusunan rekomendasi terkait mekanisme standarisasi dan sertifikasi peralatan perawatan, alternatif kelembagaan sertifikasi dan kalibrasi di lingkungan DJKA, hasil benchmarking internasional, serta penerapan manajemen risiko. Penyesuaian aktivitas Triwulan IV tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masukan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang implementatif, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan perawatan sarana perkeretaapian, serta mendukung peningkatan keselamatan, keandalan, dan kualitas tempat perawatan sarana perkeretaapian.
3	Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp895.137.300. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan penyusunan dan pembahasan Laporan Antara. Pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembahasan Laporan Antara merupakan bagian dari evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan, khususnya	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara tanggal 24 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian serta Tim Pengarah dan Tim Pendamping. Penyempurnaan tersebut mencakup pendalaman analisis kondisi eksisting, perumusan sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara, dan	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada penyempurnaan hasil kajian berdasarkan pembahasan Laporan Antara, pendalaman dan finalisasi sistem serta prosedur perawatan dan pemeriksaan kereta inspeksi milik negara, penyusunan dan pembahasan Laporan Akhir, serta penyelesaian rekomendasi teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendukung implementasi hasil kajian. Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masukan hasil pembahasan Laporan Antara telah ditindaklanjuti dan seluruh keluaran pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak. Selain itu, Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
		dalam pendalaman hasil kajian mengenai sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi kajian, termasuk memastikan kesesuaian analisis dengan kondisi operasional, kebutuhan pemeliharaan, dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal, dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan hasil kajian dan penyelesaian tahapan pekerjaan berikutnya	penyesuaian rekomendasi agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya, penyedia jasa akan melanjutkan penyusunan laporan akhir yang memuat hasil kajian secara menyeluruh, termasuk rancangan sistem dan prosedur perawatan, tata cara pemeriksaan, pembagian peran dan tanggung jawab pelaksana, serta rekomendasi implementasi. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen serta memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan kontrak.	akan memastikan hasil akhir kajian memiliki substansi yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kereta inspeksi milik negara guna mendukung peningkatan keselamatan, keandalan, dan keberlangsungan operasional sarana perkeretaapian.
4	Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp923.631.000. Pelaksanaan kegiatan telah melalui beberapa tahapan, dimulai dari penyusunan dan pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 11 Mei 2026, dilanjutkan dengan pembahasan Laporan Antara pada tanggal 17 Juli 2026. Dalam pembahasan Laporan Antara, konsultan PT Ardi Widya Utama memaparkan hasil tinjauan literatur, metodologi, pelaksanaan survei, analisis kesenjangan (gap analysis), dan rencana kerja lanjutan. Hasil pembahasan memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan substansi kajian, khususnya pengembangan Sistem dan Prosedur (Sispro) yang mencakup ruang lingkup, alur proses (process flow), SOP, instruksi kerja (work instruction), check sheet, serta mekanisme perawatan yang terintegrasi dengan Maintenance Instruction (MI), spesifikasi teknis, standar yang berlaku, dan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, penyempurnaan kajian diarahkan pada pendalaman analisis keandalan (reliability analysis), pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan (maintenance history), sistem komputerisasi, serta rekomendasi	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada penyempurnaan Draft Laporan Akhir berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara dan konsinyering tanggal 25–26 Agustus 2026. Penyedia jasa perlu memastikan seluruh masukan teknis telah diakomodasi, terutama kelengkapan Sispro yang mencakup SOP, instruksi kerja, process flow, check sheet, dan mekanisme pengendalian mutu yang terintegrasi dengan dokumen teknis serta standar perawatan yang berlaku. Selain itu, perlu dipastikan bahwa analisis keandalan, pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan, kebutuhan SDM, dan rekomendasi penerapan sistem komputerisasi telah disusun secara terukur dan didukung data serta referensi yang memadai. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen, memastikan konsistensi antara hasil survei, analisis, dan	Pada Triwulan IV, aktivitas kegiatan diarahkan pada finalisasi dan penyelesaian laporan akhir, meliputi penyempurnaan dokumen berdasarkan hasil konsinyering, verifikasi kelengkapan seluruh komponen Sispro, validasi rekomendasi teknis, serta pemeriksaan konsistensi dan kelengkapan dokumen pendukung. Fokus penyempurnaan mencakup pemantapan SOP dan instruksi kerja perawatan serta pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara, kelengkapan check sheet dan Check Sheet Quality Control (QC), mekanisme pencatatan riwayat perawatan, serta rekomendasi kebutuhan SDM dan dukungan sistem komputerisasi. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan akhir bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping untuk memastikan seluruh catatan evaluasi telah ditindaklanjuti dan hasil kajian dapat diterapkan sebagai acuan pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara. Penyesuaian aktivitas Triwulan IV ini ditujukan untuk menjaga penyelesaian pekerjaan tetap sesuai jadwal kontrak, memastikan kualitas output akhir, serta menghasilkan sistem dan prosedur yang komprehensif, terstandar, dan aplikatif guna meningkatkan keandalan, keselamatan, dan efektivitas pemeliharaan Kereta Ukur Milik Negara.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
		kebutuhan sumber daya manusia (SDM) berbasis referensi ilmiah. Aspek teknis lainnya meliputi kelengkapan jenis dan spesifikasi alat ukur pada Kereta Ukur, penyusunan Check Sheet Quality Control (QC), penyandingan dokumen secara sistematis, serta perbaikan tata naskah dan dokumentasi pendukung. Tim Pendamping menerima Laporan Antara dengan kewajiban perbaikan sebelum dilanjutkan ke tahap penyusunan Draft Laporan Akhir, dengan batas waktu penyerahan dokumen perbaikan pada 28 Juli 2026. Selanjutnya, telah dilaksanakan konsinyering dan pembahasan Draft Laporan Akhir pada tanggal 25–26 Agustus 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dengan tahapan pekerjaan telah mencapai pembahasan Draft Laporan Akhir. Namun demikian, kualitas dan kelengkapan substansi dokumen tetap perlu dipastikan melalui tindak lanjut atas seluruh masukan hasil pembahasan sebelum laporan akhir ditetapkan.	rekomendasi, serta menilai keterterapan sistem dan prosedur yang diusulkan terhadap kondisi operasional Kereta Ukur Milik Negara. Hasil perbaikan tersebut menjadi dasar pembahasan final dan penyelesaian laporan akhir sesuai dengan ketentuan kontrak.	
5	Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp924.741.000. Pelaksanaan kegiatan telah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan dan pembahasan Laporan Pendahuluan, pembahasan Laporan Antara, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), hingga pembahasan Draft Akhir. Pada tahap awal, Laporan Pendahuluan telah dibahas pada tanggal 12 Mei 2026 dengan menghasilkan masukan terhadap metodologi, ruang lingkup kajian, pendekatan analisis kebutuhan SDM, dan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penyempurnaan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2026 dengan sejumlah catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh konsultan PT Telaga Bakti Nusantara. Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan klasifikasi personel dan ruang lingkup sarana, penyesuaian dasar hukum pengelompokan Awak Sarana Perkeretaapian (ASP), Operator Alat, dan Teknisi, serta penegasan status dan jenjang	Menindaklanjuti hasil pembahasan Draft Akhir tanggal 24 September 2026, konsultan perlu menyempurnakan dokumen berdasarkan seluruh masukan dari Tim Pendamping dan peserta pembahasan, termasuk memastikan setiap rekomendasi telah didukung data, analisis, dan dasar regulasi yang memadai. Penyempurnaan difokuskan pada konsistensi klasifikasi personel, kesesuaian ruang lingkup sarana yang dikaji, validitas perhitungan kebutuhan SDM, kejelasan workflow perawatan dan pemeriksaan, serta penyusunan rekomendasi penempatan, pengembangan kompetensi, dan pembiayaan SDM. Konsultan juga perlu memastikan tersedianya matriks tindak lanjut masukan, roadmap implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta penyempurnaan tata naskah dan akurasi data jumlah unit sarana yang dianalisis.	Pada Triwulan IV, aktivitas kegiatan difokuskan pada penyempurnaan dan finalisasi laporan akhir, verifikasi pemenuhan seluruh catatan hasil pembahasan Laporan Antara, FGD, dan Draft Akhir, serta validasi rekomendasi terkait kebutuhan SDM dalam pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara. Penyedia jasa perlu memastikan bahwa analisis kebutuhan personel telah didukung metodologi yang terukur, data inventaris yang tervalidasi, dasar hukum yang relevan, serta skema penempatan dan pembiayaan SDM yang dapat diterapkan. Selain itu, dilakukan penyempurnaan roadmap implementasi dan sistem serta prosedur perawatan dan pemeriksaan sarana agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pendamping akan melaksanakan pemeriksaan akhir terhadap dokumen hasil penyempurnaan, memastikan seluruh masukan telah diakomodasi, dan memantau penyelesaian output serta administrasi kontrak. Penyesuaian aktivitas Triwulan IV tersebut bertujuan untuk menjaga penyelesaian kegiatan tetap sesuai jadwal, menjamin kualitas dan kelengkapan hasil kajian, serta memastikan tersedianya rekomendasi yang komprehensif

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
		jabatan ASP. Dari aspek metodologi, konsultan diminta memperjelas penerapan workload analysis dan Full Time Equivalent (FTE), metode validasi statistik, batas maksimal jam operasional personel, serta penyusunan workflow operasional setiap tahapan sarana milik negara (SMN). Selain itu, diperlukan integrasi data inventaris dari Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Balai Perawatan Perkeretaapian, perumusan skema penempatan dan pembiayaan SDM, penyusunan roadmap pengembangan kebutuhan personel, serta penyempurnaan konsistensi dan keakuratan data dalam dokumen kajian. Sebagai bagian dari pendalaman hasil kajian, telah dilaksanakan FGD Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara pada tanggal 20 Agustus 2026. Selanjutnya, pembahasan Draft Akhir telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan telah mencapai tahapan pembahasan Draft Akhir. Namun, substansi rekomendasi dan penyempurnaan dokumen tetap perlu dipastikan telah mengakomodasi seluruh masukan dalam pembahasan sebelumnya agar hasil studi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta ukur milik negara.	Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan untuk memastikan seluruh catatan pembahasan telah ditindaklanjuti dan substansi laporan sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penyelesaian laporan akhir dan penyelesaian administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	dan implementatif sebagai dasar peningkatan efektivitas pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan kereta ukur milik negara. Catatan evaluasi: Karena kegiatan dinyatakan berjalan sesuai jadwal dan telah mencapai pembahasan Draft Akhir, narasi Triwulan IV diarahkan pada penyempurnaan, validasi, dan finalisasi output, bukan pada percepatan akibat keterlambatan. Status penyelesaian laporan akhir tetap perlu dikonfirmasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen terakhir.
6	Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	Kegiatan Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp917.193.000. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Pelaksanaan pembahasan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pembahasan Laporan Antara merupakan tahapan penting untuk mengevaluasi hasil sementara kajian, khususnya terkait penyusunan pedoman rancang bangun dan rekayasa komponen sarana perkeretaapian. Hasil pembahasan menjadi dasar untuk menyempurnakan substansi kajian, memperdalam analisis	Menindaklanjuti pembahasan Laporan Antara tanggal 10 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan. Selanjutnya, penyedia jasa melanjutkan pendalaman analisis dan penyusunan pedoman rancang bangun serta rekayasa komponen sarana perkeretaapian, termasuk memastikan kesesuaian substansi dengan regulasi, standar teknis, dan kebutuhan penerapan di sektor perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada penyempurnaan hasil kajian berdasarkan pembahasan Laporan Antara, pendalaman analisis teknis, finalisasi substansi pedoman rancang bangun dan rekayasa komponen sarana perkeretaapian, serta penyusunan dan pembahasan Laporan Akhir. Selain itu, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan ruang lingkup kontrak serta Kerangka Acuan Kerja (KAK). Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak, menjaga kualitas hasil kajian, dan menghasilkan pedoman yang komprehensif serta aplikatif. Hasil akhir kegiatan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
		teknis, serta memastikan rekomendasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan standardisasi dan pengembangan komponen sarana perkeretaapian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III berjalan sesuai jadwal dan mendukung pencapaian target output kegiatan.	akan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pekerjaan serta memastikan seluruh masukan pembahasan telah ditindaklanjuti sebelum laporan akhir disampaikan.	komponen sarana perkeretaapian serta mendukung peningkatan standardisasi, keselamatan, dan keandalan sarana perkeretaapian di Indonesia.
7	Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	Kegiatan Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.945.641.300. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 8 Juni 2026, dengan hasil berupa masukan terhadap metodologi, ruang lingkup kajian, rencana pengumpulan data, dan pendekatan analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla). Selanjutnya, pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2026, dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 22 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendalaman substansi kajian, pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan, serta penyempurnaan hasil analisis. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan yang mendukung pencapaian target keluaran kajian.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta para pemangku kepentingan ke dalam penyempurnaan hasil kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla) didukung oleh data teknis yang memadai, kajian terhadap standar yang relevan, serta pertimbangan aspek keselamatan, keandalan, dan kebutuhan operasional. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil penyempurnaan kajian serta memantau pemenuhan seluruh keluaran sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan penyelesaian laporan akhir dan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada penyempurnaan hasil kajian berdasarkan masukan pembahasan Laporan Antara dan FGD, pendalaman analisis teknis, finalisasi rekomendasi pengembangan teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla), serta penyusunan dan pembahasan Laporan Akhir. Selain itu, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan dokumen pendukung guna memastikan seluruh substansi kajian telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan Direktorat Sarana Perkeretaapian. Penyesuaian aktivitas tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pekerjaan yang telah berjalan sesuai jadwal pada Triwulan III, memastikan seluruh masukan pemangku kepentingan telah ditindaklanjuti, serta menjamin penyelesaian keluaran kegiatan secara tepat waktu. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla), khususnya dalam mendukung peningkatan keselamatan, keandalan, dan efisiensi operasional sarana perkeretaapian.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
8	Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur Kereta Api (Railroad)	Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp950.049.000. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 18 April 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai beberapa tahapan, yaitu penyampaian Laporan Pendahuluan pada 5 Mei 2026, Laporan Antara pada 22 Juli 2026, dan Laporan Akhir pada 28 Agustus 2026. Selanjutnya, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 11 September 2026 untuk membahas hasil kajian dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan hasil kajian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mendukung penyelesaian output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan FGD tanggal 11 September 2026, perlu dilakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh masukan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan oleh peserta untuk memastikan substansi hasil kajian telah mengakomodasi kebutuhan teknis dan regulasi. Penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen hasil kajian apabila masih terdapat catatan perbaikan, khususnya terkait standar, metode pengujian, persyaratan teknis, dan mekanisme sertifikasi kelaikan kendaraan yang berjalan di jalur kereta api. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen dan memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta ketentuan kontrak. Hasil akhir kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan standar dan tata cara pengujian serta sertifikasi kelaikan kendaraan railroad.	Pada Triwulan IV, aktivitas kegiatan akan difokuskan pada penyempurnaan hasil kajian berdasarkan masukan FGD, verifikasi akhir dokumen, dan penyelesaian administrasi kontrak. Kegiatan juga mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, validasi rekomendasi teknis, serta dokumentasi hasil pelaksanaan kajian sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan di bidang sarana perkeretaapian. Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh catatan hasil pembahasan telah ditindaklanjuti, kualitas dokumen akhir tetap terjaga, dan seluruh kewajiban penyedia jasa dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Selain itu, hasil kajian akan dihimpun sebagai bahan pendukung bagi Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam merencanakan penyusunan atau penyempurnaan standar dan tata cara pengujian serta sertifikasi kelaikan kendaraan yang berjalan di jalur kereta api pada tahapan berikutnya.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
9	Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana pada Sarana Otomatis	Kegiatan Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana pada Sarana Otomatis dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp956.015.250. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan penerbitan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Tim Pendamping pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa telah menyelesaikan dan membahas Laporan Pendahuluan pada tanggal 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Antara pada tanggal 27 Agustus 2026 dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 2 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman substansi kajian, khususnya terkait standar, metodologi, dan tata cara pengujian integrasi sub system pada sarana otomatis. Sampai dengan periode pelaporan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Tahapan berikutnya adalah pembahasan Laporan Draft Akhir yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengintegrasikan seluruh masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta peserta FGD ke dalam penyempurnaan dokumen kajian. Penyempurnaan tersebut perlu mencakup pendalaman analisis standar dan tata cara pengujian integrasi sub system, kesesuaian terhadap standar yang relevan, serta perumusan rekomendasi teknis yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pengujian sarana otomatis. Selanjutnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melaksanakan pembahasan Laporan Draft Akhir pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kelengkapan substansi, kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup kontrak, serta keterakomodasian masukan dari tahapan pembahasan sebelumnya. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyempurnaan laporan akhir sebelum dilakukan penyelesaian dan penyerahan output pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Pada Triwulan IV, aktivitas difokuskan pada pembahasan Laporan Draft Akhir, penyempurnaan dokumen berdasarkan hasil evaluasi dan masukan Tim Pengarah serta Tim Pendamping, finalisasi rekomendasi teknis, dan penyelesaian Laporan Akhir. Pembahasan Laporan Draft Akhir dijadwalkan pada tanggal 22 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan dokumen dan pemenuhan seluruh keluaran pekerjaan sesuai jadwal kontrak. Penyesuaian aktivitas Triwulan IV dilakukan untuk memastikan seluruh hasil kajian telah mengakomodasi masukan dari proses pembahasan dan FGD, memenuhi ruang lingkup pekerjaan, serta menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif. Pemantauan terhadap jadwal penyelesaian dan kualitas dokumen akan terus dilakukan agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu serta mendukung penyusunan standar dan tata cara pengujian integrasi sub system sarana pada sarana otomatis secara terukur dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
10	Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	Kegiatan Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.058.912.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 21 Juni 2026. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 2 Juli 2026, dengan hasil pembahasan berupa masukan terhadap metodologi kajian, ruang lingkup evaluasi, mekanisme pengumpulan data, serta pendekatan penyusunan tata cara evaluasi persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Selanjutnya, Laporan Antara telah disampaikan pada tanggal 16 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Secara umum, progres kegiatan berjalan sesuai jadwal kontrak, dengan tahapan berikutnya berupa pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk memperoleh masukan dan pendalaman substansi kajian.	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melaksanakan FGD pada tanggal 22 Oktober 2026 dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh masukan terhadap hasil analisis, mekanisme evaluasi, serta substansi tata cara persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Hasil FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan laporan dan perumusan rekomendasi kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa seluruh masukan dan hasil pembahasan terdokumentasi dengan baik serta ditindaklanjuti dalam laporan berikutnya. Pemantauan terhadap progres pekerjaan akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas hasil kajian dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai kontrak.	Pada Triwulan IV, aktivitas difokuskan pada pelaksanaan FGD, inventarisasi dan analisis masukan dari para pemangku kepentingan, penyempurnaan hasil kajian berdasarkan pembahasan Laporan Antara, serta penyusunan dan pembahasan laporan akhir sesuai tahapan dalam kontrak. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pendukung dan kesesuaian rekomendasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian aktivitas tersebut diarahkan untuk memastikan hasil kajian dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak, menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif, serta mendukung penyempurnaan tata cara evaluasi persetujuan pengoperasian peralatan khusus yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel. Seluruh hasil pelaksanaan FGD dan tindak lanjutnya perlu didokumentasikan sebagai bukti dukung evaluasi kinerja Triwulan IV.
11	Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun	Kegiatan Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun telah dikontrakkan pada tanggal 20 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp948.966.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2026 pada tanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Dalam perkembangannya, penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Antara pada tanggal 17 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) direncanakan pada tanggal 16	Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap progres pekerjaan serta meminta penyedia jasa menyusun rencana percepatan penyelesaian kegiatan yang memuat tahapan pekerjaan, target waktu, dan keluaran yang harus dipenuhi. Pelaksanaan FGD yang direncanakan pada 16 Oktober 2026 perlu ditindaklanjuti dengan dokumentasi hasil pembahasan, inventarisasi masukan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan Laporan Antara. Selanjutnya, penyedia jasa agar segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam penyusunan laporan akhir	Pada Triwulan IV, aktivitas difokuskan pada percepatan pelaksanaan FGD dan penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan, penyempurnaan Laporan Antara berdasarkan masukan Tim Pengarah, Tim Pendamping, dan pemangku kepentingan, serta pendalaman analisis terhadap standar dan persyaratan kelaikan sarana pengangkut bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, penyedia jasa diarahkan untuk menyelesaikan penyusunan laporan akhir beserta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan standar teknis terkait. Penyesuaian aktivitas dilakukan dengan menetapkan target penyelesaian yang terukur pada setiap tahapan, memperkuat koordinasi dan pengawasan, serta memprioritaskan pekerjaan yang masih tertunda. Dengan langkah tersebut, diharapkan keterlambatan pelaksanaan dapat dikendalikan

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
		Oktober 2026 untuk membahas substansi dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan sehingga diperlukan percepatan penyelesaian tahapan pekerjaan, khususnya pembahasan hasil kajian, penyempurnaan dokumen, dan penyusunan rekomendasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak agar seluruh keluaran kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan sisa waktu pelaksanaan yang tersedia.	dan rekomendasi terkait standar serta persyaratan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun. Setiap tahapan penyelesaian perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keterlambatan tidak semakin bertambah dan seluruh keluaran kontrak dapat dipenuhi.	dan seluruh keluaran kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak serta sisa waktu pelaksanaan yang tersedia.
12	Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction and Before Entry into Service)	Kegiatan Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction and Before Entry into Service) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 16 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.123.448.343. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping dengan nomor KP-K4 DJKA 26 Tahun 2026 pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan.Pelaksanaan kegiatan telah melalui beberapa tahapan, yaitu pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 4 Juni 2026, penyampaian Laporan Antara pada tanggal 22 Juli 2026, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 3 September 2026 untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap substansi kajian. Selanjutnya, Laporan Akhir telah disampaikan pada tanggal 30 September 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan dan penyelesaian hasil kajian. Tahapan tersebut mendukung penyusunan konsep SNI melalui harmonisasi standar JIS E4041 dan IEC 61133 dengan kebutuhan standardisasi pengujian sarana perkeretaapian di Indonesia.	Menindaklanjuti penyelesaian Laporan Akhir, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap substansi dan rekomendasi yang dihasilkan, termasuk memastikan seluruh masukan dari Tim Pengarah, Tim Pendamping, dan peserta FGD telah diakomodasi dalam dokumen akhir. Selanjutnya, perlu dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian konsep SNI dengan ketentuan standardisasi nasional, relevansi penerapan standar JIS E4041 dan IEC 61133, serta kesiapan substansi untuk diproses ke tahapan standardisasi berikutnya. Dokumen hasil kajian beserta notulensi pembahasan, daftar masukan, dan matriks tindak lanjut perlu dihimpun sebagai bukti dukung pelaksanaan kegiatan dan dasar pemantauan	Pada Triwulan IV, aktivitas difokuskan pada evaluasi hasil akhir kajian, penelaahan rekomendasi, dan persiapan tindak lanjut penyusunan konsep SNI. Kegiatan meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen hasil pekerjaan, verifikasi tindak lanjut atas masukan FGD, penyusunan dokumentasi hasil kajian, serta identifikasi tahapan lanjutan yang diperlukan untuk mendorong proses standardisasi sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, dilakukan pengarsipan dokumen dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kontrak sebagai bahan pelaporan capaian kinerja Triwulan IV.Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan karena tahapan utama penyusunan kajian telah selesai pada Triwulan III. Dengan demikian, pelaksanaan pada Triwulan IV diarahkan pada pemanfaatan hasil kajian, penjaminan kelengkapan administrasi dan substansi, serta persiapan tindak lanjut standardisasi agar hasil pekerjaan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan standar pengujian sarana perkeretaapian di Indonesia.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
13	Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian	Kegiatan Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 25 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.361.831.250. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 39 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan teknis. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 5 Agustus 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Penyampaian kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa tahapan pekerjaan telah berjalan sesuai rencana dan mendukung pelaksanaan kajian lebih lanjut terkait standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian. Selanjutnya, diperlukan pengawalan terhadap kualitas substansi kajian agar hasil pekerjaan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri manufaktur sarana perkeretaapian nasional.	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil kajian, termasuk analisis kondisi eksisting manufaktur sarana perkeretaapian, kesesuaian terhadap standar yang berlaku, serta identifikasi kebutuhan penyempurnaan standar manufaktur. Penyedia jasa diminta untuk menindaklanjuti masukan hasil pembahasan dan melengkapi data serta analisis yang diperlukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi akhir. Pemantauan pelaksanaan kontrak juga akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh keluaran pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal dan memenuhi ruang lingkup yang telah ditetapkan.	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada pendalaman dan penyempurnaan hasil kajian berdasarkan Laporan Antara, verifikasi data dan analisis standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian, serta penyusunan dan pembahasan Laporan Akhir. Selain itu, akan dilakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan, khususnya terkait kebutuhan standardisasi proses manufaktur, penerapan standar teknis, pengendalian mutu, dan peningkatan kemampuan industri manufaktur sarana perkeretaapian nasional. Penyesuaian aktivitas tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak, dengan tetap menjaga kualitas dan kelengkapan hasil kajian. Hasil akhir kegiatan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam merumuskan kebijakan dan langkah pengembangan standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
14	Reviu Peraturan tentang Standar Spektek Monorel	Kegiatan Reviu Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis (Spektek) Monorel dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp990.414.150. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 2 Juni 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 7 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Dalam rangka mendukung pendalaman substansi kajian, penyedia jasa juga telah menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Pengantar Pengumpulan Data untuk keperluan koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, kegiatan direncanakan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 Oktober 2026.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian dalam Laporan Antara, memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek regulasi dan spesifikasi teknis monorel yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, proses koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky perlu ditindaklanjuti untuk melengkapi bahan analisis dan memperkuat dasar penyusunan rekomendasi. Hasil pembahasan dan data tambahan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan hasil kajian dan menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FGD, penyelesaian pengumpulan data teknis, pendalaman analisis terhadap standar spesifikasi teknis monorel, serta penyempurnaan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan masukan pemangku kepentingan. Selanjutnya, penyedia jasa diarahkan untuk menyelesaikan laporan akhir beserta rekomendasi penyempurnaan peraturan sesuai dengan ruang lingkup dan jadwal kontrak. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian setiap tahapan pekerjaan, memastikan seluruh masukan telah ditindaklanjuti, serta memeriksa kesesuaian substansi dan kelengkapan dokumen hasil kajian sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Penyesuaian aktivitas tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan memastikan hasil reviu dapat digunakan

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
		Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III menunjukkan kemajuan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, dengan fokus pada pendalaman data teknis dan penyempurnaan hasil reviu peraturan tentang standar spesifikasi teknis monorel.	monorel serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan mengenai standar spesifikasi teknis monorel.
15	Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem	Kegiatan Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 22 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.356.336.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 37 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 6 Juli 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem dijadwalkan pada 15 Oktober 2026 untuk membahas hasil kajian serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dengan tahapan selanjutnya difokuskan pada pembahasan dan penyempurnaan substansi kajian sebagai dasar penyusunan rekomendasi reviu rancangan peraturan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian, mengidentifikasi masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan, serta memperoleh kesepakatan terhadap substansi rancangan peraturan tentang standar spesifikasi teknis trem. Hasil FGD selanjutnya didokumentasikan dalam notula dan dirumuskan menjadi daftar masukan serta rekomendasi penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan, memastikan seluruh masukan relevan telah diakomodasi, serta memantau penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan jadwal kontrak. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian substansi rancangan peraturan dengan ketentuan yang berlaku, perkembangan teknologi trem, dan kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian.	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FGD, penyempurnaan substansi kajian berdasarkan masukan pemangku kepentingan, serta penyusunan dan pembahasan laporan akhir. Penyedia jasa diharapkan mengakomodasi hasil diskusi, memperjelas rekomendasi perubahan atau penyempurnaan rancangan peraturan, dan memastikan konsistensi antara hasil reviu dengan standar spesifikasi teknis trem yang dibutuhkan. Selanjutnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melaksanakan reviu akhir terhadap dokumen hasil kajian, memverifikasi kelengkapan keluaran pekerjaan, serta memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan. Penyesuaian aktivitas tersebut bertujuan untuk menjaga penyelesaian pekerjaan tetap sesuai jadwal kontrak, memastikan seluruh masukan hasil FGD ditindaklanjuti, dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif serta implementatif bagi penyusunan peraturan tentang standar spesifikasi teknis trem.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
16	Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	Kegiatan Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian telah dikontrakkan pada tanggal 29 Juni 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.106.059.500. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 41 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan kajian. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2026. Namun, penyampaian laporan tersebut mengalami keterlambatan dari tahapan pelaksanaan yang direncanakan sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan tahapan pekerjaan berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, khususnya untuk memastikan penyelesaian setiap tahapan kajian tetap sesuai dengan jadwal dan target output yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap keterlambatan penyampaian Laporan Pendahuluan serta berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk memastikan penyebab keterlambatan dan langkah percepatan yang diperlukan. Selanjutnya, perlu dilakukan pembahasan dan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan tim, disertai penyusunan jadwal kerja yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan kontrak. Penyedia jasa juga perlu mempercepat pengumpulan dan validasi data, inventarisasi standar komponen sarana perkeretaapian yang berlaku, serta analisis kebutuhan standarisasi komponen. Pemantauan kemajuan pekerjaan perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kesesuaian antara realisasi pekerjaan,	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada percepatan penyelesaian tahapan kajian melalui pembahasan dan penyempurnaan Laporan Pendahuluan, pengumpulan serta verifikasi data teknis, analisis standar komponen sarana perkeretaapian, identifikasi kesenjangan standar yang berlaku, serta penyusunan dan pembahasan Laporan Antara dan laporan akhir sesuai jadwal kontrak. Penyesuaian aktivitas dilakukan dengan menetapkan prioritas pekerjaan, memperkuat koordinasi antara penyedia jasa dan tim studi, serta meningkatkan frekuensi pemantauan terhadap kemajuan pekerjaan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak keterlambatan pada tahapan sebelumnya dan memastikan hasil studi menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar pengembangan standarisasi komponen sarana perkeretaapian. Penyelesaian setiap tahapan tetap harus mengacu pada ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan kontrak yang berlaku.
17	Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	Kegiatan Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 28 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.108.085.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan capaian berupa penyampaian Laporan Pendahuluan pada tanggal 26 Mei 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 31 Agustus 2026. Selain itu, telah dijadwalkan dan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 1 Oktober 2026 sebagai forum pembahasan dan pendalaman substansi kajian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan kemajuan sesuai tahapan yang direncanakan, baik dari sisi penyampaian dokumen maupun pelaksanaan pembahasan, sehingga mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan, hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD tanggal 1 Oktober 2026 perlu menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan substansi kajian, khususnya terkait standar peralatan dan fasilitas, tata cara pemeriksaan dan perawatan komponen bearing, serta kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi hasil pembahasan ke dalam laporan akhir, disertai analisis dan rumusan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan komponen bearing pada sarana perkeretaapian kecepatan normal. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan	Pada Triwulan IV, aktivitas akan difokuskan pada penyempurnaan hasil kajian berdasarkan masukan FGD, finalisasi standar dan tata cara pemeriksaan serta perawatan komponen bearing, penyusunan dan pembahasan Laporan Akhir, serta penyelesaian administrasi hasil pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Penyedia jasa diharapkan memastikan seluruh masukan dari Tim Pengarah, Tim Pendamping, dan peserta FGD telah ditindaklanjuti serta tercermin dalam dokumen akhir. Penyesuaian aktivitas ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pekerjaan, memastikan penyelesaian output sesuai jadwal kontrak, dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif serta aplikatif sebagai acuan dalam meningkatkan konsistensi pemeriksaan, keandalan perawatan, dan keselamatan sarana perkeretaapian kecepatan normal.

No	Kegiatan	Evaluasi Kegiatan	Tindak Lanjut	Penyesuaian Aktivitas
			dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen untuk memastikan kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan kontrak.	

II.2.5 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Presentase dengan Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan

Merupakan Parameter untuk mengukur terpenuhinya sarana perkeretaapian milik melalui pengadaan maupun pengoperasiannya sarana milik negara yang mendukung keselamatan.

A. Analisis Capaian Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan

IKK Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara mendukung keselamatan memiliki target tahun 2026 sebesar 71,01%. Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan pengadaan dan pengoperasian sarana milik negara.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\textit{Presentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan} = \textit{Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} + \textit{Presentase Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara}$$

$$\textit{Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} = \frac{\textit{Jumlah Sarana Milik Negara Direktorat Sarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan} + \textit{Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara Tahun Berjalan}}{\textit{Jumlah Sarana Milik Negara Direktorat Sarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan} + \textit{Jumlah Target Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 50\%$$

$$\textit{Presentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan}}{\textit{Jumlah Target Pengoperasian Sarana Milik Negara periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 50\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{pmatrix} Presentase\ Pemenuhan \\ pengoperasian\ sarana \\ perkeretaapian\ milik\ negara \end{pmatrix} = \frac{78}{124} \times 50\% = 31{,}452\%$$

$$\begin{pmatrix} Presentase\ Pemenuhan \\ Kebutuhan\ sarana \\ perkeretaapian\ milik\ negara \end{pmatrix} = \frac{(29+0)}{(29+40)} \times 50\% = 21{,}014\%$$

$$\begin{pmatrix} Presentase\ Pemenuhan \\ Sarana\ Perkeretaapain \\ milik\ negara\ mendukung \\ keselamatan \end{pmatrix} = 31{,}452\% + 21{,}014\% = 52{,}47\%$$

a. **Pengoperasian SMN menggunakan anggaran Pengoperasian SMN** yang dihitung dalam capaian kinerja yaitu sebagai berikut: (Total 78 Unit)

1. Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 3 21 03 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 8 April 2026 (1 Unit)
   b) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 9 April 2026 (1 Unit)
   c) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 13 April 2026 (1 Unit)
   d) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 16 April 2026 (1 Unit)
   e) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 20 April 2026 (1 Unit)
   f) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 22 April 2026 (1 Unit)
   g) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 29 April 2026 (1 Unit)
   h) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 1 Mei 2026 (1 Unit)
   i) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 6 Mei 2026 (1 Unit)
   j) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 25 Juli 2026 (1 Unit)
   k) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 2 September 2026 (1 Unit)
   l) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 17 September 2026 (1 Unit)
   m) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 22 September 2026 (1 Unit)
   n) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 8 April 2026. (1 Unit)

2. Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 3 21 04 dalam rangka mendukung kegiatan pengujian prasarana, *safety assessment* dan uji coba pengoperasian oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Lintas Maros-Garongkong pada tanggal 15 April 2026. (1 Unit)
   b) Lintas Mangkoso-Palanro pada tanggal 16 April 2026. (1 Unit)

c) Lintas Palanro-Km 112 pada tanggal 17 April 2026. (1 Unit)
d) Lintas Takallasi-Mangkoso pada tanggal 29 April 2026. (1 Unit)
e) Lintas Mangkoso-Palanro pada tanggal 5 Mei 2026. (1 Unit)
f) Lintas Takallasi-Palanro pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
g) Lintas KM 97-Palanro pada tanggal 7 Mei 2026. (1 Unit)
h) Lintas Palanro-Mangkoso pada tanggal 8 Mei 2026. (1 Unit)
i) Lintas Mangkoso-Takallasi pada tanggal 9 Mei 2026. (1 Unit)
j) Lintas Takallasi-Barru pada tanggal 11 Mei 2026. (1 Unit)
k) Lintas Barru-Palanro pada tanggal 12 Mei 2026. (1 Unit)

3. Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 2 15 02 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Lintas Binjai-Depo Pulubrayan pada tanggal 29 April 2026. (1 Unit)
   b) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 30 April 2026. (1 Unit)
   c) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 4 Mei 2026. (1 Unit)
   d) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 5 Mei 2026. (1 Unit)
   e) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
   f) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 7 Mei 2026. (1 Unit)
   g) Lintas Depo Pulubrayan-Binjai-Stasiun Pangkalan Brandan pada tanggal 12 Mei 2026. (1 Unit)
4. Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas sarana SU 3 21 01 dalam rangka memastikan kondisi dan fungsi komponen sarana guna pengoptimalan perawatan sarana Lintas Stasiun Payakabung-Stasiun Kertapati (PP) oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 30 April 2026 (1 Unit).
5. Pengoperasian *Rail Road Vehicle Car* (RRV) dengan nomor identitas V2R511 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan, dengan rincian sebagai berikut
   a) Lintas Rantauprapat Baru-Aek Nabara pada tanggal 5 Mei 2026. (1 Unit)

b) Lintas Rantauprapat Baru-Pondok S5 pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
c) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 2 Juni 2026. (1 Unit)
d) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 3 Juni 2026. (1 Unit)
e) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 4 Juni 2026. (1 Unit)
f) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 24 Juni 2026. (1 Unit)
g) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 26 Juni 2026. (1 Unit)
h) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 28 Juni 2026. (1 Unit)
i) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 2 Juli 2026. (1 Unit)
j) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 9 Juli 2026. (1 Unit)
k) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 18 Juli 2026. (1 Unit)
l) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 22 Juli 2026. (1 Unit)
m) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 25 Juli 2026. (1 Unit)
n) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 4 Agustus 2026. (1 Unit)
o) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 7 Agustus 2026. (1 Unit)
p) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 13 Agustus 2026. (1 Unit)
q) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 17 Agustus 2026. (1 Unit)
r) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 2 September 2026. (1 Unit)
s) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 7 September 2026. (1 Unit)
t) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 10 September 2026. (1 Unit)
u) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 13 September 2026. (1 Unit)
v) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 23 September 2026. (1

Unit)

w) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 24 September 2026. (1 Unit)

6. Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka persiapan kegiatan pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa lintas Ngrombo-Depo Cipinang oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 5 Juni 2026. (1 Unit)
7. Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut: (12 Unit)
   a) Lintas Gambir-Surabaya (PP) pada tanggal 8 s.d. 11 Juni 2026 (4 Unit)
   b) Lintas Gambir-Sukabumi (PP) pada tanggal 17 s.d. 18 Juni 2026 (2 Unit)
   c) Lintas Tanah Abang-Merak (PP) pada tanggal 19 Juni 2026 (1 Unit)
   d) Lintas Gambir-Malang (PP) pada tanggal 22 s.d. 26 Juni 2026 (5 Unit)
8. Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka pengembalian sarana setelah dilakukan kegiatan pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa, lintas Jatinegara – Ngrombo oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 29 Juni 2026. (1 Unit)
9. Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 16 01-02 dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring lintas Stasiun Jatinegara – Stasiun Cirebon (PP) oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 13 s.d. 14 Agustus 2026. (2 Unit)
10. Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 16 01-02 Kala rangka mendukung pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar dan tata cara pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian lintas Stasiun Gambir-Stasiun Yogyakarta-Stasiun Bandung-Stasiun Gambir pada tanggal 1 s.d. 3 September 2026. (6 Unit)

b. Pengoperasian SMN Non Komersial

1) Pengoperasian 1 Set *Railways Crane* dengan nomor identitas SC 3 05 02, GD 50 10 02, SN 0 08 02 untuk evakuasi KA 174B KA Ciremai yang

tertemper longsoran pada petak jalan maswati sasaksaat KM 142+8/9 oleh PT KAI pada tanggal 1 s.d. 2 April 2026.

2) Pengoperasian 1 Set *Railways Crane* dengan nomor identitas SC 3 05 01, GD 50 10 01, SN 0 08 01 untuk evakuasi KA 161 (Bangunkarta) yang mengalami anjlokan di Emplasemen Stasiun Bumiayu KM 312+1 wilayah Daop 5 Purwokerto oleh PT KAI pada tanggal 6 s.d. 8 April 2026.
3) Pengoperasian 1 Set *Railways Crane* dengan nomor identitas SC 3 05 02, GD 50 10 02, SN 0 08 02 untuk evakuasi PLB 5568A (CL KPB-CKR) tertumbur PLB 4A (Agro Bromo Anggrek GMR-SBI) di Emplasemen Stasiun Bekasi Timur oleh PT KAI pada tanggal 27 s.d. 29 April 2026.

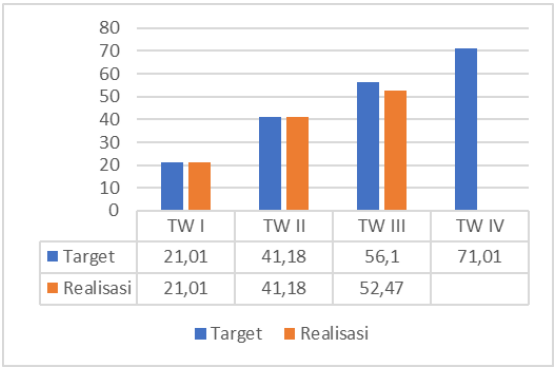
c. Pengoperasian SMN Komersial

Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 15 01-02 untuk pelaksanaan praktik dalam diklat perawatan sarana perkeretaapian oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada tanggal 17 April 2026.

Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Capaian Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK5 SK3	Persentase Pemenuhan Sarana Milik Negara	%	71,01	21,01	41,18	56,10	71,01	21,01	41,18	52,47		100	100	93,53		73,89



Gambar 6 Grafik Target dan Realisasi Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Realisasi kinerja pada triwulan III IKK ini sebesar 52,47% dan untuk Capaian kinerja Triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 93,53% terhadap target Triwulan III dan 73,89% terhadap target revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan memiliki target tahunan sebesar 71,01%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi kinerja mencapai 45,7% , sehingga menghasilkan capaian sebesar 93,53% terhadap target Triwulan III dan 73,89% terhadap target tahunan.

Pengoperasian dilakukan melalui berbagai jenis sarana, antara lain lori inspeksi, kereta ukur, railway crane, serta kereta inspeksi yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan inspeksi, pengujian prasarana, pengukuran geometri jalan rel, pemantauan pascabencana, evakuasi perjalanan kereta api, hingga kegiatan pendidikan dan pelatihan. Seluruh kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan aspek keselamatan, keandalan, dan keberlangsungan operasional perkeretaapian nasional.

Selain pengoperasian sarana, indikator ini juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Sarana Milik Negara melalui kegiatan pengadaan. Meskipun progres pengadaan tahun ini tidak ada, tingginya intensitas pengoperasian sarana yang telah tersedia mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian indicator.

Pelaksanaan aktivitas pada Triwulan III diarahkan untuk menjaga keberlanjutan kinerja sekaligus memastikan pemanfaatan Sarana Milik Negara tetap optimal. **Penyesuaian aktivitas** difokuskan pada peningkatan pemanfaatan sarana sesuai kebutuhan operasional, serta penguatan monitoring terhadap tingkat utilisasi dan kondisi teknis setiap sarana.

Selain itu, akan dilakukan penyusunan jadwal pengoperasian yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan prasarana di seluruh wilayah kerja. Evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan SMN juga akan ditingkatkan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan kebutuhan

sarana pada periode berikutnya, sehingga capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan dan pelayanan perkeretaapian.

Crosscutting Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan merupakan hasil sinergi lintas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian berperan dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Sarana Milik Negara, sedangkan Direktorat Prasarana Perkeretaapian memanfaatkan sarana tersebut untuk mendukung kegiatan inspeksi, pengukuran geometri jalan rel, pengujian prasarana, serta peningkatan keselamatan infrastruktur. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) berperan dalam pelaksanaan operasional di wilayah, termasuk monitoring kondisi prasarana dan penanganan pascabencana. Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung pemanfaatan sarana dalam kegiatan evakuasi dan penanganan gangguan operasional, sedangkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun memanfaatkan sarana untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi antarunit tersebut menghasilkan pemanfaatan Sarana Milik Negara yang lebih optimal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan inspeksi dan pengawasan, mempercepat penanganan kondisi darurat, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan perkeretaapian yang selamat, andal, dan berkelanjutan sesuai sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Crosscutting Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan merupakan hasil sinergi lintas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian berperan dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Sarana Milik Negara, sedangkan Direktorat Prasarana Perkeretaapian memanfaatkan sarana tersebut untuk mendukung kegiatan inspeksi, pengukuran geometri jalan rel,

pengujian prasarana, serta peningkatan keselamatan infrastruktur. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) berperan dalam pelaksanaan operasional di wilayah, termasuk monitoring kondisi prasarana dan penanganan pascabencana. Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung pemanfaatan sarana dalam kegiatan evakuasi dan penanganan gangguan operasional, sedangkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun memanfaatkan sarana untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi antarunit tersebut menghasilkan pemanfaatan Sarana Milik Negara yang lebih optimal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan inspeksi dan pengawasan, mempercepat penanganan kondisi darurat, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan perkeretaapian yang selamat, andal, dan berkelanjutan sesuai sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Crosscutting

Adapun kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian yang bersifat Crosscutting yang terdapat keterlibatan pihak eksternal di luar Direktorat Sarana Perkeretaapian, semisal dengan Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, maupun dengan Operator yang terkait dengan IKK Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan kondisi Sarana Milik Negara bersama Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara diantaranya BTP Kelas I Medan, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang, BTP Kelas I Bandung, BTP Kelas I Semarang dan BPKA Sulawesi Selatan agar kondisi sarana berada dalam kondisi laik operasional dan fungsi (SO)
2. Melaksanakan monitoring perawatan sarana milik negara bersama Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara diantaranya BTP Kelas I Medan, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang, BTP Kelas I Bandung, BTP Kelas I Semarang dan BPKA Sulawesi Selatan.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Rekomendasi Peningkatan Kinerja terhadap kegiatan Pengoperasian yaitu Pengoperasian Sarana Milik Negara dilakukan atas dasar permintaan atau rekomendasi dari unit kerja yang akan menggunakannya.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara, diantaranya

1) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

   Pengoperasian Sarana Milik Negara dilakukan atas dasar permintaan atau rekomendasi dari unit kerja yang akan menggunakannya sehingga perlu meningkatkan koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara.

2) **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran**

   Pada IKK Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara mendukung keselamatan telah dilakukan beberapa kegiatan guna meningkatkan kehandalan sarana perkeretaapian yaitu perawatan Sarana Milik Negara seperti Lori Inspeksi, Track Motor Car (TMC), *Railways* Crane, Gerbong Datar, Gerbong Penolong, Kereta Inspeksi, Kereta Ukur dan Kereta Kedinasan Milik Negara. Adapun perawatannya meliputi perawatan perawatan bulanan (P1) dan perawatan dua belas bulanan (P12). Selain itu, juga dilakukan perbaikan alat ukur Kereta Ukur Sarana Milik Negara.

3) **Penyesuaian Penempatan Pegawai/Jabatan**

   Pada IKK Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara mendukung keselamatan pada Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai penanggung jawab yaitu Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik dengan dikoordinasikan bersama PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian terkait pengadaan sarana maupun kondisi Sarana Milik Negara. Sedangkan pegawai yang supporting pada sasaran ini yaitu pegawai teknis berpengalaman di bidang inspeksi sarana guna melakukan monitoring perawatan Sarana Milik Negara sehingga kondisinya siap operasi (SO). Selain itu, menetapkan petugas penghubung

khusus yang berkoordinasi langsung dengan Balai Teknik Perkeretaapian wilayah untuk melakukan monitoring Sarana Milik Negara.

II.2.6 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Rampcheck sarana perkeretaapian Angkutan Lebaran tahun 2026 dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai bentuk pengawasan teknis langsung untuk memastikan kelaikan operasi sarana dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayanan angkutan lebaran sesuai standar keselamatan dan regulasi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2016, serta Permenhub Nomor 24 Tahun 2015 dan Permenhub PM 4 Tahun 2025, dengan dukungan Surat Tugas Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian Nomor ST-K4 DJKA 24 Tahun 2026. Tujuan rampcheck adalah memastikan kesiapoperasian dan kelaikan sarana, mencakup pemeriksaan administratif, teknis, dan fungsional pada sarana angkutan penumpang. Pemeriksaan dilakukan terhadap total target 3.687 unit sarana terdiri dari 292 lokomotif, 1.876 kereta yang ditarik lokomotif, 86 kereta rel diesel, dan 1.433 kereta rel listrik. Pelaksanaan dilakukan pada 02 Februari – 06 Maret 2026 di seluruh wilayah operasi operator perkeretaapian melibatkan personil Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian.

Pada IKK Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck* terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian serta *Rampcheck* Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara.

A. Analisis Capaian Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

- Realisasi Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck pada triwulan III adalah sebesar 97,79%.

- Realisasi capaian kinerja Triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 103,37% terhadap target Triwulan III dan 103,37% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil Rampcheck} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang Telah Ditindaklanjuti Perbaikan/Pemenuhan sesuai Hasil Rampcheck pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Tidak Baik/Temuan Major/Butuh Perbaikan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

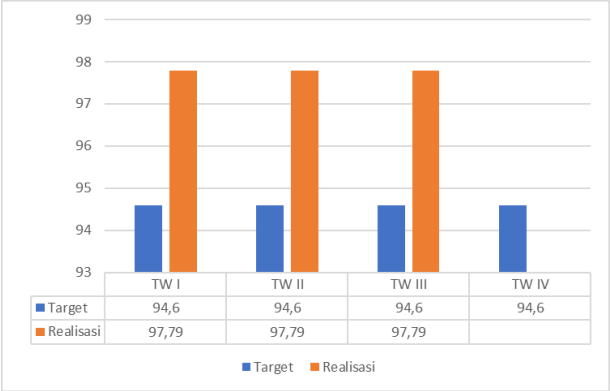
Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{pmatrix} Presentase\ Sarana\ Perkeretaapian \\ yang\ Telah\ Ditindaklanjuti \\ Sesuai\ Hasil\ Rampcheck \end{pmatrix} = \frac{1021}{1044} \times 100\% = 97{,}79\%$$

Secara jelas dapat capaian Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck* tiap triwulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Capaian Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck*

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK 6 SK3	Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	97,79	97,79	97,79		103,37	103,37	103,37		103,37



Gambar 7 Grafik Target dan Realisasi Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck*

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) presentase sarana yang dilakukan pelaksanaan rampcheck, Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II memiliki target presentase 94,6% dalam 1 tahun yang terbagi dalam 2 waktu pelaksanaan yaitu pada saat angkutan lebaran dan angkutan natal dan tahun baru . Pada Triwulan III tahun 2026 telah dilakukan kegiatan rampcheck angkutan lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%.

Hasil rampcheck menunjukkan bahwa sebanyak 3.679 unit sarana berhasil diperiksa atau 99,78% dari target sarana 3.687 unit sarana. Rincian jenis sarana meliputi 291 unit lokomotif, 1.870 unit kereta yang ditarik lokomotif, 86 unit kereta rel diesel, dan 1.432 unit kereta rel listrik. Adapun sarana yang menjadi target rampcheck difokuskan pada sarana angkutan penumpang, tidak termasuk kereta bagasi, gerbong, sarana yang sedang dalam perawatan dan lokomotif angkutan barang. Seluruh sarana yang diperiksa dinyatakan siap operasi atau laik, namun ditemukan beberapa ketidaksesuaian teknis yang perlu ditangani lebih lanjut. Temuan utama didominasi oleh komponen keselamatan kritis, yaitu rem blok pada 354 sarana, stop blok pada 270 sarana, washer pada 81 sarana dan temperatur *bearing* pada 68 sarana. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian pada *end cap bearing*, APAR, alat komunikasi darurat, pemasir, lampu utama dan semboyan, *locking plate*. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding periode sebelumnya, terutama pada rem blok yang retak dan stop blok. Secara lebih

spesifik, temuan per operator menunjukkan variasi permasalahan teknis seperti pada PT KAI yang mendominasi temuan *washer* tidak berfungsi, rem blok retak, serta APAR tidak standar. Pada PT KCI (KRL Jabodetabek), temuan terbesar adalah stiker *bearing* tidak terpasang pada 40 sarana dan stop blok pada 181 sarana. Sementara itu, LRT Jabodebek dan LRT Sumsel mencatat temuan dominan berupa kerusakan dan tidak berfungsinya alat komunikasi darurat pada 2 sarana, jendela darurat pada 2 sarana. Tindak lanjut teknis direkomendasikan melalui penggantian rem blok, perbaikan alat komunikasi darurat, penanganan *washer*, dan monitoring temperatur *bearing* secara berkala.

Berdasarkan hasil tersebut, rampcheck sarana perkeretaapian pada Angkutan Lebaran tahun 2026 secara umum menunjukkan tingkat kesiapan yang sangat baik, namun komponen keselamatan kritis seperti rem blok, temperatur *bearing*, dan alat komunikasi darurat tetap memerlukan perhatian strategis dan penanganan berkelanjutan guna mendukung pelayanan kereta api yang selamat, aman, dan andal.

Perencanaan dini dan penjadwalan berbasis risiko mempercepat penyelesaian rampcheck pada koridor bervolume tinggi, dan koordinasi serta tindak lanjut antara operator dan tim *rampcheck* memastikan seluruh temuan ditindaklanjuti tepat waktu.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan *rampcheck* didukung oleh perencanaan kegiatan yang dilakukan secara dini, penerapan penjadwalan berbasis risiko, serta koordinasi yang baik antara tim pelaksana dan operator sarana. Selain itu, tindak lanjut yang dilakukan secara tepat waktu terhadap hasil temuan pemeriksaan turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat potensi kendala berupa keterbatasan waktu pemeriksaan akibat padatnya jadwal operasional serta keterlambatan pemenuhan dokumen dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan

Crosscutting

Adapun kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian yang bersifat Crosscutting yang terdapat keterlibatan pihak eksternal di luar Direktorat Sarana Perkeretaapian, semisal dengan Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola

Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, maupun dengan Operator yang terkait dengan IKK presentase sarana yang dilakukan pelaksanaan rampcheck adalah :

1. Melakukan kegiatan *rampcheck* bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap sarana yang berada di Depo yang terdapat di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian
2. Operator Perkeretaapian yaitu PT.KAI, PT.KCI, MRT, LRT, Railink, wajib menindaklanjuti hasil rampcheck dengan perbaikan teknis dan pelaporan hasil koreksi.

Pelaksanaan *rampcheck* meliputi aspek keselamatan transportasi, kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi antarunit dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan pengguna jasa, mendukung keandalan layanan angkutan massal nasional, serta memperkuat sinergi antara regulator dan operator dalam rangka penerapan standar kelaikan sarana.

Analisis Risiko dan Realisasi Penanganan

Risiko utama dalam pelaksanaan *rampcheck* meliputi keterbatasan waktu pemeriksaan akibat padatnya jadwal operasional, potensi ketidaklengkapan dokumen teknis sarana, serta ketidakpatuhan sebagian badan usaha dalam memenuhi rekomendasi hasil *rampcheck*. Realisasi penanganan risiko dilakukan melalui penjadwalan pemeriksaan, penguatan koordinasi dengan operator, serta pemberian rekomendasi perbaikan yang bersifat segera dan wajib dipenuhi sebelum sarana dioperasikan. Upaya tersebut efektif meminimalkan potensi gangguan keselamatan dan memastikan seluruh sarana yang beroperasi pada masa angkutan puncak berada dalam kondisi laik dan aman.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui penguatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan berbasis risiko, peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan operator sarana, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil *rampcheck*, serta peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan guna memastikan

pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan keselamatan serta kelaikan sarana perkeretaapian

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK ini diantaranya

a) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

Pada IKK presentase sarana yang dilakukan pelaksanaan rampcheck telah memenuhi target. Meskipun demikian harus tetap dilakukan evaluasi terhadap hasil *rampcheck* yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik. Selain itu juga dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap kondisi sarana.

b) **Penyesuaian Anggaran dan Aktivitas**

Pada IKK presentase sarana yang dilakukan pelaksanaan rampcheck di Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan rampcheck kelaikan sarana guna memastikan Keselamatan Dan Kelancaran Operasional Sarana Perkeretaapian Bulan Februari-Maret Tahun 2026.

c) **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 penempatan pegawai guna mendukung IKK Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck* antara lain :

a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya
b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda
c. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahi Pertama

II.2.7 Sasaran Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dengan Presentase Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti

Kegiatan pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian merupakan kegiatan rutin pada Subdit Pengawasan dan Pengendalian Sarana Tahun 2026 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan usaha penyelenggara sarana dalam mengimplementasikan regulasi di bidang sarana perkeretaapian terkait dengan sistem dan prosedur perawatan sarana perkeretapian dan standar tempat dan peralatan perawatan sarana perkeretaapian

A. Analisis Capaian Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti

- Realisasi Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti pada triwulan III adalah sebesar 100%.
- Realisasi capaian kinerja Triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 100% terhadap target Triwulan III dan 100% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pengawasan Perawatan dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian} = \text{Presentase Pengawasan Perawatan Sarana} + \text{Presentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana}$$

$$\text{Presentase Pengawasan Perawatan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Perawatan sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai Sispro}}{\text{Jumlah Rekomendasi perawatan sarana perkeretaapian yg dilakukan pengawasan}} \times 50\%$$

$$\text{Presentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Tempat Perawatan sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai PM 18 tahun 2019}}{\text{Jumlah Rekomenasi tempat perawatan sarana perkeretaapian yang dilakukan pengawasan}} \times 50\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

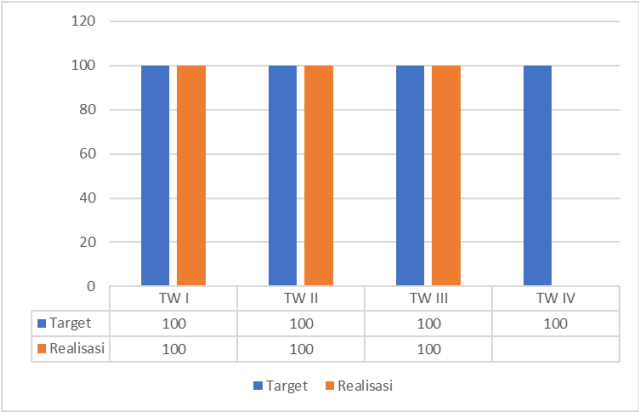
$$\begin{pmatrix} Presentase\ Pengawasan \\ Perawatan\ Sarana\ dan\ Tempat\ Perawatan\ Sarana \\ Perkeretaapian\ yang\ ditindaklanjuti \end{pmatrix} = 50\% + 50\% = 100\%$$

Secara jelas dapat capaian Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti tiap triwulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Capaian Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

IKK 7 SK3	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		100



Gambar 8 Grafik Target dan Realisasi Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti, Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana memiliki 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Persentase Pengawasan Perawatan Sarana

Telah dilaksanakan monitoring pendampingan *Maintenance Cycle Extension* (MCE) perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan dengan persentase 50%.

$$\frac{Jumlah\ hasil\ temuan\ yang\ telah\ ditindaklanjuti\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ hasil\ temuan\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan\ yang\ tidak\ sesuai\ Sispro}\ x\ 50\%$$

b. Persentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana

Telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY

Manggarai dengan tidak tersedianya alat Load Bogie Test. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan Load Bogie Test tahun 2026 dengan persentase 50%

$$\frac{Jumlah\ hasil\ temuan\ yang\ telah\ ditindaklanjuti\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ tempat\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ hasil\ temuan\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan\ yang\ tidak\ sesuai\ PM\ 18\ Tahun\ 2019} x\ 50\%$$

$$\frac{1}{1} x\ 50\% = 50\%$$

Sehingga total Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam pelaksanaan pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian terdapat rekomendasi kepada badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal ini PT KAI (Persero) agar memastikan pengoperasian Lokomotif, sesuai dengan kemampuan optimal dari Lokomotif tersebut sesuai dengan instruksi manual/ manual instruction (MI) yang dikeluarkan oleh pabrikan agar usia pakai suku cadang dapat bertahan lebih lama dan operasi dapat berjalan secara efisien.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK ini diantaranya

a) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

Pada IKK Persentase Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti telah memenuhi target. Meskipun demikian harus tetap dilakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik. Perlunya Peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan agar dapat mengikuti dan menghadapi tantangan teknologi perkeretaapian yang semakin berkembang serta Menjaga harmoni dan koordinasi yang baik di internal unit kerja Direktorat Sarana dan dengan mitra kerja di luar (Operator dan Manufaktur Sarana).

b) **Penyesuaian Anggaran dan Aktivitas**

Pada IKK Persentase Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan monitoring pemeriksaan harian/*daily check* di beberapa depo.

c) **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 penempatan pegawai guna mendukung IKK Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti antara lain :

a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya
b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda
c. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahi Pertama

II.2.8 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

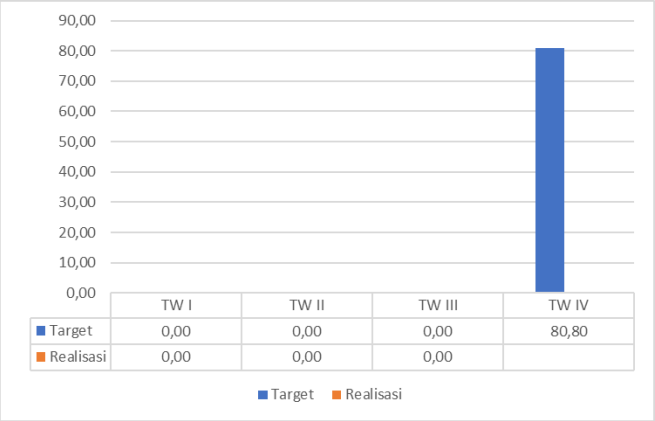
Pada periode triwulan III Tahun 2026 masih dilaksanakan proses penilaian evaluasi AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian oleh tim evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

A. Analisis Capaian Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

- Belum ada capaian nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan III
- Capaian kinerja triwulan III pada IKK ini terhadap target Triwulan III belum tercapai serta capaian kinerja triwulan III pada IKK ini terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 juga belum tercapai. Kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan ke IV.

Tabel 19 Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK8 SK4	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,80	0,00	0,00	0,00	80,80	-	-	-		-	-	-		-



Gambar 9 Grafik Target dan Realisasi Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Sudah tersedianya dokumen :

1. SK Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang.
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian
4. Kesesuaian Anggaran dan Kegiatan yang terdapat pada DIPA dan POK (saat ini sudah sampai revisi ke-12)
5. Laporan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Bulan Januari s.d September
6. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
7. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
8. Sudah dilakukannya Penilaian Mandiri meliputi Pengisian Kertas kerja dan data dukung pada aplikasi SILAKI
9. Hasil Sementara Penilaian Mandiri Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 (Penilaian internal 83, Evaluator SAKIP Tk Es 1 : 81,05, Penilaian final hasil screening Setditjen:81,50)

   Pada periode triwulan III Tahun 2026 sudah dilaksanakan proses penilaian evaluasi AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian oleh tim evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan memperhatikan *croscutting* dengan bidang lain, dalam hal ini Direktorat Sarana Perkeretaapian berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan

Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai evaluator penilaian mandiri AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Risiko yang muncul dari IKK Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah kurang lengkapnya informasi pada data dukung yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja pada dokumen SAKIP.

Penanganan yang saat ini sudah dilakukan adalah melakukan rapat pembahasan penyusunan dokumen pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Subdirektorat dan Satker PPSP).

C. Upaya Peningkatan Kinerja

a. Melakukan Monitoring Capaian Kinerja pada periode Triwulan III
b. Melakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2026 terkait ketersediaan data

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK ini diantaranya:

1) Penyesuaian Strategi/Kebijakan

Untuk dapat meningkatkan nilai AKIP di Direktorat Sarana Perkeretaapian maka perlu berpedoman pada KM 74 Tahun 2024 Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenhub.

2) Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran

Tanggungjawab dari pelaksanaan SAKIP di Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian, sehingga perlunya penyusunan laporan yang sesuai dengan format guna mendukung capaian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.

3) Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai

Telah ditugaskan pegawai dengan jabatan pranata komputer ahli pertama dan statistisi ahli pertama serta pegawai yang tercantum dalam SK SAKIP

Tahun 2026 guna mendukung IKK Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian.

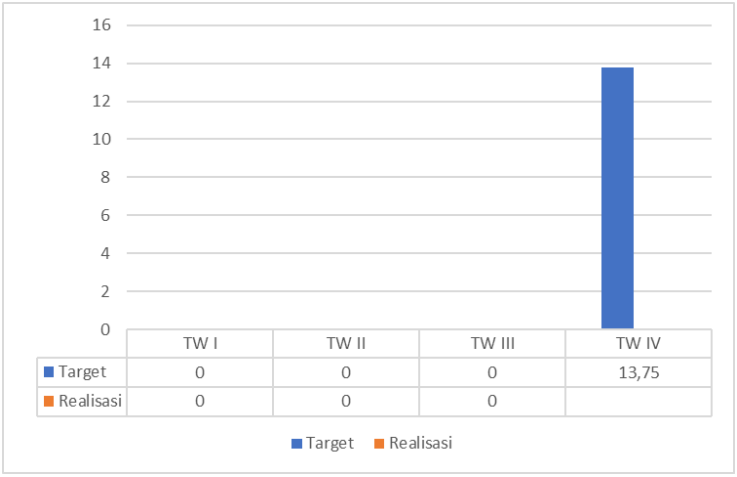
II.2.9 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

A. Analisis Capaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

- Belum ada capaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan III
- Capaian kinerja triwulan III pada IKK ini terhadap target Triwulan III belum tercapai serta capaian kinerja triwulan III pada IKK ini terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 juga belum tercapai. Kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan ke IV.

Tabel 20 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK9SK4	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	-	-	-		-	-	-		-



Gambar 10 Grafik Target dan Realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Sudah tersedianya dokumen :

1) Sudah Sudah tersusunnya SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026
2) Sudah tersusunnya SK Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026
3) Sudah tersusunnya SK UPR dan UMR Tahun 2026, Piagam MR Tahun 2026, Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 (Penetapan Konteks, Profil Risiko, Rencana Penanganan Risiko) serta Penetapan Selera Risiko
4) Sudah tersusunnya Laporan triwulan I Manajemen Risiko
5) Sudah tersusunnya Laporan triwulan II Manajemen Risiko
6) Sudah dilakukan penilaian mandiri Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil 20 (internal) dan **Penilaian Mandiri UMR Eselon I sebesar 14**
7) Sudah dilakukan pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP Tahun 2026 dan menunggu hasil penilaian PM SPIP

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan pengisian Pemantauan Daftar Risiko pada triwulan II pada aplikasi simarko serta melakukan pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK ini antara lain:

1) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

   Penerapan manajemen risiko di Direktorat Sarana Perkeretaapian baik itu penilaian risiko maupun pemantauan risiko agar selalu berpedoman dengan Kepmenhub Nomor KM.69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2) **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai**

   Telah ditugaskan pegawai guna mendukung IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian.

II.2.10 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

IKK ini memiliki kegiatan yang harus diselesaikan yaitu :

a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
c) Honor Operasional Satuan Kerja
d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
e) Kegiatan Pendukung Tusi Direktorat Sarana Perkeretaapian
f) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
g) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
h) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
i) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
j) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
k) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)

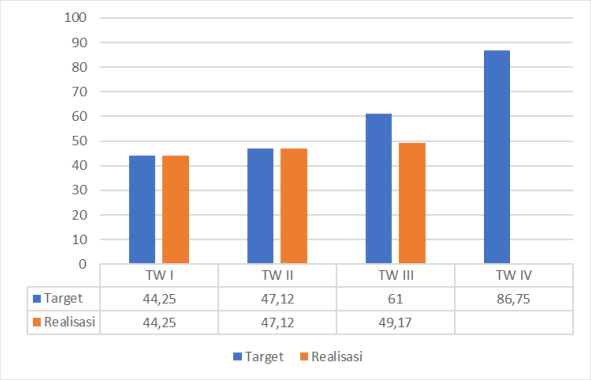
l) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II
m) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
n) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
o) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
p) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
q) Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis
r) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
s) Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)
t) Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)
u) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi
v) Langganan software multimedia
w) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
x) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
y) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
z) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
aa) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
bb) Studi Kelayakan Pengadaan Sarana Milik Negara di Wilayah Sumatera dan Sulawesi
cc) Belanja Sewa Kendaraan Roda 4
dd) Kegiatan Pendukung Sertifikasi Sarana Perkeretaapian

A. Analisis Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

- Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan II adalah sebesar 49,17%
- Capaian kinerja Triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 80,61% terhadap target Triwulan III dan 56,68% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tabel 21 Persentase Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK10 SK4	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	86,75	44,25	47,12	61	86,75	44,25	47,12	49,17		100	100	80,61		56,68



Gambar 11 Grafik Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian pada bulan September 2026 sebesar 49,17 yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Untuk realisasi anggaran sampai bulan September 2026 sejumlah Rp. 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran 2026 Rp. 68.090.836.000, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 Revisi ke-12 Nomor: SP DIPA-022.08.1.467478/2026.

Pada indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu dengan rincian nilai per variabel :



Gambar 12 Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan Gambar 12, menunjukkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 49,17 dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Dilakukan analisis perbandingan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian . Pada bulan September tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 42,59% sedangkan Direktorat Sarana Perkeretaapian mencapai 47,12%. Hal demikian dapat dikatakan bahwa Nilai Kualitas Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian termasuk kategori sangat kurang namun jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian cukup tinggi dibanding rata-rata unit kerja lainnya.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08.445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	3,33	91,50	47,42
2	022.08.467366	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	9,23	100,00	54,62
3	022.08.467306	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	4,38	80,01	42,20
4	022.08.467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	6,61	82,11	44,36
5	022.08.467311	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	9,37	72,44	40,91
6	022.08.467317	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	40,62	77,54	59,08
7	022.08.467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	9,05	81,04	45,05
8	022.08.467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	11,95	82,51	47,23
9	022.08.467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	8,93	81,86	45,40
10	022.08.467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	20,50	92,04	56,27
11	022.08.467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	12,12	98,64	55,38
12	022.08.467462	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	1,36	97,26	49,31
13	022.08.467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	10,36	87,98	49,17
14	022.08.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	15,63	76,85	46,24
15	022.08.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,45	87,58	44,02
16	022.08.467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	1,43	74,13	37,78

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya dalam meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya yaitu mengoptimalkan penyerapan anggaran di Direktorat Sarana

Perkeretaapian dan Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang tertera.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian, diantaranya:

1) Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran

Untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap anggaran di tahun 2026 serta optimalisasi penggunaan anggaran. Disamping itu telah dilakukan revisi DIPA Direktorat Sarana Perkeretaapian, hingga triwulan III Tahun 2026 telah dilakukan revisi ke-12 DIPA.

2) Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai

Telah ditugaskan 1 pegawai untuk melakukan pengisian dan update SMART serta melakukan perhitungan Nilai Kualitas Anggaran (NKA) secara berkala setiap bulan.

II.2.11 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian

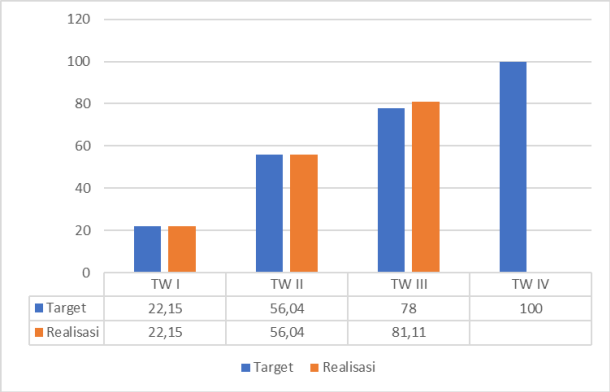
A. Analisis Capaian Kinerja Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian pada triwulan III adalah sebesar 81,11%.

b. Capaian kinerja triwulan III pada IKK ini adalah sebesar 103,99% terhadap target Triwulan III dan 81,11% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tabel 22 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK 11 SK4	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	%	100	22,15	56,04	78	100	22,15	56,04	81,11		100	100	103,99		81,11



Gambar 13 Grafik Target dan Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Capaian Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar Rp 1.216.645.000 dari target sebesar Rp 1.500.000.000 dengan persentase sebesar 81,11% yang terdiri dari pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di bidang perhubungan.

Data PNBP perbulan adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Perolehan tiap bulan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026

No	Bulan	Perolehan PNBP
1	Januari	Rp 48.475.000
2	Februari	Rp 125.975.000
3	Maret	Rp 157.800.000
4	April	Rp 279.370.000
5	Mei	Rp 123.075.000
6	Juni	Rp 105.925.000
7	Juli	Rp 116.900.000
8	Agustus	Rp 115.000.000
9	September	Rp 144.125.000

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

UNIT KERJA	TARGET TPNBP (RP)	REALISASI SPAN (RP)	%
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	2.400.000.000	950.850.000	39,62%
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	33.548.051.000	18.020.141.431	53,71%
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	1.523.000.000	5.769.724.709	378,84%
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	8.000.000.000	61.924.210.795	774,05%
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	0	8.806.730.474	100,00%
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	0	17.080.333.344	100,00%
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0	6.376.135.087	100,00%
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	3.182.000.000	3.516.568.409	110,51%
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	0	26.802.573.034	100,00%
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	112.971.395.000	115.383.459.058	102,14%
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	64.106.540.000	43.060.199.106	67,17%
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	1.088.853.604.000	1.523.860.794.266	139,95%
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	1.430.349.000	1.216.645.000	85,06%
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	2.264.706.000	2.254.535.140	99,55%
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	19.940.000.000	2.423.237.862	12,15%
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	50.000.000	50.586.050.565	101172,10%
JUMLAH	**1.338.269.645.000**	**1.888.032.188.280**	**141,08%**

Sumber : Laporan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dilakukan analisis perbandingan capaian realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian bulan September 2026 mencapai Rp 1.216.645.000,- dari target sebesar Rp 1.500.000.000,- sehingga capaiannya adalah 81,11%. Berdasarkan hal tersebut, kinerja realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian lebih tinggi dibandingkan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan pemantauan terhadap Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK ini diantaranya:

1) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

   Melakukan penagihan pembayaran PNBP secara berkala sehingga capaian perolehan PNBP tetap sesuai target dan bisa meningkatkan perolehan PNBP

2) **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran**

   Pada Triwulan III 2026 perolehan PNBP Direkktorat Sarana Perkeretaapian sebesar Rp 1.216.645.000 . PNBP tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan diantaranya:

   - Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I
   - Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II

- Sarana Milik Negara yang di sewa pihak swasta/ masyarakat umum
- Penomoran sarana perkeretaapian
- Persetujuan spesifikasi teknis perkeretaapian

3) Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai

Telah ditugaskan 1 pegawai yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PNBP.

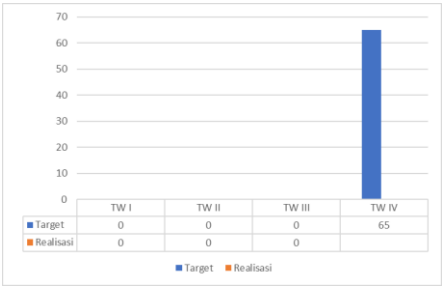
II.2.12 Sasaran Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

A. Analisis Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

- Belum ada capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan III.
- Capaian kinerja triwulan III pada IKK ini terhadap target Triwulan III belum tercapai serta capaian kinerja triwulan III pada IKK ini terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 juga belum tercapai. Kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan ke IV.

Tabel 24 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
IKK 12 SK4	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65	0,00	0,00	0,00	65	-	-	-		-	-	-		-



Gambar 14 Grafik Target dan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Pada bulan Januari 2026 telah dilakukan Penataan Arsip Inaktif dan Penyusunan Berita Acara Arsip Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2023 di Soreang, Bandung. Sudah dilakukan audit arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian oleh Biro pada bulan Mei 2026 dan sudah dilakukan pembahasan nilai sementara pengawasan kearsipan internal Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 30 September 2026 dengan nilai 76,49 atau kategori “BB” Sangat Baik.

Crosscutting

Adapun kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian yang bersifat Crosscutting yang terdapat keterlibatan pihak eksternal di luar Direktorat Sarana Perkeretaapian diantaranya :

- Dilakukan klarifikasi dan verifikasi pengawasan kearsipan internal dengan Biro Umum
- Melaksanakan audit kearsipan internal dengan menggunakan metode pengisian formulir, wawancara dan pengamatan langsung dengan hasil sementara 76,49

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan penataan arsip aktif dan inaktif serta memanfaatkan aplikasi SRIKANDI untuk persuratan serta melakukan klasifikasi arsip untuk JRA.

Diusulkan juga beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja IKK ini diantaranya:

- **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**

  Untuk meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dapat dilakukan dengan melaksanakan audit kearsipan internal dan pembinaan terhadap pengelola arsip di setiap unit, mengikuti pelatihan dan sertifikasi dasar pengelolaan arsip bagi pegawai administrasi dan pengelola data dan memperkuat sinergi antara Subbag Tata Usaha dan Subdirektorat teknis dalam pengelolaan arsip kegiatan
- **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai**

Untuk mendukung IKK ini telah ditugaskan pegawai dengan jabatan arsiparis

II.3 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA TRIWULAN III

Realisasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 Revisi ke-12 Nomor: SP DIPA- 022.08.1.467478/2026.

Realisasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Jenis Belanja/ Pembiayaan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2	Belanja Barang	67.796.682.000	30.676.291.949	45,05	37.120.390.051	55,19
3	Belanja Modal	294.154.000	0	0	294.154.000	100

Dengan rincian realisasi anggaran per indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 26 Realisasi Anggaran Pada Masing-Masing Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
				Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	**185.805.000**	**188.282.000**	**161.923.931**	**86,00%**	**26.358.069**	**14,00%**
		1	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	185.805.000	188.282.000	161.923.931	86,00%	26.358.069	14,00%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian						
		1	Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)	800.000.000	800.000.000	194.305.500	24,29%	605.694.500	75,71%
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	**1.138.865.000**	**1.088.065.000**	**825.454.833**	**75,86%**	**262.610.167**	**24,14%**
		1	Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	150.448.000	150.448.000	102.362.500	68,04%	48.085.500	31,96%
		2	Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II	345.200.000	294.400.000	189.900.000	64,50%	104.500.000	35,50%
		3	Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	310.689.000	310.689.000	294.217.819	94,70%	16.471.181	5,30%
		4	Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	332.528.000	332.528.000	238.974.514	71,87%	93.553.486	28,13%
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	**20.113.564.000**	**20.113.564.000**	**8.907.920.659**	**44,29%**	**11.205.643.341**	**55,71%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
				Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
		1	Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	1.145.761.000	1.145.761.000	568.028.625	49,58%	577.732.375	50,42%
		2	Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	1.129.016.000	1.179.016.000	158.836.838	13,47%	1.020.179.162	86,53%
		3	Studi Standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun	1.044.705.000	1.044.705.000	505.777.050	48,41%	538.927.950	51,59%
		4	Studi penyusunan konsep SNI yang bersumber dari JIS E4041 : 2019 dan IEC 61133-2016 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction An	1.327.511.000	1.277.511.000	600.131.281	46,98%	677.379.719	53,02%
		5	Studi Standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian	1.500.000.000	1.500.000.000	722.951.324	48,20%	777.048.676	51,80%
		6	Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel	1.000.000.000	1.000.000.000	495.207.076	49,52%	504.792.924	50,48%
		7	Kajian alternatif skema pengadaan sarana perkeretaapian	-	-	-	-	-	-
		8	Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem	1.457.775.000	1.407.775.000	678.168.375	48,17%	729.606.625	51,83%
		9	Studi Standar Spesifikasi Teknis Kereta Levitasi Magnet	-	-	-	-	-	-
		10	Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	1.200.000.000	1.200.000.000	165.908.925	13,83%	1.034.091.075	86,17%
		11	Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	1.108.086.000	1.108.086.000	554.042.625	50,00%	554.043.375	50,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
					Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
			12	Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	1.160.283.000	1.160.283.000	566.402.475	48,82%	593.880.525	51,18%
			13	Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi	1.014.000.000	1.014.000.000	134.270.595	13,24%	879.729.405	86,76%
			14	Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur	1.013.631.000	1.013.631.000	847.595.650	83,62%	166.035.350	16,38%
			15	Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	1.047.673.000	1.047.673.000	494.099.295	47,16%	553.573.705	52,84%
			16	Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	917.193.000	917.193.000	458.596.500	50,00%	458.596.500	50,00%
			17	Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	1.950.057.000	1.950.057.000	972.820.650	49,89%	977.236.350	50,11%
			18	Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA Railroad	950.049.000	1.000.049.000	475.024.500	47,50%	525.024.500	52,50%
			19	Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.047.930.000	1.047.930.000	510.058.875	48,67%	537.871.125	51,33%
			20	Studi Kapasitas Produksi Manufaktur Sarana Perkeretaapian PT INKA	99.894.000	-	-	-	-	-
			21	Kajian Penyusunan Kriteria dan Tata Cara Penilaian Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	0	99.894.000	0	0,00%	99.894.000	100,00%
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara		**4.046.783.000**	**4.046.783.000**	**2.225.730.374**	**55,00%**	**1.821.052.626**	**45,00%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
					Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
			1	pengoperasian sarana milik negara	4.046.783.000	4.046.783.000	2.225.730.374	55,00%	1.821.052.626	45,00%
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck		**341.387.000**	**341.387.000**	**291.529.999**	**85,40%**	**49.857.001**	**14,60%**
			1	pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	341.387.000	341.387.000	291.529.999	85,40%	49.857.001	14,60%
			2	pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang	-	**-**	**-**	-	-	-
		IKK 7	Persentase pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian		**120.065.000**	**161.196.000**	**112.808.300**	**69,98%**	**48.387.700**	**30,02%**
			1	Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	120.065.000	161.196.000	112.808.300	69,98%	48.387.700	30,02%
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian		**52.477.000**	**52.477.000**	**43.010.224**	**81,96%**	**9.466.776**	**18,04%**
			1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	7.849.000	7.849.000	3.980.000	50,71%	3.869.000	49,29%
			2	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	44.628.000	44.628.000	39.030.224	87,46%	5.597.776	12,54%
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana		**24.207.000**	**24.207.000**	**13.170.000**	**54,41%**	**11.037.000**	**45,59%**
			Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian		24.207.000	24.207.000	13.170.000	54,41%	11.037.000	45,59%
		IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian		**41.195.218.000**	**41.202.410.000**	**17.844.643.211**	**43,31%**	**23.357.766.789**	**56,69%**
			1	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	160.707.000	169.106.000	137.288.900	81,19%	31.817.100	18,81%
			2	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	72.341.000	72.341.000	72.265.000	99,89%	76.000	0,11%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
				Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
		3	Honor Operasional Satuan Kerja	1.004.044.000	1.004.044.000	423.333.871	42,16%	580.710.129	57,84%
		4	Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	126.344.000	117.945.000	40.720.000	34,52%	77.225.000	65,48%
		5	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	693.580.000	693.579.000	341.957.958	49,30%	351.621.042	50,70%
		6	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	1.269.312.000	1.269.313.000	1.162.466.083	91,58%	106.846.917	8,42%
		7	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	238.845.000	238.845.000	231.505.847	96,93%	7.339.153	3,07%
		8	Kegiatan pengadaan 1 paket peralatan inspeksi kelaikan sarana wilayah I	375.000.000	375.000.000	374.470.651	99,86%	529.349	0,14%
		9	Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	45.924.000	45.924.000	9.870.100	21,49%	36.053.900	78,51%
		10	Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	493.191.000	493.191.000	436.019.324	88,41%	57.171.676	11,59%
		11	Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	341.455.000	341.455.000	296.391.738	86,80%	45.063.262	13,20%
		12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	213.369.000	213.369.000	115.437.285	54,10%	97.931.715	45,90%
		13	Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	30.255.000	30.255.000	20.010.000	66,14%	10.245.000	33,86%
		14	Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II	41.748.000	41.748.000	20.752.275	49,71%	20.995.725	50,29%
		15	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I	310.791.000	310.791.000	291.022.710	93,64%	19.768.290	6,36%
		16	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	202.205.000	286.659.000	96.543.872	33,68%	190.115.128	66,32%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
				Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
		17	Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian	150.639.000	150.639.000	150.638.800	100,00%	200	0,00%
		18	Bimbingan teknis tata cara pelaksanaan inspeksi dan supervisi sarana perkeretaapian	24.567.000	-	-	-	-	-
		19	Monitoring dan rekonsiliasi data identitas sarana perkeretaapian	73.829.000	73.829.000	28.237.993	38,25%	45.591.007	61,75%
		20	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I	14.200.000	14.200.000	14.200.000	100,00%	-	0,00%
		21	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	9.087.000	-	-	-	-	-
		22	Bimbingan teknis penjaminan kualitas proses manufaktur sarana perkeretaapian	258.125.000	216.994.000	216.993.600	100,00%	400	0,00%
		23	Bimbingan Teknis pengembangan teknologi sarana perkeretaapian	165.232.000	162.755.000	162.754.266	100,00%	734	0,00%
		24	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	196.457.000	196.457.000	195.349.900	99,44%	1.107.100	0,56%
		25	Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis	1.234.364.000	1.234.364.000	0	0,00%	1.234.364.000	100,00%
		26	Penyusunan rancangan peraturan menteri bidang kelaikan sarana perkeretaapian	26.723.000	26.723.000	17.856.965	66,82%	8.866.035	33,18%
		27	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang sarana perkeretaapian	81.252.000	81.252.000	50.914.330	62,66%	30.337.670	37,34%
		28	Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)	40.053.000	43.967.000	18.170.000	41,33%	25.797.000	58,67%
		29	Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)	31.666.000	27.752.000	23.194.161	83,58%	4.557.839	16,42%
		30	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Dit. Sarana	17.005.000	17.005.000	17.000.000	99,97%	5.000	0,03%
		31	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP	77.149.000	77.149.000	77.120.000	99,96%	29.000	0,04%
		32	Langganan software multimedia	20.000.000	20.000.000	4.551.880	22,76%	15.448.120	77,24%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Efektif	
					Pagu PK	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
			33	Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian	2.290.000.000	2.139.543.000	427.908.547	20,00%	1.711.634.453	80,00%
			34	Biaya Penggantian Suku Cadang Bearing Sarana Milik Negara	0	1.504.160.000	0	0,00%	1.504.160.000	100,00%
			35	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	3.450.000.000	3.512.677.000	683.448.338	19,46%	2.829.228.662	80,54%
			36	Pemelliharaan Lori	1.521.000.000	1.338.322.000	626.723.957	46,83%	711.598.043	53,17%
			37	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	16.948.342.000	16.399.885.000	7.215.949.242	44,00%	9.183.935.758	56,00%
			38	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, dan Kereta Kedinasan Milik Negara	6000000000	5280072000	2.472.071.618	46,82%	2.808.000.382	53,18%
			39	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	2.946.417.000	2.857.300.000	1.371.504.000	48,00%	1.485.796.000	52,00%
			40	Pelaksanaan Uji Berkara Sarana KRL KFW	0	123.800.000	0	0,00%	123.800.000	100,00%
		IKK 11		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian						
		IKK 12		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	**72465000**	**72465000**	**55794918**	**77,00%**	**16.670.082**	**23,00%**
			1	Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	72465000	72465000	55794918	77,00%	16.670.082	23,00%

II.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN DAN SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tahun Anggaran 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Renstra 2025-2029, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Direktorat Sarana Perkeretaapian melakukan penghitungan dan penyusunan secara akurat untuk mencegah kegagalan pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih ditemukan kegagalan yang mana dapat diuraikan:

II.4.1. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Sumber Daya Manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa dalam penyederhanaan birokrasi 2 level terdapat beberapa jabatan administrasi yang telah dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Menurut Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Sarana Perkeretaapian hanya didukung oleh 65 orang ASN (PNS) yang berkedudukan sebagai jabatan fungsional dari 104 orang ASN dan 7 orang honorer.

Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi Direktorat Sarana Perkeretaapian melakukan efisiensi sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Analisis Efisiensi SDM dapat dirancang dengan mengukur seberapa optimal SDM yang tersedia mampu menghasilkan output yang sesuai atau melebihi standar kinerja yang ditetapkan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(Efisiensi\ SDM) \quad = \left(\frac{SDM\ Tersedia}{Kebutuhan\ SDM\ sesuai\ ABK} \times \frac{Output\ Aktual}{Target\ Output} \right) x\ 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$(Efisiensi\ SDM) = \left(\frac{111}{104} \times \frac{80}{100}\right) x\ 100\%$$

$$(Efisiensi\ SDM) = 85{,}38\%$$

Nilai Efisiensi SDM Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 85,38%.

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum merata, Direktorat Sarana Perkeretaapian melakukan optimalisasi personil sebagai berikut :

A. Pendistribusian beban kerja sesuai dengan Analisis Beban Kerja yang ada di Direktorat Sarana Perkeretaapian dan disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya;
B. Memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperhatikan komposisi pegawai, tugas dan jabatan yang ada di unit kerja;
C. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri dan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang ada di Direktorat Sarana Perkeretaapian.

II.4.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja tahun 2026.

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai 4 sasaran kegiatan dengan 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan tersebut berhasil terlaksana dengan baik karena pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perubahan alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian mengalami 12 kali perubahan DIPA dan POK hingga bulan September 2026. Pagu Anggaran berdasarkan DIPA Revisi ke-12 Tahun 2026 sebesar Rp 68.090.836.000. Realisasi anggaran yang terserap hingga bulan September 2026 sebanyak Rp 30.676.291.949 dengan persentase 45,05% terhadap Pagu Anggaran Efektif.

Tabel 27 Efisiensi Penggunaan Anggaran

KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	ALOKASI ANGGARAN (AARO)	REALISASI ANGGARAN (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	17	0	48	20.113.564.000	8.907.920.659	9654510720	746.590.061
OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Operasi Sarana Perkeretaapian	14	0	57	4.046.783.000	2.225.730.374	2306666310	80.935.936
	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	30	0	39	33.155.759.000	12.797.605.702	12930746010	133.140.308
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	73	359.392.000	250.273.900	262356160	12.082.260
	Layanan Perkantoran	1	0	74,97	2.966.936.000	1.927.757.912	2224311919	296.554.007
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	66	6.454.680.000	4.228.681.861	4260088800	31.406.939
	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	62	79.568.000	45.344.161	49332160	3.987.999
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	100	94.154.000	94.120.000	94154000	34.000
	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	38	20.000.000	4.551.880	7600000	3.048.120
Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi	1	0	33	800.000.000	194.305.500	264000000	69.694.500
Jumlah					68.090.836.000	30.676.291.949	32053766079	1.377.474.130
Efisiensi RO Satker								2,02

II.4.3. Analisis Atas Atas Perubahan Budaya Kinerja

Pada Tahun 2026 terdapat beberapa budaya kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian antara lain :

No	Informasi Budaya Kinerja (Semula)	Informasi Budaya Kinerja (Menjadi)	Keterangan
1	Melakukan pemantauan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian menggunakan Excel	Melakukan pemantauan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian menggunakan aplikasi Simarko	
2	Penyampaian Nota dinas dan persuratan dengan tandatangan konvensional	Melakukan penyampaian notadinas dan persuratan dengan tanda tangan elektronik pada aplikasi srikandi	

3	Absensi kehadiran Pegawai hadir dikantor dengan aplikasi Skemaraja	Absensi kehadiran Pegawai menggunakan aplikasi Digital Office dan mesin absensi biometric	
4	Tidak adanya penjadwalan kegiatan apel pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian	Dilaksanakan Apel Pegawai di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	

BAB III
PENUTUP

III.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi pencapaian kinerja periode sebelumnya Direktorat Sarana Perkeretaapian melakukan:

Tabel 28 Tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Melakukan evaluasi target Renstra 2025–2029, serta dilakukan evaluasi terhadap hasil temuan di lapangan guna memastikan kesesuaian dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka implementasi rekomendasi hasil monitoring serta penguatan pengawasan berkala guna menjamin keberlanjutan peningkatan mutu sarana perkeretaapian	Sudah berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembahasan usulan. Sudah dilakukan pembahasan terhadap usulan Dokumen Rancang Bangun Peralatan Khusus Pemeliharaan Jalan Rel Jenis Lori Gerinda Rel, Spektek Rencana Pengadaan KRL Bukan Baru
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	a) Meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengedepankan prinsip responsif, transparan, dan inklusif. b) Memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan dan konsultasi masyarakat secara profesional dan terintegrasi. c) Meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik melalui berbagai kanal digital dan media komunikasi yang mudah diakses masyarakat	Melakukan monitoring terhadap hasil survey kepuasan masyarakat setiap bulan Mengintegrasikan penyebaran kuesioner IKM pada setiap kegiatan supervisi, pengujian dan layanan lain di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Presentase Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	a) Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang sebelumnya belum sesuai dengan target. b) Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sarana Perkeretaapian (KAI, Railink, dll.) agar sarana yang diusulkan untuk dilakukan sertifikasi tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi, serta diharapkan dapat memaksimalkan pengujian sarana.	Sudah dilakukan koordinasi langsung bersama operator dan Balai Pengujian Merevisi SOP dalam tahap Validasi dan Verifikasi sertifikasi dengan memperbarui dokumen persyaratan sertifikasi.
Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Upaya peningkatan kinerja dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses administrasi kontrak sehingga diharapkan seluruh kegiatan penyusunan studi dan kajian dapat segera terealisasi sesuai dengan jadwal/timeline yang direncanakan	Dilakukan koordinasi terkait rencana penetapan target penyusunan NSPK di tahun 2026
Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Pengoperasian Sarana Milik Negara dilakukan atas dasar permintaan atau rekomendasi dari unit kerja yang akan menggunakannya sehingga perlu meningkatkan koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara.	Dilaksanakan pembahasan sebelum dilakukan peminjaman sarana milik negara Pengoperasian sarana Milik Negara dilakukan atas dasar permintaan atau rekomendasi dari unit kerja
Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	Melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan dan perawatan sarana serta meminimalkan potensi gangguan keselamatan dan memastikan seluruh sarana yang beroperasi pada masa angkutan puncak berada dalam kondisi laik dan aman.	Mengintegrasikan hasil evaluasi rampcheck dalam penyusunan rencana rampcheck periode berikutnya. Melakukan pembahasan rencana pengembangan aplikasi SISAKA Sistem Monitoring dan Pelaporan Tidak Lanjut Rampcheck Secara Terdokumentasi dan Terintegrasi

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti	Memastikan pengoperasian Lokomotif, sesuai dengan kemampuan optimal dari Lokomotif tersebut sesuai dengan Instruksi manual / manual instruction (MI) yang dikeluarkan oleh pabrikan agar usia pakai suku cadang dapat bertahan lebih lama dan operasi dapat berjalan secara efisien	Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Melakukan Pendataan dan Inventarisasi Daftar Peralatan Perawatan Sarana Milik Negara. Melakukan Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	a) Melakukan monitoring capaian kinerja pada periode Triwulan III 2026. b) Melakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2026 terkait ketersediaan data.	Mengumpulkan data dukung capaian kegiatan dan memperbarui dashboard kinerja pada e-performance dan silaki
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	Melakukan pengisian Pemantauan Daftar Risiko pada Triwulan III pada aplikasi Simarko	Melakukan identifikasi risiko di Direktorat Sarana Perkeretaapian dan melakukan penginputan di aplikasi MR Bean dan Simarko.
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	a) Mengoptimalkan penyerapan anggaran di Direktorat Sarana Perkeretaapian dan melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang tertera. b) Berkoordinasi dengan KPPN mengenai data capaian kinerja pada aplikasi SMART.	Melakukan koordinasi dengan KPPN untuk sinkronisasi data kinerja pada aplikasi SMART.
Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Melakukan pemantauan terhadap perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode	Melakukan rekapitulasi dan pelaporan PNBP per bulan kepada pimpinan.
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Melakukan penataan arsip aktif dan inaktif serta memanfaatkan aplikasi	Melaksanakan penataan arsip inaktif dan penyusunan berita

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Direktorat Sarana Perkeretaapian	SRIKANDI untuk persuratan Direktorat Sarana Perkeretaapian.	acara arsip Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2023 di Bandung pada tanggal 21 s.d. 23 Januari 2026

Link Data Dukung *:* *https://lnk.dephub.go.id/DakungTLRekomendasiTWII*

III.2 KESIMPULAN

a. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan III merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dari bulan Juli s.d. September 2026, berupa penghitungan hasil pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 dan penghitungan hasil pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan terhadap target pada Triwulan III tahun 2026.

b. Direktorat Sarana Perkeretaapian pada Tahun Anggaran 2026 menetapkan 4 sasaran dengan 12 Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja rata-rata Triwulan III adalah sebesar 97,99%. Dimana capaian kinerja pada masing-masing IKK pada Triwulan III dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 29 Kesimpulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan III (%)	Realisasi Triwulan III (%)	Capaian Kinerja Triwulan III (%)
Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	74,72	79,77	106,76
Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25	98,28	103,18
Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	50,52	45,7	90,46

Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	%	37,03	37,03	100
	Persentase Pemenuhan Sarana Milik Negara	%	56,1	52,47	93,53
	Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94,6	97,79	103,37
	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	61	49,17	80,61
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	%	78	81,11	103,99
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-

III.3 REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi dari pencapaian kinerja Triwulan III Direktorat Sarana Perkeretaapian yang dapat dilakukan yaitu :

Tabel 30 Rekomendasi Peningkatan Kinerja Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
1.	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	• Melakukan pembahasan terhadap usulan spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian. • Melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap spesifikasi	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
		teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian. • Melakukan pemberian nomor identitas sarana perkeretaapian. • Melakukan penyesuaian target pada rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track.		
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	a. Pengguna layanan mengajukan pelayanan diluar jam pelayanan sehingga petugas lambat merespon. Memberikan informasi kepada operator sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan pada waktu operasional kantor (08.00-16.00 WIB). Agar petugas dapat bekerja lebih cepat tanggap. b. Approval berjenjang pada proses sertifikasi dinilai lambat. Akan dilakukan Percepatan pelaksanaan approval berjenjang pada aplikasi SISAKA. c. Kesulitan penggunaan layanan dalam mengunggah dokumen pada aplikasi SISAKA (ada batas besaran ukuran dokumen yang menyulitkan pengguna aplikasi SISAKA). Akan ada pengembangan aplikasi untuk menunjang sertifikasi sarana KA.	Triwulan IV Tahun 2026	• Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian • Admin Aplikasi SKM
3.	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	a) Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang sebelumnya belum sesuai dengan target. b) Meningkatkan Koordinasi dengan Operator Sarana Perkeretaapian (KAI, Railink,dll) agar sarana yang diusulkan untuk dilakukan sertifikasi tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi, serta diharapkan dapat memaksimalkan pengujian sarana c) Melaksanakan sinkronisasi data dan evaluasi capaian sertifikasi sarana perkeretaapian tahun 2026 dengan Balai Pengujian Perkeretaapian	Triwulan IV Tahun 2026	• Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I • Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
4	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Upaya peningkatan kinerja dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses seluruh kegiatan penyusunan studi dan kajian dapat segera terealisasi sesuai degan jadwal timeline yang direncanakan serta menyusun pengesahan studi yang telah selesai dilaksanakan.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
5	Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	• Pengoperasian Sarana Milik Negara dilakukan atas dasar permintaan atau rekomendasi dari unit kerja yang akan menggunakannya sehingga perlu meningkatkan koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara • Menyelesaikan Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara • Melakukan Pembahasan rencana Pengoperasian Sarana Milik Negara yang dilaksanakan pada periode TW IV • Menyusun dan menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian Sarana Milik Negara (SMN) kepada unit kerja terkait sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan, meliputi penyiapan lokasi stabling, kesiapan jalur, pengaturan kegiatan langsir, serta kebutuhan operasional lainnya.	Triwulan IV Tahun 2026	Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	• melakukan pembahasan pengawasan terhadap pemeriksaan dan perawatan sarana pada periode nataru serta meminimalkan potensi gangguan keselamatan dan memastikan seluruh sarana yang beroperasi pada masa angkutan puncak berada dalam kondisi laik dan aman. • Membuat time schedule pelaksanaan Rampcheck Nataru sebagai persiapan dalam pelaksanaannya	Triwulan IV Tahun 2026	• Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I • Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
7	Persentase Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti	Melakukan pendataan dan inventarisasi daftar peralatan perawatan sarana milik negara	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	• Melakukan Monitoring Capaian Kinerja dan Melakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2026 terkait ketersediaan data. • Melakukan koordinasi lanjut terkait hasil penilaian mandiri Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan Tim Penilai DJKA. • Melakukan penyesuaian target pada rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	• Melakukan pengisian Pemantauan Daftar Risiko triwulan IV tahun 2026 pada aplikasi simarko • Melakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2027 • Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait hasil penilaian mandiri penyelenggaraan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian tingkat eselon I DJKA	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	• Melakukan Revisi anggaran dan Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan agar dapat optimal • Melakukan revisi halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi pencairan dana per jenis belanja • Melakukan penyesuaian rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja memenuhi kriteria on the right track	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
11	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Melakukan pemantauan terhadap Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode dengan Membuat surat penagihan pembayaran PNBP, Membuat usulan prioritas pengujian terhadap saran yang sudah melakukan pembayaran PNBP	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	• Melakukan Pembahasan Persiapan Verifikasi Data Dukung Pengawasan Kearsipan Internal • Melakukan penyesuaian target pada rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja dan Renaksi Tahun 2026

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BATARA**
Jabatan : Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ALLAN TANDIONO	BATARA
NIP 198801182025211023	NIP 198108102005021001

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	78,08
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25
3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,85
		Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,25
		Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	%	71,01
		Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	%	94,60
		Persentase Hasil Pengawasan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	%	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,80
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	13,75
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,75
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,00

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	**Rp.**	**57.316.106.000**
a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp.	57.316.106.000
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp.	**10.774.730.000**
a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	9.860.576.000
b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	914.154.000
TOTAL	**Rp.**	**68.090.836.000**

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Jakarta, September 2026

Plt. DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

BATARA
NIP 198108102005021001

RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN TEKNIS BIDANG KONEKTIVITAS SARANA PERKERETAAPIAN	PERSEN	78,09	**PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN TEKNIS BIDANG KONEKTIVITAS SARANA PERKERETAAPIAN**	64,045	**64,61**	**65,73**	69,663	**70,22**	**70,79**	72,472	**73,60**	**74,72**	75,843	**76,97**	**78,09**	**185.805.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
			Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa (dokumen) [Persen]	2	1	2	7	1	1	3	2	2	2	2	**2**	185.805.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	28.419.900	2.300.000	7.090.000	68.565.400	24.527.504	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.902.196		
			Jumlah Anggaran (Rp)	-	**28.419.900**	**2.300.000**	**7.090.000**	**68.565.400**	**24.527.504**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**4.902.196**	**185.805.000**	
INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	NILAI	95,25	INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (Laporan) [Nilai]	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran (Rp)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN	PERSEN	59,25	PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	20.113.564.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			1.Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian (17 NSPK) [Dokumen]	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25	**1.145.761.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.408.588**	**0**	**0**	**397.620.038**	**397.620.038**	**180.112.337**		
				37,03	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			2. Kajian Pelaksanaan Standarisasi Dan Sertifikasi Peralatan Perawatan Di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian (17 NSPK) [Dokumen]	0	0	0	0	0	0	160.322.850	0	374.086.650	0	374.086.650	251.786.850	1.160.283.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			3. Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.014.000.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	134.270.595	0	313.298.055	0	313.298.055	253.133.295		
			4. Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.013.631.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	138.544.650	0	323.270.850	0	0	323.270.850	138.544.650	90.000.000		
			5. Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.047.673.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	138.711.150	0	0	323.659.350	0	323.659.350	138.711.150	122.932.000		
			6. Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	917.193.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	137.578.950	0	321.017.550	0	321.017.550	137.578.950		
				37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			7. Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) (17 NSPK) [Dokumen]	0	0	0	0	0	291.846.195	0	0	680.974.455	0	680.974.455	296.261.895	1.950.057.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			8. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur Kereta Api (Railroad) (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	950.049.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	142.507.350	0	0	332.517.150	0	332.517.150	142.507.350	0		
			9. Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana Pada Sarana Otomatis (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.047.930.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	143.402.287	0	0	334.605.338	0	334.605.338	235.317.038		
			10. Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.129.016.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	158.836.838	0	370.619.288	0	370.619.288	228.940.588		
			11. Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.044.704.250	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	142.345.013	0	332.138.363	0	332.138.363	0	238.082.511		
			12. Studi Penyusunan Konsep SNI Yang Bersumber Dari JIS E4041 dan IEC 61133 (17 NSPK) [Dokumen]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.327.511.750	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	168.517.251	0	0	393.206.920	393.206.920	0	372.580.659		
			13. Studi Standarisasi Manufaktur	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25	1.500.000.000	Direktorat Sarana
				0	0	0	0	0	0	0	204.274.688	476.640.938	0	476.640.938	342.443.438		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			Sarana Perkeretaapian (17 NSPK) [Dokumen]														**Perkeretaapian**
			14. Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel (17 NSPK) [Dokumen]	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25	**1.000.000.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.562.123**	0	**346.644.953**	0	**346644952,5**	**148.562.123**	**9.585.850**		
			15. Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem (17 NSPK) [Dokumen]	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25	**1.457.775.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.450.513**	0	**474.717.863**	0	**474.717.863**	**304.888.763**		
			16. Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian (17 NSPK) [Dokumen]	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25	**1.200.000.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**165.908.925**	0	**387120825**	**387120825**	**259.849.425**		
			17. Studi Standar Peralatan, Fasilitas Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal (17 NSPK) [Dokumen]	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25	**1.108.086.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.212.788**	**0**	**0**	**387.829.838**	0	**387.829.838**	**166.213.537**		
			18. Studi Kapasitas Produksi Manufaktur Sarana Perkeretaapian PT INKA	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	**37,03**	59,25	**99.894.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**99.894.000**			
			Jumlah Anggaran (Rp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.763.150**	**1.060.885.657**	**1.288.139.183**	**1.705.143.428**	**4.126.996.893**	**2.836.178.448**	**5.186.750.108**	**3.489.707.134**	**20.113.564.000**	
PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK	PERSEN	71,01	**PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA**	**21,01**	**21,01**	**21,01**	**26,66**	**33,11**	**41,18**	**43,60**	**47,63**	**56,10**	**58,92**	**66,18**	**71,01**	**4.046.783.000**	**Subdirektorat Pengelolaan Sarana**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
NEGARA MENDUKUNG KESELAMATAN			**MENDUKUNG KESELAMATAN**														**Milik Negara**
			Pengoperasian Sarana Milik Negara (124 unit pengoperasian) [unit]	**0**	**0**	**0**	**14**	**16**	**20**	**6**	**10**	**21**	**7**	**18**	**12**	**4.046.783.000**	
			Jumlah Anggaran (Rp)	**0**	**0**	**404.678.250**	**0**	**0**	**0**	**910.526.063**			**910.526.063**	**910.526.063**	**910.526.563**	**4.046.783.000**	
PERSENTASE SARANA PERKERETAAPIAN YANG DILAKUKAN RAMPCHECK	PERSEN	94,6	PERSENTASE SARANA PERKERETAAPIAN YANG DILAKUKAN RAMPCHECK	0	0	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	341.387.000	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Pelaksanaan Rampcheck Angkutan lebaran, Natal dan tahun baru di bidang sarana perkeretaapian (94,60% sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck) [unit]												**94,60**	**341.387.000**	**Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II**
				0	**114.762.179**	**102.071.270**	**50.000.000**	**24.696.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.857.001**		
			Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang (94,60% sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck) [unit]												**94,60**	**0**	**Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			Jumlah Anggaran (Rp)	**0**	**114.762.179**	**102.071.270**	**50.000.000**	**24.696.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.857.001**	**341.387.000**	

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
PERSENTASE PEMENUHAN SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN	PERSEN	88,85	**PERSENTASE PEMENUHAN SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN**	0	0	8,77	13,14	21,08	29,26	30,84	37,98	50,52	58,13	66,53	88,86	1.138.865.000	**Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I & Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II**
			Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Dan Papua) (5582 Sertifikat) [%]	**0**	**0**	**948**	**1509**	**1972**	**2349**	**2514**	**3029**	**3611**	**4193**	**4887**	**5582**	**150.448.000**	**Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I**
				0	**0**	**49.500.000**	**49.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.088.000**		
			Supervisi Pengujian Sarana Perkeretaapian Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Dan Papua) (5582 Sertifikat) [%]													**310.689.000**	**Subdit Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I**
				0	**19.473.403**	**26.583.231**	**121.039.472**	**0**	**24.184.113**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**19.408.781**		
			Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II (7051 Sertifikat)) [sertifikat]	**0**	**0**	**299**	**359**	**1025**	**1811**	**1871**	**2371**	**3571**	**4071**	**4571**	**7051**	**345.200.000**	**Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II**
				0	**0**	**50.000.000**	**39.900.000**	**0**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.300.000**		
			Supervisi Pengujian Sarana Perkeretaapian Wilayah II (7051 Sertifikat) [%]													**332.528.000**	**Subdit Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II**
				0	**10.006.426**	**39.314.700**	**88.063.085**	**12.159.519**	**30.367.132**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**27.617.138**		
			Jumlah Anggaran (Rp)	**-**	**29.479.829**	**165.397.931**	**298.862.557**	**12.159.519**	**54.551.245**	**95.000.000**	**45.000.000**	**45.000.000**	**45.000.000**	**45.000.000**	**303.413.919**	**1.138.865.000**	
PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PERAWATAN SARANA DAN TEMPAT PERAWATAN SARANA	PERSEN	100	**PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PERAWATAN SARANA DAN TEMPAT PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	120.065.000	Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
PERKERETAAPIAN YANG DITINDAKLANJUTI			**YANG DITINDAKLANJUTI**														
			PENGAWASAN PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN (100% PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN TELAH DITINDAKLANJUTI) [Dokumen]	**0**	**4.172.000**	**20.096.600**	**10.780.000**	**0**	**10.900.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**24.116.400**		
			Jumlah Anggaran (Rp)	**0**	**4.172.000**	**20.096.600**	**10.780.000**	**0**	**10.900.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**24.116.400**	**120.065.000**	
PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	PERSEN	100	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian (Laporan) [%]	3,23	11,63	22,15	40,77	48,98	56,04	63,83	71,00	78,00	85,00	92,00	100,00	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				48.475.000	174.450.000	332.250.000	611.620.000	734.695.000	840.620.000	957.520.000	1.065.000.000	1.170.000.000	1.275.000.000	1.380.000.000	1.500.000.000		
			Jumlah Anggaran (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	
NILAI AKIP DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	NILAI	80,80	NILAI AKIP DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,8**	**7.849.000**	**Direktorat Sarana**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian (1 paket) [Nilai]	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.459.000**		**Perkeretaapian**
			Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian (1 paket) [Nilai]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,8**	**44.628.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**4.760.000**	**5.940.000**	**0**	**0**	**7.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.928.000**		
			Jumlah Anggaran (Rp)	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.459.000**	**204.183.000**	
TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	NILAI	13,75	**Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai SPIP dan Nilai Manajemen Risiko) [Nilai]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,750**	**24.207.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**5.870.000**	**0**	**3.360.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.977.000**		
			Jumlah Anggaran (Rp)	**0**	**5.870.000**	**0**	**3.360.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.977.000**	**24.207.000**	
NILAI KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	PERSEN	86,75	NILAI KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75		Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			**44,25**	**43,22**	**43,22**	**47,12**	**48**	**54**	**61**	**69**	**78**	**86,75**	**3.450.000.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**683.448.338**	**0**	**0**	**0**	**820.138.006**	**1.093.517.341**	**0**	**852.896.315**		
			Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car Milik Negara (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			**44,25**	**43,22**	**43,22**	**47,12**	**48**	**54**	**61**	**69**	**78**	**86,75**	**1.521.000.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**243.555.927**	**0**	**164.214.870**	**0**	**218.953.160**	**328.429.740**	**218.953.160**	**346.893.143**		
						44,25	**43,22**	**43,22**	**47,12**	**48**	**54**	**61**	**69**	**78**	**86,75**		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			Perawatan Crane Gerbong Datar dan Kereta Penolong (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]	0	0	0	3.279.976.928	0	0	1.967.986.157	0	2.623.981.543	3.935.972.314	2.623.981.543	2.516.443.516	16.948.342.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	6.000.000.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	960.071.837	0	0	647.999.906	0	863.999.875	0	1.295.999.813	863.999.875	1.367.928.695		
			Perawatan Sarana Milik Negara Untuk Pemeliharaan Jalan Rel (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	2.946.417.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	571460000	0	0	0	342876000	0	45716800	685.752.000	45716800	431.993.000		
			Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	2.290.000.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	427.908.547	0	0	855.817.094		684.653.675	321.620.684		
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (umum, rumah tangga dan perlengkapan) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	160.707.000	
				7.160.000	14.427.000	5.772.500	23.972.238	27.605.530	24.255.482	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.514.250		
						44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]	11.879.364	12.532.217	40.851.252	13.404.709	16.415.866	17.687.577	18.000.000	18.000.000	50.000.000	70.890.000	93.000.000	330.919.015	693.580.000	
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (pelayanan umum, rumah tangga, perlengkapan)[layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	72.341.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	51.965.000	0	0	0	10.000.000	0	0	10.376.000		
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	1.269.312.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
					827.983.654	19.980.000	11.091.699	71.312.400	54.509.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	34.435.247		
			PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	126.344.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	2.720.000	0	0	0	64.137.000	38.000.000	0	21.487.000		
			Honor Operasional Satuan Kerja			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	1.004.044.000	Direktorat Sarana
				0	0	0	56.991.411	0	0	0	60.000.000	0	100.000.000	100.000.000	687.052.589		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			(layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]														Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PIMPINAN DAN SUB BAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	238.845.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	49.105.647	39.214.200	100.730.784	5.044.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	9.750.369		
			RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	45.924.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	10.924.000		
			MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	493.191.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				17.337.841	30.190.582	70.484.829	116.535.120	137.805.866	18.657.023	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	27.179.739		
			KEGIATAN MONITORING PERAWATAN SARANA MILIK NEGARA (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	341.455.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				38.404.600	25.267.083	50.507.200	95.624.868	86.587.987	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.063.262			
						44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]	0	34.616.450	24.621.492	5.048.300	16.782.200	14.879.060	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	17.421.498	213.369.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	30.255.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	12.255.000		
			Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	41.748.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.748.000	0		
			INSPEKSI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	310.791.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	32.960.240	2.973.500	0	28.570.000	11.510.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	64.777.260		
			INSPEKSI SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH II (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	202.205.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	54.160.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.045.000		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			MONITORING DAN REKONSILIASI DATA IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	73.829.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	13.885.250	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	19.943.750		
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA WILAYAH I (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	14.200.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	14.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	9.087.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.087.000		
			BIMBINGAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS PROSES MANUFAKTUR SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	258.125.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				45.462.000	171.531.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.131.400		
			BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit)			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	165.232.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	51.850.000	110.904.266	0	0	0	0	0	0	0	0	2.477.734		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			[layanan, laporan, dokumen, unit]														
			BIMBINGAN TEKNISRAPAT DAN WORKSHOP PENGELOLAAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	196.457.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	193.349.900	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.100		
			TRANSFER KNOWLADGE KELAIKAN SARANA OTOMATIS (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	1.234.364.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.364.000		
			PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	26.723.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.723.000	0	0		
			PENYUSUNAN DAN EVALUASI PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	81.252.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	50.914.330	0	0	0	0	0	0	0	0	30.337.670		
						44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			KEGIATAN PENGADAAN 1 (SATU) PAKET PERALATAN INSPEKSI KELAIKAN SARANA WILAYAH I (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]	0	0	0	0	0	199.998.631	0	0	0	0	0	175.001.369	375.000.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNISTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RAMPCHECK SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	150.639.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	150.176.800	462000	0	0	0	0	0	0	0	0	200		
			BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI DAN SUPERVISI SARANA PERKERETAAPIAN (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	24.567.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	0	0	0	0	0	24.567.000	0	0	0	0	0		
			Kegiatan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAI) (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	40.053.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	14.670.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	20.883.000		
			Kegiatan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75	31.666.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
				0	650.000	10.306.000	1.440.000	650.000	6.848.161	5.000.000	5.000.000	0	0	0	1.771.839		
						44,25	43,22	43,22	47,12	48	54	61	69	78	86,75		

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**17.005.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			**44,25**	**43,22**	**43,22**	**47,12**	**48**	**54**	**61**	**69**	**78**	**86,75**	**77.149.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**		
			Langganan Software Multimedia (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			**44,25**	**43,22**	**43,22**	**47,12**	**48**	**54**	**61**	**69**	**78**	**86,75**	**20.000.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**4.551.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.448.120**		
			Pengembangan upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA) (layanan, laporan, dokumen, unit) [layanan, laporan, dokumen, unit]			**44,25**	**43,22**	**43,22**	**47,12**	**48**	**54**	**61**	**69**	**78**	**86,75**	**800.000.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000.000**	**0**	**602.000.000**		
			Jumlah Anggaran (Rp)	**120.243.805**	**1.623.196.423**	**1.961.023.406**	**3.724.067.937**	**1.390.963.114**	**1.573.033.387**	**2.742.144.027**	**1.136.499.875**	**5.269.694.802**	**7.962.784.207**	**5.248.067.515**	**9.243.499.501**	**41.995.218.000**	
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	NILAI	65	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian (Dokumen, Laporan) [Nilai]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal												**65**	**72.465.000**	**Direktorat Sarana Perkeretaapian**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7	BULAN 8	BULAN 9	BULAN 10	BULAN 11	BULAN 12		
			Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai Arsip) [Nilai]	0	20.285.000	0	26.261.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	919.000		
			Jumlah Anggaran (Rp)	0	20.285.000	0	26.261.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	919.000	72.465.000	

Jakarta, Agustus 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian



BATARA
NIP 198108102005021001

Lampiran 2

Rekomendasi Peningkatan Kinerja

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
1.	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	• Melakukan pembahasan terhadap usulan spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian. • Melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian. • Melakukan pemberian nomor identitas sarana perkeretaapian. • Melakukan penyesuaian target pada rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	a. Pengguna layanan mengajukan pelayanan diluar jam pelayanan sehingga petugas lambat merespon. Memberikan informasi kepada operator sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan pada waktu operasional kantor (08.00-16.00 WIB). Agar petugas dapat bekerja lebih cepat tanggap. b. Approval berjenjang pada proses sertifikasi dinilai lambat. Akan dilakukan Percepatan pelaksanaan approval berjenjang pada aplikasi SISAKA. c. Kesulitan penggunaan layanan dalam mengunggah dokumen pada aplikasi SISAKA (ada batas besaran ukuran dokumen yang menyulitkan pengguna aplikasi SISAKA). Akan ada pengembangan aplikasi untuk menunjang sertifikasi sarana KA.	Triwulan IV Tahun 2026	• Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian • Admin Aplikasi SKM
3.	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	a) Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang sebelumnya belum sesuai dengan target. b) Meningkatkan Koordinasi dengan Operator Sarana Perkeretaapian	Triwulan IV Tahun 2026	• Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I • Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
		(KAI, Railink,dll) agar sarana yang diusulkan untuk dilakukan sertifikasi tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi, serta diharapkan dapat memaksimalkan pengujian sarana c) Melaksanakan sinkronisasi data dan evaluasi capaian sertifikasi sarana perkeretaapian tahun 2026 dengan Balai Pengujian Perkeretaapian		
4	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Upaya peningkatan kinerja dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses seluruh kegiatan penyusunan studi dan kajian dapat segera terealisasi sesuai degan jadwal timeline yang direncanakan serta menyusun pengesahan studi yang telah selesai dilaksanakan.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
5	Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	• Pengoperasian Sarana Milik Negara dilakukan atas dasar permintaan atau rekomendasi dari unit kerja yang akan menggunakannya sehingga perlu meningkatkan koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara • Menyelesaikan Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara • Melakukan Pembahasan rencana Pengoperasian Sarana Milik Negara yang dilaksanakan pada periode TW IV • Menyusun dan menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian Sarana Milik Negara (SMN) kepada unit kerja terkait sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan, meliputi penyiapan lokasi stabling, kesiapan jalur, pengaturan kegiatan langsir, serta kebutuhan operasional lainnya.	Triwulan IV Tahun 2026	Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	• melakukan pembahasan pengawasan terhadap pemeriksaan dan perawatan sarana pada periode nataru serta	Triwulan IV Tahun 2026	• Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
	sesuai hasil Rampcheck	meminimalkan potensi gangguan keselamatan dan memastikan seluruh sarana yang beroperasi pada masa angkutan puncak berada dalam kondisi laik dan aman. • Membuat time schedule pelaksanaan Rampcheck Nataru sebagai persiapan dalam pelaksanaannya		• Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah II
7	Persentase Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti	Melakukan pendataan dan inventarisasi daftar peralatan perawatan sarana milik negara	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	• Melakukan Monitoring Capaian Kinerja dan Melakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2026 terkait ketersediaan data. • Melakukan koordinasi lanjut terkait hasil penilaian mandiri Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan Tim Penilai DJKA. • Melakukan penyesuaian target pada rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	• Melakukan pengisian Pemantauan Daftar Risiko triwulan IV tahun 2026 pada aplikasi simarko • Melakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2027 • Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait hasil penilaian mandiri penyelenggaraan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian tingkat eselon I DJKA	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	• Melakukan Revisi anggaran dan Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan agar dapat optimal • Melakukan revisi halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi pencairan dana per jenis belanja • Melakukan penyesuaian rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi peningkatan kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
		2026 agar capaian kinerja memenuhi kriteria on the right track		
11	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Melakukan pemantauan terhadap Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode dengan Membuat surat penagihan pembayaran PNBP, Membuat usulan prioritas pengujian terhadap saran yang sudah melakukan pembayaran PNBP	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	• Melakukan Pembahasan Persiapan Verifikasi Data Dukung Pengawasan Kearsipan Internal • Melakukan penyesuaian target pada rencana aksi revisi perjanjian kinerja tahun 2026 agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track.	Triwulan IV Tahun 2026	Para Kasubdit dan Kasubag TU di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian



Ronald Jackson Simbolon
NIP 197903032005021002

Lampiran 3

Monitoring Rencana Aksi Per Bulan Pada Triwulan III

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT SARANA	**63,83**	63,83	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian [Persen]	Persentase Realisasi PNBP	646	58,33	9,03	Rp 0	-	63,83	Rp 0	109.43 %	-	Target bulan Juli adalah 58,33% dengan Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Juli 2026 adalah sebesar Rp 957.520.000 dari target sebesar Rp 1.500.000.000 dengan rincian bulan Juli: -PNBP Kelaikan Sarana Wilayah I : Rp. 41.100.000 -PNBP Kelaikan Sarana Wilayah II : Rp. 6.000.000 -Persetujuan Spesifikasi Teknis Perkeretaapian : Rp. 69.800.000 Sehingga persentase realisasi sebesar 63,83% dan capaian sampai bulan Juli adalah 109,43%	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan monitoring realisasi PNBP secara berkala, mengoptimalkan pelaksanaan layanan yang menghasilkan PNBP, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi penerimaan guna mendukung pencapaian target PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 0**		**-**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI AKIP DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 80,80	-		Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	1 paket	80	-	-	Rp 12.390.000	8,18	-	Rp 1.400.000	-	11.3%	Sudah tersedianya dokumen : -SK Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nomor KP-K4 DJKA 11 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. -Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang. -Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian. -Laporan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Bulan Januari s.d. Juli Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan peran Tim Penyelenggaraan SAKIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, memanfaatkan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengendalian capaian kinerja, serta melakukan pemantauan terhadap realisasi PNBP dan indikator kinerja guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	1 paket	80	-	-	Rp 20.000.000	4,15	-	Rp 31.435.892	-	157.18%	Sudah tersedianya dokumen : -SK Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nomor KP-K4 DJKA 11 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. -Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang. -Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian. -Laporan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Bulan Januari s.d. Juli Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan peran Tim Penyelenggaraan SAKIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, memanfaatkan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengendalian capaian kinerja, serta melakukan pemantauan terhadap realisasi PNBP dan indikator kinerja guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 32.390.000**			**Rp 32.835.892**		**101.38%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	-	0	Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	Nilai SPIP dan Nilai Manajemen Risiko	13	-	-	Rp 23.000.000	8,44	-	Rp 9.230.000	-	40.13%	Untuk mencapai Target Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian sudah menyiapkan data-data meliputi : 1.Sudah tersusunnya SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 dengan nomor KP-K4 DJKA 13 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. 2.Sudah tersusunnya SK Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 dengan nomor KP-K4 DJKA 14 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. 4. Sudah dilakukan PM MR, dengan keterangan Penilaian Mandiri Manajemen Risiko mendapat peringkat 3 dengan skor 20 3. sudah dilakukan refreshment MR pada bulan Juni	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan SPIP melalui implementasi tugas Satuan Tugas SPIP dan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang telah dibentuk, melakukan pemutakhiran dokumen manajemen risiko, melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko secara berkala, serta memperkuat monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian target Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 23.000.000**			**Rp 9.230.000**		**40.13%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 86,75	-	61,70	Perawatan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 683.448.338	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 407.770.797	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi kegiatan Perawatan 6 bulan (P6): 1. Lori Inspeksi SK 3 21 01 lokasi RKO Kadhipiro 2. Lori Inspeksi SK 3 21 02 lokasi Kantor BTP kelas II Padang 3. Lori Inspeksi SK 3 21 03 lokasi Kantor Satpel Lhokseumawe 4. Lori Inspeksi SK 3 21 04 lokasi Gudang Prasarana Barru 5. Track Motor Car (TMC) SB 3 21 02 lokasi Stasiun Rungkaib	melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perawatan 6 Bulan (P6) pada 4 unit Lori Inspeksi dan 1 unit Track Motor Car (TMC) di masing-masing lokasi penempatan, dengan meminta laporan progres perawatan, memeriksa kelengkapan dokumen pelaksanaan, serta mencatat kendala dan kebutuhan perbaikan dari setiap unit sebagai dasar penentuan tindak lanjut pemeliharaan berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Crane Gerbong Datar dan Kereta Penolong [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 5.247.963.085	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 1.608.071.743	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi kegiatan : 1. Perawatan Berkala 1 (satu) Tahunan pada Kereta Inspeksi SI 3 16 01 – SI 3 16 02 di Depo Lokomotif Cipinang pada Juli 2026 2. Pelaksanaan overhaul terhadap main engine dan genset pada Kereta Ukur SU 3 17 02 dan Kereta Inspeksi SI 3 11 01 di Depo Pulubrayan Medan pada Agustus s.d. September 2026 3. Perawatan Angkat Persegi Kereta Mendawai SI 0 16 01, Kereta Mahakam SI 0 09 01 dan Kereta Kapuas SI 0 09 02 di Workshop Balai Perawatan Perkeretaapia di bulan Agustus 2026	melakukan inventarisasi kondisi dan kebutuhan perawatan Kereta Ukur serta kereta kedinasan lainnya, menyusun prioritas penanganan berdasarkan kondisi teknis dan intensitas penggunaan, serta menyiapkan jadwal dan kebutuhan anggaran perawatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terencana, mendukung kesiapan operasional sarana, dan meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Sarana Milik Negara Untuk Pemeliharaan Jalan Rel [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 914.336.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 1.371.504.000,-. Dengan kegiatan perawatan MTT Matisa Milik Negara SR 3 18 02 yang berlokasi di Stasiun Geurogok, Aceh didukung dengan kegiatan pemeriksaan bersama kondisi sarana pada April 2026 oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	akan dilakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran dan progres kegiatan perawatan MTT Matisa Milik Negara SR 3 18 02 di Stasiun Geurogok, Aceh, serta memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kondisi sarana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mendukung optimalisasi kinerja anggaran	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 427.908.547	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Kegiatan telah didukung dengan surat keputusan nomor KP-PPSP DJKA 9 TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Pengawas Pekerjaan Kegiatan Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian pada satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (umum, rumah tangga dan perlengkapan) [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 16.000.000	10,11	47,12	Rp 118.186.000	-	738.66%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (pelayanan umum, rumah tangga, perlengkapan) [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 7.500.000	10,02	47,12	Rp 51.965.000	-	692.87%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 15.507.000	8,33	47,12	Rp 2.720.000	-	17.54%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Honor Operasional Satuan Kerja [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 100.000.000	8,45	47,12	Rp 113.982.822	-	113.98%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PIMPINAN DAN SUB BAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 35.000.000	9,2	47,12	Rp 230.825.903	-	659.5%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 30.000.000	9,95	47,12	Rp 0	-	0%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 50.000.000	8,21	47,12	Rp 400.908.324	-	801.82%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN MONITORING PERAWATAN SARANA MILIK NEGARA [layanan, laporan,	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	8,71	47,12	Rp 296.391.738	-	493.99%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	9,78	47,12	Rp 111.227.285	-	185.38%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 18.000.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 20.000.000	8,58	47,12	Rp 0	-	0%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			INSPEKSI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 73.400.000	9,09	47,12	Rp 154.906.510	-	211.04%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian pada tanggal 3 Maret 2026 di Depo Manggarai, Jakarta (KA.402/116/K4/DJKA/2026) - Pemaparan Hasil Inspeksi Coil Spring Tester di Balai Perawatan Perkeretaapian dan di Balai Yasa Yogyakarta pada Maret 2026 - Melaksanakan Kegiatan Inspeksi Kelaikan Sarana Terhadap Trainset 6 Kereta Rel Listrik Bandara Soetta milik PT KCI pada 3 s.d. 4 Maret 2026 di Depo Manggarai (ND 37/K4/III/2026) - Kegiatan inspeksi sarana baru jenis KRL milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada April 2026 di dukung dengan SK Direktur Sarana Perkeretaapian Tim Pelaksana Inspeksi Pengoperasian Sarana Baru Jenis KRL Milik PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) nomor KP-K4 DJKA 24 Tahun 2026 - pelaksanaan kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian pada tanggal 19 – 22 Mei 2026 di Depo Lokomotif Cipinang dan Balai Yasa Manggarai - pelaksanaan Inspeksi pengoperasian sarana dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Juli 2026 di Depo Lokomotif dan Depo Kereta Bandung - Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 September 2026 di Depo Kereta Semarang - kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian KRD eks Prameks dan KRD Bandara YIA pada tanggal 9 – 10 September 2026 di Depo Lokomotif Yogyakarta	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			INSPEKSI SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	9,73	47,12	Rp 90.898.872	-	151.5%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : inspeksi pengoperasian sarana akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tanggal 21 s.d. 24 September 2026 di Divre IV Tanjungkarang (Depo Gerbong Rejosari); b. Tanggal 21 s.d. 24 September 2026 di Divre III Palembang (Depo Gerbong Simpang); c. Tanggal 29 September s.d. 2 Oktober 2026 di Divre II Padang (Depo Gerbong Bukittuntus)	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			MONITORING DAN REKONSILIASI DATA IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 25.000.000	12,68	47,12	Rp 22.149.893	-	88.6%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.		Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 14.200.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - telaah dilaksanakan Bimbingan Teknis Di Bidang Kelaikan Sarana Wilayah I dengan tema "Mewujudkan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Melalui Pengujian Dan Inspeksi Yang Profesional" pada April 2026 di Bogor, Jawa Barat	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 0	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS PROSES MANUFAKTUR SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 216.993.600	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 162.754.266	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNISRAPAT DAN WORKSHOP PENGELOLAAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 195.349.900	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			TRANSFER KNOWLADGE KELAIKAN SARANA OTOMATIS [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 0	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 0	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PENYUSUNAN DAN EVALUASI PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 50.914.330	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN PENGADAAN 1 (SATU) PAKET PERALATAN INSPEKSI KELAIKAN SARANA WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 199.998.631	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNISTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RAMPCHECK SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 150.638.800	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI DAN SUPERVISI SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 151.623.000	100	47,12	Rp 0	-	0%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kegiatan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAI) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 5.112.500	8,33	47,12	Rp 17.170.000	-	335.84%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kegiatan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 5.000.000	8,42	47,12	Rp 21.894.161	-	437.88%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - Inventarisasi Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Perawatan atau Penghapusan atau Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN) Berupa Alat Uji di Balai Yasa Tegal pada Januari 2026 (PL.204/27/K4/DJKA/2026) - Inventarisasi Administrasi dan Teknis BMN berupa Alat Angkutan Kereta Api Lainnya (Kereta Ukur)	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 17.000.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 77.120.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Langganan Software Multimedia [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 4.551.880	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengembangan upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	47,12	Rp 194.305.500	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : Dilakukan Pembahasan Pengembangan Aplikasi SISAKA untuk Sistem Monitoring dan Pelaporan Tidak Lanjut Rampcheck Secara Terdokumentasi dan Terintegrasi pada 04 Juni 2026 (ND 109/K4/VI/2026)	membuat list kebutuhan untuk pengembangan modul pada aplikasi direktorat sarana perkeretaapian yang kemudian bisa di implementasikan dalam aplikasi	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan perkantoran) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 50.000.000	9,99	47,12	Rp 144.474.528	-	288.95%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (layanan perkantoran) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	4,92	47,12	Rp 995.877.763	-	1659.8%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 824.142.500**			**Rp 13.364.904.216**		**1621.67%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 65	-	0	Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	Nilai Arsip	65	-	-	Rp 75.000.000	10,65	-	Rp 46.546.000	-	62.06%	Belum ada capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan II. Capaian kinerja triwulan II pada IKK ini terhadap target Triwulan II belum tercapai serta capaian kinerja triwulan II pada IKK ini terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 juga belum tercapai. Kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan ke IV. Sudah dilakukan audit arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian, namun untuk hasil masih menunggu penyampaian oleh Biro	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan kesiapan pelaksanaan pengawasan kearsipan melalui penataan arsip, pemenuhan dokumen pendukung, penguatan koordinasi dengan unit terkait, serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal yang dijadwalkan pada Triwulan IV Tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 75.000.000**			**Rp 46.546.000**		**62.06%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA PELAYANAN BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 95,25	-	96,25	INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN [Nilai]	Laporan	95	-	-	Rp 0	-	95,25	Rp 0	-	-	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut : 1. Januari : 4 2. Februari : 4 3. Maret : 4 4. April : 3,82 5. Mei : 0 6. Juni : 3,90 7. Juli : 3.86 Secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat 3,91 dalam skala 4 dengan jumlah responden sebanyak 18 responden. Sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM, maka hasil penilaian di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM = SKM unit pelayanan x 25 menjadi 3,91 x 25 = 97.75. Dari target bulan Juli sebesar 95,25 maka capaian bulan Juni adalah 102.62%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik	Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari s.d. Juli 2026 yang memperoleh nilai IKM sebesar 97,75 dengan kategori Sangat Baik, Direktorat Sarana Perkeretaapian akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala, peningkatan kompetensi pelayanan, serta penyempurnaan proses bisnis pelayanan. Selain itu, mengingat jumlah responden pada periode survei ini masih relatif terbatas, yaitu sebanyak 18 responden, Direktorat Sarana Perkeretaapian akan mengoptimalkan pelaksanaan survei dengan meningkatkan sosialisasi dan penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi responden sehingga hasil survei yang diperoleh pada periode berikutnya dapat lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 0**		**-**			

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 59,25	-	37,03	Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	15	Rp 170.408.588	-	-	Kegiatan Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.136.067.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan telah mencapai pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara, masih diperlukan penyempurnaan terhadap pemenuhan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK, khususnya penyelesaian ruang lingkup G sampai dengan K. Selain itu, masih diperlukan pendalaman terhadap beberapa aspek teknis, antara lain standardisasi definisi dan metodologi pengujian, kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, perlakuan terhadap sarana yang telah berumur, penggunaan simulasi dalam pengujian, pengujian distribusi beban bogie, serta penyempurnaan parameter pengujian. Dengan demikian, meskipun progres kegiatan telah berjalan sesuai jadwal, masih diperlukan penyempurnaan substansi agar seluruh output kajian dapat memenuhi ruang lingkup dan kualitas yang dipersyaratkan.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara, penyedia jasa akan melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian seluruh ruang lingkup studi, khususnya ruang lingkup G sampai dengan K. Pendalaman juga akan dilakukan melalui perluasan benchmarking terhadap standar dan praktik pengujian sarana perkeretaapian internasional, termasuk China Railway Standards, serta penyempurnaan definisi, metodologi, parameter, dan kriteria pengujian. Selain itu, akan disusun kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, termasuk pengaturan terhadap sarana yang telah berumur dan pemanfaatan simulasi sebagai bagian dari pendekatan pengujian. Penyedia jasa juga diarahkan untuk menyusun draft pedoman/Juknis, tata cara pengujian, dan checksheet yang spesifik untuk setiap jenis sarana sebagai bahan penyelesaian Laporan Akhir dan penyusunan Draf Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan pemantauan dan pembahasan secara berkala untuk memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Laporan Antara ditindaklanjuti dan penyelesaian	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Pelaksanaan Standarisasi Dan Sertifikasi Peralatan Perawatan Di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 160	-	-	Kegiatan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.068.819.000. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, ditandai dengan telah dilaksanakannya pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 7 Juli 2026 sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, masih diperlukan penyempurnaan substansi kajian, khususnya terkait standarisasi tempat perawatan pada Depo (light maintenance) dan Balai Yasa (heavy maintenance), standar dan tata cara sertifikasi peralatan perawatan, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi beserta lembaga sertifikasinya, serta kajian terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, diperlukan pendalaman terkait alternatif kajian pembentukan unit kerja di lingkungan DJKA yang dapat melaksanakan sertifikasi dan kalibrasi, analisis kemampuan dan kompetensi sertifikasi DJKA, benchmarking dengan praktik di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi. Hasil evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan data lapangan pada beberapa lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi, serta penyempurnaan tata naskah dan penyeragaman nomenklatur dalam	Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, penyedia jasa akan melakukan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan dan hasil evaluasi rapat. Selanjutnya dilaksanakan pengumpulan dan analisis data pada lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi yang telah ditentukan, kajian terhadap standar nasional dan internasional, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi, identifikasi lembaga sertifikasi, serta analisis terhadap mekanisme dan kompetensi sertifikasi. Selain itu, kajian akan diperdalam melalui analisis alternatif pembentukan unit kerja sertifikasi dan kalibrasi di lingkungan DJKA, benchmarking terhadap praktik standarisasi dan sertifikasi di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi peralatan perawatan. Hasil dari seluruh tindak lanjut tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kajian dan penyusunan Laporan Antara serta menjadi dasar untuk tahapan penyelesaian	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 134	-	-	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp895.137.300. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan penyusunan dan pembahasan Laporan Antara. Pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembahasan Laporan Antara merupakan bagian dari evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan, khususnya dalam pendalaman hasil kajian mengenai sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi kajian, termasuk memastikan kesesuaian analisis dengan kondisi operasional, kebutuhan pemeliharaan, dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal, dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan hasil kajian dan penyelesaian tahapan pekerjaan berikutnya	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara tanggal 24 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian serta Tim Pengarah dan Tim Pendamping. Penyempurnaan tersebut mencakup pendalaman analisis kondisi eksisting, perumusan sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara, dan penyesuaian rekomendasi agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya, penyedia jasa akan melanjutkan penyusunan laporan akhir yang memuat hasil kajian secara menyeluruh, termasuk rancangan sistem dan prosedur perawatan, tata cara pemeriksaan, pembagian peran dan tanggung jawab pelaksana, serta rekomendasi implementasi. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen serta memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 493	-	-	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp923.631.000. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyusunan dan pembahasan Laporan Pendahuluan pada 11 Mei 2026, dilanjutkan pembahasan Laporan Antara pada 17 Juli 2026. Dalam pembahasan tersebut, konsultan PT Ardi Widya Utama memaparkan hasil tinjauan literatur, metodologi, survei, analisis kesenjangan (gap analysis), dan rencana kerja lanjutan. Hasil pembahasan menghasilkan sejumlah masukan untuk menyempurnakan kajian, khususnya pengembangan Sistem dan Prosedur (Sispro) yang meliputi ruang lingkup, alur proses (process flow), SOP, instruksi kerja (work instruction), check sheet, serta mekanisme perawatan yang terintegrasi dengan Maintenance Instruction (MI), spesifikasi teknis, standar yang berlaku, dan kondisi aktual di lapangan. Penyempurnaan kajian juga diarahkan pada pendalaman analisis keandalan (reliability analysis), pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan (maintenance history), sistem komputerisasi, serta rekomendasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan referensi ilmiah. Aspek teknis lainnya mencakup kelengkapan jenis dan spesifikasi alat ukur, penyusunan Check Sheet Quality Control (QC), penyandingan dokumen secara sistematis, serta perbaikan tata naskah dan dokumentasi pendukung. Tim Pendamping menerima Laporan Antara dengan kewajiban perbaikan sebelum penyusunan Draft Laporan Akhir, dengan batas waktu penyerahan dokumen perbaikan pada 28 Juli 2026. Selanjutnya, konsinyering dan pembahasan Draft Laporan Akhir dilaksanakan pada 25–26 Agustus 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal hingga tahap pembahasan Draft Laporan Akhir. Namun, tindak lanjut atas seluruh masukan tetap diperlukan untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kualitas substansi dokumen sebelum laporan akhir ditetapkan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada penyempurnaan Draft Laporan Akhir berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara dan konsinyering tanggal 25–26 Agustus 2026. Penyedia jasa perlu memastikan seluruh masukan teknis telah diakomodasi, terutama kelengkapan Sispro yang mencakup SOP, instruksi kerja, process flow, check sheet, dan mekanisme pengendalian mutu yang terintegrasi dengan dokumen teknis serta standar perawatan yang berlaku. Selain itu, perlu dipastikan bahwa analisis keandalan, pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan, kebutuhan SDM, dan rekomendasi penerapan sistem komputerisasi telah disusun secara terukur dan didukung data serta referensi yang memadai. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen, memastikan konsistensi antara hasil survei, analisis, dan rekomendasi, serta menilai keterterapan sistem dan prosedur yang diusulkan terhadap kondisi operasional Kereta Ukur Milik Negara. Hasil perbaikan tersebut menjadi dasar pembahasan final dan penyelesaian laporan akhir sesuai dengan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 139	-	-	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 April 2026 dengan nilai Rp924.741.000. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Focus Group Discussion (FGD), dan Draft Akhir. Pembahasan Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada 12 Mei 2026 dengan masukan terkait metodologi, ruang lingkup kajian, analisis kebutuhan SDM, dan rencana pelaksanaan kegiatan. Pembahasan Laporan Antara dilaksanakan pada 23 Juli 2026 dengan sejumlah catatan perbaikan bagi konsultan PT Telaga Bakti Nusantara, meliputi penyempurnaan klasifikasi personel dan ruang lingkup sarana, dasar hukum pengelompokan Awak Sarana Perkeretaapian (ASP), Operator Alat, dan Teknisi, serta penegasan status dan jenjang jabatan ASP. Konsultan juga diminta memperjelas metode workload analysis dan Full Time Equivalent (FTE), validasi statistik, batas jam operasional personel, serta alur kerja pengoperasian sarana milik negara (SMN). Selain itu, diperlukan integrasi data inventaris, perumusan skema penempatan dan pembiayaan SDM, penyusunan roadmap kebutuhan personel, serta peningkatan konsistensi dan akurasi data kajian. Pendalaman kajian dilaksanakan melalui FGD Kebutuhan SDM dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara pada 20 Agustus 2026, dilanjutkan pembahasan Draft Akhir pada 24 September 2026. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai jadwal hingga tahap pembahasan Draft Akhir. Selanjutnya, perlu dipastikan seluruh masukan telah diakomodasi dalam penyempurnaan dokumen agar hasil studi dapat menjadi dasar penyusunan sistem dan prosedur perawatan serta	Menindaklanjuti hasil pembahasan Draft Akhir tanggal 24 September 2026, konsultan perlu menyempurnakan dokumen berdasarkan seluruh masukan dari Tim Pendamping dan peserta pembahasan, termasuk memastikan setiap rekomendasi telah didukung data, analisis, dan dasar regulasi yang memadai. Penyempurnaan difokuskan pada konsistensi klasifikasi personel, kesesuaian ruang lingkup sarana yang dikaji, validitas perhitungan kebutuhan SDM, kejelasan workflow perawatan dan pemeriksaan, serta penyusunan rekomendasi penempatan, pengembangan kompetensi, dan pembiayaan SDM. Konsultan juga perlu memastikan tersedianya matriks tindak lanjut masukan, roadmap implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta penyempurnaan tata naskah dan akurasi data jumlah unit sarana yang dianalisis. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan untuk memastikan seluruh catatan pembahasan telah ditindaklanjuti dan substansi laporan sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penyelesaian laporan akhir dan penyelesaian administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 138	-	-	Kegiatan Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp917.193.000. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Pelaksanaan pembahasan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pembahasan Laporan Antara merupakan tahapan penting untuk mengevaluasi hasil sementara kajian, khususnya terkait penyusunan pedoman rancang bangun dan rekayasa komponen sarana perkeretaapian. Hasil pembahasan menjadi dasar untuk menyempurnakan substansi kajian, memperdalam analisis teknis, serta memastikan rekomendasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan standardisasi dan pengembangan komponen sarana perkeretaapian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III berjalan sesuai jadwal dan mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pembahasan Laporan Antara tanggal 10 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan. Selanjutnya, penyedia jasa melanjutkan pendalaman analisis dan penyusunan pedoman rancang bangun serta rekayasa komponen sarana perkeretaapian, termasuk memastikan kesesuaian substansi dengan regulasi, standar teknis, dan kebutuhan penerapan di sektor perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pekerjaan serta memastikan seluruh masukan pembahasan telah ditindaklanjuti sebelum laporan akhir disampaikan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 292	-	-	Kegiatan Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.945.641.300. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 8 Juni 2026, dengan hasil berupa masukan terhadap metodologi, ruang lingkup kajian, rencana pengumpulan data, dan pendekatan analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla). Selanjutnya, pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2026, dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 22 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendalaman substansi kajian, pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan, serta penyempurnaan hasil analisis. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan yang mendukung pencapaian target	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta para pemangku kepentingan ke dalam penyempurnaan hasil kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla) didukung oleh data teknis yang memadai, kajian terhadap standar yang relevan, serta pertimbangan aspek keselamatan, keandalan, dan kebutuhan operasional. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil penyempurnaan kajian serta memantau pemenuhan seluruh keluaran sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan penyelesaian laporan akhir dan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur Kereta Api (Railroad) [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	50	Rp 475.024.500	-	-	Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp950.049.000. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 18 April 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai beberapa tahapan, yaitu penyampaian Laporan Pendahuluan pada 5 Mei 2026, Laporan Antara pada 22 Juli 2026, dan Laporan Akhir pada 28 Agustus 2026. Selanjutnya, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 11 September 2026 untuk membahas hasil kajian dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan hasil kajian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mendukung penyelesaian output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan FGD tanggal 11 September 2026, perlu dilakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh masukan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan oleh peserta untuk memastikan substansi hasil kajian telah mengakomodasi kebutuhan teknis dan regulasi. Penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen hasil kajian apabila masih terdapat catatan perbaikan, khususnya terkait standar, metode pengujian, persyaratan teknis, dan mekanisme sertifikasi kelaikan kendaraan yang berjalan di jalur kereta api. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen dan memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta ketentuan kontrak. Hasil akhir kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan standar dan tata cara	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana Pada Sarana Otomatis [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	15	Rp 143.402.287	-	-	Kegiatan Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana pada Sarana Otomatis dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp956.015.250. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan penerbitan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Tim Pendamping pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa telah menyelesaikan dan membahas Laporan Pendahuluan pada tanggal 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Antara pada tanggal 27 Agustus 2026 dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 2 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman substansi kajian, khususnya terkait standar, metodologi, dan tata cara pengujian integrasi sub system pada sarana otomatis. Sampai dengan periode pelaporan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Tahapan berikutnya adalah pembahasan Laporan Draft Akhir yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengintegrasikan seluruh masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta peserta FGD ke dalam penyempurnaan dokumen kajian. Penyempurnaan tersebut perlu mencakup pendalaman analisis standar dan tata cara pengujian integrasi sub system, kesesuaian terhadap standar yang relevan, serta perumusan rekomendasi teknis yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pengujian sarana otomatis. Selanjutnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melaksanakan pembahasan Laporan Draft Akhir pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kelengkapan substansi, kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup kontrak, serta keterakomodasian masukan dari tahapan pembahasan sebelumnya. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyempurnaan laporan akhir sebelum dilakukan penyelesaian dan penyerahan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 159	-	-	Kegiatan Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.058.912.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 21 Juni 2026. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 2 Juli 2026, dengan hasil pembahasan berupa masukan terhadap metodologi kajian, ruang lingkup evaluasi, mekanisme pengumpulan data, serta pendekatan penyusunan tata cara evaluasi persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Selanjutnya, Laporan Antara telah disampaikan pada tanggal 16 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Secara umum, progres kegiatan berjalan sesuai jadwal kontrak, dengan tahapan berikutnya berupa pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang direncanakan	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melaksanakan FGD pada tanggal 22 Oktober 2026 dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh masukan terhadap hasil analisis, mekanisme evaluasi, serta substansi tata cara persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Hasil FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan laporan dan perumusan rekomendasi kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa seluruh masukan dan hasil pembahasan terdokumentasi dengan baik serta ditindaklanjuti dalam laporan berikutnya. Pemantauan terhadap progres pekerjaan akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas hasil kajian dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	15	Rp 142.345.013	-	-	Kegiatan Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun telah dikontrakkan pada tanggal 20 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp948.966.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2026 pada tanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Dalam perkembangannya, penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Antara pada tanggal 17 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) direncanakan pada tanggal 16 Oktober 2026 untuk membahas substansi dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan sehingga diperlukan percepatan penyelesaian tahapan pekerjaan, khususnya pembahasan hasil kajian, penyempurnaan dokumen, dan penyusunan rekomendasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak agar seluruh keluaran kegiatan dapat diselesaikan sesuai	Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap progres pekerjaan serta meminta penyedia jasa menyusun rencana percepatan penyelesaian kegiatan yang memuat tahapan pekerjaan, target waktu, dan keluaran yang harus dipenuhi. Pelaksanaan FGD yang direncanakan pada 16 Oktober 2026 perlu ditindaklanjuti dengan dokumentasi hasil pembahasan, inventarisasi masukan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan Laporan Antara. Selanjutnya, penyedia jasa agar segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam penyusunan laporan akhir dan rekomendasi terkait standar serta persyaratan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun. Setiap tahapan penyelesaian perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keterlambatan tidak semakin bertambah dan seluruh keluaran kontrak dapat dipenuhi.	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			Studi Penyusunan Konsep SNI Yang Bersumber Dari JIS E4041 dan IEC 61133 [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	50	Rp 600.131.281	-	-	Kegiatan Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction and Before Entry into Service) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 16 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.123.448.343. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping dengan nomor KP-K4 DJKA 26 Tahun 2026 pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan telah melalui beberapa tahapan, yaitu pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 4 Juni 2026, penyampaian Laporan Antara pada tanggal 22 Juli 2026, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 3 September 2026 untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap substansi kajian. Selanjutnya, Laporan Akhir telah disampaikan pada tanggal 30 September 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan dan penyelesaian hasil kajian. Tahapan tersebut mendukung penyusunan konsep SNI melalui harmonisasi standar JIS E4041 dan IEC 61133 dengan kebutuhan standardisasi [illegible]	Menindaklanjuti penyelesaian Laporan Akhir, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap substansi dan rekomendasi yang dihasilkan, termasuk memastikan seluruh masukan dari Tim Pengarah, Tim Pendamping, dan peserta FGD telah diakomodasi dalam dokumen akhir. Selanjutnya, perlu dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian konsep SNI dengan ketentuan standardisasi nasional, relevansi penerapan standar JIS E4041 dan IEC 61133, serta kesiapan substansi untuk diproses ke tahapan standardisasi berikutnya. Dokumen hasil kajian beserta notulensi pembahasan, daftar masukan, dan matriks tindak lanjut perlu dihimpun sebagai bukti dukung pelaksanaan kegiatan dan dasar pemantauan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 0	-	-	Kegiatan Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 25 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.361.831.250. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 39 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan teknis. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 5 Agustus 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Penyampaian kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa tahapan pekerjaan telah berjalan sesuai rencana dan mendukung pelaksanaan kajian lebih lanjut terkait standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian. Selanjutnya, diperlukan pengawalan terhadap kualitas substansi kajian agar hasil pekerjaan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri [illegible]	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil kajian, termasuk analisis kondisi eksisting manufaktur sarana perkeretaapian, kesesuaian terhadap standar yang berlaku, serta identifikasi kebutuhan penyempurnaan standar manufaktur. Penyedia jasa diminta untuk meindaklanjuti masukan hasil pembahasan dan melengkapi data serta analisis yang diperlukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi akhir. Pemantauan pelaksanaan kontrak juga akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh keluaran pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal dan memenuhi ruang lingkup yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 149	-	-	Kegiatan Reviu Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis (Spektek) Monorel dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp990.414.150. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 2 Juni 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 7 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Dalam rangka mendukung pendalaman substansi kajian, penyedia jasa juga telah menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Pengantar Pengumpulan Data untuk keperluan koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, kegiatan direncanakan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 Oktober 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III menunjukkan kemajuan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, dengan fokus pada pendalaman data teknis dan penyempurnaan hasil [illegible]	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian dalam Laporan Antara, memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek regulasi dan spesifikasi teknis monorel yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, proses koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky perlu ditindaklanjuti untuk melengkapi bahan analisis dan memperkuat dasar penyusunan rekomendasi. Hasil pembahasan dan data tambahan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan hasil kajian dan menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi monorel serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 203	-	-	Kegiatan Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 22 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.356.336.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 37 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 6 Juli 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem dijadwalkan pada 15 Oktober 2026 untuk membahas hasil kajian serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dengan tahapan selanjutnya difokuskan pada pembahasan dan penyempurnaan substansi kajian sebagai dasar penyusunan rekomendasi reviu rancangan peraturan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian, mengidentifikasi masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan, serta memperoleh kesepakatan terhadap substansi rancangan peraturan tentang standar spesifikasi teknis trem. Hasil FGD selanjutnya didokumentasikan dalam notula dan dirumuskan menjadi daftar masukan serta rekomendasi penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan, memastikan seluruh masukan relevan telah diakomodasi, serta memantau penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan jadwal kontrak. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian substansi rancangan peraturan dengan ketentuan yang berlaku, perkembangan teknologi trem, dan kebutuhan penyelenggaraan [illegible]	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 0	-	-	Kegiatan Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian telah dikontrakkan pada tanggal 29 Juni 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.106.059.500. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 41 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan kajian. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2026. Namun, penyampaian laporan tersebut mengalami keterlambatan dari tahapan pelaksanaan yang direncanakan sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan tahapan pekerjaan berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, khususnya untuk memastikan penyelesaian setiap tahapan kajian tetap sesuai dengan jadwal dan target output yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap keterlambatan penyampaian Laporan Pendahuluan serta berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk memastikan penyebab keterlambatan dan langkah percepatan yang diperlukan. Selanjutnya, perlu dilakukan pembahasan dan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan tim, disertai penyusunan jadwal kerja yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan kontrak. Penyedia jasa juga perlu mempercepat pengumpulan dan validasi data, inventarisasi standar komponen sarana perkeretaapian yang berlaku, serta analisis kebutuhan standarisasi komponen. Pemantauan kemajuan pekerjaan perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kesesuaian antara realisasi pekerjaan,	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			Studi Standar Peralatan, Fasilitas Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 0	-	-	Rp 166	-	-	Kegiatan Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 28 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.108.085.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan capaian berupa penyampaian Laporan Pendahuluan pada tanggal 26 Mei 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 31 Agustus 2026. Selain itu, telah dijadwalkan dan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 1 Oktober 2026 sebagai forum pembahasan dan pendalaman substansi kajian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan kemajuan sesuai tahapan yang direncanakan, baik dari sisi penyampaian dokumen maupun pelaksanaan pembahasan, sehingga mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan, hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD tanggal 1 Oktober 2026 perlu menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan substansi kajian, khususnya terkait standar peralatan dan fasilitas, tata cara pemeriksaan dan perawatan komponen bearing, serta kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi hasil pembahasan ke dalam laporan akhir, disertai analisis dan rumusan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan komponen bearing pada sarana perkeretaapian kecepatan normal. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen untuk memastikan kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan kontrak	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 1.531.313.702**		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA MENDUKUNG KESELAMATAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 71,01	**43,60**	43,60	Pengoperasian Sarana Milik Negara [unit]	20 unit pengoperasian	71	-	-	Rp 0	-	161,01	Rp 1.315.204.312	-	-	Target Kinerja bulan Juli adalah 52,05%. Sampai bulan Juli telah dilakukan pengoperasian SMN sebanyak 56 unit sehingga realisasi kinerja sebesar 161,01% dan capaian bulan Juli 309,33%	Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan evaluasi terhadap target dan Rencana Aksi (Renaksi) bulanan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengoperasian Sarana Milik Negara (SMN) mengingat capaian hingga bulan Juli telah mencapai 309,33% atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyesuaian distribusi target bulanan agar lebih realistis dan selaras dengan rencana pengoperasian SMN sepanjang tahun. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pengoperasian SMN, pemutakhiran data pendukung, serta penguatan koordinasi dengan unit pelaksana untuk menjaga akurasi pelaporan dan memastikan target tahunan tercapai secara optimal.	Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 1.315.204.312**		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE SARANA PERKERETAAPIAN YANG DILAKUKAN RAMPCHECK Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 94,60	-	97,79	Pelaksanaan Rampcheck Angkutan lebaran, Natal dan tahun baru di bidang sarana perkeretaapian [unit]	94,60% sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	94	-	-	Rp 0	-	100	Rp 291.529.999	-	-	Sudah terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang [unit]	94,60% sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	94	-	-	Rp 0	-	100	Rp 0	-	-	Sudah terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 291.529.999**		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 88,85	**30,84**	30,43	SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 0	-	45,04	Rp 99.360.000	-	-	Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Juli 2026 adalah sebesar 30,43%. Dengan capaian bulan juli sebanyak 4385 sertifikat, dengan rincian 2514 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1871 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
			Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 0	-	23,68	Rp 89.900.000	-	-	Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Juli 2026 adalah sebesar 30,43%. Dengan capaian bulan juli sebanyak 4385 sertifikat, dengan rincian 2514 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1871 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			SUPERVISI PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 50.000.000	10,29	62,11	Rp 192.960.219	-	385.92%	Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Juli 2026 adalah sebesar 30,43%. Dengan capaian bulan juli sebanyak 4385 sertifikat, dengan rincian 2514 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1871 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
			SUPERVISI PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 80.000.000	10,17	55,57	Rp 184.770.862	-	230.96%	Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Juli 2026 adalah sebesar 30,43%. Dengan capaian bulan juli sebanyak 4385 sertifikat, dengan rincian 2514 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1871 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Jumlah Anggaran					**Rp 130.000.000**			**Rp 566.991.081**		**436.15%**			

Bulan: Juli, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juli	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juli	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PERAWATAN SARANA DAN TEMPAT PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN YANG	-	100	PENGAWASAN PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN	100% PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN TELAH DITINDAKLANJUTI	100	-	-	Rp 20.000.000	10	100	Rp 53.886.100	-	269.43%	Pengawasan Perawatan Sarana : Telah dilaksanakan monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan Pengawasan Tempat Perawatan Sarana : Telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY Manggarai dengan tidak tersedianya alat Load Bogie Test. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan Load Bogie Test tahun 2026.	Akan dilakukan koordinasi perihal tindak lanjut dokumen sispro kepada Pengelola Sarana Milik Negara	Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana
			Jumlah Anggaran					Rp 20.000.000			Rp 53.886.100		269.43%			

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

RONALD JACKSON SIMBOLON
NIP 197903032005021002

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8			Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Outout	Anggaran		Outout	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	**71,00**	71,50	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian [Persen]	Persentase Realisasi PNBP	646	66,67	10,32	Rp 0	-	71,51	Rp 0	107.26%	-	Target bulan Agustus adalah 66,67% dengan Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Agustus 2026 adalah sebesar Rp 1.072.520.000 dari target sebesar Rp 1.500.000.000 dengan persentase realisasi sebesar 71,51% sehingga capaian bulan Agustus adalah 107,24%	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan monitoring realisasi PNBP secara berkala, mengoptimalkan pelaksanaan layanan yang menghasilkan PNBP, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi penerimaan guna mendukung pencapaian target PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
Satuan: PERSEN			**Jumlah Anggaran**					**Rp 0**			**Rp 0**		-				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI AKIP DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 80,80	-	0	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1 paket	80	-	-	Rp 14.390.000	9,51	-	Rp 1.400.000	-	9.73%	Sudah tersedianya dokumen : -SK Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nomor KP-K4 DJKA 11 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. -Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang. -Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian. -Laporan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Bulan Januari s.d. Agustus.	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan peran Tim Penyelenggaraan SAKIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, memanfaatkan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengendalian capaian kinerja, serta melakukan pemantauan terhadap realisasi PNBP dan indikator kinerja guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	1 paket	80	-	-	Rp 20.000.000	4,15	-	Rp 39.030.224	-	195.15%	Sudah tersedianya dokumen : -SK Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nomor KP-K4 DJKA 11 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. -Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang. -Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian. -Laporan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Bulan Januari s.d. Agustus.	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan peran Tim Penyelenggaraan SAKIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, memanfaatkan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengendalian capaian kinerja, serta melakukan pemantauan terhadap realisasi PNBP dan indikator kinerja guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 34.390.000**			**Rp 40.430.224**		**117.56%**				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 13,75	-	0	Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	Nilai SPIP dan Nilai Manajemen Risiko	13	-	-	Rp 29.000.000	10,65	-	Rp 9.230.000	-	31.83%	Untuk mencapai Target Penerapan Manajemen Risiko Direktorart Sarana perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian sudah menyiapkan data-data meliputi : 1.Sudah tersusunnya SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 dengan nomor KP-K4 DJKA 13 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. 2.Sudah tersusunnya SK Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 dengan nomor KP-K4 DJKA 14 Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026. 4. Sudah dilakukan PM MR, dengan keterangan Penilaian Mandiri Manajemen Risiko mendapat peringkat 3 dengan skor 20 3. sudah dilakukan refreshment MR pada bulan Juni	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan SPIP melalui implementasi tugas Satuan Tugas SPIP dan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang telah dibentuk, melakukan pemutakhiran dokumen manajemen risiko, melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko secara berkala, serta memperkuat monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian target Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 29.000.000**			**Rp 9.230.000**		**31.83%**				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 86,75	-	48,4	Perawatan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 828.000.000	24	-	Rp 683.448.338	-	82.54%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 365.040.000	24	-	Rp 407.770.797	-	111.71%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi kegiatan Perawatan 6 bulan (P6): 1. Lori Inspeksi SK 3 21 01 lokasi RKO Kadhipiro 2. Lori Inspeksi SK 3 21 02 lokasi Kantor BTP kelas II Padang 3. Lori Inspeksi SK 3 21 03 lokasi Kantor Satpel Lhokseumawe 4. Lori Inspeksi SK 3 21 04 lokasi Gudang Prasarana Barru	melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perawatan 6 Bulan (P6) pada 4 unit Lori Inspeksi dan 1 unit Track Motor Car (TMC) di masing-masing lokasi penempatan, dengan meminta laporan progres perawatan, memeriksa kelengkapan dokumen pelaksanaan, serta mencatat kendala dan kebutuhan perbaikan dari setiap unit sebagai dasar penentuan tindak lanjut pemeliharaan berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Crane Gerbong Datar dan Kereta Penolong [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 4.508.025.840	24	-	Rp 5.247.963.085	-	116.41%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 1.440.000.000	24	-	Rp 2.472.071.618	-	171.67%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi kegiatan : 1. Perawatan Berkala 1 (satu) Tahunan pada Kereta Inspeksi SI 3 16 01 – SI 3 16 02 di Depo Lokomotif Cipinang pada Juli 2026 2. Pelaksanaan overhaul terhadap main engine dan genset pada Kereta Ukur SU 3 17 02 dan Kereta Inspeksi SI 3 11 01 di Depo Pulubrayan Medan pada Agustus s.d. September 2026 3. Perawatan Angkat Persegi Kereta Mendawai SI 0 16 01, Kereta Mahakam SI 0 09 01 dan Kereta Kapuas SI 0 09 02 di Workshop Balai Perawatan Perkeretaapia di bulan Agustus 2026	melakukan inventarisasi kondisi dan kebutuhan perawatan Kereta Ukur serta kereta kedinasan lainnya, menyusun prioritas penanganan berdasarkan kondisi teknis dan intensitas penggunaan, serta menyiapkan jadwal dan kebutuhan anggaran perawatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terencana, mendukung kesiapan operasional sarana, dan meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Sarana Milik Negara Untuk Pemeliharaan Jalan Rel [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 707.140.080	24	-	Rp 914.336.000	-	129.3%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. . Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 1.371.504.000,-. Dengan kegiatan perawatan MTT Matisa Milik Negara SR 3 18 02 yang berlokasi di Stasiun Geurogok, Aceh didukung dengan kegiatan pemeriksaan bersama kondisi sarana pada April 2026 oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	akan dilakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran dan progres kegiatan perawatan MTT Matisa Milik Negara SR 3 18 02 di Stasiun Geurogok, Aceh, serta memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kondisi sarana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mendukung optimalisasi kinerja anggaran	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 109.176.240	24	-	Rp 427.908.547	-	391.94%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Kegiatan telah didukung dengan surat keputusan nomor KP-PPSP DJKA 9 TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Pengawas Pekerjaan Kegiatan Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian pada satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (umum, rumah tangga dan perlengkapan) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 19.000.000	12,01	-	Rp 134.882.300	-	709.91%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8			Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Outout	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (pelayanan umum, rumah tangga, perlengkapan) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 9.000.000	12,03	-	Rp 51.965.000	-	577.39%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 15.507.000	8,33	-	Rp 40.720.000	-	262.59%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Honor Operasional Satuan Kerja [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 100.000.000	8,45	-	Rp 113.982.822	-	113.98%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PIMPINAN DAN SUB BAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 40.000.000	10,52	-	Rp 231.505.847	-	578.76%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 30.000.000	9,95	-	Rp 0	-	0%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 50.000.000	8,21	-	Rp 436.019.324	-	872.04%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN MONITORING PERAWATAN SARANA MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	8,71	-	Rp 296.391.738	-	493.99%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	9,78	-	Rp 115.097.285	-	191.83%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 20.010.000	-	-		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 20.000.000	8,58	-	Rp 8.860.000	-	44.3%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			INSPEKSI KELAIKAN SARANA PERKERETAPIAN DI WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 73.400.000	9,09	-	Rp 208.818.510	-	284.49%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian pada tanggal 3 Maret 2026 di Depo Manggarai, Jakarta (KA.402/116/K4/DJKA/2026) - Pemaparan Hasil Inspeksi Coil Spring Tester di Balai Perawatan Perkeretaapian dan di Balai Yasa Yogyakarta pada Maret 2026 - Melaksanakan Kegiatan Inspeksi Kelaikan Sarana Terhadap Trainset 6 Kereta Rel Listrik Bandara Soetta milik PT KCI pada 3 s.d. 4 Maret 2026 di Depo Manggarai (ND 37/K4/III/2026) - Kegiatan inspeksi sarana baru jenis KRL milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada April 2026 di dukung dengan SK Direktur Sarana Perkeretaapian Tim Pelaksana Inspeksi Pengoperasian Sarana Baru Jenis KRL Milik PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) nomor KP-K4 DJKA 24 Tahun 2026 - pelaksanaan kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian pada tanggal 19 – 22 Mei 2026 di Depo Lokomotif Cipinang dan Balai Yasa Manggarai - pelaksanaan Inspeksi pengoperasian sarana dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Juli 2026 di Depo Lokomotif dan Depo Kereta Bandung - Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 September 2026 di Depo Kereta Semarang - kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian KRD eks Prameks dan KRD Bandara YIA pada tanggal 9 – 10 September 2026 di Depo Lokomotif Yogyakarta	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Outout	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			INSPEKSI SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	9,73	-	Rp 90.898.872	-	151.5%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : inspeksi pengoperasian sarana akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tanggal 21 s.d. 24 September 2026 di Divre IV Tanjungkarang (Depo Gerbong Rejosari); b. Tanggal 21 s.d. 24 September 2026 di Divre III Palembang (Depo Gerbong Simpang); c. Tanggal 28 September s.d. 2 Oktober 2026 di Divre II Padang (Depo Gerbong Bukitputus)	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			MONITORING DAN REKONSILIASI DATA IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 25.000.000	12,68	-	Rp 23.229.893	-	92.92%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.		Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 14.200.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - telaah dilaksanakan Bimbingan Teknis Di Bidang Kelaikan Sarana Wilayah I dengan tema "Mewujudkan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Melalui Pengujian Dan Inspeksi Yang Profesional" pada April 2026 di Bogor, Jawa Barat	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 2.000.000	-	-		Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS PROSES MANUFAKTUR SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 216.993.600	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 162.754.266	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNISRAPAT DAN WORKSHOP PENGELOLAAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 195.349.900	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			TRANSFER KNOWLADGE KELAIKAN SARANA OTOMATIS [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 457.568.650	35	-	Rp 0	-	0%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 9.490.989	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PENYUSUNAN DAN EVALUASI PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 50.914.330	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN PENGADAAN 1 (SATU) PAKET PERALATAN INSPEKSI KELAIKAN SARANA WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 199.998.631	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8			Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Outout	Anggaran		Outout	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			BIMBINGAN TEKNISTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RAMPCHECK SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 150.638.800	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI DAN SUPERVISI SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 0	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kegiatan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAI) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 5.112.500	8,33	-	Rp 17.670.000	-	345.62%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kegiatan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 5.000.000	8,42	-	Rp 22.544.161	-	450.88%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - Inventarisasi Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Perawatan atau Penghapusan atau Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN) Berupa Alat Uji di Balai Yasa Tegal pada Januari 2026 (PL.204/27/K4/DJKA/2026) - Inventarisasi Administrasi dan Teknis BMN berupa Alat Angkutan Kereta Api Lainnya (Kereta Ukur)	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 17.000.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 77	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Langganan Software Multimedia [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 4.551.880	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengembangan upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	-	Rp 194.305.500	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : Dilakukan Pembahasan Pengembangan Aplikasi SISAKA untuk Sistem Monitoring dan Pelaporan Tidak Lanjut Rampcheck Secara Terdokumentasi dan Terintegrasi pada 04 Juni 2026 (ND 109/K4/VI/2026)	membuat list kebutuhan untuk pengembangan modul pada aplikasi direktorat sarana perkeretaapian yang kemudian bisa di implementasikan dalam aplikasi	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan perkantoran) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 50.000.000	9,99	-	Rp 219.057.112	-	438.11%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (layanan perkantoran) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	4,92	-	Rp 1.072.251.107	-	1787.09%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Ro 9.096.970.310**			**Ro 14.475.600.329**		**159.13%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 65	-	0	Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	Nilai Arsip	65	-	-	Rp 75.000.000	10,65	-	Rp 55.794.918	-	74.39%	Belum ada capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan I. Capaian kinerja triwulan I pada IKK ini terhadap target Triwulan I belum tercapai serta capaian kinerja triwulan I pada IKK ini terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 juga belum tercapai. Kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan ke IV. Sudah dilakukan audit arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian, namun untuk hasil masih menunggu penyampaian oleh Biro	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan kesiapan pelaksanaan pengawasan kearsipan melalui penataan arsip, pemenuhan dokumen pendukung, penguatan koordinasi dengan unit terkait, serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal yang dijadwalkan pada Triwulan IV Tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 75.000.000**			**Rp 55.794.918**		**74.39%**			

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8			Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Outout	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA PELAYANAN BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 95,25	-	100	INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN [Nilai]	Laporan	95	-	-	Rp 0	-	98	Rp 0	-	-	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut : 1. Januari : 4 2. Februari : 4 3. Maret : 4 4. April : 3,82 5. Mei : 0 6. Juni : 3,90 7. Juli : 3,85 8. Agustus : 4 Secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat 3,92 dalam skala 4 dengan jumlah responden sebanyak 19 responden. Sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM, maka hasil penilaian di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM = SKM unit pelayanan x 25 menjadi 3,92 x 25 = 98. Dari target bulan Agustus sebesar 95,25 maka capaian bulan Agustus adalah 102,88%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori sangat baik	Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari s.d. Agustus 2026 yang memperoleh nilai IKM sebesar 98 dengan kategori Sangat Baik, Direktorat Sarana Perkeretaapian akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala, peningkatan kompetensi pelayanan, serta penyempurnaan proses bisnis pelayanan. Selain itu, mengingat jumlah responden pada periode survei ini masih relatif terbatas, yaitu sebanyak 19 responden, Direktorat Sarana Perkeretaapian akan mengoptimalkan pelaksanaan survei dengan meningkatkan sosialisasi dan penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi responden sehingga hasil survei yang diperoleh pada periode berikutnya dapat lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 0**		-				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 59,25	-	37,03	Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 420.000.000	35	-	Rp 170.408.588	-	40.57%	Kegiatan Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.136.067.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan telah mencapai pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara, masih diperlukan penyempurnaan terhadap pemenuhan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK, khususnya penyelesaian ruang lingkup G sampai dengan K. Selain itu, masih diperlukan pendalaman terhadap beberapa aspek teknis, antara lain standardisasi definisi dan metodologi pengujian, kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, perlakuan terhadap sarana yang telah berumur, penggunaan simulasi dalam pengujian, pengujian distribusi beban bogie, serta penyempurnaan parameter pengujian. Dengan demikian, meskipun progres kegiatan telah berjalan sesuai jadwal, masih diperlukan penyempurnaan substansi agar seluruh output kajian dapat memenuhi ruang lingkup dan kualitas yang dipersyaratkan.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara, penyedia jasa akan melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian seluruh ruang lingkup studi, khususnya ruang lingkup G sampai dengan K. Pendalaman juga akan dilakukan melalui perluasan benchmarking terhadap standar dan praktik pengujian sarana perkeretaapian internasional, termasuk China Railway Standards, serta penyempurnaan definisi, metodologi, parameter, dan kriteria pengujian. Selain itu, akan disusun kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, termasuk pengaturan terhadap sarana yang telah berumur dan pemanfaatan simulasi sebagai bagian dari pendekatan pengujian. Penyedia jasa juga diarahkan untuk menyusun draft pedoman/Juknis, tata cara pengujian, dan checksheet yang spesifik untuk setiap jenis sarana sebagai bahan penyelesaian Laporan Akhir dan penyusunan Draf Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan pemantauan dan pembahasan secara berkala untuk memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Laporan Antara ditindaklanjuti dan penyelesaian pekerjaan tetap sesuai dengan target kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Pelaksanaan Standarisasi Dan Sertifikasi Peralatan Perawatan Di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 420.000.000	35	-	Rp 160.322.850	-	38.17%	Kegiatan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.068.819.000. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, ditandai dengan telah dilaksanakannya pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 7 Juli 2026 sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, masih diperlukan penyempurnaan substansi kajian, khususnya terkait standarisasi tempat perawatan pada Depo (light maintenance) dan Balai Yasa (heavy maintenance), standar dan tata cara sertifikasi peralatan perawatan, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi beserta lembaga sertifikasinya, serta kajian terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, diperlukan pendalaman terkait alternatif kajian pembentukan unit kerja di lingkungan DJKA yang dapat melaksanakan sertifikasi dan kalibrasi, analisis kemampuan dan kompetensi sertifikasi DJKA, benchmarking dengan praktik di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi. Hasil evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan data lapangan pada beberapa lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi, serta penyempurnaan tata naskah dan penyeragaman nomenklatur dalam dokumen kajian.	Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, penyedia jasa akan melakukan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan dan hasil evaluasi rapat. Selanjutnya dilaksanakan pengumpulan dan analisis data pada lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi yang telah ditentukan, kajian terhadap standar nasional dan internasional, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi, identifikasi lembaga sertifikasi, serta analisis terhadap mekanisme dan kompetensi sertifikasi. Selain itu, kajian akan diperdalam melalui analisis alternatif pembentukan unit kerja sertifikasi dan kalibrasi di lingkungan DJKA, benchmarking terhadap praktik standarisasi dan sertifikasi di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi peralatan perawatan. Hasil dari seluruh tindak lanjut tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kajian dan penyusunan Laporan Antara serta menjadi dasar untuk tahapan penyelesaian pekerjaan berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 339.505.600	35	-	Rp 134.270.595	-	39.55%	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp895.137.300. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan penyusunan dan pembahasan Laporan Antara. Pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembahasan Laporan Antara merupakan bagian dari evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan, khususnya dalam pendalaman hasil kajian mengenai sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi kajian, termasuk memastikan kesesuaian analisis dengan kondisi operasional, kebutuhan pemeliharaan, dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal, dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan hasil kajian dan penyelesaian tahapan pekerjaan berikutnya	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara tanggal 24 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian serta Tim Pengarah dan Tim Pendamping. Penyempurnaan tersebut mencakup pendalaman analisis kondisi eksisting, perumusan sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara, dan penyesuaian rekomendasi agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya, penyedia jasa akan melanjutkan penyusunan laporan akhir yang memuat hasil kajian secara menyeluruh, termasuk rancangan sistem dan prosedur perawatan, tata cara pemeriksaan, pembagian peran dan tanggung jawab pelaksana, serta rekomendasi implementasi. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen serta memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 337.775.200	35	-	Rp 847.595.650	-	250.93%	Kegiatan "Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara" didasarkan pada kontrak tanggal 2 Maret 2026 senilai Rp923.631.000, dengan pelaksanaan yang berjalan sesuai jadwal hingga tahap pembahasan Draft Laporan Akhir. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: - Laporan Pendahuluan: Disusun dan dibahas pada 11 Mei 2026. - Laporan Antara: Dibahas pada 17 Juli 2026 oleh konsultan PT Ardi Widya Utama, yang memaparkan tinjauan literatur, metodologi, survei, gap analysis, dan rencana kerja lanjutan. Tim Pendamping menerima laporan ini dengan kewajiban perbaikan selambat-lambatnya 28 Juli 2026. - Draft Laporan Akhir: Dibahas melalui kegiatan konsinyering pada 25–26 Agustus 2026. Fokus Utama Penyempurnaan Kajian: - Pengembangan Sispro: Mencakup ruang lingkup, alur proses (process flow), SOP, instruksi kerja (work instruction), check sheet, serta mekanisme perawatan terintegrasi dengan Maintenance Instruction (MI), spesifikasi teknis, standar berlaku, dan kondisi lapangan. - Analisis & Teknis: Pendalaman analisis keandalan (reliability analysis), pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan (maintenance history), sistem komputerisasi, rekomendasi kebutuhan SDM berbasis referensi ilmiah, kelengkapan alat ukur Kereta Ukur, penyusunan Check Sheet Quality Control (QC), penyandingan dokumen, serta perbaikan tata naskah. Secara keseluruhan, kegiatan telah mencapai tahap pembahasan Draft Laporan Akhir. Namun, kualitas dan kelengkapan substansi dokumen tetap harus dipastikan melalui tindak lanjut atas seluruh masukan pembahasan sebelum laporan akhir ditetapkan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada penyempurnaan Draft Laporan Akhir berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara dan konsinyering tanggal 25–26 Agustus 2026. Penyedia jasa perlu memastikan seluruh masukan teknis telah diakomodasi, terutama kelengkapan Sispro yang mencakup SOP, instruksi kerja, process flow, check sheet, dan mekanisme pengendalian mutu yang terintegrasi dengan dokumen teknis serta standar perawatan yang berlaku. Selain itu, perlu dipastikan bahwa analisis keandalan, pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan, kebutuhan SDM, dan rekomendasi penerapan sistem komputerisasi telah disusun secara terukur dan didukung data serta referensi yang memadai. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen, memastikan konsistensi antara hasil survei, analisis, dan rekomendasi, serta menilai keterterapan sistem dan prosedur yang disusulkan terhadap kondisi operasional Kereta Ukur Milik Negara. Hasil perbaikan tersebut menjadi dasar pembahasan final dan penyelesaian laporan akhir sesuai dengan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 342.466.600	35	-	Rp 494.099.295	-	144.28%	Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 April 2026 dengan nilai Rp924.741.000. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyusunan Laporan Pendahuluan yang dibahas pada 12 Mei 2026 terkait metodologi, ruang lingkup, pendekatan analisis kebutuhan SDM, dan rencana pelaksanaan. Selanjutnya, Laporan Antara dibahas pada 23 Juli 2026 dengan catatan perbaikan bagi konsultan PT Telaga Bakti Nusantara, meliputi: penyempurnaan klasifikasi personel dan ruang lingkup sarana; penyesuaian dasar hukum pengelompokan Awak Sarana Perkeretapian (ASP), Operator Alat, dan Teknisi; penegasan status dan jenjang jabatan ASP; penerapan workload analysis dan FTE serta validasi statistik; batas maksimal jam operasional; workflow operasional sarana milik negara (SMN); integrasi data inventaris Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Balai Perawatan Perkeretaapian; skema penempatan dan pembiayaan SDM; roadmap pengembangan personel; serta peningkatan keakuratan data kajian. Sebagai pendalaman, FGD Kajian Kebutuhan SDM dalam Pengoperasian Sarana Perkeretapian Milik Negara diselenggarakan pada 20 Agustus 2026, dilanjutkan pembahasan Draft Akhir pada 24 September 2026. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai jadwal dan telah mencapai tahap Draft Akhir, dengan substansi rekomendasi dan penyempurnaan akhir yang terus dimatangkan untuk hasil yang optimal.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Draft Akhir tanggal 24 September 2026, konsultan perlu menyempurnakan dokumen berdasarkan seluruh masukan dari Tim Pendamping dan peserta pembahasan, termasuk memastikan setiap rekomendasi telah didukung data, analisis, dan dasar regulasi yang memadai. Penyempurnaan difokuskan pada konsistensi klasifikasi personel, kesesuaian ruang lingkup sarana yang dikaji, validitas perhitungan kebutuhan SDM, kejelasan workflow perawatan dan pemeriksaan, serta penyusunan rekomendasi penempatan, pengembangan kompetensi, dan pembiayaan SDM. Konsultan juga perlu memastikan tersedianya matriks tindak lanjut masukan, roadmap implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta penyempurnaan tata naskah dan akurasi data jumlah unit sarana yang dianalisis. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan untuk memastikan seluruh catatan pembahasan telah ditindaklanjuti dan substansi laporan sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penyelesaian laporan akhir dan penyelesaian administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 350.000.000	35	-	Rp 137.578.950	-	39.31%	Kegiatan Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp917.193.000. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Pelaksanaan pembahasan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pembahasan Laporan Antara merupakan tahapan penting untuk mengevaluasi hasil sementara kajian, khususnya terkait penyusunan pedoman rancang bangun dan rekayasa komponen sarana perkeretaapian. Hasil pembahasan menjadi dasar untuk menyempurnakan substansi kajian, memperdalam analisis teknis, serta memastikan rekomendasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan standardisasi dan pengembangan komponen sarana perkeretaapian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III berjalan sesuai jadwal dan mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pembahasan Laporan Antara tanggal 10 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan. Selanjutnya, penyedia jasa melanjutkan pendalaman analisis dan penyusunan pedoman rancang bangun serta rekayasa komponen sarana perkeretaapian, termasuk memastikan kesesuaian substansi dengan regulasi, standar teknis, dan kebutuhan penerapan di sektor perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pekerjaan serta memastikan seluruh masukan pembahasan telah ditindaklanjuti sebelum laporan akhir disampaikan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 700.000.000	35	-	Rp 291.846.195	-	41.69%	Kegiatan Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.945.641.300. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 8 Juni 2026, dengan hasil berupa masukan terhadap metodologi, ruang lingkup kajian, rencana pengumpulan data, dan pendekatan analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla). Selanjutnya, pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2026, dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 22 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendalaman substansi kajian, pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan, serta penyempurnaan hasil analisis. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan yang mendukung pencapaian target keluaran kajian.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta para pemangku kepentingan ke dalam penyempurnaan hasil kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla) didukung oleh data teknis yang memadai, kajian terhadap standar yang relevan, serta pertimbangan aspek keselamatan, keandalan, dan kebutuhan operasional. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil penyempurnaan kajian serta memantau pemenuhan seluruh keluaran sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan penyelesaian laporan akhir dan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8			Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Outout	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur Kereta Api (Railroad) [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 350.000.000	35	-	Rp 475.024.500	-	-	135.72%	Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp950.049.000. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 18 April 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai beberapa tahapan, yaitu penyampaian Laporan Pendahuluan pada 5 Mei 2026, Laporan Antara pada 22 Juli 2026, dan Laporan Akhir pada 28 Agustus 2026. Selanjutnya, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 11 September 2026 untuk membahas hasil kajian dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan hasil kajian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mendukung penyelesaian output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan FGD tanggal 11 September 2026, perlu dilakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh masukan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan oleh peserta untuk memastikan substansi hasil kajian telah mengakomodasi kebutuhan teknis dan regulasi. Penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen hasil kajian apabila masih terdapat catatan perbaikan, khususnya terkait standar, metode pengujian, persyaratan teknis, dan mekanisme sertifikasi kelaikan kendaraan yang berjalan di jalur kereta api. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen dan memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta ketentuan kontrak. Hasil akhir kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan standar dan tata cara pengujian sarta sertifikasi kelaikan kendaraan railroad.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana Pada Sarana Otomatis [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 350.000.000	35	-	Rp 143.402.287	-	-	40.97%	Kegiatan Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana pada Sarana Otomatis dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp956.015.250. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan penerbitan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Tim Pendamping pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa telah menyelesaikan dan membahas Laporan Pendahuluan pada tanggal 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Antara pada tanggal 27 Agustus 2026 dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 2 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman substansi kajian, khususnya terkait standar, metodologi, dan tata cara pengujian integrasi sub system pada sarana otomatis. Sampai dengan periode pelaporan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Tahapan berikutnya adalah pembahasan Laporan Draft Akhir yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengintegrasikan seluruh masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta peserta FGD ke dalam penyempurnaan dokumen kajian. Penyempurnaan tersebut perlu mencakup pendalaman analisis standar dan tata cara pengujian integrasi sub system, kesesuaian terhadap standar yang relevan, serta perumusan rekomendasi teknis yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pengujian sarana otomatis. Selanjutnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melaksanakan pembahasan Laporan Draft Akhir pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kelengkapan substansi, kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup kontrak, serta keterakomodasian masukan dari tahapan pembahasan sebelumnya. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyempurnaan laporan akhir sebelum dilakukan penyelesaian dan penyerahan output pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 420.000.000	35	-	Rp 158.836.838	-	-	37.82%	Kegiatan Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.058.912.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 21 Juni 2026. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 2 Juli 2026, dengan hasil pembahasan berupa masukan terhadap metodologi kajian, ruang lingkup evaluasi, mekanisme pengumpulan data, serta pendekatan penyusunan tata cara evaluasi persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Selanjutnya, Laporan Antara telah disampaikan pada tanggal 16 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Secara umum, progres kegiatan berjalan sesuai jadwal kontrak, dengan tahapan berikutnya berupa pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk memperoleh masukan dan pendalaman substansi kajian.	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melaksanakan FGD pada tanggal 22 Oktober 2026 dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh masukan terhadap hasil analisis, mekanisme evaluasi, serta substansi tata cara persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Hasil FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan laporan dan perumusan rekomendasi kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa seluruh masukan dan hasil pembahasan terdokumentasi dengan baik serta ditindaklanjuti dalam laporan berikutnya. Pemantauan terhadap progres pekerjaan akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas hasil kajian dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 350.000.000	35	-	Rp 142.345.013	-	-	40.67%	Kegiatan Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun telah dikontrakkan pada tanggal 20 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp948.966.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2026 pada tanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Dalam perkembangannya, penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Antara pada tanggal 17 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) direncanakan pada tanggal 16 Oktober 2026 untuk membahas substansi dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan sehingga diperlukan percepatan penyelesaian tahapan pekerjaan, khususnya pembahasan hasil kajian, penyempurnaan dokumen, dan penyusunan rekomendasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak agar seluruh keluaran kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan sisa waktu pelaksanaan yang tersedia.	Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap progres pekerjaan serta meminta penyedia jasa menyusun rencana percepatan penyelesaian kegiatan yang memuat tahapan pekerjaan, target waktu, dan keluaran yang harus dipenuhi. Pelaksanaan FGD yang direncanakan pada 16 Oktober 2026 perlu ditindaklanjuti dengan dokumentasi hasil pembahasan, inventarisasi masukan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan Laporan Antara. Selanjutnya, penyedia jasa agar segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam penyusunan laporan akhir dan rekomendasi terkait standar serta persyaratan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun. Setiap tahapan penyelesaian perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keterlambatan tidak semakin bertambah dan seluruh keluaran kontrak dapat dipenuhi.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Konsep SNI Yang Bersumber Dari JIS E4041 dan IEC 61133 [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 420.000.000	35	-	Rp 600.131.281	-	-	142.89%	Kegiatan Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction and Before Entry into Service) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 16 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.123.448.343. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping dengan nomor KP-K4 DJKA 26 Tahun 2026 pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan telah melalui beberapa tahapan, yaitu pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 4 Juni 2026, penyampaian Laporan Antara pada tanggal 22 Juli 2026, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 3 September 2026 untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap substansi kajian. Selanjutnya, Laporan Akhir telah disampaikan pada tanggal 30 September 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan dan penyelesaian hasil kajian. Tahapan tersebut mendukung penyusunan konsep SNI melalui harmonisasi standar JIS E4041 dan IEC 61133 dengan kebutuhan standardisasi pengujian sarana perkeretaapian di Indonesia.	Menindaklanjuti penyelesaian Laporan Akhir, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap substansi dan rekomendasi yang dihasilkan, termasuk memastikan seluruh masukan dari Tim Pengarah, Tim Pendamping, dan peserta FGD telah diakomodasi dalam dokumen akhir. Selanjutnya, perlu dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian konsep SNI dengan ketentuan standardisasi nasional, relevansi penerapan standar JIS E4041 dan IEC 61133, serta kesiapan substansi untuk diproses ke tahapan standardisasi berikutnya. Dokumen hasil kajian beserta notulensi pembahasan, daftar masukan, dan matriks tindak lanjut perlu dihimpun sebagai bukti dukung pelaksanaan kegiatan dan dasar pemantauan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 525.000.000	35	-	Rp 204.274.687	-	-	38.91%	Kegiatan Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 25 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.361.831.250. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 39 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan teknis. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 5 Agustus 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Penyampaian kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa tahapan pekerjaan telah berjalan sesuai rencana dan mendukung pelaksanaan kajian lebih lanjut terkait standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian. Selanjutnya, diperlukan pengawalan terhadap kualitas substansi kajian agar hasil pekerjaan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil kajian, termasuk analisis kondisi eksisting manufaktur sarana perkeretaapian, kesesuaian terhadap standar yang berlaku, serta identifikasi kebutuhan penyempurnaan standar manufaktur. Penyedia jasa diminta untuk menindaklanjuti masukan hasil pembahasan dan melengkapi data serta analisis yang diperlukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi akhir. Pemantauan pelaksanaan kontrak juga akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh keluaran pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal dan memenuhi ruang lingkup yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 350.000.000	35	-	Rp 148.562.123	-	-	42.45%	Kegiatan Reviu Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis (Spektek) Monorel dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp990.414.150. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 2 Juni 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 7 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Dalam rangka mendukung pendalaman substansi kajian, penyedia jasa juga telah menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Pengantar Pengumpulan Data untuk keperluan koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, kegiatan direncanakan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 Oktober 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III menunjukkan kemajuan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, dengan fokus pada pendalaman data teknis dan penyempurnaan hasil reviu peraturan tentang standar spesifikasi teknis monorel.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian dalam Laporan Antara, memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek regulasi dan spesifikasi teknis monorel yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, proses koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky perlu ditindaklanjuti untuk melengkapi bahan analisis dan memperkuat dasar penyusunan rekomendasi. Hasil pembahasan dan data tambahan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan hasil kajian dan menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi monorel serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 525.000.000	35	-	Rp 203.450.513	-	-	38.75%	Kegiatan Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 22 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.356.336.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 37 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 6 Juli 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem dijadwalkan pada 15 Oktober 2026 untuk membahas hasil kajian serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dengan tahapan selanjutnya difokuskan pada pembahasan dan penyempurnaan substansi kajian sebagai dasar penyusunan rekomendasi reviu rancangan peraturan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian, mengidentifikasi masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan, serta memperoleh kesepakatan terhadap substansi rancangan peraturan tentang standar spesifikasi teknis trem. Hasil FGD selanjutnya didokumentasikan dalam notula dan dirumuskan menjadi daftar masukan serta rekomendasi penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan, memastikan seluruh masukan relevan telah diakomodasi, serta memantau penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan jadwal kontrak. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian substansi rancangan peraturan dengan ketentuan yang berlaku, perkembangan teknologi trem, dan kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 420.000.000	35	-	Rp 165.908.925	-	-	39.5%	Kegiatan Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian telah dikontrakkan pada tanggal 29 Juni 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.106.059.500. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 41 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan kajian. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2026. Namun, penyampaian laporan tersebut mengalami keterlambatan dari tahapan pelaksanaan yang direncanakan sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan tahapan pekerjaan berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, khususnya untuk memastikan penyelesaian setiap tahapan kajian tetap sesuai dengan jadwal dan target output yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap keterlambatan penyampaian Laporan Pendahuluan serta berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk memastikan penyebab keterlambatan dan langkah percepatan yang diperlukan. Selanjutnya, perlu dilakukan pembahasan dan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan tim, disertai penyusunan jadwal kerja yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan kontrak. Penyedia jasa juga perlu mempercepat pengumpulan dan validasi data, inventarisasi standar komponen sarana perkeretaapian yang berlaku, serta analisis kebutuhan standarisasi komponen. Pemantauan kemajuan pekerjaan perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kesesuaian antara realisasi pekerjaan,	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standar Peralatan, Fasilitas Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 420.000.000	65,42	-	Rp 166.212.788	-	-	39.57%	Kegiatan Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 28 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.108.085.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan capaian berupa penyampaian Laporan Pendahuluan pada tanggal 26 Mei 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 31 Agustus 2026. Selain itu, telah dijadwalkan dan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 1 Oktober 2026 sebagai forum pembahasan dan pendalaman substansi kajian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan kemajuan sesuai tahapan yang direncanakan, baik dari sisi penyampaian dokumen maupun pelaksanaan pembahasan, sehingga mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan, hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD tanggal 1 Oktober 2026 perlu menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan substansi kajian, khususnya terkait standar peralatan dan fasilitas, tata cara pemeriksaan dan perawatan komponen bearing, serta kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi hasil pembahasan ke dalam laporan akhir, disertai analisis dan rumusan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan komponen bearing pada sarana perkeretaapian kecepatan normal. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen untuk memastikan kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 7.039.747.400**			**Rp 4.644.271.078**			**65.97%**			

Bulan: Agustus, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan B				Realisasi Bulan B			Capaian Bulan B		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output		Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume		Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PERKERETAPIAN MILIK NEGARA MENDUKUNG KESELAMATAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 71,01	47,62	46,01	Pengoperasian Sarana Milik Negara [unit]	20 unit pengoperasian	71	-	-	Rp 1.080.000.000	24	52,47	Rp 1.315.204.312	-	121,76%	Kegiatan pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang masuk dalam perhitungan capaian kinerja IKK ini yaitu pengoperasian SMN yang biayanya dibebankan kepanggaran pengoperasian SMN yaitu sebanyak 78 unit, namun terdapat pelaksanaan kegiatan pengoperasian SMN tanpa menggunakan anggaran pengoperasian SMN yang terbagi menjadi pengoperasian SMN komersial dan non komersial. Berikut rincian perhitungan capaian kinerja pengoperasian	melakukan pemantauan kegiatan agar berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara
			Jumlah Anggaran					Rp 1.080.000.000			Rp 1.315.204.312		121,76%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE SARANA PERKERETAAPIAN YANG DILAKUKAN RAMPCHECK Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 94,60	-	97,79	Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru di bidang sarana perkeretapian [unit]	94,60% sarana perkeretapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	94	-	-	Rp 0	-	100	Rp 291.529.992	-	-	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kelaipoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1044 unit dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang [unit]	94,60% sarana perkeretapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	94	-	-	Rp 0	-	-	Rp 0	-	-	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kelaipoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1044 unit dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Jumlah Anggaran					Rp 0			Rp 291.529.992		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 88,85	37,08	39,71	SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 0	-	36,19	Rp 102.363.500	-	-	Target Kinerja sampai bulan Agustus adalah sebesar 39,38% dengan realisasi Kinerja sampai bulan Agustus adalah 36,19%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian sampai bulan Agustus adalah sebesar 91,91%. Dengan keterangan realisasi sebanyak 5146 sertifikat, dengan rincian 3054 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 2092 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Dengan Target Sarana Aktif sebanyak 14.217.	Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian distribusi target bulanan revisi Renaksi) agar lebih mencerminkan pola realisasi yang aktual dan proporsional hingga akhir tahun, tanpa mengubah target tahunan yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan sertifikasi, pemutakhiran data sarana aktif, serta penguatan kelengkapan data dukung guna menjaga akurasi pengukuran dan kualitas pelaporan kinerja.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
			Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretapian Wilayah II [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian (14.217 target sertifikat jumlah	88	-	-	Rp 0	-	-	Rp 139.900.000	-	-	Target Kinerja sampai bulan Agustus adalah sebesar 39,38% dengan realisasi Kinerja sampai bulan Agustus adalah 36,19%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian sampai bulan Agustus adalah sebesar 91,91%. Dengan keterangan realisasi sebanyak 5146 sertifikat, dengan rincian 3054 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 2092 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Dengan Target Sarana Aktif sebanyak 14.217.	Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian distribusi target bulanan revisi Renaksi) agar lebih mencerminkan pola realisasi yang aktual dan proporsional hingga akhir tahun, tanpa mengubah target tahunan yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan sertifikasi, pemutakhiran data sarana aktif, serta penguatan kelengkapan data dukung guna menjaga akurasi pengukuran dan kualitas pelaporan kinerja.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			SUPERVISI PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 50.000.000	10,25	-	Rp 204.667.819	-	409,35%	Target Kinerja sampai bulan Agustus adalah sebesar 39,38% dengan realisasi Kinerja sampai bulan Agustus adalah 36,19%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian sampai bulan Agustus adalah sebesar 91,91%. Dengan keterangan realisasi sebanyak 5146 sertifikat, dengan rincian 3054 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 2092 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Dengan Target Sarana Aktif sebanyak 14.217.	Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian distribusi target bulanan revisi Renaksi) agar lebih mencerminkan pola realisasi yang aktual dan proporsional hingga akhir tahun, tanpa mengubah target tahunan yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan sertifikasi, pemutakhiran data sarana aktif, serta penguatan kelengkapan data dukung guna menjaga akurasi pengukuran dan kualitas pelaporan kinerja.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
			SUPERVISI PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian (14.217 target sertifikat jumlah	88	-	-	Rp 90.000.000	11,45	-	Rp 238.174.514	-	264,64%	Target Kinerja sampai bulan Agustus adalah sebesar 39,38% dengan realisasi Kinerja sampai bulan Agustus adalah 36,19%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian sampai bulan Agustus adalah sebesar 91,91%. Dengan keterangan realisasi sebanyak 5148 sertifikat, dengan rincian 3054 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 2092 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Dengan Target Sarana Aktif sebanyak 14.217.	Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian distribusi target bulanan revisi Renaksi) agar lebih mencerminkan pola realisasi yang aktual dan proporsional hingga akhir tahun, tanpa mengubah target tahunan yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan sertifikasi, pemutakhiran data sarana aktif, serta penguatan kelengkapan data dukung guna menjaga akurasi pengukuran dan kualitas pelaporan kinerja.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Jumlah Anggaran					Rp 140.000.000			Rp 685.424.833		489,59%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PERAWATAN SARANA DAN TEMPAT PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN YANG	-	100	PENGAWASAN PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN	100% PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN TELAH DITINDAKLANJUTI	100	-	-	Rp 20.000.000	10	100	Rp 58.611.100	-	294,06%	Pengawasan Perawatan Sarana : Telah dilaksanakan monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan Pengawasan Tempat Perawatan Sarana : Telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretapian di beberapa balai yaas milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY Manggarai dengan tidak tersedianya alat Load Bogie Test. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan Load Bogie Test tahun 2026.	Akan dilakukan koordinasi perihal tindak lanjut dokumen aliasnu kepada Pengelola Sarana Milik Negara	Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana
			Jumlah Anggaran					Rp 20.000.000			Rp 58.611.100		294,06%			

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

RONALD JACKSON SIMBOLON
NIP 197903032005021002

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 100	**78**	81,11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian [Persen]	Persentase Realisasi PNBP	646	75	11,61	Rp 0	-	81,1	Rp 0	108.13 %	-	Target bulan September adalah 78,00% dengan Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar Rp 1.216.645.000 dari target sebesar Rp 1.500.000.000 dengan persentase realisasi sebesar 81,10% sehingga capaian bulan Agustus adalah 103,97%	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan monitoring realisasi PNBP secara berkala, mengoptimalkan pelaksanaan layanan yang menghasilkan PNBP, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi penerimaan guna mendukung pencapaian target PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 0**		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI AKIP DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 80,80	-	0	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	1 paket	80	-	-	Rp 16.390.000	10,83	-	Rp 3.980.000	-	24.28%	Berdasarkan Tahun 2025 Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian : 80,75 Progres kegiatan SAKIP yang sudah dilakukan yaitu sudah tersedianya dokumen : - SK Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian - Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2026 Kesesuaian Anggaran dan Kegiatan yang terdapat pada DIPA dan POK saat ini sudah dilakukan revisi DIPA sebanyak 9 kali - Laporan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni - Laporan monitoring capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian - Sudah dilakukannya Penilaian Mandiri meliputi Pengisian Kertas kerja dan data dukung pada aplikasi SILAKI - Hasil Sementara Penilaian Mandiri Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 (Penilaian internal 83, Evaluator SAKIP Tk Es 1 : 81,05, Penilaian final hasil screening Setditjen:81,50)	- Melakukan Monitoring Capaian Kinerja pada periode Triwulan IV - Melakukan Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Triwulan IV - Melakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2026 terkait ketersediaan data	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	1 paket	80	-	-	Rp 50.000.000	10,37	-	Rp 39.030.224	-	78.06%			Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 66.390.000**			**Rp 43.010.224**		**64.78%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 13,75	-	0	Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	Nilai SPIP dan Nilai Manajemen Risiko	13	-	-	Rp 35.000.000	12,85	-	Rp 13.170.000	-	37.63%	Untuk mencapai Target Penerapan Manajemen Risiko Direktorarat Sarana perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian sudah menyiapkan data-data meliputi : 1) Sudah tersusunnya SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 2) Sudah tersusunnya SK Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 3) Sudah tersusunnya SK UPR dan UMR Tahun 2026, Piagam MR Tahun 2026, Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 (Penetapan Konteks, Profil Risiko, Rencana Penanganan Risiko) serta Penetapan Selera Risiko 4) Sudah tersedia SK UPG Tahun 2026 dan laporan Triwulan I Tahun 2026 UPG 5) Sudah tersusunnya Laporan triwulan I Manajemen Risiko 6) Sudah dilakukan penilaian mandiri Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil 20 (internal) dan Penilaian Mandiri UMR Eselon I sebesar 14	Melakukan pemantauan pengisian aplikasi Simarko dan Menunggu hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP dan MR Direktorat Sarana Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 35.000.000**			**Rp 13.170.000**		**37.63%**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 86,75	-	49,17	Perawatan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 683.448.338	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 626.723.957	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi kegiatan Perawatan 6 bulan (P6): 1. Lori Inspeksi SK 3 21 01 lokasi RKO Kadhipiro 2. Lori Inspeksi SK 3 21 02 lokasi Kantor BTP kelas II Padang 3. Lori Inspeksi SK 3 21 03 lokasi Kantor Satpel Lhokseumawe 4. Lori Inspeksi SK 3 21 04 lokasi Gudang Prasarana Barru 5. Track Motor Car (TMC) SP 3 21 02 lokasi Stasiun Purwokerto	melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perawatan 6 Bulan (P6) pada 4 unit Lori Inspeksi dan 1 unit Track Motor Car (TMC) di masing-masing lokasi penempatan, dengan meminta laporan progres perawatan, memeriksa kelengkapan dokumen pelaksanaan, serta mencatat kendala dan kebutuhan perbaikan dari setiap unit sebagai dasar penentuan tindak lanjut pemeliharaan berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Crane Gerbong Datar dan Kereta Penolong [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 7.215.949.242	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 2.472.071.618	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi kegiatan : 1. Perawatan Berkala 1 (satu) Tahunan pada Kereta Inspeksi SI 3 16 01 – SI 3 16 02 di Depo Lokomotif Cipinang pada Juli 2026 2. Pelaksanaan overhaul terhadap main engine dan genset pada Kereta Ukur SU 3 17 02 dan Kereta Inspeksi SI 3 11 01 di Depo Pulubrayan Medan pada Agustus s.d. September 2026 3. Perawatan Angkat Persegi Kereta Mendawai SI 0 16 01, Kereta Mahakam SI 0 09 01 dan Kereta Kapuas SI 0 09 02 di Workshop Balai Perawatan Perkeretaapia di bulan Agustus 2026	melakukan inventarisasi kondisi dan kebutuhan perawatan Kereta Ukur serta kereta kedinasan lainnya, menyusun prioritas penanganan berdasarkan kondisi teknis dan intensitas penggunaan, serta menyiapkan jadwal dan kebutuhan anggaran perawatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terencana, mendukung kesiapan operasional sarana, dan meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perawatan Sarana Milik Negara Untuk Pemeliharaan Jalan Rel [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 1.371.504.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 1.371.504.000,-. Dengan kegiatan perawatan MTT Matisa Milik Negara SR 3 18 02 yang berlokasi di Stasiun Geurogok, Aceh didukung dengan kegiatan pemeriksaan bersama kondisi sarana pada April 2026 oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	akan dilakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran dan progres kegiatan perawatan MTT Matisa Milik Negara SR 3 18 02 di Stasiun Geurogok, Aceh, serta memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kondisi sarana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mendukung optimalisasi kinerja anggaran	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 427.908.547	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Kegiatan telah didukung dengan surat keputusan nomor KP-PPSP DJKA 9 TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Pengawas Pekerjaan Kegiatan Perbaikan Alat Uji Komponen Sarana Perkeretaapian pada satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9			Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (umum, rumah tangga dan perlengkapan) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 20.000.000	12,64	49,17	Rp 137.288.900	-	-	686.44%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (pelayanan umum, rumah tangga, perlengkapan) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 11.000.000	14,7	49,17	Rp 72.265.000	-	-	656.95%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 15.507.000	8,33	49,17	Rp 40.720.000	-	-	262.59%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Honor Operasional Satuan Kerja [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 100.000.000	8,45	49,17	Rp 423.333.871	-	-	423.33%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PIMPINAN DAN SUB BAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 40.000.000	10,52	49,17	Rp 231.505.847	-	-	578.76%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 30.000.000	9,95	49,17	Rp 9.870.100	-	-	32.9%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 50.000.000	8,21	49,17	Rp 436.019.324	-	-	872.04%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Realisasi Anggaran hingga akhir September 2026 sebesar Rp 30.676.291.949 dari Pagu Anggaran Revisi sebesar Rp 68.090.836.000.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN MONITORING PERAWATAN SARANA MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	8,71	49,17	Rp 296.391.738	-	-	493.99%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	9,78	49,17	Rp 115.437.285	-	-	192.4%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 20.100.000	-	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melakukan pemantauan dan percepatan kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 20.000.000	8,58	49,17	Rp 20.752.275	-	103.76%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			INSPEKSI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 73.400.000	9,09	49,17	Rp 291.022.710	-	396.49%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian pada tanggal 3 Maret 2026 di Depo Manggarai, Jakarta (KA.402/116/K4/DJKA/2026) - Pemaparan Hasil Inspeksi Coil Spring Tester di Balai Perawatan Perkeretaapian dan di Balai Yasa Yogyakarta pada Maret 2026 - Melaksanakan Kegiatan Inspeksi Kelaikan Sarana Terhadap Trainset 6 Kereta Rel Listrik Bandara Soetta milik PT KCI pada 3 s.d. 4 Maret 2026 di Depo Manggarai (ND 37/K4/III/2026) - Kegiatan inspeksi sarana baru jenis KRL milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada April 2026 di dukung dengan SK Direktur Sarana Perkeretaapian Tim Pelaksana Inspeksi Pengoperasian Sarana Baru Jenis KRL Milik PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) nomor KP-K4 DJKA 24 Tahun 2026 - pelaksanaan kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian pada tanggal 19 – 22 Mei 2026 di Depo Lokomotif Cipinang dan Balai Yasa Manggarai - pelaksanaan Inspeksi pengoperasian sarana dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Juli 2026 di Depo Lokomotif dan Depo Kereta Bandung - Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 September 2026 di Depo Kereta Semarang - kegiatan inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian KRD eks Prameks dan KRD Bandara YIA pada tanggal 9 – 10 September 2026 di Depo Lokomotif Yogyakarta	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			INSPEKSI SARANA PERKERETAAPIAN DI WILAYAH II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	9,73	49,17	Rp 96.543.872	-	160.91%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : Inspeksi pengoperasian sarana akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tanggal 21 s.d. 24 September 2026 di Divre IV Tanjungkarang (Depo Gerbong Rejosari); b. Tanggal 21 s.d. 24 September 2026 di Divre III Palembang (Depo Gerbong Simpang); c. Tanggal 28 September s.d. 2 Oktober 2026 di Divre II Padang (Depo Gerbong Bukittuo)	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			MONITORING DAN REKONSILIASI DATA IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 25.000.000	12,68	49,17	Rp 28.237.993	-	112.95%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.		Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 14.200.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - telaah dilaksanakan Bimbingan Teknis Di Bidang Kelaikan Sarana Wilayah I dengan tema "Mewujudkan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Melalui Pengujian Dan Inspeksi Yang Profesional" pada April 2026 di Bogor, Jawa Barat	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 0	-	-		Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS PROSES MANUFAKTUR SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 216.993.600	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 162.754.266	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNISRAPAT DAN WORKSHOP PENGELOLAAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 195.349.900	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			TRANSFER KNOWLADGE KELAIKAN SARANA OTOMATIS [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 196.100.850	15	49,17	Rp 0	-	0%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
			PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI BIDANG KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 17.856.965	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			PENYUSUNAN DAN EVALUASI PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 50.914.330	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			KEGIATAN PENGADAAN 1 (SATU) PAKET PERALATAN INSPEKSI KELAIKAN SARANA WILAYAH I [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 374.470.651	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNISTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RAMPCHECK SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 150.638.800	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI DAN SUPERVISI SARANA PERKERETAAPIAN [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 0	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kegiatan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAI) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 5.112.500	8,33	49,17	Rp 18.170.000	-	355.4%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kegiatan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 5.000.000	8,42	49,17	Rp 23.194.161	-	463.88%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : - Inventarisasi Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Perawatan atau Penghapusan atau Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN) Berupa Alat Uji di Balai Yasa Tegal pada Januari 2026 (PL.204/27/K4/DJKA/2026) - Inventarisasi Administrasi dan Teknis BMN berupa Alat Angkutan Kereta Api Lainnya (Kereta Ukur)	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 17.000.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker PPSP [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 77.120.000	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Langganan Software Multimedia [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 0	-	49,17	Rp 4.551.880	-	-	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pengembangan upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 198.000.000	24,75	49,17	Rp 194.305.500	-	98.13%	Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98. Rincian kegiatan pendukung : Dilakukan Pembahasan Pengembangan Aplikasi SISAKA untuk Sistem Monitoring dan Pelaporan Tidak Lanjut Rampcheck Secara Terdokumentasi dan Terintegrasi pada 04 Juni 2026 (ND 109/K4/VI/2026)	membuat list kebutuhan untuk pengembangan modul pada aplikasi direktorat sarana perkeretaapian yang kemudian bisa di implementasikan dalam aplikasi	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9			Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			LAYANAN PERKANTORAN SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN (layanan perkantoran) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 50.000.000	9,99	49,17	Rp 341.957.958	-	683.92%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana
			ADMINISTRASI DAN LAYANAN KANTOR DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN (layanan perkantoran) [layanan, laporan, dokumen, unit]	layanan, laporan, dokumen, unit	86	-	-	Rp 60.000.000	4,92	49,17	Rp 1.162.466.083	-	1937.44%		Berdasarkan Aplikasi Smart capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 49,17 terdiri dari : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,36 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 87,98.	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA dan POK TA 2026	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 1.079.120.350**			**Rp 18.039.038.711**		**1671.64%**				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	-	0	Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian [Nilai]	Nilai Arsip	65	-	-	Rp 75.000.000	10,65	-	Rp 55.794.918	-	74.39%		Sudah dilakukan audit arsip internal Direktorat Sarana Perkeretaapian oleh Biro pada bulan Mei 2026 dan sudah dilakukan pembahasan nilai sementara pengawasan kearsipan internal Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 30 September 2026 dengan nilai 76,49	Menunggu hasil penilaian audit Kearsipan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 75.000.000**			**Rp 55.794.918**		**74.39%**				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KONEKTIVITAS SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN TEKNIS BIDANG KONEKTIVITAS SARANA PERKERETAAPIAN	-	79,77	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa [Persen]	dokumen	77	-	-	Rp 35.000.000	8,18	79,77	Rp 161.923.931	-	462.64%		Realisasi kinerja bulan September 4 dokumen : -Rekayasa Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Pembangkit (P) Milik PT KAI (Persero) -Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan Rel Penarik Lori Gerinda Rel Milik PT MRT (Perseroda) -Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik untuk Angkutan Barang Sumatera Selatan Milik PT KAI (Persero) -Rancang Bangun Peralatan Khusus Pemeliharaan Jalan Rel Jenis Lori Gerinda Rel Milik PT MRT Jakarta	telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan, standar teknis, serta aspek keselamatan perkeretaapian yang berlaku. Dan juga akan dilakukan pembahasan dan verifikasi dokumen lainnya yang telah diajukan oleh setiap operator	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 35.000.000**			**Rp 161.923.931**		**462.64%**				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA PELAYANAN BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: NILAI Target Dalam PK: 95,25	-	98,28	INDEKS KEPUASAN MASAYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN [...]	Laporan	95	-	-	Rp 0	-	98,28	Rp 0	-	-		Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d September 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,28 dari skala 100 atau 3.93 dalam skala 4 atau 17.20 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik. Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d September 2026. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.	melakukan pemantauna kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 0**		-				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 59,25	-	37,03	Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 180.000.000	15	-	Rp 568.028.625	-	315.57%		Kegiatan Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.136.067.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan telah mencapai pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara, masih diperlukan penyempurnaan terhadap pemenuhan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK, khususnya penyelesaian ruang lingkup G sampai dengan K. Selain itu, masih diperlukan pendalaman terhadap beberapa aspek teknis, antara lain standardisasi definisi dan metodologi pengujian, kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, perlakuan terhadap sarana yang telah berumur, penggunaan simulasi dalam pengujian, pengujian distribusi beban bogie, serta penyempurnaan parameter pengujian. Dengan demikian, meskipun progres kegiatan telah berjalan sesuai jadwal, masih diperlukan penyempurnaan substansi agar seluruh output kajian dapat memenuhi ruang lingkup dan kualitas yang dipersyaratkan.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara, penyedia jasa akan melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian seluruh ruang lingkup studi, khususnya ruang lingkup G sampai dengan K. Pendalaman juga akan dilakukan melalui perluasan benchmarking terhadap standar dan praktik pengujian sarana perkeretaapian internasional, termasuk China Railway Standards, serta penyempurnaan definisi, metodologi, parameter, dan kriteria pengujian. Selain itu, akan disusun kriteria keberterimaan dokumen perawatan operator, termasuk pengaturan terhadap sarana yang telah berumur dan pemanfaatan simulasi sebagai bagian dari pendekatan pengujian. Penyedia jasa juga diarahkan untuk menyusun draft pedoman/juknis, tata cara pengujian, dan checksheet yang spesifik untuk setiap jenis sarana sebagai bahan penyelesaian Laporan Akhir dan penyusunan Draf Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan pemantauan dan pembahasan secara berkala untuk memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Laporan Antara ditindaklanjuti dan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Pelaksanaan Standarisasi Dan Sertifikasi Peralatan Perawatan Di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 180.000.000	15	-	Rp 566.402.475	-	314.67%		Kegiatan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.068.819.000. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, ditandai dengan telah dilaksanakannya pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 7 Juli 2026 sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, masih diperlukan penyempurnaan substansi kajian, khususnya terkait standarisasi tempat perawatan pada Depo (light maintenance) dan Balai Yasa (heavy maintenance), standar dan tata cara sertifikasi peralatan perawatan, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi beserta lembaga sertifikasinya, serta kajian terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, diperlukan pendalaman terkait alternatif kajian pembentukan unit kerja di lingkungan DJKA yang dapat melaksanakan sertifikasi dan kalibrasi, analisis kemampuan dan kompetensi sertifikasi DJKA, benchmarking dengan praktik di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi. Hasil evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan data lapangan pada beberapa lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi, serta penyempurnaan tata naskah dan penyeragaman nomenklatur dalam dokumen kajian.	Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, penyedia jasa akan melakukan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan dan hasil evaluasi rapat. Selanjutnya dilaksanakan pengumpulan dan analisis data pada lokasi tempat perawatan dan lembaga sertifikasi yang telah ditentukan, kajian terhadap standar nasional dan internasional, inventarisasi peralatan yang memerlukan sertifikasi, identifikasi lembaga sertifikasi, serta analisis terhadap mekanisme dan kompetensi sertifikasi. Selain itu, kajian akan diperdalam melalui analisis alternatif pembentukan unit kerja sertifikasi dan kalibrasi di lingkungan DJKA, benchmarking terhadap praktik standarisasi dan sertifikasi di beberapa negara, serta penguatan aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan sertifikasi peralatan perawatan. Hasil dari seluruh tindak lanjut tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kajian dan penyusunan Laporan Antara serta menjadi dasar untuk tahapan penyelesaian pekerjaan berikutnya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9			Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 145.502.400	15	-	Rp 134.270.595	-	92.28%		Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi Milik Negara telah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp895.137.300. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan penyusunan dan pembahasan Laporan Antara. Pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembahasan Laporan Antara merupakan bagian dari evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan, khususnya dalam pendalaman hasil kajian mengenai sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi kajian, termasuk memastikan kesesuaian analisis dengan kondisi operasional, kebutuhan pemeliharaan, dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal, dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan hasil kajian dan penyelesaian tahapan pekerjaan berikutnya	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara tanggal 24 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian serta Tim Pengarah dan Tim Pendamping. Penyempurnaan tersebut mencakup pendalaman analisis kondisi eksisting, perumusan sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta inspeksi milik negara, dan penyesuaian rekomendasi agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya, penyedia jasa akan melanjutkan penyusunan laporan akhir yang memuat hasil kajian secara menyeluruh, termasuk rancangan sistem dan prosedur perawatan, tata cara pemeriksaan, pembagian peran dan tanggung jawab pelaksana, serta rekomendasi implementasi. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen serta memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Sistem Dan Prosedur Perawatan Dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 144.760.800	15	-	Rp 847.595.650	-	585.51%		Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp923.631.000. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyusunan dan pembahasan Laporan Pendahuluan pada 11 Mei 2026, dilanjutkan pembahasan Laporan Antara pada 17 Juli 2026. Dalam pembahasan tersebut, konsultan PT Ardi Widya Utama memaparkan hasil tinjauan literatur, metodologi, survei, analisis kesenjangan (gap analysis), dan rencana kerja lanjutan. Hasil pembahasan menghasilkan sejumlah masukan untuk menyempurnakan kajian, khususnya pengembangan Sistem dan Prosedur (Sispro) yang meliputi ruang lingkup, alur proses (process flow), SOP, instruksi kerja (work instruction), check sheet, serta mekanisme perawatan yang terintegrasi dengan Maintenance Instruction (MI), spesifikasi teknis, standar yang berlaku, dan kondisi aktual di lapangan. Penyempurnaan kajian juga diarahkan pada pendalaman analisis keandalan (reliability analysis), pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan (maintenance history), sistem komputerisasi, serta rekomendasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan referensi ilmiah. Aspek teknis lainnya mencakup kelengkapan jenis dan spesifikasi alat ukur, penyusunan Check Sheet Quality Control (QC), penyandingan dokumen secara sistematis, serta perbaikan tata naskah dan dokumentasi pendukung. Tim Pendamping menerima Laporan Antara dengan kewajiban perbaikan sebelum penyusunan Draft Laporan Akhir, dengan batas waktu penyerahan dokumen perbaikan pada 28 Juli 2026. Selanjutnya, konsinyering dan pembahasan Draft Laporan Akhir dilaksanakan pada 25–26 Agustus 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal hingga tahap pembahasan Draft Laporan Akhir. Namun, tindak lanjut atas seluruh masukan tetap diperlukan untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kualitas substansi dokumen sebelum laporan akhir ditetapkan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada penyempurnaan Draft Laporan Akhir berdasarkan hasil pembahasan Laporan Antara dan konsinyering tanggal 25–26 Agustus 2026. Penyedia jasa perlu memastikan seluruh masukan teknis telah diakomodasi, terutama kelengkapan Sispro yang mencakup SOP, instruksi kerja, process flow, check sheet, dan mekanisme pengendalian mutu yang terintegrasi dengan dokumen teknis serta standar perawatan yang berlaku. Selain itu, perlu dipastikan bahwa analisis keandalan, pola perawatan, pengelolaan riwayat perawatan, kebutuhan SDM, dan rekomendasi penerapan sistem komputerisasi telah disusun secara terukur dan didukung data serta referensi yang memadai. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen, memastikan konsistensi antara hasil survei, analisis, dan rekomendasi, serta menilai keterterapan sistem dan prosedur yang diusulkan terhadap kondisi operasional Kereta Ukur Milik Negara. Hasil perbaikan tersebut menjadi dasar pembahasan final dan penyelesaian laporan akhir sesuai dengan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 146.771.400	15	-	Rp 494.099.295	-	336.65%		Kegiatan Studi Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur Milik Negara dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 2 April 2026 dengan nilai Rp924.741.000. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Focus Group Discussion (FGD), dan Draft Akhir. Pembahasan Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada 12 Mei 2026 dengan masukan terkait metodologi, ruang lingkup kajian, analisis kebutuhan SDM, dan rencana pelaksanaan kegiatan. Pembahasan Laporan Antara dilaksanakan pada 23 Juli 2026 dengan sejumlah catatan perbaikan bagi konsultan PT Telaga Bakti Nusantara, meliputi penyempurnaan klasifikasi personel dan ruang lingkup sarana, dasar hukum pengelompokan Awak Sarana Perkeretaapian (ASP), Operator Alat, dan Teknisi, serta penegasan status dan jenjang jabatan ASP. Konsultan juga diminta memperjelas metode workload analysis dan Full Time Equivalent (FTE), validasi statistik, batas jam operasional personel, serta alur kerja pengoperasian sarana milik negara (SMN). Selain itu, diperlukan integrasi data inventaris, perumusan skema penempatan dan pembiayaan SDM, penyusunan roadmap kebutuhan personel, serta peningkatan konsistensi dan akurasi data kajian. Pendalaman kajian dilaksanakan melalui FGD Kebutuhan SDM dalam Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara pada 20 Agustus 2026, dilanjutkan pembahasan Draft Akhir pada 24 September 2026. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai jadwal hingga tahap pembahasan Draft Akhir. Selanjutnya, perlu dipastikan seluruh masukan telah diakomodasi dalam penyempurnaan dokumen agar hasil studi dapat menjadi dasar penyusunan sistem dan prosedur perawatan serta pemeriksaan kereta ukur milik negara.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Draft Akhir tanggal 24 September 2026, konsultan perlu menyempurnakan dokumen berdasarkan seluruh masukan dari Tim Pendamping dan peserta pembahasan, termasuk memastikan setiap rekomendasi telah didukung data, analisis, dan dasar regulasi yang memadai. Penyempurnaan difokuskan pada konsistensi klasifikasi personel, kesesuaian ruang lingkup sarana yang dikaji, validitas perhitungan kebutuhan SDM, kejelasan workflow perawatan dan pemeriksaan, serta penyusunan rekomendasi penempatan, pengembangan kompetensi, dan pembiayaan SDM. Konsultan juga perlu memastikan tersedianya matriks tindak lanjut masukan, roadmap implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta penyempurnaan tata naskah dan akurasi data jumlah unit sarana yang dianalisis. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan untuk memastikan seluruh catatan pembahasan telah ditindaklanjuti dan substansi laporan sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penyelesaian laporan akhir dan penyelesaian administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 150.000.000	15	-	Rp 458.596.500	-	305.73%		Kegiatan Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 13 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp917.193.000. Sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan telah mencapai tahapan pembahasan Laporan Antara yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Pelaksanaan pembahasan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pembahasan Laporan Antara merupakan tahapan penting untuk mengevaluasi hasil sementara kajian, khususnya terkait penyusunan pedoman rancang bangun dan rekayasa komponen sarana perkeretaapian. Hasil pembahasan menjadi dasar untuk menyempurnakan substansi kajian, memperdalam analisis teknis, serta memastikan rekomendasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan standardisasi dan pengembangan komponen sarana perkeretaapian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III berjalan sesuai jadwal dan mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pembahasan Laporan Antara tanggal 10 September 2026, penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan. Selanjutnya, penyedia jasa melanjutkan pendalaman analisis dan penyusunan pedoman rancang bangun serta rekayasa komponen sarana perkeretaapian, termasuk memastikan kesesuaian substansi dengan regulasi, standar teknis, dan kebutuhan penerapan di sektor perkeretaapian. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pekerjaan serta memastikan seluruh masukan pembahasan telah ditindaklanjuti sebelum laporan akhir disampaikan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 300.000.000	15	-	Rp 972.820.650	-	324.27%		Kegiatan Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.945.641.300. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 8 Juni 2026, dengan hasil berupa masukan terhadap metodologi, ruang lingkup kajian, rencana pengumpulan data, dan pendekatan analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla). Selanjutnya, pembahasan Laporan Antara telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2026, dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla) pada tanggal 22 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendalaman substansi kajian, pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan, serta penyempurnaan hasil analisis. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan yang mendukung pencapaian target keluaran kajian.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta para pemangku kepentingan ke dalam penyempurnaan hasil kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa analisis teknologi gerbong angkutan kendaraan (Rolla) didukung oleh data teknis yang memadai, kajian terhadap standar yang relevan, serta pertimbangan aspek keselamatan, keandalan, dan kebutuhan operasional. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil penyempurnaan kajian serta memantau pemenuhan seluruh keluaran sesuai dengan ruang lingkup kontrak. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan penyelesaian laporan akhir dan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur Kereta Api (Railroad) [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 150.000.000	15	-	Rp 475.024.500	-	316.68%		Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp950.049.000. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pekerjaan Jasa Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (Railroad) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 18 April 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai beberapa tahapan, yaitu penyampaian Laporan Pendahuluan pada 5 Mei 2026, Laporan Antara pada 22 Juli 2026, dan Laporan Akhir pada 28 Agustus 2026. Selanjutnya, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 11 September 2026 untuk membahas hasil kajian dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan hasil kajian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mendukung penyelesaian output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan FGD tanggal 11 September 2026, perlu dilakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh masukan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan oleh peserta untuk memastikan substansi hasil kajian telah mengakomodasi kebutuhan teknis dan regulasi. Penyedia jasa perlu melakukan penyempurnaan dokumen hasil kajian apabila masih terdapat catatan perbaikan, khususnya terkait standar, metode pengujian, persyaratan teknis, dan mekanisme sertifikasi kelaikan kendaraan yang berjalan di jalur kereta api. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil penyempurnaan dokumen dan memastikan seluruh keluaran pekerjaan telah memenuhi ruang lingkup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta ketentuan kontrak. Hasil akhir kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan standar dan tata cara pengujian serta sertifikasi kelaikan kendaraan railroad.	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9			Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			Kajian Tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana Pada Sarana Otomatis [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 150.000.000	15	-	Rp 510.058.875	-	340.04%		Kegiatan Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana pada Sarana Otomatis dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp956.015.250. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan penerbitan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Tim Pendamping pada tanggal 26 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa telah menyelesaikan dan membahas Laporan Pendahuluan pada tanggal 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Antara pada tanggal 27 Agustus 2026 dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 2 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman substansi kajian, khususnya terkait standar, metodologi, dan tata cara pengujian integrasi sub system pada sarana otomatis. Sampai dengan periode pelaporan Triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Tahapan berikutnya adalah pembahasan Laporan Draft Akhir yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026.	Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD, penyedia jasa perlu mengintegrasikan seluruh masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengarah, Tim Pendamping, serta peserta FGD ke dalam penyempurnaan dokumen kajian. Penyempurnaan tersebut perlu mencakup pendalaman analisis standar dan tata cara pengujian integrasi sub system, kesesuaian terhadap standar yang relevan, serta perumusan rekomendasi teknis yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pengujian sarana otomatis. Selanjutnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping akan melaksanakan pembahasan Laporan Draft Akhir pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kelengkapan substansi, kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup kontrak, serta keterakomodasian masukan dari tahapan pembahasan sebelumnya. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyempurnaan laporan akhir sebelum dilakukan penyelesaian dan penyerahan output pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 180.000.000	15	-	Rp 158.836.838	-	88.24%		Kegiatan Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 8 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.058.912.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 21 Juni 2026. Penyedia jasa telah menyusun Laporan Pendahuluan yang dibahas pada tanggal 2 Juli 2026, dengan hasil pembahasan berupa masukan terhadap metodologi kajian, ruang lingkup evaluasi, mekanisme pengumpulan data, serta pendekatan penyusunan tata cara evaluasi persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Selanjutnya, Laporan Antara telah disampaikan pada tanggal 16 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Secara umum, progres kegiatan berjalan sesuai jadwal kontrak, dengan tahapan berikutnya berupa pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2026 untuk memperoleh masukan dan pendalaman substansi kajian.	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melaksanakan FGD pada tanggal 22 Oktober 2026 dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh masukan terhadap hasil analisis, mekanisme evaluasi, serta substansi tata cara persetujuan pengoperasian peralatan khusus. Hasil FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan laporan dan perumusan rekomendasi kajian. Penyedia jasa juga perlu memastikan bahwa seluruh masukan dan hasil pembahasan terdokumentasi dengan baik serta ditindaklanjuti dalam laporan berikutnya. Pemantauan terhadap progres pekerjaan akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas hasil kajian dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 150.000.000	15	-	Rp 505.777.050	-	337.18%		Kegiatan Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun telah dikontrakkan pada tanggal 20 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp948.966.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2026 pada tanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Dalam perkembangannya, penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Antara pada tanggal 17 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) direncanakan pada tanggal 16 Oktober 2026 untuk membahas substansi dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan sehingga diperlukan percepatan penyelesaian tahapan pekerjaan, khususnya pembahasan hasil kajian, penyempurnaan dokumen, dan penyusunan rekomendasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak agar seluruh keluaran kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan sisa waktu pelaksanaan yang tersedia.	Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Tim Pendamping perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap progres pekerjaan serta meminta penyedia jasa menyusun rencana percepatan penyelesaian kegiatan yang memuat tahapan pekerjaan, target waktu, dan keluaran yang harus dipenuhi. Pelaksanaan FGD yang direncanakan pada 16 Oktober 2026 perlu ditindaklanjuti dengan dokumentasi hasil pembahasan, inventarisasi masukan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan Laporan Antara. Selanjutnya, penyedia jasa agar segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam penyusunan laporan akhir dan rekomendasi terkait standar serta persyaratan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun. Setiap tahapan penyelesaian perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keterlambatan tidak semakin bertambah dan seluruh keluaran kontrak dapat dipenuhi.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Penyusunan Konsep SNI Yang Bersumber Dari JIS E4041 dan IEC 61133 [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 180.000.000	15	-	Rp 600.131.281	-	333.41%		Kegiatan Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133 (Testing of Rolling Stock on Completion of Construction and Before Entry into Service) dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 16 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.123.448.343. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping dengan nomor KP-K4 DJKA 26 Tahun 2026 pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai dasar koordinasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan telah melalui beberapa tahapan, yaitu pembahasan Laporan Pendahuluan pada tanggal 4 Juni 2026, penyampaian Laporan Antara pada tanggal 22 Juli 2026, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 3 September 2026 untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap substansi kajian. Selanjutnya, Laporan Akhir telah disampaikan pada tanggal 30 September 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan penyusunan laporan hingga pembahasan dan penyelesaian hasil kajian. Tahapan tersebut mendukung penyusunan konsep SNI melalui harmonisasi standar JIS E4041 dan IEC 61133 dengan kebutuhan standardisasi pengujian sarana perkeretaapian di Indonesia.	Menindaklanjuti penyelesaian Laporan Akhir, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap substansi dan rekomendasi yang dihasilkan, termasuk memastikan seluruh masukan dari Tim Pengarah, Tim Pendamping, dan peserta FGD telah diakomodasi dalam dokumen akhir. Selanjutnya, perlu dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian konsep SNI dengan ketentuan standardisasi nasional, relevansi penerapan standar JIS E4041 dan IEC 61133, serta kesiapan substansi untuk diproses ke tahapan standardisasi berikutnya. Dokumen hasil kajian beserta notulensi pembahasan, daftar masukan, dan matriks tindak lanjut perlu dihimpun sebagai bukti dukung pelaksanaan kegiatan dan dasar pemantauan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 225.000.000	15	-	Rp 722.951.324	-	321.31%		Kegiatan Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 25 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.361.831.250. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 39 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan teknis. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 5 Agustus 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Penyampaian kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa tahapan pekerjaan telah berjalan sesuai rencana dan mendukung pelaksanaan kajian lebih lanjut terkait standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian. Selanjutnya, diperlukan pengawalan terhadap kualitas substansi kajian agar hasil pekerjaan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri manufaktur sarana perkeretaapian nasional.	Menindaklanjuti penyampaian Laporan Antara, Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil kajian, termasuk analisis kondisi eksisting manufaktur sarana perkeretaapian, kesesuaian terhadap standar yang berlaku, serta identifikasi kebutuhan penyempurnaan standar manufaktur. Penyedia jasa diminta untuk menindaklanjuti masukan hasil pembahasan dan melengkapi data serta analisis yang diperlukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi akhir. Pemantauan pelaksanaan kontrak juga akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh keluaran pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal dan memenuhi ruang lingkup yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 150.000.000	15	-	Rp 495.207.076	-	330.14%		Kegiatan Reviu Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis (Spektek) Monorel dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 31 Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp990.414.150. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 2 Juni 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 7 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan kajian. Dalam rangka mendukung pendalaman substansi kajian, penyedia jasa juga telah menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Pengantar Pengumpulan Data untuk keperluan koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, kegiatan direncanakan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 Oktober 2026. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III menunjukkan kemajuan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, dengan fokus pada pendalaman data teknis dan penyempurnaan hasil reviu peraturan tentang standar spesifikasi teknis monorel.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian dalam Laporan Antara, memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek regulasi dan spesifikasi teknis monorel yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, proses koordinasi dan pengumpulan data teknis dengan Unitsky perlu ditindaklanjuti untuk melengkapi bahan analisis dan memperkuat dasar penyusunan rekomendasi. Hasil pembahasan dan data tambahan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan hasil kajian dan menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi monorel serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 225.000.000	15	-	Rp 678.168.375	-	301.41%		Kegiatan Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 22 Mei 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.356.336.750. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Pengarah dan Pendamping Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 37 Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026 sebagai dasar koordinasi dan pendampingan teknis selama pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 6 Juli 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 21 September 2026. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) Studi Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem dijadwalkan pada 15 Oktober 2026 untuk membahas hasil kajian serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dengan tahapan selanjutnya difokuskan pada pembahasan dan penyempurnaan substansi kajian sebagai dasar penyusunan rekomendasi reviu rancangan peraturan.	Tindak lanjut kegiatan difokuskan pada pelaksanaan FGD untuk membahas hasil kajian, mengidentifikasi masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan, serta memperoleh kesepakatan terhadap substansi rancangan peraturan tentang standar spesifikasi teknis trem. Hasil FGD selanjutnya didokumentasikan dalam notula dan dirumuskan menjadi daftar masukan serta rekomendasi penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Direktorat Sarana Perkeretaapian bersama Tim Pengarah dan Pendamping akan melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan, memastikan seluruh masukan relevan telah diakomodasi, serta memantau penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan jadwal kontrak. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian substansi rancangan peraturan dengan ketentuan yang berlaku, perkembangan teknologi trem, dan kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian.	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9			Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran		Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah		%	%			
			Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 180.000.000	15	-	Rp 165.908.925	-	92.17%		Kegiatan Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian telah dikontrakkan pada tanggal 29 Juni 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.106.059.500. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan SK Tim Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor KP-K4 DJKA 41 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026 sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan kajian. Penyedia jasa telah menyampaikan Laporan Pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2026. Namun, penyampaian laporan tersebut mengalami keterlambatan dari tahapan pelaksanaan yang direncanakan sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan tahapan pekerjaan berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, khususnya untuk memastikan penyelesaian setiap tahapan kajian tetap sesuai dengan jadwal dan target output yang telah ditetapkan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi terhadap keterlambatan penyampaian Laporan Pendahuluan serta berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk memastikan penyebab keterlambatan dan langkah percepatan yang diperlukan. Selanjutnya, perlu dilakukan pembahasan dan penyempurnaan Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan tim, disertai penyusunan jadwal kerja yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan kontrak. Penyedia jasa juga perlu mempercepat pengumpulan dan validasi data, inventarisasi standar komponen sarana perkeretaapian yang berlaku, serta analisis kebutuhan standarisasi komponen. Pemantauan kemajuan pekerjaan perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kesesuaian antara	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Studi Standar Peralatan, Fasilitas Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal [Dokumen]	17 NSPK	59	-	-	Rp 180	0	-	Rp 554.042.625	-	307801458 .33%		Kegiatan Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal telah dilaksanakan berdasarkan kontrak tanggal 28 April 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.108.085.250. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan capaian berupa penyampaian Laporan Pendahuluan pada tanggal 26 Mei 2026 dan Laporan Antara pada tanggal 31 Agustus 2026. Selain itu, telah dijadwalkan dan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 1 Oktober 2026 sebagai forum pembahasan dan pendalaman substansi kajian. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan kemajuan sesuai tahapan yang direncanakan, baik dari sisi penyampaian dokumen maupun pelaksanaan pembahasan, sehingga mendukung pencapaian target output kegiatan.	Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan, hasil pembahasan Laporan Antara dan FGD tanggal 1 Oktober 2026 perlu menjadi bahan bagi penyedia jasa untuk menyempurnakan substansi kajian, khususnya terkait standar peralatan dan fasilitas, tata cara pemeriksaan dan perawatan komponen bearing, serta kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya, penyedia jasa perlu mengakomodasi masukan dan rekomendasi hasil pembahasan ke dalam laporan akhir, disertai analisis dan rumusan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan komponen bearing pada sarana perkeretaapian kecepatan normal. Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyempurnaan dokumen untuk memastikan kesesuaian hasil kajian dengan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan kontrak.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**Rp 2.837.034.780**			**Rp 8.907.920.659**		**313.99%**				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA MENDUKUNG KESELAMATAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 71,01	**56,10**	52,47	Pengoperasian Sarana Milik Negara [unit]	20 unit pengoperasian	71	-	-	Rp 0	-	52,47	Rp 2.225.730.374	-	-		Realisasi kinerja hingga Bulan September 2026 yaitu 78 unit pengoperasian dan baseline pengadaan 29 unit : - Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 3 21 03 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan - Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 3 21 04 dalam rangka mendukung kegiatan pengujian prasarana, safety assessment dan uji coba pengoperasian oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan - Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 2 15 02 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas sarana SU 3 21 01 dalam rangka memastikan kondisi dan fungsi komponen sarana guna pengoptimalan perawatan sarana Lintas Stasiun Payakabung-Stasiun Kertapati (PP) oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 30 April 2026 - Pengoperasian Rail Road Vehicle Car (RRV) dengan nomor identitas V2R511 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP - Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka persiapan kegiatan pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa lintas Ngrombo-Depo Cipinang oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 5 Juni 2026. (1 Unit) - Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian - Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka pengembalian sarana setelah dilakukan kegiatan pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa, lintas Jatinegara – Ngrombo oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 29 Juni 2026 Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 16 01-02	melakukan pemantauan kegiatan agar berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 2.225.730.374**		-				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE SARANA PERKERETAAPIAN YANG DILAKUKAN RAMPCHECK Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 94,60	-	97,79	Pelaksanaan Rampcheck Angkutan lebaran, Natal dan tahun baru di bidang sarana perkeretaapian [unit]	94,60% sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	94	-	-	Rp 0	-	97,79	Rp 291.529.999	-	-		Sudah terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang [unit]	94,60% sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	94	-	-	Rp 0	-	97,79	Rp 0	-	-		Sudah terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya.	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Jumlah Anggaran					**Rp 0**			**Rp 291.529.999**		-				
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE PEMENUHAN SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 88,85	**50,52**	45,70	SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 0	-	45,7	Rp 102.362.500	-	-		Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar 45,70%. Dengan capaian hingga bulan september sebanyak 6.586 sertifikat, dengan rincian 3506 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3080 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
			Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah	88	-	-	Rp 0	-	45,7	Rp 189.900.000	-	-		Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar 45,70%. Dengan capaian hingga bulan september sebanyak 6.586 sertifikat, dengan rincian 3506 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3080 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			SUPERVISI PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH I (PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA) [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 50.000.000	10,29	45,7	Rp 294.217.819	-	588.44%		Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar 45,70%. Dengan capaian hingga bulan september sebanyak 6.586 sertifikat, dengan rincian 3506 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3080 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
			SUPERVISI PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN WILAYAH II [sertifikat]	12.633 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (14.217 target sertifikat jumlah sarana aktif)	88	-	-	Rp 120.000.000	15,26	45,7	Rp 238.974.514	-	199.15%		Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan September 2026 adalah sebesar 45,70%. Dengan capaian hingga bulan september sebanyak 6.586 sertifikat, dengan rincian 3506 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3080 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin ; Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana, Meningkatkan performa aplikasi SISAKA	Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
			Jumlah Anggaran					**Rp 170.000.000**			**Rp 825.454.833**		**485.56%**				

Bulan: September, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan	Realisasi Indikator Kinerja Bulan	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Ini			Realisasi Bulan Ini			Capaian Bulan Ini		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran	Output		Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KEHANDALAN SARANA PERKERETAAPIAN MENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Indikator Kinerja: PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PERAWATAN SARANA DAN TEMPAT PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN YANG DITINDAKLANJUTI Satuan: PERSEN Target Dalam PK: 100	-	100	PENGAWASAN PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN DI BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN (Dokumen)	100% PERAWATAN, TEMPAT DAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN TELAH DITINDAKLANJUTI	100	-	-	Rp 20.000.000	10	100	Rp 112.808.300	-	564.04%	Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentasi hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti. Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana memiliki 2 (dua) kegiatan, yaitu: Pengawasan Perawatan Sarana Dengan capaian kinerja telah dilaksanakan monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan. b. Persentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana Dengan capaian kinerja telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY Manggarai dengan tidak tersedianya alat Load Bogie Test. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan Load Bogie Test tahun 2026. Telah disampaikan nota dinas permohonan Pendataan dan Inventarisasi Daftar Peralatan Perawatan Sarana Milik Negara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Teknis di lingkungan DJKA untuk mengupayakan ketersediaan data yang tersruktur dan terkini diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi serta keberadaan peralatan perawatan	Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penyampaian data pendataan dan inventarisasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian melalui tindak lanjut nota dinas yang telah disampaikan oleh Subdirektorat Pengawasan Perawatan, Tempat dan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian kepada Sekretaris Direktorat dan direktorat teknis di lingkungan DJKA. Selanjutnya, dilakukan kompilasi, verifikasi, dan pemutakhiran data yang mencakup nama barang, jumlah, merek, kondisi, lokasi, serta informasi teknis lainnya untuk memperoleh data inventarisasi yang lengkap, akurat, dan terkini sebagai dasar pemetaan kondisi dan keberadaan peralatan perawatan sarana perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana
Jumlah Anggaran								Rp 20.000.000			Rp 112.808.300		564.04%			

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

RONALD JACKSON SIMBOLON
NIP 197903032005021002

Lampiran 4
Data Dukung Capaian Kinerja

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP: +62 813-6001- 3838 | WEBSITE : djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 83/ND/K4.1/DITSAR/2026

Yth. : Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

Dari : Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana

Hal : Penyampaian Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Subdirektorat Pengembangan Sarana Triwulan III Tahun 2026

Tanggal : 28 Oktober 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Koordinator/Ketua Tim Kelompok Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor 174/K4/IX/2026 tanggal 30 September 2026 perihal Permohonan Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Bulan September dan Triwulan III Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung untuk penyusunan laporan dimaksud berupa capaian kinerja sampai dengan triwulan III Tahun 2026 Subdit Pengembangan Sarana, sebagai berikut:

No.	Judul Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s/d TW III 2026
1.	Monitoring Pengendalian Mutu, Rancang Bangun dan Rekayasa	27 Dokumen	30 Dokumen
2.	Presentase pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian • Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian • Reviu Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Monorel	 1 Dokumen 1 Dokumen	 - -

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	• Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem • Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian • Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian • Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	- - - -
3.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Sarana Perkeretaapian	1 Laporan	1 Laporan
4.	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Pengembangan Sarana Perkeretaapian	Rp150.000.000,-	Rp446.700.000,-

Informasi dan analisis keberhasilan pencapain target serta rencana tindak lanjut masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

1. Monitoring Pengendalian Mutu, Rancang Bangun dan Rekayasa

Sesuai dengan PM No. 16 Tahun 2022, proses rancang bangun sebuah sarana perkeretaapian meliputi tahapan perencanaan, perancangan, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen, uji simulasi, dan pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian. Untuk pelaksanaan rekayasa sarana perkeretaapian meliputi tahapan perencanaan, perancangan, dan perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen. Pelaksanaan kegiatan monitoring pengendalian mutu, rancang bangun, dan rekayasa meliputi:

a. Klarifikasi dan pembahasan dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Validasi gambar teknis, tahapan produksi, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian;
c. Monitoring dan supervisi terhadap uji prototipe dan uji konstruksi terhadap sarana perkeretaapian dalam rangka uji rancang bangun dan rekayasa;
d. Kegiatan lain yang diperlukan dalam proses pengesahan dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian; dan
e. Pengesahan oleh Direktur Sarana Perkeretaapian terhadap dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana.

Dalam 1 (satu) tahun monitoring pengendalian mutu, rancang bangun, dan rekayasa memiliki target 27 (dua puluh tujuh) dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian yang telah disahkan dalam 1 (satu) tahun. Sampai dengan Triwulan III 2026 terdapat 30 (tiga puluh) dokumen yang telah disahkan oleh Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Dokumen Spesifikasi Teknis, Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian	Tanggal Persetujuan
1.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi *Heritage* Eksekutif (K1) tipe 1 Milik PT KAI (Persero)	30 Januari 2026
2.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi *Heritage* Eksekutif (K1) tipe 2 Milik PT KAI (Persero)	30 Januari 2026
3.	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan rel *Vehicle Exavator Rail-Road* Milik Balai Perawatan Perkeretaapian	26 Februari 2026
4.	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Perawatan Jalan Rel Jenis Alat Pengangkut (Transport Gerat) Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2 Maret 2026
5.	Perpanjangan Spesifikasi Teknis Gerbong Terbuka - Berat Muat (BM) 50 T Pintu Bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero)	10 Maret 2026
6.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Pembangkit (P)	14 April 2026
7.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Advance Class* (*A-Class*)	14 April 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Compact Class* (*C-Class*)	14 April 2026
9.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Signature Class* (*S-Class*)	14 April 2026
10.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif menjadi *The Grand Restaurant* (M)	14 April 2026
11.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Kitchen and Crew* (M)	14 April 2026
12.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Makan (M) *Lounge*	14 April 2026
13.	Spesifikasi Teknis Gerbong Terbuka Pengangkut Balas Lebar Jalan Rel 1435 Berat Muat (BM) 70 T Milik PT KCIC	9 Mei 2026
14.	Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik Kecepatan Operasi 120KM/Jam Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	30 Juni 2026
15.	Spesifikasi Teknis Kereta Derek (Railway Crane) Kapasitas 120 Ton Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2 Juli 2026
16.	Rekayasa Teknis Kereta Penumpang Menjadi Kereta Penumpang Wisata Versi Heritage Eksekutif (K1) Tipe 1	23 Juli 2026
17.	Rekayasa Teknis Kereta Penumpang Menjadi Kereta Penumpang Wisata Versi Heritage Eksekutif (K1) Tipe 2	23 Juli 2026
18.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Ekonomi K3 Tipe 1 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3 Agustus 2026
19.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Ekonomi K3 Tipe 2 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3 Agustus 2026
20.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Advance Class (A-Class)* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
21.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Compact Class (C-Class)* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
22.	Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Signature Class (S-Class)* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi *Kereta The Grand Restaurant* (M) Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
24.	Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Kitchen and Crew* (M) Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
25.	Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Makan (M) *Lounge* Milik PT KAI (Persero)	13 Agustus 2026
26.	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan Rel Jenis *Track Motor Car Milik* Balai Perawatan Perkeretaapian	31 Agustus 2026
27.	Rekayasa Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Pembangkit (P) Milik PT KAI (Persero)	2 September 2026
28.	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan Rel Penarik Lori Gerinda Rel Milik PT MRT (Perseroda)	21 September 2026
29.	Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik untuk Angkutan Barang Sumatera Selatan Milik PT KAI (Persero)	21 September 2026
30.	Rancang Bangun Peralatan Khusus Pemeliharaan Jalan Rel Jenis Lori Gerinda Rel Milik PT MRT Jakarta	21 September 2026

Sebagai tindak lanjut kegiatan monitoring pengendalian mutu, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan, standar teknis, serta aspek keselamatan perkeretaapian yang berlaku. Dan juga akan dilakukan pembahasan dan verifikasi dokumen lainnya yang telah diajukan oleh setiap operator.

Dengan telah tercapainya target kegiatan, selanjutnya dilakukan penguatan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga konsistensi mutu, kesesuaian hasil rancang bangun dan rekayasa, serta pemenuhan aspek keselamatan sarana perkeretaapian. Kegiatan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat mendukung terselenggaranya sarana perkeretaapian yang memenuhi persyaratan teknis, andal, berkualitas, dan berkeselamatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah rumusan NSPK Sarana Perkeretaapian, Subdit Pengembangan Sarana memiliki 6 (enam) penyusunan studi dan kajian, yaitu:

a. Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian;
b. Reviu Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Monorel;
c. Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem;
d. Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian;
e. Kajian Penyusunan Pedoman Rancang Bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian; dan
f. Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla).

Pelaksanaan penyusunan studi dan kajian saat ini telah berjalan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan Antara Studi Review Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesikasi Teknis Trem, Studi Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel, Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian, Studi Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian, dan Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan Rolla telah dilaksanakan pada September 2026 sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* pada Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan Rolla yang telah dilaksanakan pada September 2026. Pelaksanaan FGD ini berjalan secara komprehensif dengan keikutsertaan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Teknis, Blai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, PT Kereta Api Indonesia, PT INKA, PT Kereta Api Logistik dan tim Konsultan.

Upaya koordinasi dengan pihak terkait, serta memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil kajian sehingga diharapkan seluruh kegiatan penyusunan studi dan kajian dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dapat dipertanggungjawabkan dan terealisasi sesuai dengan jadwal *timeline* yang direncanakan. Berikut Dokumentasi kegiatan laporan antara Studi yang telah dilakukan bulan September 2026:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laporan Antara Studi Review Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem





Laporan Antara Studi Peraturan Tentang Standar Spesifikasi Teknis Monorel





Laporan Antara Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Studi Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian





Laporan Antara Studi Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)





***Focus Grop Discussion* Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)**





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Nilai Kinerja Anggarana Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai kinerja anggaran Direktorat Sarana Persentase, Subdirektorat Pengembangan Sarana memiliki kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Sarana Perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026 di Bandung dengan pembahasan "Bimbingan Teknis Kriteria Perancangan dan Perhitungan Teknis Konstruksi dan Komponen dalam Penyusunan Dokumen Rancang bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian". Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya pemahaman dan kompetensi teknis para pemangku kepentingan, khususnya operator penyelenggara sarana perkeretaapian, manufaktur sarana, serta unit balai yasa, terkait penerapan prinsip *design engineering* dan penyusunan dokumen rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini berjalan secara komprehensif dengan keikutsertaan aktif dari setiap operator antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta *Commuter* Indonesia, PT MRT Jakarta (Perseroda), PT LRT Jakarta, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai manufaktur. Dalam kegiatan bimbingan teknis kali ini menghadirkan 2 (dua) narasumber ahli dari akademisi/ praktisi. Materi pertama yang dibawakan dengan judul "Kriteria Perancangan dan Perhitungan Teknis Konstruksi dan Komponen dalam Penyusunan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian" yang disampaikan oleh Dr. Ditho Ardiansyah Pulungan, dan materi kedua dengan judul "Rekayasa Sarana Perkeretaapian untuk Meningkatkan Kemampuan atau Mengubah Fungsi Sesuai Spesifikasi Teknis" yang disampaikan oleh Sapto Adi Nurgroho. Jalannya diskusi dan pemaparan materi dipandu secara interaktif oleh moderator yaitu Rudi Damanik.

4. Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Pengembangan Sarana Perkeretaapian

Realisasi capaian PNBP Subdit Pengembangan Sarana untuk jasa pelayanan persetujuan spesifikasi teknis sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar Rp446.700.000,- dari target Tahunan sebesar Rp150.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Spesifikasi Teknis	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Teknis Kereta Penumpang menjadi Kereta Penumpang Kelas Eksekutif (K1) Milik PT KAI (Persero)	15 Januari 2026	Rp28.500.000,-
2.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi Heritage Eksekutif (K1) tipe 1 Milik PT KAI (Persero)	10 Februari 2026	Rp28.500.000,-
3.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi Heritage Eksekutif (K1) tipe 2 Milik PT KAI (Persero)	10 Februari 2026	Rp28.500.000,-
4	Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Perawatan Jalan Rel Jenis Alat Pengangkut (Transport Gerat) Milik PT Kerata Api Indonesia (Persero)	11 Maret 2026	Rp34.900.000,-
5.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Pembangkit (P)	22 April 2026	Rp28.500.000,-
6.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Advance Class* (*A-Class*)	22 April 2026	Rp28.500.000,-
7.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Compact Class* (*C-Class*)	22 April 2026	Rp28.500.000,-
8.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Sleeper* (T) *Signature Class* (*S-Class*)	22 April 2026	Rp28.500.000,-
9.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif menjadi *The Grand Restaurant* (M)	22 April 2026	Rp28.500.000,-
10.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta *Kitchen and Crew* (M)	22 April 2026	Rp28.500.000,-
11.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Yang Ditarik Lokomotif Menjadi Kereta Makan (M) *Lounge*	22 April 2026	Rp28.500.000,-
12.	Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik Kecepatan Operasi 120 Km/Jam	16 Juli 2026	Rp34.900.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13.	Spesifikasi Teknis Kereta Derek (Railway Crane) Kapasitas 120 Ton Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	23 Juli 2026	Rp34.900.000,-
14.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Ekonomi K3 Tipe 1 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	12 Agustus 2026	Rp28.500.000,-
15.	Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Ekonomi K3 Tipe 2 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)	12 Agustus 2026	Rp28.500.000,-
Total		Rp446.700.000,-	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lanjut kami ucapkan terima kasih.

Amanda Pritasari, S.T., M.T.
NIP. 198403192007122001

Tembusan:
Koordinator/Ketua Tim Kelompok
Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 26/K4.2/X/2026

Yth. : Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

Dari : Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana

Hal : Data Capaian Kinerja Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana Triwulan III Tahun 2026

Tanggal : 10 Oktober 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Koordinator/Ketua Tim Kelompok Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor 174/K4/IX/2026 tanggal 30 September 2026 perihal Permohonan Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Bulan September dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 untuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana, sebagai berikut:

No.	Judul Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi TW III
1.	Presentase pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian □ Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal □ Studi Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian	100% 100%	60% 60%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi TW III
2.	Persentase Hasil Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti	100%	100%
3.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian. Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas Manufaktur Sarana Perkeretaapian	100%	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana	100%	-

Informasi dan analisis keberhasilan pencapain target serta rencana tindak lanjut masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

1. Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian
   Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah rumusan NSPK Sarana Perkeretaapian, Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana memiliki target 2 (dua) penyusunan studi, yaitu:
   a. Studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal;
      Pada Triwulan III, kegiatan studi Standar Peralatan, Fasilitas, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal telah dilaksanakan kegiatan pembahasan laporan antara pada tanggal 31 Agustus 2026 serta hasil dokumen laporan antara telah diserahkan pada tanggal 29 September 2026 (berbobot 60%).
   b. Studi Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian.
      Pada Triwulan III, kegiatan studi Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana telah dilaksanakan kegiatan pembahasan laporan antara pada tanggal 16 September 2026 serta hasil dokumen laporan antara telah diserahkan pada tanggal 24 September 2026 (berbobot 60%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Persentase Hasil Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti

   Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Hasil Pengawasan Perawatan Sarana dan Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang ditindaklanjuti, Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

   a. Persentase Pengawasan Perawatan Sarana

      Telah dilaksanakan monitoring pendampingan *Maintenance Cycle Extension* (MCE) perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan.

$$\frac{Jumlah\ hasil\ temuan\ yang\ telah\ ditindaklanjuti\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ hasil\ temuan\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan\ yang\ tidak\ sesuai\ Sispro}\ x\ 50\%$$

   b. Persentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana

      Telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng.

      Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY Manggarai dengan tidak tersedianya alat *Load Bogie Test*. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan *Load Bogie Test* tahun 2026.

$$\frac{Jumlah\ hasil\ temuan\ yang\ telah\ ditindaklanjuti\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ tempat\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ hasil\ temuan\ pada\ kegiatan\ pengawasan\ perawatan\ sarana\ perkeretaapian\ pada\ tahun\ berjalan\ yang\ tidak\ sesuai\ PM\ 18\ Tahun\ 2019}\ x\ 50\%$$

$$\frac{1}{1}\ x\ 50\% = 50\%$$

3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

   Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai kinerja anggaran Direktorat Sarana Persentase Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana pada tahun 2026 memiliki target realisasi penyerapan anggaran sebesar 100%. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Judul Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi s.d. Triwulan III	Persentase
Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas Manufaktur Sarana Perkeretaapian	Rp 216,994,000,-	Rp 216,993,600,-	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas Manufaktur Sarana Perkeretaapian memiliki pagu revisi TA 2026 sebesar Rp 216,994,000,- dan telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tema "*Quality Control of Underfloor Wheel Lathe*" pada tanggal 27 s.d. 30 Januari 2026 di Bekasi, Jawa Barat.

4. Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Pengembangan Sarana Perkeretaapian

   Tidak terdapat kegiatan terkait capaian PNBP Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana dari bulan Januari s.d. September 2026.

No.	Bulan	Jumlah (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)	Keterangan
1	Januari	0	0	
2	Februari	0	0	
3	Maret	0	0	
4	April	0	0	
5	Mei	0	0	
6	Juni	0	0	
7	Juli	0	0	
8	Agustus	0	0	
9	September	0	0	
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Plt. Direktur kami ucapkan terima kasih.

Irvan Ariestiana
NIP 197906232005021002

Tembusan:
Koordinator/ Ketua Tim Kelompok
Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001-3838
WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 177/K4/X/2026

Yth. : Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Dari : Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
Hal : Penyampaian Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan III Bulan September Tahun 2026 Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
Tanggal : 8 Oktober 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor 174/K4/IX/2026 tanggal 30 September 2026 hal Permohonan Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Bulan September dan Triwulan III Tahun 2026, dengan ini disampaikan capaian kinerja Triwulan III Bulan September Tahun 2026 Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara sebagai berikut:

1. SK 3 – IKK 4 Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
   a. Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi, telah dilaksanakan pembahasan laporan antara pada tanggal 24 September 2026.
   b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur, masih dalam tahap finalisasi draft laporan akhir studi.
   c. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara, telah dilaksanakan pembahasan draft laporan akhir pada tanggal 24 September.
   d. Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus, telah dilaksanakan pembahasan laporan antara pada tanggal 16 September 2026.
2. SK 3 – IKK 5 Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
   Kegiatan pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang masuk dalam perhitungan capaian kinerja IKK ini yaitu pengoperasian SMN yang biayanya dibebankan ke anggaran pengoperasian SMN yaitu sebanyak 78 unit, namun terdapat pelaksanaan kegiatan pengoperasian SMN tanpa menggunakan anggaran pengoperasian SMN yang terbagi menjadi pengoperasian SMN

komersial ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

komersial dan non komersial. Berikut rincian perhitungan capaian kinerja pengoperasian dan rincian kegiatan pengoperasian SMN:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi Bulan September (%)
	PK 2026 (%)	Bulan September (%)	
Presentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	71,01	56,10	52,47

Persentase pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	=	((Jumlah SMN Direktorat Sarana Perkeretaapian + Jumlah realisasi pengadaan atau revitalisasi SMN tahun berjalan)/ (Jumlah SMN Direktorat Sarana Perkeretaapian + Target renstra)) x 50%	+	(Jumlah realisasi pengoperasian SMN tahun berjalan / Jumlah target pengoperasian SMN tahun berjalan) x 50%

Perhitungan Realisasi Bulan September

52,47%	=	((29 + 0) / (29 + 40)) x 50%	+	(78/124) x 50%

a. Pengoperasian SMN menggunakan anggaran Pengoperasian SMN yang dihitung dalam capaian kinerja yaitu sebagai berikut: (Total 78 Unit)
   1) Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 3 21 03 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 8 April 2026. (1 Unit)
      b) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 9 April 2026. (1 Unit)
      c) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 13 April 2026. (1 Unit)
      d) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 16 April 2026. (1 Unit)
      e) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 20 April 2026. (1 Unit)
      f) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 22 April 2026. (1 Unit)
      g) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 29 April 2026. (1 Unit)
      h) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 1 Mei 2026. (1 Unit)
      i) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
      j) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 25 Juli 2026. (1 Unit)

k) Lintas ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

k) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 2 September 2026. (1 Unit)
l) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 17 September 2026. (1 Unit)
m) Lintas Muara Satu-Kutablang pada tanggal 22 September 2026. (1 Unit)
n) Lintas Muara Satu-Krueng Geukueh pada tanggal 8 April 2026. (1 Unit)

2) Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 3 21 04 dalam rangka mendukung kegiatan pengujian prasarana, *safety assessment* dan uji coba pengoperasian oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
a) Lintas Maros-Garongkong pada tanggal 15 April 2026. (1 Unit)
b) Lintas Mangkoso-Palanro pada tanggal 16 April 2026. (1 Unit)
c) Lintas Palanro-Km 112 pada tanggal 17 April 2026. (1 Unit)
d) Lintas Takallasi-Mangkoso pada tanggal 29 April 2026. (1 Unit)
e) Lintas Mangkoso-Palanro pada tanggal 5 Mei 2026. (1 Unit)
f) Lintas Takallasi-Palanro pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
g) Lintas KM 97-Palanro pada tanggal 7 Mei 2026. (1 Unit)
h) Lintas Palanro-Mangkoso pada tanggal 8 Mei 2026. (1 Unit)
i) Lintas Mangkoso-Takallasi pada tanggal 9 Mei 2026. (1 Unit)
j) Lintas Takallasi-Barru pada tanggal 11 Mei 2026. (1 Unit)
k) Lintas Barru-Palanro pada tanggal 12 Mei 2026. (1 Unit)

3) Pengoperasian Lori Inspeksi dengan nomor identitas SK 2 15 02 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan, dengan rincian sebagai berikut:
a) Lintas Binjai-Depo Pulubrayan pada tanggal 29 April 2026. (1 Unit)
b) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 30 April 2026. (1 Unit)
c) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 4 Mei 2026. (1 Unit)
d) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 5 Mei 2026. (1 Unit)
e) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
f) Di Depo Pulubrayan pada tanggal 7 Mei 2026. (1 Unit)
g) Lintas Depo Pulubrayan-Binjai-Stasiun Pangkalan Brandan pada tanggal 12 Mei 2026. (1 Unit)

4) Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas sarana SU 3 21 01 dalam rangka memastikan kondisi dan fungsi komponen sarana guna pengoptimalan perawatan sarana Lintas Stasiun Payakabung-Stasiun

Kertapati ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kertapati (PP) oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 30 April 2026 (1 Unit).

5) Pengoperasian *Rail Road Vehicle Car* (RRV) dengan nomor identitas V2R511 dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelaksanaan monitoring prasarana perkeretaapian pasca bencana alam guna mengurangi risiko tindak vandalisme oleh BTP Kelas I Medan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Lintas Rantauprapat Baru-Aek Nabara pada tanggal 5 Mei 2026. (1 Unit)
   b) Lintas Rantauprapat Baru-Pondok S5 pada tanggal 6 Mei 2026. (1 Unit)
   c) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 2 Juni 2026. (1 Unit)
   d) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 3 Juni 2026. (1 Unit)
   e) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 4 Juni 2026. (1 Unit)
   f) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 24 Juni 2026. (1 Unit)
   g) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 26 Juni 2026. (1 Unit)
   h) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 28 Juni 2026. (1 Unit)
   i) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 2 Juli 2026. (1 Unit)
   j) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 9 Juli 2026. (1 Unit)
   k) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 18 Juli 2026. (1 Unit)
   l) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 22 Juli 2026. (1 Unit)
   m) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 25 Juli 2026. (1 Unit)
   n) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 4 Agustus 2026. (1 Unit)
   o) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 7 Agustus 2026. (1 Unit)
   p) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 13 Agustus 2026. (1 Unit)
   q) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara pada tanggal 17 Agustus 2026. (1 Unit)
   r) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 2 September 2026. (1 Unit)
   s) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 7 September 2026. (1 Unit)
   t) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 10 September 2026. (1 Unit)
   u) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 13 September 2026. (1 Unit)
   v) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 23 September 2026. (1 Unit)
   w) Lintas Rantauprapat-Aek Nabara tanggal 24 September 2026. (1 Unit)
6) Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka persiapan kegiatan pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa lintas Ngrombo-Depo Cipinang oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 5 Juni 2026. (1 Unit)

7) Pengoperasian ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7) Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut: (12 Unit)
   a) Lintas Gambir-Surabaya (PP) pada tanggal 8 s.d. 11 Juni 2026 (4 Unit)
   b) Lintas Gambir-Sukabumi (PP) pada tanggal 17 s.d. 18 Juni 2026 (2 Unit)
   c) Lintas Tanah Abang-Merak (PP) pada tanggal 19 Juni 2026 (1 Unit)
   d) Lintas Gambir-Malang (PP) pada tanggal 22 s.d. 26 Juni 2026 (5 Unit)
8) Pengoperasian Kereta Ukur dengan nomor identitas SU 3 14 01 dalam rangka pengembalian sarana setelah dilakukan kegiatan pengukuran geometri jalan rel di pulau Jawa, lintas Jatinegara – Ngrombo oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 29 Juni 2026. (1 Unit)
9) Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 16 01-02 dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring lintas Stasiun Jatinegara – Stasiun Cirebon (PP) oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tanggal 13 s.d. 14 Agustus 2026. (2 Unit)
10) Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 16 01-02 Kala rangka mendukung pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar dan tata cara pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian lintas Stasiun Gambir-Stasiun Yogyakarta-Stasiun Bandung-Stasiun Gambir pada tanggal 1 s.d. 3 September 2026. (6 Unit)

b. Pengoperasian SMN Non Komersial
   1) Pengoperasian 1 Set *Railways Crane* dengan nomor identitas SC 3 05 02, GD 50 10 02, SN 0 08 02 untuk evakuasi KA 174B KA Ciremai yang tertemper longsoran pada petak jalan maswati sasaksaat KM 142+8/9 oleh PT KAI pada tanggal 1 s.d. 2 April 2026.
   2) Pengoperasian 1 Set *Railways Crane* dengan nomor identitas SC 3 05 01, GD 50 10 01, SN 0 08 01 untuk evakuasi KA 161 (Bangunkarta) yang mengalami anjlokan di Emplasemen Stasiun Bumiayu KM 312+1 wilayah Daop 5 Purwokerto oleh PT KAI pada tanggal 6 s.d. 8 April 2026.
   3) Pengoperasian 1 Set *Railways Crane* dengan nomor identitas SC 3 05 02, GD 50 10 02, SN 0 08 02 untuk evakuasi PLB 5568A (CL KPB-CKR) tertumbur PLB 4A (Agro Bromo Anggrek GMR-SBI) di Emplasemen Stasiun Bekasi Timur oleh PT KAI pada tanggal 27 s.d. 29 April 2026.

c. Pengoperasian….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pengoperasian SMN Komersial

Pengoperasian Kereta Inspeksi dengan nomor identitas SI 3 15 01-02 untuk pelaksanaan praktik dalam diklat perawatan sarana perkeretaapian oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada tanggal 17 April 2026.

3. SK 4 – IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

a. Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara

Anggaran perjalanan dinas kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara memiliki sisa anggaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp21.113.262 dari Rp236.148.000 dan sisa anggaran perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp0 dari Rp2.010.000.

b. Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara

Anggaran perjalanan dinas kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara memiliki sisa anggaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp73.276.915 dari Rp177.322.000 dan sisa anggaran perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp10.940.000 dari Rp12.320.000.

c. Bimbingan teknis/rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian

Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dengan pembahasan alat ukur dan pengolahan data hasil pengukuran menggunakan metode EN pada kereta ukur milik negara pada tanggal 2 s.d. 3 Februari 2026 di Bogor.

d. Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara.

Saat ini masih dilakukan perbaikan alat ukur di pabrikan. Progres realisasi fisik sebesar 17,59%.

e. Perawatan Lori Inspeksi dan *Track Motor Car* (TMC) Milik, telah dilakukan kegiatan perawatan harian pada sarana, dengan progres realisasi fisik sebesar 59,70%.

f. Perawatan *crane*, gerbong datar, dan kereta penolong, telah dilakukan kegiatan perawatan harian dan bulanan pada sarana, dengan progres realisasi fisik sebesar 43,38%. Saat ini *crane* solo sedang dilakukan *over haul main engine*.

g. Perawatan Kereta Inspeksi, Kereta Ukur dan Kereta Kedinasan Milik Negara, telah dilakukan kegiatan perawatan harian dan bulanan pada sarana serta perawatan 12 bulanan (P12) pada Kereta Ukur di Ngrombo, dengan progres realisasi fisik sebesar 67,36%.

h. Perawatan ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel telah dilakukan kegiatan perawatan harian pada sarana, dengan progres realisasi fisik sebesar 57,27%.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Moch. Andi Hary Murty
NIP 197507312002121001

Tembusan:
Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 47/K4.4/X/2026

Yth	:	Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I
Hal	:	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I
Tanggal	:	6 Oktober 2026

Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 509 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian perkeretaapian wilayah I.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I. (laporan terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Santoso Sinaga
NIP 197904192006041002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN TRIWULAN III

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

SUBDIT KELAIKAN SARANA WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanya perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Setiap instansi pemerintah perlu ditumbuhkembangkan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, efektivitas dan kinerja dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Selanjutnya, hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dari suatu unit kerja.

Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I merupakan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian perkeretaapian wilayah I, selama tahun 2026 telah menyusun dan melaksanakan program-program yang mencakup bidang pengembangan dan pengawasan sarana, pengelolaan sarana milik negara, kelaikan sarana sesuai visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai.

Selanjutnya dengan berpedoman pada program kerja tersebut dan pelaksanaan yang telah dilaksanakannya, disusun laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama tahun berjalan 2026 dalam bentuk Laporan Capaian Triwulan III Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I, Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Triwulan III ini diharapkan dapat memberikan gambaran, evaluasi dan motivasi dalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang meliputi SDM, dana, dan waktu pelaksanaan kegiatan, hasil (*output*), manfaat (*outcomes*), dan dampak kegiatan. Laporan Triwulan III ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu sebagai bahan dalam rangka kesempurnaan laporan ini diharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang konstruktif.

Jakarta, 6 Oktober 2026
KASUBDIT KELAIKAN SARANA WILAYAH I



Santoso Sinaga
NIP 197904192006041002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian, termasuk di dalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas pemerintah baik secara administratif maupun secara manajerial kepemimpinan melalui aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka dilaksanakan monitoring capaian kinerja Triwulan III pada tahun 2026. Pelaksanaan monitoring tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan lanjutnya yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Monitoring capaian kinerja di lingkungan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

1. Memantau kemajuan pelaksanaan/*progress* Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I per triwulan;
2. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan; dan
3. Mengidentifikasi perubahan capaian target Indikator Kinerja Kegiatan akibat adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan lingkungan strategis dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang di dalamnya terdapat unit kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian yang secara legalitas kedudukannya di bawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, dipimpin oleh Direktur Sarana Perkeretaapian. Direktorat tersebut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari:
1. Ketua Tim Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah I;
2. Ketua Tim Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I; dan
3. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Struktur Organisasi Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari:
1. Ketua Tim Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah I; dan
2. Ketua Tim Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Penempatan Pegawai
   Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan penempatan pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatan Pegawai

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1.	Kepala Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	1
2.	Ketua Tim	2
3.	Staf Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah I	7
4.	Staf Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I	8
JUMLAH		**18**

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
   Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1.	SLTA	0
2.	DIII	2
3.	DIV/ S1	11
4.	S2	5
JUMLAH		**18**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I

   Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian, yang memuat 3 Sasaran Kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

   a. Meningkatnya pelayanan bidang sarana perkeretaapian, yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian.
   b. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, yaitu:
      1) Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian.
      2) Persentase pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian.
      3) Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck*.
   c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian, yaitu:
      1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
         a) Bimbingan teknis di bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I.
         b) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua).
         c) Inspeksi Kelaikan Sarana Wilayah I.
         d) Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian
         e) Tra*nsfer Knowledge Kelaikan Sarana Otomatis*
      2) Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian.
      3) Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian.
      4) Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian.

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.3. Perjanjian Kinerja (PK) Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Efisiensi Rp.
1	Meningkatnya pelayanan bidang sarana perkeretaapian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian***)	Nilai	95,25	-
2	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	1. Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian a. Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian Wilayah I*)	%	88,67	150.448.000
		b. Supervisi pengujian sarana perkeretaapian Wilayah I	%	100	310.689.000
		2. Persentase pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian a. Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian b. Studi Penyusunan Konsep SNI Yang Bersumber Dari JIS E4041 dan IEC 61133 (*Testing Of Rolling Stock On Completion Of Construction And Before Entry Into Service*) c. Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan di Jalur Kereta Api (*Railroad*) d. Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Sub System Sarana Pada Sarana Otomatis	%	100	4.471.251.000
		3. Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck***)	%	94,6	341.387.000
		4. Inspeksi Kelaikan Sarana Wilayah I	%	100	310.791.000
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian			
		a. Bimbingan teknis di bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I	%	100	14.200.000
		b. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I	%	100	30.255.000
		c. Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian	%	100	73.829.000
		d. Transfer Knowledge Kelaikan Sarana Otomatis	%	100	1.234.364.000
		2. Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian ***)	%	100	
		3. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian ***)	Nilai	80,80	
		4. Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian **)	nilai	13,75	

*) Merupakan target Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I, sebesar 5.582 sertifikat dari 6.295 sarana yang aktif di Wil I
**) Merupakan IKK dan target Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
***) Merupakan IKK dan target Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
CAPAIAN TRIWULAN III SUBDIT KELAIKAN SARANA WILAYAH I

Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I sebagaimana tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pembinaan perkeretaapian, melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang dituangkan dalam program kerja tahun 2026.

Pelaksanaan program kerja Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I, adalah sebagai berikut:

A. TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan tidak tercapai sesuai dengan target, maka formula yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran, maka formula yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah:

1. Target Triwulan Tahun 2026 dan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
2. Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan III Tahun 2026; dan
3. Identifikasi Kendala dan Hambatan yang dihadapi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada awal tahun 2026 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I, dan target tersebut mengacu pada target Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I, selanjutnya pengukuran capaian kinerja Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Konsep Renstra Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I Tahun 2026-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Capaian Kinerja Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I Triwulan III

a. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Direktorat Sarana Perkeretaapian dilaksanakan sebagai upaya evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, khususnya badan usaha perkeretaapian dan masyarakat pengguna jasa. Pengukuran dilakukan melalui survei berbasis instrumen standar yang mencakup unsur persyaratan pelayanan, prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi dan perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Realisasi kinerja pada Triwulan III untuk IKK ini tercatat sebesar 98,75 dari target 95,25 dengan kategori Sangat Baik. Persentase capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebesar 103,67% terhadap target Triwulan III.

b. IKK Persentase Sarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

1) Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian Wilayah I

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2026 dengan target Triwulan III dan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tabel 2.1. Target dan Capaian Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Target Triwulan (%)				Realisasi Triwulan (%)			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian	88,67 (5.582 dari sarana aktif 6.295)	948 15,06%	2.349 37,32%	3.611 57,36%	5.582 88,67	948 15,06%	2.349 37,32%	3.506 55,69%	-

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Sarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian, Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I menetapkan target tahunan sebanyak 5.582 sertifikat atau 88,67%. Target tersebut dihitung dari jumlah sarana aktif di Wilayah I dalam satu tahun, yaitu sebanyak 6.295 unit sarana.

Pada Triwulan III, target sertifikasi sarana ditetapkan sebesar 57,36% atau 3.611 sertifikat. Realisasi sertifikasi sarana pada periode yang sama tercatat sebesar 55,69% atau 3.506 unit sarana yang tersertifikasi, sehingga capaian kinerja sebesar **97,09%** terhadap target IKK Triwulan III.

Adapun realisasi anggaran tercatat sebesar Rp102.362.500 atau 68,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp150.448.000.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Pelaksanaan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian pada Triwulan III menunjukkan capaian kinerja IKK sebesar 97,09%. Realisasi sertifikasi tercatat sebanyak 3.506 sarana (55,69% dari 6.295 sarana aktif), sedangkan target Triwulan III sebanyak 3.611 sarana (57,36%), sehingga masih terdapat selisih 105 sarana. Dari 5.512 permohonan yang masuk, 3.506 sarana (63,61%) telah tersertifikasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemantauan dan supervisi berkala terhadap progres sertifikasi, koordinasi dengan unit kerja dan pihak terkait, serta pengendalian pemenuhan persyaratan sertifikasi. Upaya ini terlihat dari selesainya seluruh permohonan LRT Jabodebek (85 sarana), Satker PPSP (4 sarana), dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (2 sarana), serta kontribusi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebanyak 2.718 sertifikat dan PT Kereta Commuter Indonesia sebanyak 679 sertifikat.
Target belum tercapai penuh karena terdapat 2.006 sarana yang belum menyelesaikan seluruh tahapan sertifikasi sampai dengan Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:

a) 1.222 sarana telah lulus uji tetapi masih dalam proses administrasi, yaitu penerbitan billing PNBP (694 sarana), TTE (458 sarana), pelaporan ke Ditsar (57 sarana), dan validasi Ditsar (13 sarana).
b) 601 sarana belum diuji karena menunggu pembayaran pengujian, terutama milik PT KAI (476 sarana) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (101 sarana).
c) 133 sarana tidak lulus uji, milik PT Kereta Commuter Indonesia (109 sarana) dan PT KAI (24 sarana), sehingga memerlukan pengujian ulang.
d) 50 sarana PT KAI masih dalam proses verifikasi.

Sebagai tindak lanjut, penyelesaian difokuskan pada 1.222 sarana yang sudah lulus uji, khususnya tahap penerbitan billing PNBP dan TTE, karena penyelesaian sebagian kecil saja (105 sarana) sudah cukup untuk memenuhi target Triwulan III. Selain itu dilakukan koordinasi dengan operator untuk percepatan pembayaran pengujian 601 sarana, penjadwalan pengujian ulang 133 sarana yang tidak lulus uji, dan penyelesaian proses verifikasi 50 sarana. Sampai dengan Triwulan III telah terbit 3.506 sertifikat, sehingga masih terdapat 2.076 sertifikat yang harus diselesaikan untuk mencapai target tahunan 5.582 sertifikat. Karena permohonan yang masih diproses berjumlah 2.006, diperlukan tambahan sedikitnya 70 permohonan baru.

Dari sisi anggaran, realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp102.362.500 atau 68,04% dari pagu Rp150.448.000. Sisa anggaran sebesar Rp48.085.500 akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan kegiatan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.2. Rekapitulasi Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Badan Usaha dan Jenis Sarana	Permohonan	Verifikasi		Lulus Verifikasi							Tersertifikasi
				Pengujian			Lulus Uji				
		Proses Verifikasi	Tidak Lulus Verifikasi	Belum Diuji (Pembayaran Pengujian)	Proses Pengujian	Tidak Lulus Uji	Proses Pelaporan ke Ditsar	Proses Validasi Ditsar	Proses TTE	Proses Penerbitan Billing PNBP	
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	**2**										**2**
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	2										2
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	**4.196**	**50**		**476**		**24**	**19**	**5**	**340**	**564**	**2.718**
Gerbong	1.740			236		5	1		205	155	1.138
Kereta	2.008	50		201		13	16	5	123	388	1.212
KRD	81			13		2					66
KRL	17										17
Lokomotif	256			21		1			7	13	212
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	71								5		63
Peralatan Khusus Tanpa Penggerak	23			5							10
PT LRT JABO	**85**										**85**
KRL	85										85
PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA	**120**			**101**					**11**	**8**	
Gerbong	3			3							
KRL	88			88							
Lokomotif	1			1							
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	28			9					11		
PT KERETA COMMUTER INDONESIA	**1.006**			**24**		**109**	**38**		**83**	**73**	**679**
KRL	1.006			24		109	38		83	73	679
PT LRT JAKARTA	**8**							**8**			
KRL	8							8			
PT MRT JAKARTA	**91**								**24**	**49**	**18**
KRL	90								24	48	18
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	1									1	
SATKER PPSP	**4**										**4**
KRL	4										4
Grand Total	**5.512**	**50**	**-**	**601**	**-**	**133**	**57**	**13**	**458**	**694**	**3.506**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.3. Capaian Jumlah Sertifikat Kelaikan Sarana Per Operator

Jenis Sarana	Balai Pengelola Kereta Api Sulsel		PT Kereta Api Indonesia (Persero)		LRT Jabodebek		PT Kereta Commuter Indonesia		PT MRT		Satker PPSP		Grand Total	
	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB
1. Gerbong	-	-	-	1138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138
2. Kereta														
a. Kereta Ditarik Lokomotif	-	-	22	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1.190
b. Kereta Berpenggerak Sendiri														
1) KRD	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
2) KRL	-	-	-	17	-	85	36	643	-	18		4	36	767
3. Lokomotif	-	-	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212
4. Peralatan Khusus														
a. Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	-	2	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
b. Peralatan Khusus Tanpa Penggerak	-		-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Jumlah	-	**2**	**22**	**2.696**	**-**	**85**	**36**	**643**	**-**	**18**	**-**	**4**	**58**	**3.448**
Jumlah UP + UB	**2**		**2.718**		**85**		**679**		**18**		**4**		**3.506**	

UP : Uji Pertama
UB : Uji Berkala

Tabel 2.4. Capaian Jumlah Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah I Per Bulan

Jenis Sarana	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agu		Sep		Okt		Nov		Des		Jumlah	
	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB
1. Gerbong	0	0	0	0	0	319	0	23	0	346	0	93	0	0	0	261	0	96							0	1.138
2. Kereta																										
a. Kereta Ditarik Lokomotif	0	0	0	0	11	426	11	220	0	80	0	165	0	49	0	88	0	162							22	1.190
b. Kereta Berpenggerak Sendiri																										
1) KRD	0	0	0	0	0	0	0	24	0	2	0	5	0	0	0	0	0	35							0	66
2) KRL	0	0	0	0	24	48	0	242	12	16	0	101	0	92	0	174	0	94							36	767
3. Lokomotif	0	0	0	0	0	95	0	22	0	7	0	9	0	14	0	11	0	54							0	212
4. Peralatan Khusus																										
a. Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	0	0	0	0	0	25	0	19	0	0	0	4	0	10	0	1	0	6							0	65
b. Peralatan Khusus Tanpa Penggerak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5							0	10
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**913**	**11**	**550**	**12**	**451**	**0**	**377**	**0**	**165**	**0**	**540**	**0**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**3.448**
Jumlah UP + UB	**0**		**0**		**948**		**561**		**463**		**377**		**165**		**540**		**452**		**0**		**0**		**0**		**3.506**	

UP : Uji Pertama
UB : Uji Berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Supervisi Pengujian Sarana Wilayah I

Supervisi pengujian sarana perkeretaapian dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengujian sarana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prosedur pengujian yang berlaku.
Selain itu, supervisi bertujuan mengendalikan mutu proses dan hasil pengujian, yang meliputi kesesuaian metode pengujian, kompetensi petugas penguji, kelengkapan peralatan uji, serta keabsahan data dan dokumen hasil pengujian sebagai dasar penerbitan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian.

Tabel 2.5. Target dan Capaian Supervisi Pengujian Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Target Triwulan (%)				Realisasi Triwulan (%)			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Supervisi Pengujian Sarana Wilayah I	100% Laporan	-	-	-	100%			95%	

Realisasi anggaran kegiatan pada Triwulan III sebesar Rp244.247.819 atau 78,61% dari total pagu anggaran Rp310.689.000, sehingga tersisa Rp66.441.181.
Supervisi dilaksanakan di depo dan balai yasa milik operator sarana perkeretaapian, antara lain:

a) Depo KRL Depok;
b) Daop 2 Bandung;
c) Daop 7 Madiun;
d) Depo LRT Jabodebek.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Berdasarkan IKK, target pelaksanaan supervisi pengujian sarana Wilayah I pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Pada periode pelaporan, target kegiatan supervisi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini diperoleh meskipun kegiatan mengalami efisiensi anggaran yang cukup besar. Pagu semula sebesar Rp786.251.000 berkurang Rp475.562.000 (60,48%) menjadi Rp310.689.000. Untuk menjaga target, pelaksanaan supervisi disesuaikan melalui pemanfaatan perjalanan dinas yang telah terjadwal, pengaturan jumlah personel, dan prioritas pada uji pertama sarana. Dengan penyesuaian tersebut, supervisi tetap dapat dilaksanakan.

Keberhasilan juga didukung oleh perencanaan jadwal, koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian dan operator terkait jadwal pengujian, serta supervisi langsung di lapangan. Tahapan supervisi meliputi penyusunan jadwal, koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian dan operator, pelaksanaan supervisi lapangan, pencatatan temuan, dan penyampaian hasil kepada operator dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Pada setiap pelaksanaan, supervisi memastikan kesesuaian metode pengujian, kompetensi petugas penguji, kelengkapan peralatan uji, serta keabsahan data dan dokumen hasil pengujian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meskipun target tercapai, efisiensi anggaran membatasi pelaksanaan supervisi di Wilayah I, terutama dari sisi frekuensi, jumlah sarana yang disupervisi, dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Oleh karena itu, pengendalian mutu pengujian dilakukan dengan memprioritaskan supervisi pada uji pertama sarana.

Sebagai tindak lanjut, dengan sisa anggaran yang terbatas, supervisi pada periode berikutnya akan dilaksanakan secara selektif dengan prioritas pada uji pertama sarana. Apabila diperlukan, akan dilakukan penyesuaian anggaran agar kualitas supervisi tetap terjaga.

3) Inspeksi Sarana Perkeretaapian di Wilayah I

Inspeksi sarana perkeretaapian merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat teknis dan operasional terhadap pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana perkeretaapian guna mengetahui tingkat kesiapan operasional dan kelaikan sarana.

Tabel 2.6. Target dan Capaian Inspeksi Sarana Perkeretaapian di Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Target Triwulan (%)				Realisasi Triwulan (%)			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inspeksi Sarana perkeretaapian	100% Laporan	-	-	-	100	-		95	

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan inspeksi sarana Wilayah I pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi fisik tercatat sebesar 95%, sehingga terdapat selisih 5% dari target. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp291.022.710 atau 93,64% dari pagu setelah efisiensi sebesar Rp310.791.000, sehingga tersisa Rp19.768.290.

Inspeksi dilaksanakan di depo dan balai yasa milik operator sarana perkeretaapian, antara lain:

- Daop 2 Bandung;
- Daop 5 Semarang;
- Daop 6 Yogyakarta;
- Daop 8 Surabaya;
- Balai Yasa Manggarai;
- Depo KCI;
- Banyuwangi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Capaian realisasi fisik sebesar 95% menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan inspeksi telah terlaksana. Capaian ini diperoleh meskipun kegiatan mengalami efisiensi anggaran. Untuk menjaga target, pelaksanaan inspeksi disesuaikan melalui: pemanfaatan perjalanan dinas yang telah terjadwal, pengaturan jumlah personel, dan prioritas pada sarana tertentu. Dengan penyesuaian tersebut, inspeksi tetap dapat dilaksanakan di tujuh lokasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keberhasilan ini juga didukung oleh perencanaan jadwal, koordinasi dengan operator terkait jadwal dan kesiapan sarana, serta pelaksanaan inspeksi langsung di lapangan. Tahapan inspeksi meliputi penyusunan jadwal, koordinasi dengan operator, inspeksi lapangan, pencatatan temuan, dan penyampaian hasil kepada operator.

Keterbatasan anggaran akibat efisiensi diatasi dengan penjadwalan ulang dan koordinasi lebih awal dengan operator.

Dari sisi anggaran, realisasi keuangan sebesar 93,64% sejalan dengan realisasi fisik sebesar 95%. Serapan yang tinggi terjadi karena pagu berkurang akibat efisiensi, sementara kebutuhan inspeksi tetap harus dipenuhi. Sisa anggaran Rp19.768.290 akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan sisa inspeksi sebesar 5% secara efektif dan efisien.

c. IKK Persentase **Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian**

Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian terdapat 4 (empat) kegiatan penyusunan kajian dan studi teknis yang menjadi dasar pengembangan NSPK di bidang sarana perkeretaapian.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 76,25%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.153.243.281 dari total pagu anggaran sebesar Rp4.471.251.000.

Tabel 2.7. Target dan Capaian Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Target %	Target (%)				Realisasi (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian 1) Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	100	-	-	-	100	-	15	85	
2) Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 dan IEC 61133 (*Testing of Rolling Stock on Completion of Construction and Before Entry into Service*)						-	15	85	
3) Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian serta Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur Kereta Api (*Railroad*)						-	15	85	
4) Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Integrasi Subsistem Sarana pada Sarana Otomatis						-	15	50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian, target tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% dan akan dicapai pada Triwulan IV. Sampai dengan Triwulan III, capaian kinerja sebesar 76,25% dan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak.

Tiga kegiatan telah mencapai 85%, yaitu kajian standar dan tata cara pengujian uji pembebanan statis dan dinamis, studi penyusunan konsep SNI dari JIS E4041 dan IEC 61133, serta studi penyusunan standar dan tata cara pengujian dan sertifikasi kelaikan kendaraan yang berjalan di jalur kereta api (railroad). Adapun kajian standar dan tata cara pengujian integrasi subsistem pada sarana otomatis mencapai 50% sesuai tahapan pekerjaan dalam kontrak.

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada jadwal kontrak serta pemantauan progres secara berkala terhadap pekerjaan penyedia jasa. Seluruh kegiatan dimulai pada Triwulan II dengan progres awal 15%, kemudian meningkat pada Triwulan III hingga 85% untuk tiga kegiatan dan 50% untuk satu kegiatan, sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp2.153.243.281 atau 48,16% dari pagu Rp4.471.251.000, sehingga tersisa Rp2.318.007.719. Sisa anggaran akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai kontrak.

Sebagai tindak lanjut, pada Triwulan IV tiga kegiatan yang telah mencapai 85% akan menyelesaikan sisa 15% melalui finalisasi dokumen, pembahasan akhir, dan penyampaian hasil, sedangkan kegiatan integrasi subsistem pada sarana otomatis akan menyelesaikan sisa 50% melalui tahapan penyusunan dan finalisasi kajian. Pemantauan progres dilakukan secara berkala agar seluruh kegiatan selesai sesuai jadwal kontrak dan target 100% tercapai pada akhir tahun.

d. IKK Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck*

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2026 dengan target Triwulan III dan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tabel 2.8. Target dan Capaian *Rampcheck* Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Target %	Target (%)				Realisasi (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck*	94,60	-	-	-	94,60	97,79	-	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target persentase pelaksanaan *rampcheck* sarana perkeretaapian tahun 2026 adalah 94,60%. Pada Triwulan III, realisasi capaian kinerja adalah sebesar 97,79%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan *rampcheck* tersebut adalah sebesar Rp291.529.999 atau 85,40% dari total pagu anggaran sebesar Rp341.387.000.

Kegiatan *rampcheck* sarana perkeretaapian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Kesiapoperasian (*rampcheck*) sarana perkeretaapian dalam rangka Angkutan Lebaran Tahun 2026, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari s.d. 6 Maret 2026.
2) Total populasi sarana angkutan penumpang yang menjadi target *rampcheck* mencapai 3.687 unit, terdiri atas 292 lokomotif, 1.876 kereta yang ditarik lokomotif, 86 kereta rel diesel, dan 1.433 kereta rel listrik.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Berdasarkan IKK, target persentase sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck tahun 2026 ditetapkan sebesar 94,60% dan akan dinilai pada Triwulan IV. Kegiatan rampcheck hanya dilaksanakan pada Triwulan I dengan realisasi 97,79%, sehingga telah melampaui target (103,37%). Pada Triwulan II dan Triwulan III tidak terdapat kegiatan rampcheck sehingga tidak ada realisasi pada periode tersebut, sesuai dengan jadwal kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan rampcheck didukung oleh perencanaan jadwal dan sasaran rampcheck yang disusun lebih awal, koordinasi intensif dengan operator sarana perkeretaapian, serta penyampaian hasil dan rekomendasi perbaikan secara cepat. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala terhadap progres tindak lanjut sehingga temuan yang belum selesai dapat segera didorong penyelesaiannya. Komitmen operator dalam menindaklanjuti temuan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan sarana, turut mendorong capaian 97,79% yang melampaui target 94,60%.

Dari sisi anggaran, realisasi sebesar Rp291.529.999 atau 85,40% dari pagu Rp341.387.000, sehingga tersisa Rp49.857.001. Sisa anggaran dialokasikan untuk rampcheck pada Natal dan Tahun Baru.

Sebagai tindak lanjut, pada Triwulan IV akan dilaksanakan rampcheck Natal dan Tahun Baru dengan memprioritaskan sarana yang temuannya belum ditindaklanjuti, serta pemantauan agar capaian tetap berada di atas target 94,60%.

e. IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2026 dengan target Triwulan III dan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tabel 2.9. Target dan Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				Realisasi (%)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian								
a. Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I	-	-	-	100	-	-	66,14	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				Realisasi (%)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
b. Bimbingan Teknis di Bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian	-	-	-	100	-	100	-	
c. Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian	-	-	-	100	-	-	38,25	
d. Transfer Knowledge Kelaikan Sarana Otomatis	-	-	-	100	-	-	-	
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	-	-	80,80	-	-	-	
3. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian**)	-	-	-	13,75	-	-	-	
4. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian *)				100	18,35	40,90	60,27	

*) dalam ribuan

1) IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

a) Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di Wilayah I direncanakan dilaksanakan pada bulan Desember 2026 sebagai kegiatan akhir tahun untuk menilai capaian kinerja, menganalisis hambatan, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sepanjang tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang beroperasi di Wilayah I memenuhi standar keselamatan dan kelaikan teknis, sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi serta perencanaan program peningkatan kinerja Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di Wilayah I ditetapkan sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp20.010.000 atau 66,14 % dari total pagu anggaran sebesar Rp30.255.000.

b) Bimbingan Teknis di Bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Bimbingan teknis kelaikan sarana perkeretaapian merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sebagai wujud fungsi Pemerintah sebagai regulator, sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan memberikan pengetahuan baru kepada sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian demi perbaikan pelayanan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target persentase pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelaikan sarana perkeretaapian tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Pada Triwulan III, capaian kinerja kegiatan tersebut mencapai 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.200.000 atau 100% dari total pagu anggaran sebesar Rp14.200.000.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis didukung oleh perencanaan jadwal dan materi yang sesuai kebutuhan, koordinasi dengan narasumber dan peserta, serta pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Tidak terdapat kendala berarti pada pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut, hasil bimbingan teknis dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

c) *Transfer of Knowledge* Kelaikan Sarana Otomatis

Pada Triwulan III Tahun 2026 kegiatan *Transfer of Knowledge* Kelaikan Sarana Otomatis belum dilaksanakan dan dijadwalkan pada bulan Oktober 2026.

Melalui pelaksanaan kegiatan *Transfer of Knowledge* ini, diharapkan seluruh materi terkait pengenalan sistem otomatisasi sarana dapat tersampaikan secara komprehensif kepada peserta. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kompetensi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang kelaikan sarana perkeretaapian, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi otomatisasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan penyelenggaraan kelaikan sarana perkeretaapian.

d) Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian

Kegiatan Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 sebagai upaya memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan keakuratan data identitas sarana perkeretaapian. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan data yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, sehingga tersedia basis data yang valid dan mutakhir sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan, sertifikasi kelaikan sarana, serta pengambilan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian**.**

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp28.237.993 atau 38,25% dari pagu setelah efisiensi sebesar Rp73.829.000, sehingga tersisa Rp45.591.007.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.10. Penetapan Identitas, Penghapusan, Perubahan Identitas dan Mutasi

Badan Usaha/Jenis Sarana	Permohonan Mutasi Sarana			Permohonan Penetapan Identitas				Permohonan Perubahan Identitas		Grand Total
	Dalam Proses	Selesai	Total	Dalam Proses	Ditolak	Selesai	Total	Selesai	Total	
Balai Perawatan Perkeretaapian				**2**			**2**			**2**
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri				2			**2**			2
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	**3**	**48**	**51**		**1**	**14**	**15**	**3**	**3**	**69**
Gerbong		2	**2**		1	9	**10**			12
Kereta	3	29	**32**			3	**3**	3	3	38
Lokomotif		17	**17**			2	**2**			19
PT Kereta Commuter Indonesia				**1**		**1**	**2**			**2**
KRL				1		1	**2**			2
Grand Total	**3**	**48**	**51**	**3**	**1**	**15**	**19**	**3**	**3**	**73**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) IKK Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Capaian perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I pada Triwulan III mencapai **Rp379.700.000**,-, dengan persentase **60,27%** dari target sebesar **Rp630.000.000,-**.

Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya intensitas permohonan layanan kelaikan sarana perkeretaapian serta tingginya kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, dan optimalisasi monitoring penerimaan turut berkontribusi terhadap realisasi PNBP, sekaligus mencerminkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dalam mendukung penerimaan negara.

Tabel 2.11. Capaian Perolehan PNBP Sertifikasi Per Bulan

No.	Bulan	Jumlah (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
1	Januari	17.600.000	17.600.000
2	Februari	3.200.000	20.800.000
3	Maret	94.800.000	115.600.000
4	April	59.700.000	175.300.000
5	Mei	56.200.000	231.500.000
6	Juni	26.200.000	257.700.000
7	Juli	41.100.000	298.800.000
8	Agustus	35.700.000	334.500.000
9	September	45.200.000	379.700.000
10	Oktober		
11	November		
12	Desember		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I pada Tahun Anggaran 2026 menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja. Capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan III dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 95,25. Hasil pengukuran pada Triwulan III menunjukkan capaian sebesar 98,75 dengan kategori Sangat Baik, atau 103,67% terhadap target, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi, kecepatan, dan profesionalitas pelayanan publik yang diberikan, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

b. Persentase Sarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan Sarana

1) Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I

Pada Triwulan III, target sertifikasi sarana sebesar 57,36% atau 3.611 sertifikat. Realisasi sertifikasi sebesar 55,69% atau 3.506 sarana, sehingga capaian kinerja sebesar 97,09% terhadap target IKK Triwulan III dan masih terdapat selisih 105 sarana. Dari 5.512 permohonan yang masuk, 3.506 sarana (63,61%) telah tersertifikasi, sedangkan 2.006 sarana masih dalam proses, yaitu 1.222 sarana telah lulus uji dan masih dalam proses administrasi, 601 sarana belum diuji, 133 sarana tidak lulus uji, dan 50 sarana dalam proses verifikasi. Untuk mencapai target tahunan 5.582 sertifikat masih diperlukan 2.076 sertifikat. Realisasi anggaran sebesar Rp102.362.500 atau 68,04% dari pagu Rp150.448.000, sehingga tersisa Rp48.085.500.

2) Supervisi Pengujian Sarana Wilayah I

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target supervisi pengujian sarana Wilayah I pada tahun 2026 adalah sebesar 100%.

Pada Triwulan III, target kegiatan pada periode pelaporan tercapai sesuai rencana meskipun pagu anggaran mengalami efisiensi dari Rp786.251.000 menjadi Rp310.689.000 (60,48%). Realisasi anggaran sebesar Rp244.247.819 atau 78,61% dari pagu setelah efisiensi, sehingga tersisa Rp66.441.181.

3) Inspeksi Sarana Perkeretaapian Wilayah I

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan inspeksi sarana Wilayah I pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%.

Pada Triwulan III, realisasi fisik sebesar 95%, sehingga terdapat selisih 5% dari target. Realisasi anggaran sebesar Rp291.022.710 atau 93,64% dari pagu setelah efisiensi Rp310.791.000, sehingga tersisa Rp19.768.290.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% dan akan dicapai pada Triwulan IV. Pada Triwulan III, capaian kinerja sebesar 76,25% dengan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal kontrak: tiga kegiatan mencapai 85% dan satu kegiatan (kajian pengujian integrasi subsistem pada sarana otomatis) mencapai 50%. Realisasi anggaran sebesar Rp2.153.243.281 atau 48,16% dari pagu Rp4.471.251.000, sehingga tersisa Rp2.318.007.719.

d. Persentase Sarana Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil *Rampcheck*

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target persentase sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti sesuai hasil *rampcheck* tahun 2026 ditetapkan sebesar 94,60%. *Rampcheck* dalam rangka Angkutan Lebaran Tahun 2026 dilaksanakan pada 2 Februari sampai 6 Maret 2026 dengan realisasi tindak lanjut sebesar 97,79% (103,37% dari target). Pada Triwulan II dan Triwulan III tidak terdapat kegiatan *rampcheck*. Realisasi anggaran sebesar Rp291.529.999 atau 85,40% dari pagu Rp341.387.000, sehingga tersisa Rp49.857.001 yang dialokasikan untuk *rampcheck* Natal dan Tahun Baru.

e. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

1) Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi anggaran sebesar Rp20.010.000 atau 66,14% dari total pagu Rp30.255.000. Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada Desember 2026.

2) Bimbingan Teknis di Bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%. Pada Triwulan III, capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.200.000 atau 100% dari total pagu Rp14.200.000.

3) *Transfer of Knowledg*e Kelaikan Sarana Otomatis

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%. Pada Triwulan III kegiatan belum dilaksanakan dan dijadwalkan pada bulan Oktober 2026.

4) *Monitoring* dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), target pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi anggaran sebesar Rp28.237.993 atau 38,25% dari pagu setelah efisiensi Rp73.829.000, sehingga tersisa Rp45.591.007.

5) Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sampai dengan Triwulan III, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I sebesar Rp379.700.000 atau 60,27% dari target Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp630.000.000. Untuk mencapai target diperlukan tambahan Rp250.300.000 pada Triwulan IV.

2. SARAN TINDAK LANJUT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja Triwulan III, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I perlu:

a. Mempercepat proses sertifikasi melalui koordinasi dengan operator dan unit terkait. Langkah ini sekaligus mendorong realisasi PNBP.
b. Melaksanakan supervisi dan inspeksi pada Triwulan IV secara selektif dengan prioritas uji pertama sarana, menyelesaikan sisa 5% inspeksi, dan mengusulkan penyesuaian anggaran bila diperlukan agar kualitas pengendalian mutu pengujian tetap terjaga.
c. Memantau progres kegiatan NSPK sesuai jadwal kontrak agar sisa 15% (tiga kegiatan) dan sisa 50% (satu kegiatan) selesai pada Triwulan IV.
d. Melaksanakan *rampcheck* Natal dan Tahun Baru serta memantau tindak lanjut temuan oleh operator.
e. Melaksanakan *Transfer of Knowledge* (Oktober 2026), Monitoring dan Rekonsiliasi Data Identitas, serta Evaluasi dan Pelaporan (Desember 2026) sesuai jadwal agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 26/K4.5/X/2026

Yth	:	Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
Hal	:	Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Bulan September dan Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	8 Oktober 2026

Merujuk Nota Dinas Koordinator/Ketua Tim Kelompok Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor: 174/K4/IX/2026 tanggal 30 September 2026 perihal Permohonan Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Bulan September dan Triwulan III Tahun 2026, dengan ini disampaikan data dukung dimaksud (konsep laporan terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lukman Al Amin
NIP 198101242001121001

Tembusan:
Koordinator / Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 26/K4.5/X/2026
Tanggal : 8 Oktober 2026

Tabel 1. Rencana Aksi dan Laporan Bulanan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Rencana Pelaksanaan Kumulatif dan Realisasi (Bulan)												Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian***)	Nilai	95,25												95,25		Direktorat Sarana Perkeretaapian
2	Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian																
	1 Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan	%															Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
	- Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian*)		89,26	0	0	3,79 299	4,54 359	12,98 1025	22,93 1811	23,69 1871	30,02 2371	45,21 3571	51,54 4071	57,87 4571	89,26 7051	345.200.000 menjadi 294.400.000 Realisasi 189.900.000 64,50%	
				0	0	299	359	1025	1811	1871	2092	3080					
	- Supervisi pengujian sarana		100		1,27	6,27	41,32	44,97	54,10	55,57	71,63	71,87			100	332.528.000 Realisasi 238.974.514 (71,87%)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Rencana Pelaksanaan Kumulatif dan Realisasi (Bulan)												Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2 Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck**)	%	94,6			97,79	100	100	100	100	100	100			94,6	341.387.000 (rampcheck angkutan lebaran, natal, tahun baru) Realisasi 291.529.999 (85,40%)	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan II
	3 Persentase Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian - Studi standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun - Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	100						14,23	13,63	13,63	48,41 66,82			100	1.044.705.000 Realisasi 505.777.050 (48,41%) 26.723.000 Realisasi 17.856.965 (66,82%)	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian																
	1 Nilai kinerja anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian - Inspeksi Kelaikan Sarana	%	100						26,78	44,95	44,95	33,68			100	202.205.000 menjadi 286.659.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Rencana Pelaksanaan Kumulatif dan Realisasi (Bulan)												Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Perkeretaapian di Wilayah II															Realisasi 96.543.872 (33,68%)	
	- Evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana wilayah II											49,71				41.748.000 Realisasi 20.752.275 (49,71%)	
	- Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian				83,39	83,39	100	100	100	100	100	100				150.639.000 Realisasi 150.638.800 (100%)	
	- Pemeliharaan sarana teknologi informasi dan komunikasi								22,76	22,76	22,76	22,76				20.000.000 Realisasi 4.551.880 (22,76%)	
2	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian***)	%	100												100	1.422.000.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian***)	Nilai	80,80												80,80		Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Rencana Pelaksanaan Kumulatif dan Realisasi (Bulan)												Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian***)	Nilai	13,75												13,75		Direktorat Sarana Perkeretaapian

*) Merupakan IKK dan target Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II sejumlah 7051 sertifikat dari 7.899 target sertifikat sarana aktif 2026

**) Merupakan IKK dan target Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Wilayah II

- Total sarana yang diperiksa pada bulan Maret sebanyak 3.679 unit dari target sarana 3.687 unit (99,78%) dengan total temuan sebanyak 1.044 (100%) sudah ditindaklanjuti

***) Merupakan IKK dan target Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. Proses Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah II

Nama Badan Usaha	Jumlah Permohonan	Proses Verifikasi	Lulus Verifikasi	Tidak Lulus Verifikasi	Sudah Bayar PNBP Uji	Belum Bayar PNBP Uji	Sudah Diuji	Belum Diuji	Lulus Uji	Tidak Lulus Uji	Terbit Sertifikat	Belum Terbit Sertifikat
PT RAILINK	16		16		16		16		16		16	
PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER	139		129	10	129	0	0	129	0	0	0	0
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	6838	184	6416	238	5108	1308	4913	195	4911	2	3064	1847
Total	6993	184	6561	248	5253	1308	4929	324	4927	2	3080	1847

Tabel 3. Capaian Bulanan Jumlah Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah II Per Bulan Tahun 2026

Jenis Sarana	Jan		Feb		Mar		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Total	
	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB	UP	UB
Gerbong					60	223	60		180	362	126	569		60	54	163	0	957	480	2334
Kereta										76		1				3		27		107
KRD										16						0		0		16
KRL												24				0		0		24
Lokomotif					2	9			14	2	2	62				1		4	18	78
Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri						5				15		2				0		0		22
Peralatan Khusus Tanpa Penggerak										1		0				0		0		1
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**62**	**237**	**60**	**0**	**194**	**472**	**128**	**658**	**0**	**60**	**54**	**167**	**0**	**988**	**498**	**2582**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. Capaian Perolehan PNBP Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II

Bulan	Badan Usaha	PNBP Cetak	
Januari*)	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	200.000
Februari*)	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	62.200.000
Maret**)	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	26.200.000
April	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	11.700.000
Mei	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	63.500.000
	PT. Railink	Rp	1.600.000
Juni	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	78.600.000
Juli	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	6.000.000
Agustus	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	22.100.000
September	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp	98.800.000
Total		Rp	370.900.000

*) Merupakan sertifikasi Tahun 2025 yang dibayarkan Tahun 2026
**) Merupakan sertifikasi Tahun 2025 yang dibayarkan Tahun 2026 dan sertifikasi Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUBDIREKTORAT KELAIKAN SARANA WILAYAH II
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Bulan September 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Pagu	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output (akumulatif)	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	%	Volume	%	%			
1	Meningkatnya pelayanan bidang sarana perkeretaapian	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat	Nilai	95,25	a) Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian														Direktorat Sarana Perkeretaapian
2	Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian	1) Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan	%	89,26	a) Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)	7051	89,26	294.400.000	3571	45,21	-	-	38,99	189.900.000	3080	64,50	Persentase target sampai bulan september 45,21 realisasi 38,99 (tabel 3) Kendala Sedang berproses administrasi sertifikasi	Mempercepat penyelesaian proses administrasi	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
					b) Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II			332.528.000	-		-	-	-	238.974.514	-	71,87	Realisasi yang sudah dilakukan sampai bulan September meliputi : 1. Supervisi Pengujian Pertama dan Berkala Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 3 s.d. 6 Maret 2026 di Divre III Sumatera Selatan 2. Supervisi Pengujian Pertama Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 6 s.d. 9 April 2026 di Banyuwangi 3. Supervisi Pengujian Berkala Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 7 s.d. 10 April 2026 di Divre III Sumatera Selatan 4. Supervisi Pengujian Pertama Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 15 s.d. 17 April 2026 di Divre IV Lampung 5. Supervisi Pengujian Pertama Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 21 s.d. 23 April 2026 di Divre III Sumatera Selatan 6. Melaksanakan Supervisi Pengujian Pertama dan Berkala Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2026 di Divre III Sumatera Selatan 7. Melaksanakan Supervisi Pengujian Berkala Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 20 s.d. 22 Mei 2026 di Divre II Sumatera Barat 8. Melaksanakan Kegiatan Supervisi Pengujian Pertama Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 21 s.d. 24 Juli 2026 di Banyuwangi 9. Melaksanakan Kegiatan Supervisi Pengujian Pertama dan Pengujian Berkala Sarana Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2026 di Divre III Sumatera Selatan		Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
		3) Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck**)	%	94,60	a) Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,60%	94,60	341.387.000	988	94,6	-	-	100	291.529.999	1044	85,40	Total sarana yang diperiksa pada bulan Maret sebanyak 3.679 unit dari target sarana 3.687 unit (99,78%) dengan total temuan sebanyak 1.044 (100%) sudah ditindaklanjuti Kendala Terjadinya perbedaan data antara Berita Acara dari Balai Teknik Perkeretaapian dan data dari Database Direktorat Sarana Perkeretaapian yang sebelumnya sudah diinput oleh Balai Teknik Perkeretaapian		Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan II
		2) Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	100	a) Studi standarisasi dan kelaikan sarana perkeretaapian pengangkut bahan berbahaya dan beracun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.044.705.000	-	-	-	-	-	505.777.050	-	48,41	Telah dilaksanakan laporan pendahuluan pada bulan Mei 2026 dan laporan antara bulan September 2026 Kendala - Konsultan kurang menguasai bidang studi - Penyusunan draft dokumen belum sesuai dengan output yang diharapkan sehingga masih diperlukan revisi	Permintaan penambahan tenaga ahli yang menguasai bidang tersebut	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
					b) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri bidang kelaikan sarana perkeretaapian	1 Laporan	1 Laporan	26.723.000	-	-	-	-	-	17.856.965	-	66,82	Kegiatan Survey Lapangan dalam Rangka Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Standar dan Tata Cara Pengujian Sarana Perkeretaapian pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2026 di Depo Kereta Bandung dan Depo Gerbong Cirebon		Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	1) Nilai kinerja anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	a) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di Wilayah II	1 Laporan	1 Laporan	286.659.000	-	-	-	-	-	96.543.872		33,68	Kegiatan Inspeksi Pengoperasian Sarana perkeretaapian pada tanggal 21 September 2026 s.d. 2 Oktober 2026 di Wilayah Sumatera Kendala Perlu penyempurnaan *checksheet* inspeksi		Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
					a) Evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana Wilayah II			41.748.000	-	-	-	-	-	20.752.275		49,71			
					b) Bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan rampcheck sarana perkeretaapian			150.639.000	-	-	-	-	-	150.638.800		100,00	Telah dilaksanakan pada Bulan januari 2026 sesuai dengan rencana		
					c) Pemeliharaan sarana teknologi informasi dan komunikasi			20.000.000	-	-	-	-	-	4.551.880		22,76	Berlanggan google cloud (gemini) dan canva		
		2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	%	100	a) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	laporan	100										Realisasi merujuk tabel 4		Direktorat Sarana Perkeretaapian
		3) Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,8	a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian														Direktorat Sarana Perkeretaapian
					b) Penyusunan dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian														Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Pagu	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output (akumulatif)	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	%	Volume	%	%			
		4) Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level	13,75	a) Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian														Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 18/K4.TU/X/2026

Yth.	:	Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Dari	:	Koordinator/Ketua Tim Kelompok Tata Usaha
Hal	:	Laporan Capaian Kinerja Tim/Kelompok Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Periode September Tahun 2026
Tanggal	:	05 Oktober 2026

Menindaklanjuti penetapan sasaran kinerja pegawai dan kewajiban pelaporan kinerja Tim/Kelompok Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian, Bersama ini disampaikan laporan capaian kinerja Tim/Kelompok Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian periode bulan September 2026 sebagai berikut :

a. **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian**

   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian diukur melalui hasil pengisian Survei Aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Direktorat Sarana Perkeretaapian. Pada periode Januari sampai dengan September 2026, telah dilaksanakan survei mandiri persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan kepada pengguna layanan di bidang sarana perkeretaapian.

   Pelaksanaan survei tersebut melibatkan 29 responden pengguna layanan sarana perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei periode Januari sampai dengan September 2026, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. Adapun hasil pengukuran IKM tersebut disajikan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Bulan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Persepsi Korupsi
1	Januari	100	100
2	Februari	100	100
3	Maret	98.13	100
4	April	94,38	95.50
5	Mei	-	-
6	Juni	97.50	97.50
7	Juli	96.25	96.25
8	Agustus	100	100
9	September	100	100
Nilai rata-rata Januari s.d. September		98.28	98.66

Dari hasil penilaian survei untuk Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebesar 98.28.

b. Indikator Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Pelaksanaan kegiatan studi di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang direncanakan. Dari 17 kegiatan studi yang tercantum, beberapa kegiatan telah menyelesaikan tahapan laporan pendahuluan dan laporan antara, serta sebagian telah melaksanakan FGD/konsinyering dan menyelesaikan laporan antara. Kegiatan yang telah menyelesaikan tahapan laporan antara antara lain Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan Rolla, Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur, Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara, Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan yang Berjalan di Jalur KA Railroad, serta Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041:2019 dan IEC 61133:2016. Selain itu, pada September 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembahasan/FGD sebagai bagian

dari...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dari penyelesaian tahapan laporan antara, antara lain pada studi standar spesifikasi teknis monorel, teknologi gerbong angkutan kendaraan Rolla, serta beberapa kajian pada Subdit Kelaikan.

Sampai dengan akhir September 2026, sebagian besar kegiatan tercatat berstatus on schedule, yaitu sebanyak 14 kegiatan, sedangkan 3 kegiatan berstatus late, yaitu Reviu Peraturan Tentang Standar Spektek Monorel, Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian, dan Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun. Terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan, perlu dilakukan pemantauan dan percepatan penyelesaian tahapan pekerjaan, khususnya pemenuhan laporan antara, FGD/konsinyering, dan penyusunan laporan akhir sesuai batas waktu kontrak. Sementara itu, kegiatan yang telah menyelesaikan tahapan sebelumnya agar segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan penyempurnaan dokumen berikutnya sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target akhir kontrak pada Oktober–Desember 2026.

c. Indikator Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pengukuran kinerja atas nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri (self-assessment) unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian AKIP mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja, dengan rentang predikat mulai dari D (nilai > 0–30) sampai dengan AA (nilai > 90–100).

Berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/3/15/K1/DJKA/2026 tanggal 9 September 2026, telah dilaksanakan evaluasi AKIP tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menjadi salah satu unit kerja yang dievaluasi oleh evaluator dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Evaluasi

dilakukan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilakukan terhadap seluruh komponen AKIP, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian memperoleh nilai AKIP sebesar 81,50 pada evaluasi tingkat Eselon I. Adapun rincian hasil evaluasi pada masing-masing komponen disajikan pada tabel berikut:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	PENILAIAN MANDIRI
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	**23.70**
	1.1 Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00
	1.2 Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20
	1.3 Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	**26,10**
	2.1 Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6,00	6,00
	2.2 Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10
	2.3 Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	**12,45**
	3.1 Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40
	3.2 Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05
	3.3 Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00

f. Indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	PENILAIAN MANDIRI
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	**19,25**
	4.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50
	4.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00
	4.3 Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**81,50**

d. Indikator Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Mengacu pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan target nilai 13,75 (Level Repeatable) pada indikator Tingkat Manajemen Risiko. Dalam rangka mencapai target tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian telah melaksanakan berbagai langkah penerapan dan penguatan manajemen risiko, antara lain melalui wawancara penilaian manajemen risiko dalam rangka penilaian maturitas manajemen risiko yang mendukung pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sarana Perkeretaapian Nomor 8/K4/I/2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian, telah disusun dan diterapkan dokumen manajemen risiko yang meliputi: (1) Piagam Manajemen Risiko; (2) Penetapan Konteks; (3) Profil Risiko; (4) Peta Risiko; dan (5) Rencana Penanganan Risiko.

Unit Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian secara berkala telah melaksanakan penanganan, pemantauan, dan penyusunan laporan manajemen risiko setiap triwulan. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan penilaian mandiri terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan menggunakan 15 parameter penilaian. Berdasarkan hasil

penilaian...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penilaian mandiri tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian memperoleh nilai 14 dengan Level Repeatable.

Berdasarkan Surat Undangan Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor PR.005/154/K4/DJKA/2026 tanggal 21 September 2026, telah dilaksanakan Pembahasan Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan, dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode Triwulan III Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemantauan terhadap 8 rencana kegiatan penanganan risiko sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan mitigasi risiko berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

e. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian sampai dengan bulan September Tahun 2026 berdasarkan hasil pemantauan pada Dashboard Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan (Monev Kemenkeu) tercatat sebesar 49,17. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja anggaran sampai dengan periode pelaporan bulan September 2026.

Pada bulan September Tahun 2026, target NKA yang ditetapkan secara kumulatif sampai dengan periode tersebut adalah sebesar 61,00. Dengan demikian, capaian NKA sampai dengan bulan September 2026 dihitung dengan membandingkan realisasi nilai NKA sebesar 49,17 terhadap target NKA sebesar 61,00. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan rumus:

Capaian NKA = (Realisasi NKA / Target NKA) × 100%
= (49,17 / 61,00) × 100%
= 80,61%

Dengan demikian, sampai dengan bulan September Tahun 2026, capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebesar 80,60% terhadap target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi NKA sebesar 49,17 telah mencapai 80,60% dari target kumulatif sebesar 61,00.

f. Indikator...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Indikator Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian

Tahun 2026, sesuai dengan penetapan revisi Perjanjian Kinerja, target kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian ditetapkan sebesar 100,00%, dengan target penerimaan sebesar Rp1.500.000.000. Sampai dengan bulan September 2026, realisasi PNBP pada bulan September tercatat sebesar Rp144.125.000, dengan rincian sebagai berikut:

- PNBP Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah I sebesar Rp45.200.000,
- PNBP Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II sebesar Rp98.800.000, dan
- PNBP Penomoran Sarana Perkeretaapian sebesar Rp125.000.

Dengan demikian, realisasi kumulatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian sampai dengan bulan September 2026 mencapai Rp1.072.520.000. Realisasi tersebut setara dengan 71,50% dari target PNBP tahun 2026 sebesar Rp1.500.000.000, serta mencapai 91,67% dari target kumulatif sampai dengan bulan September 2026.

g. Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pada tahun 2026, berdasarkan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan target sebesar 65,00. Sampai dengan periode September 2026, pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut telah menunjukkan progres sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penataan arsip inaktif Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2019 pada tanggal 21 s.d. 23 Januari 2026 bertempat di Kantor Arsip Kementerian Perhubungan, Soreang, Bandung.
2. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan tema *"Optimalisasi Tata Naskah Dinas dan Arsip Kepegawaian Berbasis SRIKANDI"* pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2026 di Bandung, Jawa Barat.
3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Sarana Perkeretaapian Nomor UM.001/207/K4/DJKA/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 pada tanggal 14 April 2026.

4. Telah...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Telah dilaksanakan penilaian mandiri terhadap pengawasan kearsipan internal, dengan hasil perolehan nilai sementara sebesar 76,00, yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 65,00.

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk lanjut Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ari Pranovi Indrianto
NIP. 197910242009121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 383
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 90/K4/VI/2026

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Hal	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian
Tanggal	:	22 Mei 2026

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Keputusan Direktur Sarana Perkeretaapian Nomor KP-K4 DJKA 11 Tahun 2026 tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Sarana Perkeretaapian telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

3. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian memperoleh nilai 83,00 (Predikat A) dengan interpretasi “Memuaskan”.

4. Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,2
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,5
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20
Nilai Hasil Evaluasi			**83,00**
Predikat			**A**

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja
   Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 25.2 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya :
   1. Dokumen perencanaan kinerja perlu dipublikasikan pada website Direktorat Sarana Perkeretaapian.
   2. Terdapat IKK yang mempunyai capaian anomali (diatas 110%).

   b. Pengukuran Kinerja
   Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25.5 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya perlunya pendokumentasian yang baik setiap pegawai atas hasil pengukuran kinerjanya.

   c. Pelaporan Kinerja
   Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,30 dari nilai maksimal 15,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:
   1) Belum secara konsisten melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja yang terdokumentasi dalam 5 tahun.
   2) Perlunya keseragaman data dukung subdirektorat terkait capaian kinerja agar disusun per indikator kinerja dan menginfokan analisis keberhasilan kinerja/ kegagalan kinerja dan tindaklanjut dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

   d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20 dari skor maksimal 25,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

6. Telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Telah ditindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2025 sebagaimana Nota Dinas Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor: 42/K4/III/2026 tentang Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian
7. Terhadap hasil capaian kinerja tersebut direkomendasikan untuk:
   a. Agar dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu pada ESR dan Website Direktorat Sarana Perkeretaapian.
   b. Agar secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait:
      1) Hasil Pengukuran kinerja setiap pegawai meliputi SKP dan Laporan Bulanan Pegawai.
      2) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang , agar tidak terdapat capaian yang anomali (diatas 110 %) pada akhir periode dan diharapkan dalam perencanaan target kinerja tahun berikutnya dapat menantang.
   c. Agar melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya melakukan peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lanjut diucapkan terima kasih.

Batara
NIP 198108102005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Unit Kerja: DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Tahun: 2026

No	Komponen	Bobot	Nilai					Daftar Evidence
1	PERENCANAAN KINERJA	30	25.2					
Sub-Komponen		**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
1a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia		6	AA	6	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia yang meliputi Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan termasuk dokumen anggaran. Seluruh kriteria juga telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.	seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.		
Kriteria				**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				Memenuhi	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang dibuktikan dengan: 1. PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan 2. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP 3. PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingk Kemenhub 4. PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 5. Permen PPN 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029 6. Buku Pedoman SAKIP Tahun 2026 7. Dokumen SOP Penyusunan PK 8. Dokumen SOP Penyusunan Revisi PK 9. Dokumen SOP Penyusunan RKT 10. Dokumen SOP Penyusunan Renstra			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/Buku Pedoman SAKIP Tahun 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/PM 12 Tahun 2025 tentang Renstra Kemehub 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/Permen PPN 10 Tahun 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/PM 112 Tahun 2017.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/PM 85 Tahun 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/PM 69 Tahun 2012.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/SOP Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/SOP Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/SOP Penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7623/UU Nomor 25 Tahun 2004.pdf
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa: 1. RPJP Kemenhub 2005-2025. 2. Renstra DJKA Tahun 2025-2029. 3. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/LAPORAN EAP RENSTRA DITSAR 2020 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/Renstra 2015-2019 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/Renstra DJKA 2015-2019.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/Renstra DJKA 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/Renstra DJKA 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7624/RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025.pdf
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				Memenuhi	Telah tersedia dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah melalui Rencana Strategis. Adapun data dukung antara lain: 1. Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019, 2020-2024 serta Renstra 2025-2029; 2. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2015-2019, 2020-2024 serta Renstra 2025-2029; 3. Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dan Evaluasi Akhir Periode Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/LAPORAN EAP RENSTRA DITSAR 2020 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Renstra 2015-2019 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Renstra DJKA 2015-2019.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Renstra DJKA 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Renstra DJKA 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/EVALUASI paruh waktu RPJMN dan RENSTRA 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7625/Evaluasi Pengukuran Kinerja ditsar.pdf

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	Memenuhi	Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka pendek melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sarana Perkeretaapian. Adapun data dukung yang disampaikan dari tahun 2021-2026 (5 tahun terakhir): 1. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian 2021-2026. 2. RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian 2021-2026. 3. PK Berjenjang 2021-2026.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi kedua Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/RKT 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/RKT 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/RKT 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/RKT 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/RKT 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/RKT 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/PK Berjenjang 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/PK Berjenjang 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/PK Berjenjang 2023 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/Perjanjian Kinerja Berjenjang 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7626/PK BERJENJANG 2025 Dit. Sarana KA.pdf

Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	Memenuhi	Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dapat dibuktikan melalui : 1. PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. PM 112 Tahun 2017 tetang Pedoman Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 3. Permen PPN 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029; 4. Cascading Renstra 2020-2024 dan 2025-2029; 5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dari tahun 2021-2026 (termasuk revisinya). 6. SKP Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Cascading 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Permen PPN 10 Tahun 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/PM 112 Tahun 2017.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/PM 69 Tahun 2012.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi PK 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi PK 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi PK 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi PK 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi PK 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi PK 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi PK 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi PK 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/Rencana Aksi PK 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/SKP 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/SKP 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/SKP 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/SKP 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/SKP 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7627/SKP 2026 Ditsar.pdf

Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	Memenuhi	Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dapat dibuktikan melalui penetapan dokumen anggaran (DIPA dan POK) termasuk alokasi anggaran per indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi atas PK. Adapun data dukung yang disediakan dilampirkan dari tahun 2021-2026, antara lain: 1. DIPA dan POK Tahun 2021-2026. 2. Rencana Aksi atas PK Tahun 2021-2026 (termasuk revisinya). 3. Screenshoot Aplikasi E-Planning Kemenhub (Pagu Kebutuhan-Indikatif-Anggaran-Alokasi Anggaran Tahun 2026 dan Pagu Kebutuhan Tahun 2027). 4. Highlight Matriks Pendanaan pada Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025-2029	Terdapat kekurangan Data dukung sesuai yg dipersyaratkan dalam PM 74 Tahun 2024 yaitu : DIPA revisi ke 13 Tahun 2025 yg diupload masih konsep, blm ttd		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2021 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2021 Revisi 5.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2022 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2022 Revisi 9.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2023 AWAL.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2023 Revisi 10.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2024 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/DIPA 2024 Revisi 12.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/00. DIPA 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/13. DIPA 2025 Rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/00. DIPA 2026 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2021 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2021 Revisi 5.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2022 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2022 Revisi 9.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2023 AWAL.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2023 Revisi 10.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2024 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK 2024 Revisi 12.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/00. POK 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/13. POK 2025 Rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/00. POK 2026 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi PK 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi PK 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi PK 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi PK 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi PK 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi PK 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi PK 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi PK 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Rencana Aksi PK 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Renstra 2025 2029 Ditsar OK.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/eplanning-2027.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/eplanning-2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/LAMPIRAN KERANGKA PENDANAAN.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7629/POK rev 13 tahun 2025.pdf

Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Memenuhi	Setiap subdit dan subag Tata Usaha di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian telah menetapkan perencanaan kinerja melalui perjanjian kinerja Eselon II dan Perjanjian kinerja berjenjang level Eselon 3, Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana. Adapun data dukung antara lain: 1. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2021-2026; 2. PK Berjenjang Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2021-2026; 3. Dokumentasi/Foto Penandatanganan PK Tahun 2026; 4. SKP Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2021-2026.	pada SKP Kasubdit, penilai kerjanya apakah juga kasubdit ? (SUDAH TL)		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi kedua Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/PK Berjenjang 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/PK Berjenjang 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/PK Berjenjang 2023 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Perjanjian Kinerja Berjenjang 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/PK BERJENJANG 2025 Dit. Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/PK Berjenjang 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/Acara Penandatanganan PK 2026 (Und. Laporan dan Dokumentasi).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/SKP 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/SKP 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/SKP 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/SKP 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/SKP 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7630/SKP 2026 Ditsar.pdf
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
1b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7.2	Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dimana Tujuan/Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai termasuk mandat kebijakan nasional	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**

Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	Memenuhi	Telah ditetapkan dokumen perencanaan kinerja dengan mandat kebijakan nasional (mengacu kebijakan Nasional (RPJP, RPJMN dan Astacita). Adapun data dukung antara lain : 1. KM 296 Tahun 2020 - Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 2. Kepdirjen No. PR.005/SK.89/DJKA/ 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Renstra DJKA 2025-2029; 3. Keputusan Dirsar No HK.209/678/K1/DJKA/2021 tentang Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan Keputusan Direktur Sarana Perkeretaapian No KP-K1 DJKA 122 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029; 4. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2021 s.d 2026 dan Renaksi (termasuk revisinya); 5. RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2021 s.d 2026.	Rencana aksi kegiatan pendukung belum didetailkan setiap bulan		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/KM 296 Tahun 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Renstra DJKA 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi kedua Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/RKT 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/RKT 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/Rencana Strategis Dit Sarana KA 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/RKT 2023 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/RKT 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/RKT 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7637/RKT 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Memenuhi	Publikasi dokumen perencanaan kinerja pada media onlie baik melalui website yang mudah diakses oleh pihak internal maupun eksternal Ditjen Perkeretaapian maupun pada aplikasi e-SAKIP reviu telah dilakukan secara tepat waktu. 1. Publikasi ESR terkait LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 2. Publikasi ESR terkait RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 3. Publikasi ESR terkait PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 4. Publikasi ESR terkait Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 5. Publikasi ESR terkait Renaksi atas PK Tahun 2026 6. Publikasi Website terkait Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 7. Publikasi Website terkait LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 8. Publilkasi Website terkait RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 9. Publikasi Website terkait PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR LKIP.PNG • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR Renaksi PK.PNG • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR PK.PNG • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR RKT.PNG • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR Renstra.PNG • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/Screenshot Renstra 2025-2029 pada website djka.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR LKIP 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR PK 2025-2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR RENAKSI PK 2025-2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR RENSTRA 2025-2029.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR RKT 2025-2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/ESR RKT 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/screenshot Perjanjian Kinerja 2025 website.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/screenshot Perjanjian Kinerja 2026 website.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/Screenshot Renstra 2025-2029 pada website djka.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/screenshot RKT 2025 website.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7676/screenshot RKT 2026 website.png

Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Memenuhi	Tujuan telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan key performance Indikator mengacu pada Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian termasuk mandat Kementerian Perhubungan dan kebijakan nasional. Adapun data dukung antara lain : 1. SK Kepdirjen Indikator Kinerja 2025. 2. Hightlight bagian Matriks Sasaran, Indikator dan Target pada Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025 s.d 2029. 3. Hightlight bagian Target pada PK Direktorat Sarana Perkeretaapian 2026. 4. Highlight Tugas dan Fungsi Direktorat Sarana Perkeretaapian pada PM 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 5. Highlight pada dokumen PK 2021 - 2026 pada bagian tujuan dan sasaran. 6. Dokumen Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi kedua Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Revisi Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/PM 4 Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/SK Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/SK Penetapan Indikator Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/SK Penetapan Indikator Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/EVALUASI paruh waktu RPJMN dan RENSTRA 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/Evaluasi Pengukuran Kinerja ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7677/LAPORAN EAP RENSTRA DITSAR 2020 2024.pdf
Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Memenuhi	Tujuan telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan key performance Indikator mengacu pada Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian termasuk mandat Kementerian Perhubungan dan kebijakan nasional. Adapun data dukung antara lain : 1. SK Kepdirjen Indikator Kinerja 2025. 2. Hightlight bagian Matriks Sasaran, Indikator dan Target pada Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025 s.d 2029. 3. Hightlight bagian Target pada PK Direktorat Sarana Perkeretaapian 2026. 4. Highlight Tugas dan Fungsi Direktorat Sarana Perkeretaapian pada PM 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 5. Highlight pada dokumen PK 2021 - 2026 pada bagian tujuan dan sasaran. 6. Dokumen Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/SK Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/PM 4 Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi kedua Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Perjanjian Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7678/Rencana Strategis Dit Sarana KA 2025-2029.pdf

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Memenuhi	Tujuan/Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai termasuk mandat kebijakan nasional. Adapun data dukung antara lain: 1. SK Kepdirjen Indikator Kinerja 2025; 2. Indikator sudah memenuhi kriteria SMART 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 4. Kertas Kerja Evaluasi Indikator Kinerja dimana telah memenuhi Kriteria SMART sebagaimana tercantum pada KKE Format J			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7679/SK Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7679/Hasil Evaluasi BPKP atas PM dan PK SPIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7679/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7679/Format J Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7679/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7679/LKIP 2025.pdf
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	Memenuhi	Telah dilakukan penetapan indikator kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian dan dituangkan pada Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dan PK Tahun 2026. Adapun pada periode Renstra Tahun 2020-2024, terjadi 2 kali revisi indikator kinerja yakni pada Tahun 2021 dan 2023. Revisi indikator pada tahun 2021 mengakomodir masukan untuk menyusun indikator kinerja yang berorientasi outcome. Telah terjadi perubahan indikator sesuai laporan rapat pembahasan Indikator Kinerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Rekomendasi Kementerian PAN dan RB tahun 2021 dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB Dan Laporan Rapat Bimtek SAKIP yang diselenggarakan pada Bulan Desember 2022 dengan Narasumber Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Kementerian PANRB. Untuk revisi indikator pada tahun 2023 mengakomodir masukan untuk cascading indikator IKM yang ada pada Kemenhub serta indikator SAKIP dan SPIP dari Direktorat Sarana Perkeretaapian pada unit kerja lain di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Untuk Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 pada Desember 2025. Adapun data dukung yang disediakan antara lain : 1. SK Kepdirjen Indikator Kinerja Tahun 2023 (Penambahan Indikator IKM, SAKIP dan SPIP pada Unit Kerja); 2. SK Kepdirjen Indikator Kinerja Tahun 2025 (penyesuaian terhadap Renstra Tahun 2025-2029); 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 s.d 2026 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 s.d 2026; 4. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan 2025-2029; 5. SK Indikator Kinerja (outcome) Tahun 2021 Nomor HK.209/2/6/DJKA/2021.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/SK Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/SK Penetapan Indikator Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi Perjanjian Kinerja 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi Perjanjian Kinerja 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi Perjanjian Kinerja 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/SK Penetapan Indikator Kinerja 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7680/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	Tidak Memenuhi	Target kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan memperhatikan beberapa hal diantaranya : 1. Target pada Renstra; 2. Alokasi anggaran tahun berjalan; 3. Capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun data dukung yang disediakan antara lain: 1. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 ; 2. LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025; 3. Catatan Hasil Reviu 2025; 4. Kertas Kerja (Format K) Direktorat Sarana Perkeretaapian (sesuai lampiran SE-1 Itjen Tahun 2024) 5. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025-2029. 6. Kepdirjen IKU/IKK Tahun 2025.	Target yang di tetapkan tahun 2025 Belum menantang karena terdapat 3 IKK yang tidak on the right track (realisasi >110%)		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/SK Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/LKIP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/Format K Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7681/Revisi_II_PK_2025_Ditsar.pdf
Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Memenuhi	Dokumen Perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Direktorat Sarana Perkeretaapian) telah selaras kondisi/hasil yang ingin dicapai s.d level jabatan. Adapun data dukung antara lain : 1. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024 dan Tahun 2025-2029; 2. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2026 (termasuk revisi); 3. PK Berjenjang di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan 2026; 4. Cascading Sasaran dan Indikator Kinerja MPPH Direktorat Sarana Perkeretaapian ; 5. SKP Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2026;	1. Cascading yang ada belum belum mencerminkan penjenjangan indikator per jabatan, cascading yang ada merupakan MPPH 2. SKP sudah ada tetapi indikator belum menjelaskan penjenjangan seluruh indikator direktur yang didukung sampai level staf		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/PK BERJENJANG 2025 Dit. Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/PK Berjenjang 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/SKP 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/SKP 2026 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/Rencana Strategis Dit Sarana KA 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/cascading direktorat sarana.xlsx • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/MPPH 2026.jpeg • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7682/SKP 2026 Ditsar.pdf

Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			Memenuhi	Dalam dokumen Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025-2029 telah mencakup arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan kebijakan nasional termasuk penguatan kelembagaan kaitannya kerjasama dengan stakeholder maupun pemerintah daerah serta kerangka pendanaan Adapun data dukung antara lain : 1. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025-2029 (Highlight Penguatan/Kerangka Kelembagaan dan Highlight Kerangka Pendanaan); 2. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 (Highlight Bab II). 3. Highlight hubungan crosscutting LKIP Tahun 2025.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7683/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7683/LKIP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7683/Rencana Strategis Dit Sarana KA 2025-2029.pdf
Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Memenuhi	Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.melalui penyusunan perjanjian kinerja berjenjang yang mencakup komitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Adapun data dukung antara lain : 1. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2026; 2. PK Berjenjang Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2026; 3. Dokumentasi Rapat maupun penandatanganan PK; 4. SKP pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan 2026.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/PK BERJENJANG 2025 Dit. Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/PK Berjenjang 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/Acara Penandatanganan PK 2026 (Und. Laporan dan Dokumentasi).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/SKP 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7684/SKP 2026 Ditsar.pdf
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
1c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	BB	12	Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%)	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%)		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	Memenuhi	Anggaran yang tercantum pada DIPA telah selaras dengan IKU yang telah ditetapkan dan ingin dicapai pada Renstra dan PK Direktorat Sarana Perkeretaapian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan : 1. Highlight “Target dan Kebutuhan Anggaran Tahunan” pada Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025 -2029 pada Kerangka Pendanaan; 2. DIPA dan POK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2022 s.d 2026 ; 3. Highlight “Anggaran per Indikator Kinerja” pada PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025, Revisi PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025, Revisi II PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026; 4. Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 s.d Maret Tahun 2026.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/DIPA 2022 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/DIPA 2022 Revisi 9.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/POK 2022 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/POK 2022 Revisi 9.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/DIPA 2023 AWAL.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/DIPA 2023 Revisi 10.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/POK 2023 AWAL.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/POK 2023 Revisi 10.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/DIPA 2024 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/DIPA 2024 Revisi 12.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/POK 2024 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/POK 2024 Revisi 12.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/00. DIPA 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/13. DIPA 2025 Rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/00. POK 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/13. POK 2025 Rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/00. DIPA 2026 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/07. POK 2026 Rev 7.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Rencana Aksi PK 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/1. Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/2. Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/3. Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/4. Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/5. Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/6. Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/7. Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/8. Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/9. Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/10. Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/11. Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/12. Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Maret_2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Februari_2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Januari_2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7701/Monitoring renaksi Juli 2025.pdf

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	Tidak Memenuhi	Aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan diterjemahkan melalui RO/KRO pada dokumen anggaran. Selanjutnya, RO/KRO tersebut dilaksanakan guna mendukung kinerja/IKU yang ingin dicapai pada Direktorat Sarana Perkeretaapian. Dengan kata lain, RO/KRO yang ada telah selaras dengan IKU yang telah ditetapkan dan ingin dicapai sebagaimana tertuang pada dokumen PK. Adapun data dukung yang disediakan antara lain : 1. Cascading Sasaran dan Indikator Kinerja terkait Program Dukungan Manajemen. 2. Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 s.d Maret 2026. 3. Highlight terkait keselarasan aktivitas untuk mendukung kinerja pada KK 2 (Penetapan Kinerja) pada dokumen Hasil Evaluasi SPIP 2025. 4. PK Tahun 2025, Revisi I PK Tahun 2025 dan Revisi II PK Tahun 2025 serta PK Tahun 2026; 5. DIPA dan POK Tahun 2025 s.d 2026.	• Rencana aksi kegiatan pendukung yang disampaikan belum mencakup rencana aksi output , penanggungjawab kegiatan pendukung belum terbagi unit kerja dilingkungan dit sarana • Target pada Monitoring rencana aksi tidak berdasarkan target kegiatan pendukung tapi pada target indikator kinerjanya		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Rencana Aksi PK 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/1. Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/2. Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/3. Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/4. Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/5. Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/6. Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/7. Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/8. Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/9. Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/10. Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/11. Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/12. Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/1. Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/2. Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/3. Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/00. DIPA 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/13. DIPA 2025 Rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/00. POK 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/13. POK 2025 Rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/00. DIPA 2026 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7702/00. POK 2026 Awal.pdf
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	Tidak Memenuhi	Target kinerja telah dicapai dengan baik atau masih on the right track. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata tingkat capaian di Tahun 2025 (berdasarkan LKIN Tahun 2025) yang sangat baik dimana sebanyak 9 dari 12 indikator kinerja (IKK) telah on the right track (capaian kinerja 90%-110%) dan memiliki rata-rata capaian sebesar 105,374%. Adapun data dukung yang disediakan antara lain : 1. Highlight bagian “Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Empat Tahun Terakhir serta perbandingan dengan Target Renstra” pada LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 (BAB III); 2. Dokumen PK Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025, Revisi I PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025, Revisi II PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026; 3. EPW dan EAP Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024;	terdapat 3 indikator tahun 2025 yang dicapai tidak on the right track (>110%)		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/LKIP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/EVALUASI paruh waktu RPJMN dan RENSTRA 2020-2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/Evaluasi Pengukuran Kinerja ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7704/LAPORAN EAP RENSTRA DITSAR 2020 2024.pdf

Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	Tidak Memenuhi	Monitoring terhadap rencana aksi telah dilaksanakan secara rutin dan berkala (setiap bulan). Selain itu, di setiap triwulan telah disusun laporan monitoring kinerja triwulanan guna pemantauan terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun data dukung yang dilampirkan sebagai berikut: 1. Monitoring Renaksi setiap Bulan Tahun 2025 dan Monitoring Renaksi Januari s.d Maret Tahun 2026. 2. Monitoring Capaian Kinerja di apikasi e-Performance setiap Bulan Tahun 2025 s.d Maret 2026 (screenshot e-Performance). 3. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan I s.d IV Tahun 2025 dan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026. 4. Laporan Rapat Pembahasan PK dan Renaksi Tahun 2026, Laporan Rapat Pembahasan TW I Tahun 2026.	• Rencana aksi kegiatan pendukung yang disampaikan belum mencakup rencana aksi output , penanggungjawab kegiatan pendukung belum terbagi unit kerja dilingkungan dit sarana • Target pada Monitoring rencana aksi tidak berdasarkan target kegiatan pendukung tapi pada target indikator kinerjanya		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/1. Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/2. Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/3. Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/4. Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/5. Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/6. Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/7. Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/8. Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/9. Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/10. Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/11. Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/12. Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/1. Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/2. Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/3. Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/LMCK Triwulan I 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/LMCK Triwulan I 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/LMCK Triwulan II 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/LMCK Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7706/LMCK Triwulan IV 2025.pdf

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Tidak Memenuhi	Telah dilaksanakan penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya pada Revisi Perjanjian Kinerja dan Laporan Monitoirng Kinerja Triwulan selanjutnya termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Perkeretaapian. Adapun data dukung antara lain: 1. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan highlight pada bagian “Analisis” atau “Rekomendasi” yang mengupayakan peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran, program dan indikator kinerja dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; 2. PK Tahun 2026; 3. PK (termasuk Revisinya) Tahun 2025; 4. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan highlight pada bagian “Analisis” atau “Rekomendasi” yang mengusulkan revisi PK Tahun 2025 guna penyesuaian target dan indikator yang ditetapkan pada Dokumen Renstra Final termasuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori on the right track (capaian 90-110%); 5. Monitoring Renaksi bulan Januari s.d Desember 2025 dan Monitoring Renaksi Januari s.d Maret 2026. 6. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan 2025-2029. 7. RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian Perkeretaapian n Tahun 2025-2026. 8. Renaksi atas PK (termasuk revisinya) Tahun 2025-2026.	Tidak terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. misalnya : Pada LMCK TW III, realisasi pada IKK 11nya sudah lebih dari 100%, seharusnya pada rev II PK sudah dipertimbangkan untuk merevisi target kinerja pada IKK 11. Tetapi pada laporan LMCK TW III tidak ada rekomendasi tindak lanjut untuk revisi PK		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/LMCK Triwulan I 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/LMCK Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/LMCK Triwulan IV 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/1. Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/2. Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/3. Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/4. Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/5. Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/6. Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/7. Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/8. Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/9. Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/10. Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/11. Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/12. Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/1. Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/2. Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/3. Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/RKT 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/RKT 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7708/Rencana Aksi PK 2026.pdf

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Memenuhi	Telah dilaksanakan penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya pada Revisi Perjanjian Kinerja dan Laporan Monitoirng Kinerja Triwulan selanjutnya termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian. Adapun data dukung antara lain: 1. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan highlight pada bagian “Analisis” atau “Rekomendasi” yang mengupayakan peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran, program dan indikator kinerja dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; 2. PK Tahun 2026; 3. PK (termasuk Revisinya) Tahun 2025; 4. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan highlight pada bagian “Analisis” atau “Rekomendasi” yang mengusulkan revisi PK Tahun 2025 guna penyesuaian target dan indikator yang ditetapkan pada Dokumen Renstra Final termasuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori on the right track (capaian 90-110%); 5. Monitoring Renaksi bulan Januari s.d Desember 2025 dan Monitoring Renaksi Januari s.d Maret 2026. 6. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan 2025-2029. 7. RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2026. 8. Renaksi atas PK (termasuk revisinya) Tahun 2025-2026.	telah dilakukan revisi pk tetapi masih terdapat 3 indikator tahun 2025 yang dicapai tidak on the right track (>110%) (IKK 1, IKK 3, IKK 11)		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/LMCK Triwulan I 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/LMCK Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/LMCK Triwulan IV 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/1. Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/2. Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/3. Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/4. Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/5. Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/6. Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/7. Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/8. Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/9. Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/10. Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/11. Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/12. Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/1. Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/2. Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/3. Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/RKT 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/RKT 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7709/Renstra 2025 2029 Ditsar.pdf
Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Memenuhi	Proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja melibatkan seluruh subdirektorat di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian. Seluruh subdirektorat berkomitmen dalam mencapai kinerja termasuk komitmen terkait peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi/analisis kinerja. Adapun data dukung yang disediakan antara lain: 1. Komitmen Peningkatan Kinerja berdasarkan Rekomendasi pada Lampiran Laporan Kinerja (baik Triwulan dan Tahunan). 2. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian dan PK Berjenjang di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan 2026. 3. Dokumentasi Rapat Staff Internal, Rapat Koordinasi atau Rapat Pimpinan terkait perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. 4. Bentuk peduli dan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja dengan dibuatnya Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2025-2026. 5. Kuisioner SAKIP Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian. 6. Laporan Rapat Pembahasan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan ND Evaluasi Kinerja atas Laporan Monitoring Triwulan IV/LKIP Tahun 2025. 7. Renaksi atas PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2026 (termasuk revisinya).			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/LMCK Triwulan I 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/LMCK Triwulan IV 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/LKIP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Rencana Aksi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Rencana Aksi Revisi Kedua PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Rencana Aksi Revisi PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7711/Rencana Aksi PK 2026.pdf

Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan			Memenuhi	Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja berjenjang pegawai yang mencakup komitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Adapun data dukung antara lain: 1. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan 2026. 2. PK Berjenjang Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan 2026. 3. Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2025 dan 2026 pegawai di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian. 4. Dokumentasi Rapat Staff Internal, Rapat Koordinasi atau Rapat Pimpinan terkait perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. 5. Hasil Kuisioner SAKIP Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian.	kuisioner Diisi oleh 1 pimpinan dan 15 pegawai Belum ada penjenjangan indikator di level kasubdit sampai staf sesuai dengan tusi masing-masing jabatan yg diampu. perlu dilakukan evaluasi cascading sampai dengan level Pelaksana		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/Revisi II PK 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/PK BERJENJANG 2025 Dit. Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/PK Berjenjang 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/Kuesioner SAKIP 2026 (Jawaban).xlsx • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7712/cascading direktorat sarana.xlsx

No	Komponen	Bobot	Nilai				Daftar Evidence
2	PENGUKURAN KINERJA	30	25.5				

Sub-Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai	Catatan	Catatan Evaluator	Catatan Itjen	Lampiran
2a. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6	A	5.4	Seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir	Seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir		

Kriteria	Status	Catatan	Catatan Evaluator	Catatan Itjen	Lampiran
Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Memenuhi	Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai mandat kebijakan nasional			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/Kepdirjen Indikator Kinerja 2023..pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/PM 11 Tahun 2013.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/PM 12 Tahun 2013.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/PM 85 Tahun 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/SOP.zip • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/BUKU INFORMASI SAKIP DJKA 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/BUKU INFORMASI SAKIP DJKA 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/BUKU INFORMASI SAKIP DJKA 2022.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/BUKU INFORMASI SAKIP DJKA 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/KP_DJKA_162_Tahun_2025_Indikator_Kinerja_DJKA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7654/Buku Pedoman SAKIP Tahun 2026.pdf
Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Memenuhi	Telah terdapat definisi atas kinerja dan cara mengukur kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bidang Perkeretaapian dan telah ditetapkan SK Indikator Kinerja Program yang berbasis outcome	Dokumen Kepdirjen Indikator Kinerja 2025-2029 belum di ttd		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7656/Rencana Strategis Dit Sarana KA 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7656/ND Kepdirjen Indikator Kinerja 2025-2029.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7656/Rev_LAPORAN AKHIR RENSTRA DIT SARANA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7656/Renstra 2020-2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7656/Revisi Renstra Dit. Sarana 2020-2024.pdf
Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Memenuhi	Telah terdapat definisi atas kinerja dan cara mengukur kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bidang Perkeretaapian dan telah ditetapkan SK Indikator Kinerja Program yang berbasis outcome, SOP Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian, SOP Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan SK TIM SAKIP	Dijelaskan dalam catatan evaluatan penanggung jawab yang jelas siapa yang mengumpulkan, mencatat, mensupervisi		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/PM 11 Tahun 2013.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/PM 12 Tahun 2013.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SK Tim SAKIP Ditsar 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SOP Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SOP Penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SOP Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SOP Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SOP Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7657/KP Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf

Sub-Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai	Catatan	Catatan Evaluator	Catatan Itjen	Lampiran

2b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	A	8.1	Terdapat upaya lebih yaitu dalam pengumpulan data kinerja dan capaian kinerja periode bulanan telah dilakukan pembahasan monitoring secara berkala dan pengukuran kinerja individu telah menggunakan Aplikasi E-Kinerja, Terdapat upaya lebih yaitu dalam pengumpulan data kinerja terkait capaian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian telah menggunakan Aplikasi SISAKA (Sertifikasi Sarana Perkeretaapian) dan SIPANTAS SIPANTAS (Sistem Informasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Indonesia) untuk memonitoring Profile badan Usaha; SK. Sarana; Jumlah Sarana; Jumlah Permohonan dan Jumlah Spesifikasi Teknis Sarana yang telah SSO dengan Portal DJKA	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%)		

Kriteria	Status	Catatan	Catatan Evaluator	Catatan Itjen	Lampiran
Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Tidak Memenuhi	Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja telah dilakukan secara berkala	Sesuai dengan pedoman sakip tahun 2026 diwajbkan untuk LMCK pada Lampiran 5. Terdapat Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja. Pada Direktorat Sarana Perkeretaapian belum terdapat Dokumentasi keikutsertaan pimpinan dalam rapat evaluasi tsb		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/ND LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/326 ND K4 DJKA 2022 Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pembahasan Evaluasi Sertifikasi Tahun 2022 dan Program Pengujian Sarana Perkeretaapian Tahun 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/54 ND K4.3 DITSAR IV 2025 Data Dukung Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I untuk Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7758/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf
Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Memenuhi	Data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja telah relevan dalam mendukung dalam pengukuran dan pencapaian kinerja			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/ND LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Nota DInas Subdit Laporan Triwulan I 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Nota DInas Subdit Laporan Triwulan IV 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Nota DInas Subdit Laporan Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Nota DInas Subdit Laporan Triwulan II 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Nota DInas Subdit Laporan Triwulan I 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7773/Laporan Keuangan TA 2025 SARANA 467478.pdf
Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Memenuhi	Data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja valid dan bisa dipertangungjawabkan dalam mendukung dalam pengukuran dan pencapaian kinerja			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/KP Penetapan Indikator Kinerja 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/ND LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/Laporan Keuangan TA 2025 SARANA 467478.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7881/LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.pdf

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	Memenuhi	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilaksanakan secara berkala, selain itu untuk unit kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian secara berkala telah dilaksanakan pada tahun 2024-2025			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/15. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/14. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/13. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/12. Laporan Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/11. Laporan Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/10. Laporan Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/9. Laporan Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/8. Laporan Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/7. Laporan Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/6. Laporan Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/5. Laporan Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/4. Laporan Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/3. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/2. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/1. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE MARET 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE FEBRUARI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE JANUARI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE DESEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE NOVEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE SEPTEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7884/EPERFORMANCE OKTOBER 2025.png
Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Memenuhi	Pengumpulan data kinerja melalui aplikasi e-performance dan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja (SILAKI) untuk pemantauan dan pengukuran capaian kinerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, untuk unit kinerja dibawah Direktorat Sarana Perkeretaapian pemantauan dan pengukuran kinerja melalui monitoring capaian kinerja atas perjanjian kinerja berjenjang			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/3. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/2. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/1. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/6. Laporan Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/5. Laporan Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/4. Laporan Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/15. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/14. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/12. Laporan Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/11. Laporan Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/10. Laporan Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/9. Laporan Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/8. Laporan Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/7. Laporan Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8149/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf

Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Memenuhi	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi E-Perfomance, SILAKI, E-Sakip Reviu, SAKTI, SPAN, SMART, SISAKA, SIPANTAS, E-KINERJA KEMENUB	Jelaskan di cacatan evaluatan data dukung apa saja yg diupload pada setiap indikator pada E-Performance		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE MARET 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE FEBRUARI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE JANUARI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE DESEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE NOVEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE SEPTEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/EPERFORMANCE OKTOBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/DASHBOARD SILAKI.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/SILAKI CAPAIAN KINERJA.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/DASHBOARD SIPANTAS.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8150/DASHBOARD E SAKIP REVIU.png
Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Memenuhi	Pengumpulan data kinerja melalui aplikasi E-Performance dan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja (SILAKI) Pengumpulan data Capaian Sertifikasi melalui Aplikasi SISAKA dan SIPANTAS			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/DASHBOARD SIPANTAS.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/DASHBOARD E SAKIP REVIU.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/DASHBOARD SILAKI.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/SILAKI CAPAIAN KINERJA.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE MARET 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE FEBRUARI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE JANUARI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE DESEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE NOVEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE SEPTEMBER 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8151/EPERFORMANCE OKTOBER 2025.png
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
2c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	BB	12	Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya lebih terkait pengukuran kinerja yaitu dalam mendukung pencapaian kinerja dilakukan dengan penilaian kinerja berbasis risiko pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025	kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Memenuhi	Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja telah dilakukan secara berkala			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Renaksi_Perjanjian_KInerja_2026_Ditsar_KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Renaksi_Perjanjian_KInerja_2025_Ditsar_KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/Renaksi_Revisi_Perjanjian_KInerja_2025_Ditsar_KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/SE - ITJEN 1 TAHUN 2024 PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja April 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7658/ND Penyampaian Pembayaran Tunjangan Kinerja Oktober 2025.pdf
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Memenuhi	E-Performance telah dimanfaatkan dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/ND PENYAMPAIAN USULAN TIM PENYUSUN SOAL UJIKOM JF 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/ND Pelaksanaan Penguji Ujikom JF.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8164/ND Pelaksanaan Uji Kompetensi.pdf
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Memenuhi	Hasil dari pengukuran kinerja telah menjadi rekomendasi penyesuaian (refocusing) organisasi. Adanya penambahan subdirektorat baru. Adapun data dukung antara lain: Laporan Triwulan I-IV Tahun 2025, Laporan Triwulan I Tahun 2026 dan LKIP Tahun 2025 terkait Penempatan Jabatan Fungsional bidang sarana perkeretaapian. Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan PM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.	belum ada data dukung blezzeting pegawai		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8165/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8165/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8165/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8165/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8165/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8165/LKIP 2025.pdf
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	Tidak Memenuhi	Hasil dari pengukuran kinerja telah menjadi rekomendasi penyesuaian (refocusing) organisasi. Adanya penambahan subdirektorat baru. Adapun data dukung antara lain: Laporan Triwulan I-IV Tahun 2025, Laporan Triwulan I Tahun 2026 dan LKIP Tahun 2025 Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan PM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	tambahkan data dukung indikator yg ada penyesuaian strateginya		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8166/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8166/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8166/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8166/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8166/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8166/LKIP 2025.pdf
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	Tidak Memenuhi	Hasil dari pengukuran kinerja telah menjadi rekomendasi penyesuaian (refocusing) organisasi. Adanya penambahan subdirektorat baru. Adapun data dukung antara lain: Laporan Triwulan I-IV Tahun 2025, Laporan Triwulan I Tahun 2026 dan LKIP Tahun 2025 Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan PM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	tambahkan data dukung indikator yg ada penyesuaian kebijakan		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8167/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8167/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8167/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8167/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8167/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8167/LKIP 2025.pdf

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	Tidak Memenuhi	Hasil dari pengukuran kinerja telah menjadi rekomendasi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. Adapun data dukung antara lain Laporan Triwulan I-IV Tahun 2025, LKIP Tahun 2025, Laporan Triwulan I Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2026	data dukung pelaksanaan dari penyesuaian aktivitasnya di periode selanjutnya		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8168/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8168/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8168/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8168/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8168/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8168/LKIP 2025.pdf
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	Tidak Memenuhi	Hasil dari pengukuran kinerja telah menjadi rekomendasi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Adapun data dukung antara lain: Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Laporan Triwulan I-IV Tahun 2025, Laporan Triwulan I Tahun 2026, LKIP Tahun 2025, Nota dinas Permohonan Revisi Anggaran, DIPA dan POK, Serta Rencana Aksi PK Tahun 2025	tambahkan data dukung sesuai KM 74 tahun 2024 dan data dukung pelaksanaan dari penyesuaian anggaran di periode selanjutnya		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/DIPA REV_1_2026-01-022.08-467478-01-133-1-01.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/POK REV 1_RINCIAN KERTAS KERJA SATKER (4).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/DIPA rev 4.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/POK rev 4.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Revisi_II_PK_2025_Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8169/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf
Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Memenuhi	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Penyampaian Laporan TW I.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8170/LKIP 2025.pdf
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Tidak Memenuhi	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	1. tidak ada dokumentasi rapat pimpinan terkait pengukuran capaian kinerja tahun 2025 2. pengisian kuisioner sebanyak 15 pegawai, 1 pegawai ada yang belum tau terkait LKIP		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/Kuesioner SAKIP 2026 (Jawaban).xlsx • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/326 ND K4 DJKA 2022 Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pembahasan Evaluasi Sertifikasi Tahun 2022 dan Program Pengujian Sarana Perkeretaapian Tahun 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/54 ND K4.3 DITSAR IV 2025 Data Dukung Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I untuk Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/Laporan Capaian Kinerja Bulan April 2026 Subdit Kelaikan Sarana.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/Penyampaian Data Dukung Monitoring Rencana Aksi Subdirektorat.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8171/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf
Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Memenuhi	Setiap pegawai unit kerja memahami target kinerja yang akan dicapai dan melakukan pengukuran kinerja secara berkala			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/Cascading Direktorat Sarana Perkeretaapian.xlsx • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8172/SKP 2026 Ditsar.pdf

No	Komponen	Bobot	Nilai				Daftar Evidence
3	PELAPORAN KINERJA	15	12.3				
Sub-Komponen		**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**

3a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	A	2.7	Seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			Memenuhi	Laporan kinerja dan laporan monitoring kinerja triwulan telah disusun dan dtetapkan sesuai dengan ketentuan dengan bukti data dukung yang disampaikan antara lain: 1. Pedoman LKIP. 2. LKIP Tahun 2021 s.d 2025 yang sudah bertandatangan oleh Pimpinan (5 tahun terakhir). 3. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I, II, III, IV Tahun 2021 s.d Triwulan I 2026 yang sudah bertandatangan oleh Pimpinan. 4. Buku Pedoman SAKIP Tahun 2026			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8127/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8127/LKIP 2024..pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8127/LKIP_Tahun_2022_Direktorat_Sarana_KA1.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8127/LKIP 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8127/LKIP 2023.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			Memenuhi	Bahwa Laporan kinerja dan laporan monitoring kinerja triwulan telah disusun dan dtetapkan sesuai dengan ketentuan (PM 85/2020) sebagai berikut: 1. LKIP Tahun 2021 s.d 2025 yang sudah bertandatangan oleh Pimpinan (5 tahun terakhir). 2. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I, II, III, IV Tahun 2021 s.d Triwulan I 2026 yang sudah bertandatangan oleh Pimpinan.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8128/LKIP 2025.pdf

Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Memenuhi	Laporan Kinerja telah diformalkan bukti data dukung yang disampaikan antara lain: 1. LKIP Tahun 2021 s.d 2025 yang sudah bertandatangan oleh Pimpinan (5 tahun terakhir). 2. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I, II, III, IV Tahun 2021 s.d Triwulan I 2026 yang sudah bertandatangan oleh Pimpinan. 3. Diupload pada website DJKA yang mudah diakses oleh pihak internal maupun eksternal Ditjen Perkeretaapian 4. Screenshot Monitoring Kinerja pada Aplikasi e-Performance Tahun 2021 s.d Maret 2026.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2022 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan III 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan II 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2021 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/LKIP Tahun 2021 Direktorat Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/LKIP Tahun 2022 Direktorat Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/LKIP Tahun 2023 Direktorat Sarana KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8129/LKIP Tahun 2024 Direktorat Sarana KA.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Tidak Memenuhi	APIP telah melakukan reviu terhadap penyusunan LKIP Eselon I dan telah dilakukan juga pembahasan dan reviu penyusunan LKIP 2025 di internal DJKA dengan bukti data dukung yang disampaikan antara lain: 1. Rapat pembahasan dan reviu LKIP Tahun 2021 s.d 2025. 2. Catatan Hasil Reviu LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Data dukung catatan penyusunan konsep laporan kinerja 5 tahun terakhir belum di upload		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/LKE PM SAKIP 2023 DITSAR KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/0063 K4 V 2024 TL Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/113 ND K4 DJKA 2023 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian Implementasi SAKIP SAKIP Di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/0022 K4 I 2025 LKIP 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/BA TL SAKIP DITSAR 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/04. KERTAS KERJA REVIU LAKIP Dit Sarana 2024.docx.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8130/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Tidak Memenuhi	Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website DJKA yang mudah diakses oleh pihak internal maupun eksternal Ditjen Perkeretaapian maupun pada aplikasi e-SAKIP reviu dengan bukti data dukung yang disampaikan antara lain: 1. Screenshot LKIP 2021 s.d 2025 di website DJKA (termasuk Laporan Triwulan I, II, III, IV 2021-2025 dan Laporan Triwulan I 2026). 2. Screenshot LKIP 2021 s.d 2025 di e-Sakip Reviu. 3. Screenshot Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan dan LKIP Tahunan di SILAKI.	Publikasi LAKIP 2024 dan 2025 pada ESR terlambat		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/Screenshot ESR LKIP.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW 1 tte.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/Screenshot TW IV 2025 .png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW I 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW II 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW III 2025.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW IV 2024.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW III 2024.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW II 2024.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW I 2024.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW I 2023.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW IV 2022.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW III 2022.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW II 2022.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8131/screenshot Laporan Capaian Kinerja TW I 2022.png

Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			Memenuhi	Dokumen LKIP serta Laporan Monitoring Triwulanan telah disampaikan secara tepat waktu dengan bukti data dukung yang disampaikan antara lain: 1. Surat Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2021-2025. 2. Surat Hasil Evaluasi dari Direktorat Sarana Perkeretaapian terkait Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2021-2025. 3. Dokumen Laporan Triwulan dan LKIP telah di Upload pada E-Sakip Reviu. 4. Dokumen Laporan Triwulan dan LKIP telah di publikasikan pada Website DJKA.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/025 ND K4 DJKA 2023 Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/030 ND K4 DJKA 2022 Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/Penyampaian Laporan TW I.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/Nota Dinas Penyampaian LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/0022 K4 I 2025 LKIP 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8132/025 ND K4 DJKA 2023 Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
3b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.5	BB	3.6	Seluruh kriteria telah terpenuhi (100%), dimana dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar kualitas mengacu pada PM 85 Tahun 2020 dan Buku Pedoman SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			Tidak Memenuhi	Laporan Kinerja dan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan telah disusun mengacu pada km 74 Tahun 2024 dan Buku Pedoman SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga megacu pada SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulanan (untuk Laporan Triwulanan) serta SOP Monitoring dan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sarana Perkeretaapian (Untuk Laporan Kinerja Tahunan) dengan bukti data dukung yang disampaikan antara lain: 1. PM 85 Tahun 2020 dan Buku Pedoman SAKIP 2026. 2. Laporan Kinerja Triwulan (Triwulan I-IV 2025, Triwulan I 2026) dan Tahunan (LKIP 2025). 3. Surat Hasil Evaluasi dari Direktorat Sarana Perkeretaapian terkait Kinerja dan Pemenuhan Standar Pelaporan Kinerja.	belum ada lampiran atau dokumentasi pembahasan capaian kinerja		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Nota Dinas Subdit Laporan Triwulan I Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/pm 85 tahun 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/KM 74 TAHUN 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/SD 1 Nota Dinas Data Capaian Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/SD 2 Capaian Kinerja Februari.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/SD 4 Capaian Kinerja Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8133/Nota Dinas Subdit Laporan Triwulan I Tahun 2025.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja menjelaskan informasi-informasi pencapaian kinerja permasing-masing indikator kinerja periode bulanan, triwulanan dan tahunan dijelaskan dalam: 1. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP dan Buku Pedoman SAKIP 2026. 2. Perbadingan target dan realisasi indikator kinerja dijelaskan pada Bab 2 analisis dan Bab 3 Kesimpulan pada Laporan Kinerja Triwulan (Triwulan I-IV 2025, Triwulan I 2026). 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk seluruh indikator kinerja dijelasikan dalam Analisis Capaian pada Bab 3 dan Bab 4 Kesimpulan pada LKIP 2025. 4. ND Pengantar dari tiap Subdirektorat di Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai data dukung penyusunan Laporan Kinerja dan tercantum pada Lampiran Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan (LKIP).			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/SD 1 Nota Dinas Data Capaian Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/SD 2 Capaian Kinerja Februari.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/SD 4 Capaian Kinerja Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/pm 85 tahun 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8134/KM 74 TAHUN 2024.pdf

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja menjelaskan informasi-informasi pencapaian kinerja permasing-masing indikator kinerja periode bulanan, triwulanan dan tahunan dijelaskan dalam: 1. PK Direktorat Sarana Perkeretaapian 2026. 2. Perbadingan target dan realisasi indikator kinerja dijelaskan pada Bab 2 Analisis dan Bab 3 Kesimpulan Laporan Kinerja Triwulan (Triwulan I-IV 2025, Triwulan I 2026). 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk seluruh indikator kinerja dijelasikan dalam Analisis dan Capaian pada Bab 3 dan Kesimpulan Bab 4 pada LKIP 2025. 4. Surat Hasil Evaluasi Capaian Kinerja berdasarkan LKIP Tahun 2025 dan Laporan Monitoring Knerja Triwulanan Tahun 2025 (Triwulan I - IV).			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Revisi_II_PK_2025_Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8135/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja telah menjelaskan informasi-informasi perbandingan target kinerja dan pencapaian kinerja permasing-masing indikator kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang pada dokumen Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yang dijelaskan dengan data dukung: 1. Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029. 2. Bab 3 (Analisa) pada LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 menggambarkan analisa perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tertuang pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8136/Rencana Strategis Dit Sarana KA 2025-2029.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja telah menjelaskan informasi-informasi perbandingan target kinerja dan pencapaian kinerja (tahun berjalan dan 4 tahun sebelumnya) per masing-masing indikator kinerja pada Bab 3 (Analisa) LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8137/LKIP 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8137/LKIP 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8137/LKIP 2024..pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8137/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8137/LKIP_Tahun_2022_Direktorat_Sarana_KA1.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja baik di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Dari 12 Indikator Kinerja, 9 Indikator diantaranya telah terdapat Benchmark Kinerja. Adapun data dukung antara lain: 1. LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) terdapat dalam bab 3 Analisis capaian kinerja diantaranya. 2. Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW I Tahun 2025 s.d TW I Tahun 2026.	terdapat benchmarking 5 indikator dari total 12 indikator		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8138/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8138/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8138/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8138/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8138/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8138/LKIP 2025.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya yang tertuang pada Bab III (Analisa) dan Bab IV (Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja Periode Sebelumnya). Adapun data dukung antara lain: 1. Dokumen Laporan Kinerja telah menjelaskan informasi-informasi kualitas capaian kinerja, serta hambatan dan upaya mengatasinya terdapat pada Bab 3 analisis kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja pada setiap indikkator kinerja dan hambatan dalam mencapai target kinerja serta upaya peningkatan kinerja untuk perode berikutnya. 2. ND Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian 2025. 3. Surat Evaluasi Kinerja Berdasarkan LKIP Tahun 2025. 4. ND Pengantar dari tiap Subdirektorat di Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai data dukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan (LKIP)			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8139/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8139/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8139/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8139/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8139/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8139/LKIP 2025.pdf

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja (LKIP 2025) telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya baik anggaran maupun SDM dalam mencapai kinerja. Adapun data dukung antara lain: 1. Dokumen Laporan Kinerja telah menjelaskan informasi efisiensi dan penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Bab III LKIP 2025 2. Monitoring Renaksi Tahun 2025 s.d Maret 2026. 3. Surat Evaluasi Kinerja Berdasarkan LKIP Tahun 2025. 4. Laporan Kinerja Triwulan (Triwulan I-IV 2025, Triwulan I 2026)			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/13. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/15. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/14. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/12. Laporan Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/11. Laporan Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/10. Laporan Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/9. Laporan Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/8. Laporan Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/7. Laporan Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/6. Laporan Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/5. Laporan Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/4. Laporan Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/3. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/2. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8140/1. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			Memenuhi	Dokumen Laporan Kinerja (LKIP 2025) telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yang tertuang pada Bab III Upaya Peningkatan Kinerja, Bab IV Rekomendasi dan Lampiran Rekomendasi Peningkatan Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Sarana Perkeretaapian. Selain itu, telah dilakukan inovasi/upaya yang patut dihargai diantaranya terkait penyampaian uraian analisa pencapaian kinerja berbasis risiko yang diuraikan pada setiap sasaran dan indikator kinerja sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan strategi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya sehingga proses evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada capaian output, namun juga pada efektivitas pengendalian risiko, efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, serta kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian secara adaptif terhadap dinamika kebijakan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun data dukung antara lain: 1. Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW I 2025 s.d TW I 2026. 2. Dokumen Laporan Kinerja (LKIP 2025) telah memberikan penjelasan upaya peningkatan/perbaikan dan penyempurnaan pada setiap indikator kinerja untuk periode selanjutnya dijelaskan pada analisis Bab III dan Bab IV Tindak Lanjut Rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya serta Lampiran rekomendasi peningkatan kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Sarana Perkeretaapian.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8141/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8141/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8141/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8141/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8141/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8141/LKIP 2025.pdf
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
3c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.5	BB	6	Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%)	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Tidak Memenuhi	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dengan disusunnya dokumen berikut: 1. Dokumentasi Rapat terkait penetapan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja yang berisi arahan pimpinan terkait kinerja (rapat penetapan kinerja 2025 dan 2026 termasuk dokumentasi/foto kegiatan penandatanganan PK 2025 dan 2026 bersama Dirjen, para Eselon II dan Kepala Balai); 2. Tanda Tangan Pimpinan yang ada di Laporan Kinerja (Triwulan dan Tahunan) Tahun 2025 serta komitmen peningkatan kinerja pimpinan unit organisasi; 3. Screenshot approval pimpinan pada dashoboard SILAKI; 4. Adanya SOP Evaluasi Kinerja dimana dalam SOP tersebut melibatkan setiap Subdirektorat dan pejabat fungsional; 5. Kuesioner Pimpinan Unit Kinerja yang mencakup bahwa hasil analisa dan capaian kinerja menjadi perhatian pimpinan	belum ada dokumen pelaksanaan rapat terkait pelaporan kinerja yang dipimpin oleh pimpinan unit kerja		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/LKIP 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/LKIP 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/LKIP 2024..pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/LKIP_Tahun_2022_Direktorat_Sarana_KA1.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/Nota Dinas Subdit Laporan Triwulan I Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/SD 1 Nota Dinas Data Capaian Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/SD 2 Capaian Kinerja Februari.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8142/SD 4 Capaian Kinerja Februari 2026.pdf
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Tidak Memenuhi	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini dibuktikan dengan: 1. Pegawai terlibat dalam penyajian infromasi dalam laporan kinerja masing-masing PIC unit kerja mengumpulkan data dukung guna pengukuran capaian kinerja pegawai terlihat pada SKP dan Laporan Bulanan pegawai. 2. LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025. 3. Laporan Kinerja Triwulan (Triwulan I-IV 2025, Triwulan I 2026) 4. Kuisioner Pegawai dan Pimpinan di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian terkait kepedulian seluruh pegawai terhadap Penyajian Informasi.	Belum ada dokumen rapat pembahasan laporan kinerja, Hasil kuisioner, LKIP		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/SKP 2026 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Kuesioner SAKIP 2026 (Jawaban).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Kuesioner SAKIP 2026 (Jawaban).xlsx • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/SD 1 Nota Dinas Data Capaian Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/SD 2 Capaian Kinerja Februari.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/SD 4 Capaian Kinerja Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8143/Nota Dinas Subdit Laporan Triwulan I Tahun 2025.pdf
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Memenuhi	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Adapun data dukung lainnya yaitu: 1. Laporan Monitoring TW I 2025 s.d TW I 2026. 2. Revisi Renaksi atas PK Tahun 2025 dan Renaksi PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/13. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/15. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/14. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/12. Laporan Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/11. Laporan Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/10. Laporan Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/9. Laporan Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/8. Laporan Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/7. Laporan Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/6. Laporan Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/5. Laporan Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/4. Laporan Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/3. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/2. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8144/1. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Memenuhi	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk meningkatkan kinerja. Adapun data dukungannya antara lain: 1. DIPA/Revisi DIPA dan POK Satker PPSP Tahun 2025 s.d 2026 (awal dan revisi terakhir). 2. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan I 2025 s.d Triwulan I 2026. 3. Revisi PK dan PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2026.			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/00. POK 2025 Awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/eplanning-2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/eplanning-2027.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/POK 2025 rev 13.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/POK 2026 awal.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Revisi_Perjanjian_Kinerja_2025_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian_fix.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Revisi_II_PK_2025_Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8145/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Tidak Memenuhi	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Hal ini dibuktikan dengan: 1. Laporan Kinerja telah menginformasikan capaian kinerja serta Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja yang tertuang pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW I 2025 s.d TW I 2026 pada Bab 2, serta "Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya" dan "Komitmen Peningkatan Kinerja dijelaskan pada Bab 3. Selain itu, pada LKIP 2025 telah menginformasikan capaian kinerja dan Analisis Keberhasilan serta Kegagalan Pencapaian Kinerja yang terdapat pada Bab 3 serta Kesimpulan Capaian Kinerja" dan "Komitmen Peningkatan Kinerja" pada Bab 4, ini telah digunakan sebagai acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja periode selanjutnya. 2. Telah dilakukan pembahasan terhadap capaian kinerja dan permasalahan/kendala yang dihadapi yang dilaksanan setiap Triwulan.	Belum ada dokumen rapat pembahasan laporan kinerja		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/Nota Dinas Subdit Laporan Triwulan I Tahun 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/ND K41 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/ND Laporan K44 Capaian Kinerja.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/SD 1 Nota Dinas Data Capaian Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/SD 2 Capaian Kinerja Februari.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8146/SD 4 Capaian Kinerja Februari 2026.pdf
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Memenuhi	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yang dibuktikan dengan pada penetapan target kinerja pada dokumen PK selalu mengacu pada perolehan realisasi/capaian kinerja periode sebelumnya, termasuk rekomendasi ang tertuang pada Laporan Kinerja guna mengukur kemampuan organisasi dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan: 1. PK dan Revisi PK Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2026. 2. LKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025. 3. Laporan Kinerja Triwulan (Triwulan I-IV 2025, Triwulan I 2026)			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Ditsar KA.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/Laporan Capaian Kinerja TW I 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/Laporan Capaian Kinerja TW I 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/Laporan Capaian Kinerja TW II 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/Laporan Capaian Kinerja TW III 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/Laporan Capaian Kinerja TW IV 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8147/LKIP 2025.pdf
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Memenuhi	Informasi dalam Laporan Kinerja (Triwulanan dan Tahunan) selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Selain itu, dilakukan juga inovasi peningkatan kinerja yang kemudian menjadi kebiasaan baik/budaya organisasi. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya analisa perubahan budaya kinerja organisasi pada Bab 3 Laporan Triwulan (TW 1 2025 s.d TW 1 2026) dan Bab 4 LKIP Tahun 2025 yang memuat kondisi organisasi semula/pra dan menjadi/pasca dilakukannya perubahan budaya kinerja.	Telah terdapat informasi terkait budaya kinerja pada laporan kinerja tetapi belum menjelaskan perubahannya terhadap kinerja organisasi		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8148/LMCK Triwulan I 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8148/LMCK Triwulan I 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8148/LMCK Triwulan II 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8148/LMCK Triwulan III 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8148/LMCK Triwulan IV 2025.pdf

No	Komponen	Bobot	Nilai				Daftar Evidence
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	20				
Sub-Komponen		**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen** / **Lampiran**
4a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan		5	A	4.5	Seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 3 Tahun terakhir (belum genap mencapai 5 Tahun pelaksanaan)	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).	

Kriteria	Status	Catatan	Catatan Evaluator	Catatan Itjen / Lampiran

Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal.			Memenuhi	Terdapat Pedoman teknis mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian meliputi: 1. Permenpan RB nomor 88 tahun 2021. 2. PM 85 tahun 2020. 3. Buku pedoman SAKIP Tahun 2026. 4. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan DJKA. 5. KM 74 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di lingkungan Kemenhub			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/PM 85 TAHUN 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/KM 74 TAHUN 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/SOP Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/SOP Penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/SOP Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/SOP Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/SOP Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/7744/SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sarana Perkeretaapian.pdf
Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretapian secara berkala dilakukan dengan Koordinator Setditjen Perkeretaapian			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/SK Tim SAKIP Ditsar 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/202603111237 10TL_LHE_SAKIP_Tahun_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/SK Tim SAKIP Ditsar 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8173/202603111237 10TL_LHE_SAKIP_Tahun_2025.pdf
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan berkala secara berjenjang di level Direktorat Sarana Perkeretaapian			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8176/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8176/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8176/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8176/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
4b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.5	A	6.75	Seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.	kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%)		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan sesuai standar yang ada			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/KM 74 TAHUN 2024.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8178/pm 85 tahun 2020.pdf

Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretapian secara berkala dilakukan dengan Koordinator Setditjen Perkeretaapian.. Dan telah dibentuk SK Tim evaluasi Penilaiaan mandiri Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan tim evaluator memiliki seritifikar Evaluasi AKIP, hal ini dibuktikan dengan SK Plt Direktur Sarana Perkeretaapian	berapa orang dan siapa saja dalam tim yang menjadi evaluator penilaian mandiri? tuliskan nama orang.		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/ANGELA MERICI YOSHINTA RINAWATI.pdf_tte (1).pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/FADHILA DHANESWARA PRIMASIWI.pdf_tte.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/IZZA ARTA RAMADHIAN.pdf_tte.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/JOHANNES ANGGA PRIMAS.pdf_tte.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/JUNIAR ELIZABETH.pdf_tte.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/RAHMAWATY.pdf_tte.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8179/SK SAKIP 2026.pdf
Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretapian secara berkala dilakukan dengan Koordinator Setditjen Perkeretaapian			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/pm 85 tahun 2020.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8180/KM 74 TAHUN 2024.pdf
Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretapian secara berkala dilakukan dengan Koordinator Setditjen Perkeretaapian			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8183/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8183/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8183/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8183/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8183/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Memenuhi	Evaluasi akuntabilitas unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretapian secara berkala dilakukan dengan Koordinator Setditjen Perkeretaapian dengan menggunakan teknologi Informasi aplikasi SILAKI			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/DASHBOARD SILAKI.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SILAKI CAPAIAN KINERJA.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SS SILAKI 2026.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SS SILAKI 2025d.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SS SILAKI 2025c.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SS SILAKI 2025b.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SS SILAKI 2025a.png • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8185/SS SILAKI 2025.png
Sub-Komponen	**Bobot**	**Jawaban**	**Nilai**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**
4c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.5	B	8.75	Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (60%). Berdasarkan hasil PM, didapati bahwa Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada unit Direktorat Sarana Perkeretaapian.	kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).		
Kriteria			**Status**	**Catatan**	**Catatan Evaluator**	**Catatan Itjen**	**Lampiran**

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti.	Tidak Memenuhi	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	sesuai dengan BA hasil Evaluasi, Seluruh rekomendasi telah status tuntas, namun sesuai dengan hasil evaluasi AKIP terdapat ketidaktepatan waktu publikasi LKIP Tahun 2025 yg diupload pada ... februari 2026. selain itu masih terdapat IKK yang tidak on the right track sesuai dengan dengan LKIP Tahun 2025		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/LKIP 2021.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/LKIP_Tahun_2022_Direktorat_Sarana_KA1.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/LKIP 2023.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/LKIP 2024..pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/LKIP 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8187/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi AKIP internal.	Memenuhi	Peningkatan implementasi SAKIP/upaya peningkatan kinerja dilaksanakan sesuai rekomendasi pada Laporan Kinerja pada triwulan/periode sebelumnya	NIlai AKIP Tahun 2025 : 80, 75 Nilai AKIP Tahun 2026 :		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8189/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8189/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8189/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8189/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf
Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Memenuhi	Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian yaitu dengan rata-rata Kinerja (Laporan Kinerja Tahun 2025) adalah 106,19%	Rata-rata Capaian tahun 2024 : 135,59 rata-rata capaian tahun 2025 : 106,19		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8193/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8193/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8193/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8193/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf
Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Memenuhi	Hasil Monitoring TL Evaluasi tahun sebelumnya dan perbaikan di dokumen SAKIP Tahun berikutnya (norma hasil)			• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/3__Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/04. Dit. Sarana - BA TL atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja DSP Tahun 2025 ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/TL LHE SAKIP Tahun 2025 Ditsar.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/13. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/15. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/14. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/12. Laporan Monitoring Renaksi Desember 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/11. Laporan Monitoring Renaksi November 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/10. Laporan Monitoring Renaksi Oktober 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/9. Laporan Monitoring Renaksi September 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/8. Laporan Monitoring Renaksi Agustus 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/7. Laporan Monitoring Renaksi Juli 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/6. Laporan Monitoring Renaksi Juni 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/5. Laporan Monitoring Renaksi Mei 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/4. Laporan Monitoring Renaksi April 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/3. Laporan Monitoring Renaksi Maret 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/2. Laporan Monitoring Renaksi Februari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/1. Laporan Monitoring Renaksi Januari 2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8194/LKE evalulasi_sakip_2025 TTD.pdf

Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal.	Memenuhi	Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian yaitu dengan rata-rata Kinerja (Laporan Kinerja Tahun 2025) adalah 106,19%		• https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/3._Hasil_Evaluasi_Akuntabilitas_Kinerja_Internal_Tahun_2025_pada_Direktorat_Sarana_Perkeretaapian.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/04._Dit._Sarana_-_BA_TL_atas_Rekomendasi_Hasil_Evaluasi_AKIP.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/Kertas_Kerja_Reviu_Laporan_Kinerja_DSP_Tahun_2025_ttd.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/TL_LHE_SAKIP_Tahun_2025_Ditsa_.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/LKE_evaluasi_sakip_2025_TTD.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/13._Laporan_Monitoring_Renaksi_Januari_2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/15._Laporan_Monitoring_Renaksi_Maret_2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/14._Laporan_Monitoring_Renaksi_Februari_2026.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/12._Laporan_Monitoring_Renaksi_Desember_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/11._Laporan_Monitoring_Renaksi_November_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/10._Laporan_Monitoring_Renaksi_Oktober_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/9._Laporan_Monitoring_Renaksi_September_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/8._Laporan_Monitoring_Renaksi_Agustus_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/7._Laporan_Monitoring_Renaksi_Juli_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/6._Laporan_Monitoring_Renaksi_Juni_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/5._Laporan_Monitoring_Renaksi_Mei_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/4._Laporan_Monitoring_Renaksi_April_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/3._Laporan_Monitoring_Renaksi_Maret_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/2._Laporan_Monitoring_Renaksi_Februari_2025.pdf • https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki/uploads/laporan/evidence/8195/1._Laporan_Monitoring_Renaksi_Januari_2025.pdf
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**83,00**	

Mengetahui,
Koordinator / Ketua Tim Kelompok Tata Usaha

Ari Pranovi Indrianto
NIP 197910242009121003

Tim Evaluator Internal AKIP Tahun 2026

1. Angela Merici Yoshinta
   NIP 199201302020122007

2. Johannes Angga Prima
   NIP 199411152020121005

3. Izza Artha Ramadhian
   NIP 200211232024121001

PENILAIAN MATURITAS MANAJEMEN RISIKO
UNIT KERJA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

No.	Parameter	Penilaian Mandiri Unit Kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian		Penilaian Mandiri UMR Eselon I	
		Bobot	Skor	Bobot	Skor
1	Tujuan organisasi terdokumentasi, dipahami dan telah tergambarkan dalam dokumen manajemen risiko	90,00	2	80,00	1
2	Manajemen risiko menjadi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan telah diturunkan dalam uraian tugas serta tanggungjawab pegawai	40,00	1	40,00	1
3	Pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggungjawab atas risiko tersebut	95,00	2	78,75	2
4	*Risk appetite*/selera risiko telah ditetapkan dengan sistem skoring sesuai dengan kebutuhan organisasi	100,00	2	100,00	2
5	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan memadai	50,00	1	30,00	0
6	Proses Analisa risiko dilaksanakan dengan sistem Skoring yang telah ditetapkan	70,00	1	70,00	1
7	Prioritas risiko ditetapkan secara memadai dengan proses evaluasi risiko	100,00	2	100,00	2
8	Seluruh tindak pengendalian *existing* pada Formulir Profil Risiko telah sesuai dan telah diimplementasikan	85,00	1	15,00	0
9	Seluruh respon rencana penanganan risiko rencana penanganan risiko (untuk risiko diatas *risk appetite*) telah lengkap, memadai, dan diimplementasikan	56,00	1	21,00	0
10	Terdapat penetapan mekanisme pemantauan dalam penerapan manajemen risiko dan telah diimplementasikan oleh pemilik risiko	53,00	1	47,00	1
11	Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko	65,00	1	65,00	1
12	Terdapat pelaporan dan dokumentasi yang memadai	77,50	1	41,25	1
13	Register risiko di-mutakhirkan secara periodik (minimal triwulan)	0,00	0	37,50	0
14	Setiap perubahan yang mempengaruhi tujuan, selalu dinilai risikonya (baik itu berupa perubahan kebijakan, tambahan/pengurangan kegiatan pada proses bisnis dan sebagainya)	100,00	2	75,00	1
15	Korelasi pengelolaan risiko dalam menunjang pencapaian kinerja Unit Pemilik Risiko	100,00	2	65,00	1
TOTAL SKOR		**20**		**14**	
LEVEL MATURITAS MANAJEMEN RISIKO		**3**		**2**	

Mengetahui,
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
selaku Pemilik Risiko

Batara
NIP 198108102005021001

Tim Penilai Manajemen Risiko
Unit Manajemen Risiko tingkat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Andi Guntur Asapa
NIP 198407242007121001

Viki Okissa Saifudin
NIP 199510022018011001

PENILAIAN MATURITAS MANAJEMEN RISIKO
UNIT KERJA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

No.	Parameter	Penilaian Mandiri Unit Kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian		Penilaian Mandiri UMR Eselon I	
		Bobot	Skor	Bobot	Skor
1	Tujuan organisasi terdokumentasi, dipahami dan telah tergambarkan dalam dokumen manajemen risiko	90,00	2	80,00	1
2	Manajemen risiko menjadi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan telah diturunkan dalam uraian tugas serta tanggungjawab pegawai	40,00	1	40,00	1
3	Pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggungjawab atas risiko tersebut	95,00	2	78,75	2
4	*Risk appetite*/selera risiko telah ditetapkan dengan sistem skoring sesuai dengan kebutuhan organisasi	100,00	2	100,00	2
5	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan memadai	50,00	1	30,00	0
6	Proses Analisa risiko dilaksanakan dengan sistem Skoring yang telah ditetapkan	70,00	1	70,00	1
7	Prioritas risiko ditetapkan secara memadai dengan proses evaluasi risiko	100,00	2	100,00	2
8	Seluruh tindak pengendalian *existing* pada Formulir Profil Risiko telah sesuai dan telah diimplementasikan	85,00	1	15,00	0
9	Seluruh respon rencana penanganan risiko rencana penanganan risiko (untuk risiko diatas *risk appetite*) telah lengkap, memadai, dan diimplementasikan	56,00	1	21,00	0
10	Terdapat penetapan mekanisme pemantauan dalam penerapan manajemen risiko dan telah diimplementasikan oleh pemilik risiko	53,00	1	47,00	1
11	Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko	65,00	1	65,00	1
12	Terdapat pelaporan dan dokumentasi yang memadai	77,50	1	41,25	1
13	Register risiko di-mutakhirkan secara periodik (minimal triwulan)	0,00	0	37,50	0
14	Setiap perubahan yang mempengaruhi tujuan, selalu dinilai risikonya (baik itu berupa perubahan kebijakan, tambahan/pengurangan kegiatan pada proses bisnis dan sebagainya)	100,00	2	75,00	1
15	Korelasi pengelolaan risiko dalam menunjang pencapaian kinerja Unit Pemilik Risiko	100,00	2	65,00	1
TOTAL SKOR		**20**		**14**	
LEVEL MATURITAS MANAJEMEN RISIKO		**3**		**2**	

Mengetahui,
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
selaku Pemilik Risiko

Batara
NIP 198108102005021001

Tim Penilai Manajemen Risiko
Unit Manajemen Risiko tingkat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Andi Guntur Asapa
NIP 198407242007121001

Viki Okissa Saifudin
NIP 199510022018011001

RISALAH HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL SEMENTARA
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2026

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah membuat naskah dinas elektronik, namun masih terdapat naskah dinas yang belum sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	4	-
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	Pimpinan Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah menandatangani dan mengirim naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI sebanyak 99,81%.
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	Pimpinan Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah menindaklanjuti naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI sebanyak 100%.

B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah membuat naskah dinas konvensional, namun masih terdapat naskah dinas yang belum sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah membuat daftar arsip aktif elektronik berdasarkan SKKAAD, namun mendokumentasikan layanan arsip aktifnya.

B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 0% s.d. 50%.	1	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI sebesar 40,78%.

3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah menyusun daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI sesuai ketentuan, namun belum menyampaikannya kepada Unit Kearsipan II.
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Belum terdapat berkas yang ditutup.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah belum melaksanakan tutup berkas pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah belum menunjukkan rencana pemberkasan sesuai definisi rencana pemberkasan dan dokumentasi pelaksanaan pemberkasan dengan menunjukkan isi naskah dinas yang diberkaskan.
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 0% s.d. 50%.	1	-
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah menyusun daftar arsip aktif sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan kepada Unit Kearsipan II.

4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif lebih dari 3 tahun dari masa audit.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapiansebagai Unit Pengolah masih menyimpan arsip aktif dengan retensi aktif lebih dari 3 tahun.
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Belum melaksanakan alih media arsip aktif.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah belum melaksanakan alih media arsip aktif.
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi 2 s.d. 3 kriteria.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi 2 kriteria.

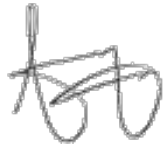
NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.

B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	-
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	1	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN			
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN			
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah dan terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	4	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah memiiki 2 arsiparis dan terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Sebagian arsiparis pada unit pengolah telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai Unit Pengolah memiiki 2 arsiparis, namun hanya 1 arsiparis yang telagh tersertifikasi.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN			
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN			
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-

Menyetujui,
Ketua Tim Tata Usaha



Ari Pranovi Indrianto
NIP. 19791024 200912 1 003

Jakarta, 26 Mei 2026
Ketua Tim Pengelolaan Naskah Dinas
dan Arsip Aktif / Arsiparis Ahli Muda

Yopie Tarya Lansa
NIP. 19860815 200912 2 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	09 September	133	022	467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,84 15 13,18	93,92	49,14 20 9,83	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,80 10 9,98	87,24	0,00 25 0,00	0,00	62,98	100,00%	0,00	62,98

tanggal cetak : 01-10-26 09:47:58


MONEV
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Role
Pilih TA (2026)
Logout
Nilai Kinerja Anggaran Satker (New)
Monitoring / NKA Satker New
Download Excel
Tampilkan 25 entri
Cari:
No.
Kode Satuan Kerja
Satuan Kerja
NK Perencanaan Anggaran
NK Pelaksanaan Anggaran
Nilai Kinerja Anggaran
1
022.08.467478
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN
10,36
87,98
49,17
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri
Sebelumnya
1
Selanjutnya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor	:	UM.006/522/K4/DJKA/2026
Klasifikasi	:	Biasa
Lampiran	:	2 Dokumen
Hal	:	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian Periode Bulan Juli - September Tahun 2026

Jakarta, 13 Oktober 2026

Yth. Plt. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Merujuk :

1. Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sesuai rujukan di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian selaku Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian Periode Bulan Juli - September Tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

Ronald Jackson Simbolon
NIP 197903032005021002

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
3. Koordinator / Ketua Tim Kelompok Tata Usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JULI S.D SEPTEMBER 2026

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian

Ronald Jackson Simbolon

197903032005021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui https://skm.dephub.go.id/.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- ○ Ya
- ○ Tidak

2. Bagaimana penlilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- ☐ Kebijakan Pelayanan
- ☐ Profesionalisme SDM
- ☐ Kualitas Sarana Prasarana
- ☐ Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- ☐ Konsultasi dan Pengaduan
- ☐ Penghilangan Praktik Pungli
- ☐ Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- ☐ Penghilangan Praktik Percaloan
- ☐ Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*. Penggunaan Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)* sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui https://skm.dephub.go.id/.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

n = N / {1 + (N x e2)}

n = 150 / {1 + (150 x 0,052)}

n = 109,09

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah
c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*, dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*, dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumah Bobot}}{\text{Jumah Unsur}} = \frac{1}{x} = \text{N}$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumah Bobot}}{\text{Jumah Unsur}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 0{,}07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Tota Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Juli	3.85	4	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
2	Agustus	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	September	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		**3.95**	**7**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**

Pada pelaksanaan survei periode Juli s.d September 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.95 dalam skala 4 atau 17.28 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Juli s.d September 2026. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Juli	3.85	4	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
2	Agustus	4	1	4	4	4	4	4
3	September	4	2	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		**3.95**	**7**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.95**

Pada pelaksanaan survei periode Juli s.d September 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.95 dalam skala 4 atau 17.28 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

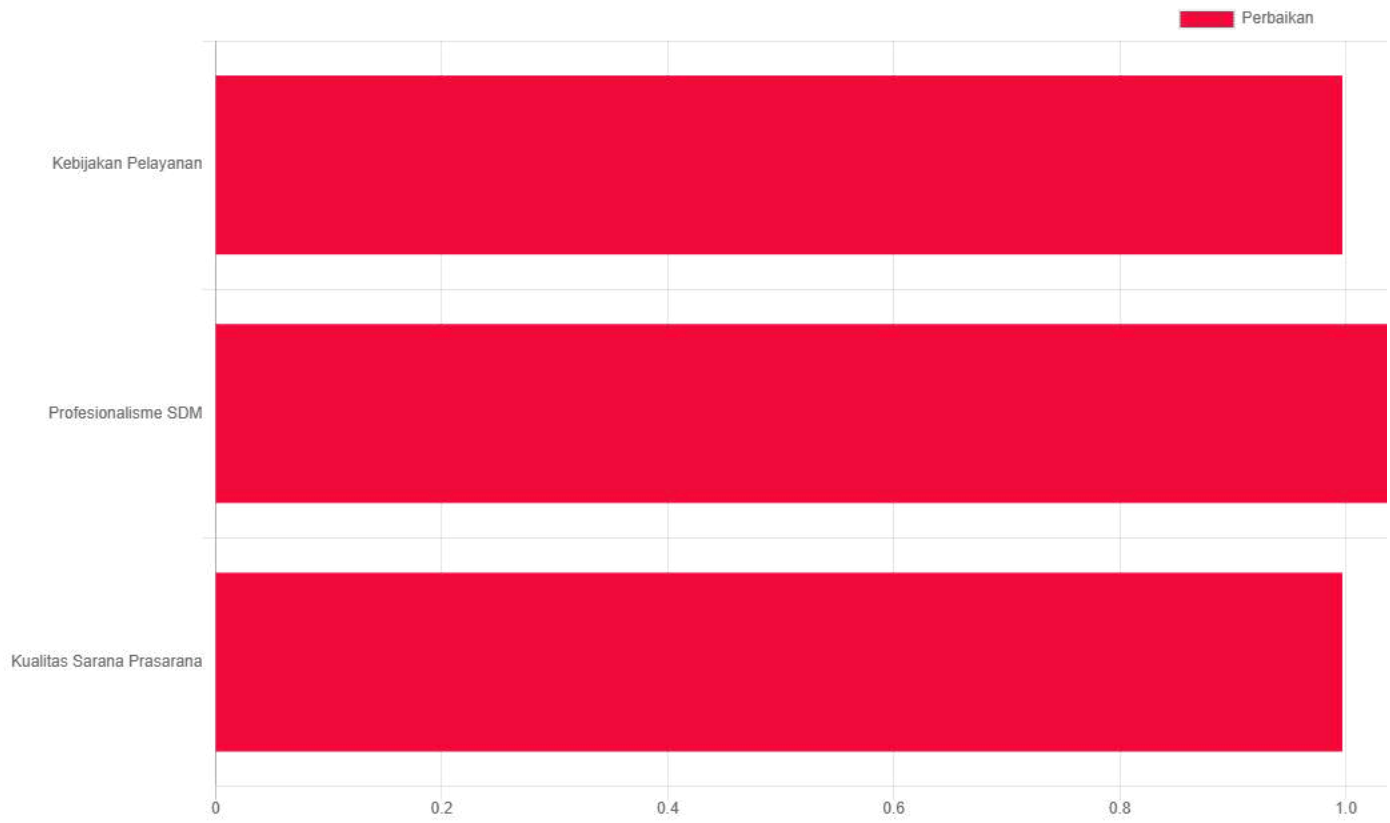
Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Juli s.d September 2026. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Informasi
    - Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
    - Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
    - Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Persyaratan
    - Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan;
    - Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan;
    - Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3. Prosedur/Alur
    - Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan;
    - Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan;
    - Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4. Waktu Penyelesaian
    - Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;
    - Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;
    - Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.
5. Tarif/Biaya
    - Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor;
    - Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan;
    - Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

DATA SURVEI

A. DATA RESPONDEN

No.	Tgl. Survei	Nama	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
1	Rabu, 01 Juli 2026 Jam 09:40	Elisa	085646121998	Karyawan Swasta	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 2 (S2)	Tidak Memilih Jenis layanan
2	Rabu, 01 Juli 2026 Jam 09:40	Adhisatya	085624314937	Swasta	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 2 (S2)	Tidak Memilih Jenis layanan
3	Senin, 27 Juli 2026 Jam 06:21	Prasanti	-	Swasta	31-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
4	Jumat, 31 Juli 2026 Jam 13:41	Putri	-	ASN	31-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
5	Senin, 31 Agustus 2026 Jam 08:28	Putri	-	ASN	31-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
6	Rabu, 23 September 2026 Jam 12:46	Amira	-	Swasta	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
7	Rabu, 23 September 2026 Jam 12:51	Hagi Sundra Gonzales	081363734864	ASN	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan

B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI JULI S.D SEPTEMBER 2026

Jumlah Responden : 7

II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

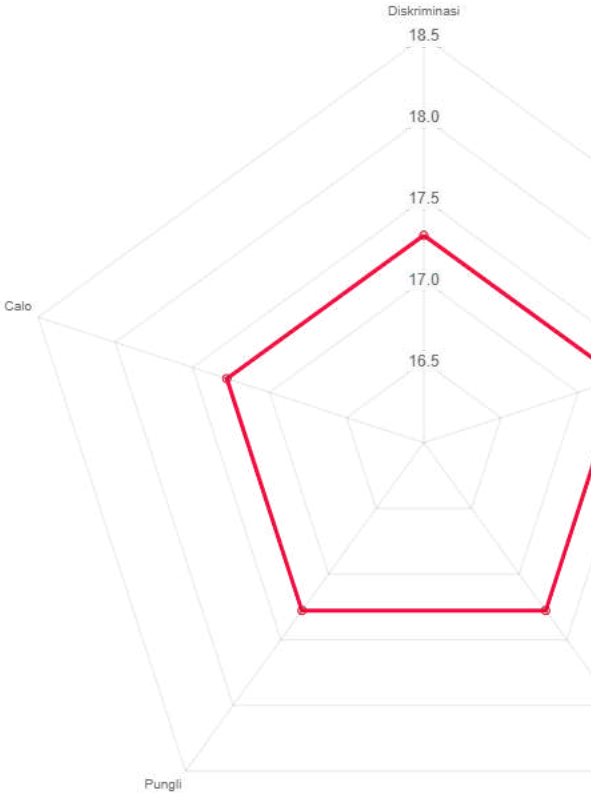
Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Persyaratan	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Prosedur/Alur	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Tarif/Biaya	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Sarana Prasarana	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Respon	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
IKM	**17.28**	**98.75**	**3.95**	**Sangat Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



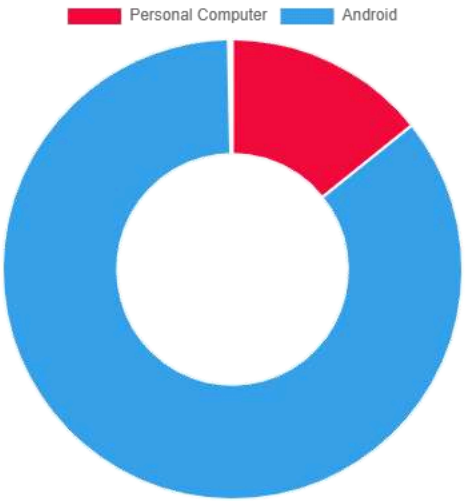
III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Kecurangan	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Gratifikasi	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Pungli	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
Calo	17.28	98.75	3.95	Sangat Baik
IPK	**17.28**	**98.75**	**3.95**	**Sangat Baik**

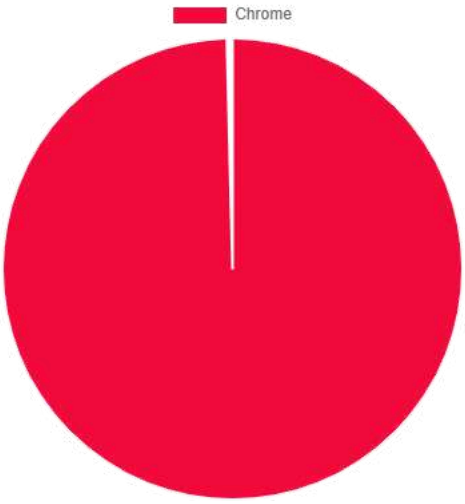


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

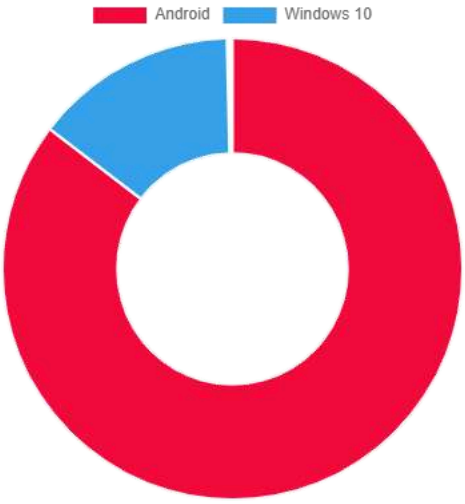
2. Penggunaan Perangkat



3. Penggunaan Peramban (*Browswer*) Perangkat



4. Penggunaan (*Platform Operating System*)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026



DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat petunjuk, kami dapat menyelesaikan “Laporan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Sarana Perkeretaapian, Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membawa kita seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan bentuk Implementasi dari komitmen Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Hal demikian sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Direktorat Sarana Perkeretaapian telah melakukan tugas pokok dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi pengguna jasa transportasi. Dalam rangka mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang telah diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah dilakukan penyebaran dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara komprehensif, dan berkala.

Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat telah dituangkan pada laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat. Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kinerja dari Direktorat Sarana Perkeretaapian. Penyusunan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai waktu dan jenis pelayanan yang ada di Direktorat Sarana Perkeretaapian, Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan jenis layanan seperti yang diharapkan, namun dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi upaya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan tindak lanjut atas masukan perbaikan dari pengguna jasa transportasi.

Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian,

Ronald Jackson Simbolon
NIP 197903032005021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelanggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelanggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Data Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk aktif melakukan pengumpulan persepsi pengguna layanan (masyarakat) terhadap pelayanan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanannya selanjutnya sebagai bahan peningkatan jasa pelayanan yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Tuntutan untuk selalu berupaya melakukan perbaikan pelayanan jasa transportasi kepada para pengguna jasa merupakan suatu kewajiban baik bagi regulator dan operator jasa transportasi. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna pelayanan tersebut. Dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, maka Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal, melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Sarana Perkeretaapian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Direktorat Sarana Perkeretaapian sehingga diperoleh nilai/tingkat kepuasan masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan nilai kepuasan masyarakat pada tahun berikutnya.
b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Direktorat Sarana Perkeretaapian kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

3. Target dan Sasaran

Sasaran penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini antara lain:

a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. Penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna;
c. Tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. Penyampaian hasil survei dan identifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan;
e. Penyusunan rencana aksi perbaikan (*action plan*) terhadap aspek pelayanan yang belum optimal; dan
f. Sebagai umpan balik kepada masyarakat bahwa hasil survei digunakan untuk perbaikan nyata.

4. Waktu Pelaksanaan Survei

Survei kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada periode Juli s.d. September 2026 pada Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Ruang Lingkup

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit layanan Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
METODOLOGI SURVEI

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis aplikasi 3AS *Case Survey Management* Kementerian Perhubungan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Metode survei yang digunakan adalah pengisian kuesioner secara *daring* kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan, dengan pengisian survei melaui QRCode survei atau *link* survei kepuasan masyarakat.

2.2 Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian didasarkan pada 2 (dua) indikator utama, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Adapun beberapa aspek yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) meliputi:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   1. Persyaratan;
   2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
   3. Waktu penyelesaian;
   4. Biaya/tarif;
   5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
   6. Kompetensi pelaksana;
   7. Perilaku pelaksana;
   8. Sarana dan prasarana;
   9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

b. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
   1. Diskriminasi;
   2. Kecurangan;
   3. Gratifikasi;
   4. Percaloan; dan
   5. Pungutan Liar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
HASIL DAN ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

3.1 Rekapitulasi Hasil Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk menilai persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan. Survei ini menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Berdasarkan perolehan hasil survei kepuasan masyarakat di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 98.75 Kategori Predikat Sangat Baik dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 98.75 Kategori Predikat Sangat Baik, dengan jumlah responden survei sebanyak 7 responden.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan sasaran responden berfokus pada pengguna jasa layanan di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian, seperti operator sarana perkeretaapian.

Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner *QRCode* dan *link* survei yang diisi langsung oleh responden setelah menerima pelayanan dari Direktorat Sarana Perkeretaapian. Adapun hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara keseluruhan pada Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Waktu Pelaksanaan Perbaikan	Tindak Lanjut	Tantangan dan Hambatan
		Indeks	Mutu Layanan			
1	Informasi Pelayanan***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-
2	Persyaratan***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-
3	Waktu Pelayanan***)**	98,75	Sangat Baik	Periode 2026	Agar petugas dapat bekerja lebih cepat tanggap	Pengguna layanan mengajukan pelayanan diluar jam pelayanan sehingga petugas lambat merespon
4	Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan***)**	98,75	Sangat Baik	Periode 2026	Percepatan pelaksanaan approval berjenjang pada aplikasi sisaka	Approval berjenjang pada proses sertifikasi dinilai lambat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Waktu Pelaksanaan Perbaikan	Tindak Lanjut	Tantangan dan Hambatan
		Indeks	Mutu Layanan			
5	Tarif / Biaya***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-
6	Sarana dan Prasarana***)**	98,75	Sangat Baik	Periode 2026	Akan ada pengembangan aplikasi untuk menunjang sertifikasi KA	Kesulitan dalam mengunggah dokumen (ada batas besaran ukuran dokumen yang menyulitkan pengguna aplikasi sisaka)
7	Produk Layanan	-	-	-	-	-
8	Respon/Perilaku Petugas***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-
9	Penanganan Konsultasi, Saran, dan Masukan***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-

Keterangan:
1. Skala prioritas perbaikan unsur dimulai dari 3 unsur dengan nilai terendah;
2. Dokumentasi pelaksanaan SKM dilampirkan pada laporan tindak lanjut hasil survei.

*) silahkan pilih jenis layanan yang perlu dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bernilai rendah, atau yang perlu dilakukan perbaikan (tidak harus semua unsur ditindaklanjuti).

b. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

No	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Waktu Pelaksanaan Perbaikan	Tindak Lanjut	Tantangan dan Hambatan
		Indeks	Mutu Layanan			
1	Diskriminasi***)**	98,75	Sangat Baik	Periode 2026	Pelayanan kepada pengguna layanan diberikan secara profesional, transparan, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, kecurangan, dan gratifikasi.	-
2	Kecurangan***)**	98,75	Sangat Baik	Periode 2026	Pelayanan kepada	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Waktu Pelaksanaan Perbaikan	Tindak Lanjut	Tantangan dan Hambatan
		Indeks	Mutu Layanan			
					pengguna layanan diberikan secara profesional, transparan, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, kecurangan, dan gratifikasi.	
3	Gratifikasi***)**	98,75	Sangat Baik	Periode 2026	Pelayanan kepada pengguna layanan diberikan secara profesional, transparan, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, kecurangan, dan gratifikasi.	-
4	Percaloan***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-
5	Pungutan Liar***)**	98,75	Sangat Baik	-	-	-

Keterangan:
1. Skala prioritas perbaikan unsur dimulai dari 3 unsur dengan nilai terendah;
2. Dokumentasi pelaksanaan SKM dilampirkan pada laporan tindak lanjut hasil survei.

*) silahkan pilih jenis layanan yang perlu dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bernilai rendah, atau yang perlu dilakukan perbaikan (tidak harus semua unsur ditindaklanjuti)

c. Tindak Lanjut Masukan Responden

No	Unsur	Masukan Perbaikan Responden / Jumlah Responden Yang Memilih	Tindak Lanjut
1	Kebijakan Pelayanan	-	-
2	Profesionalisme SDM	-	Menyelenggarakan pelayanan publik secara konsisten sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unsur	Masukan Perbaikan Responden / Jumlah Responden Yang Memilih	Tindak Lanjut
			standar operasional baku.
3	Kualitas Sarana dan Prasarana	-	-
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	-	-
5	Konsultasi dan Pengaduan	-	-
6	Penghilangan Praktik Pungli	-	-
7	Penghilangan praktik diluar prosedur	-	-
8	Penghilangan praktik percaloan	-	-
9	Dst …	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2. Penanggung Jawab

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP: +62 813-6001- 3838 | WEBSITE : djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-K4 DJKA 19 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa Penyelenggara pelayanan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;

b. bahwa perlu dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan semakin prima kepada pengguna jasa layanan atau masyarakat;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Tim : Direktur Sarana Perkeretaapian
2. Wakil Ketua Tim : Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II
3. Sekretaris Tim : Koordinator / Ketua Tim Kelompok Tata Usaha

4. Anggota...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Anggota Tim : a) Akbarani Cantika;
b) Alfira Berlianti;
c) Angela Merici Yoshinta R;
d) Fadhila Dhaneswara P;
e) Haezah Qisthina;
f) Hagi Sundra Gonzales;
g) Hanna Suryadika M. R;
h) Lubansky;
i) Mochendra;
j) Nisa Alawiyah Iskandar;
k) Putri Ikhdina Ningtyas;
l) Putri Pinang Sari.

KEDUA : Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Ketua Tim
   a. Memimpin dan mengoordinasikan Tim. Ketua Tim bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan survei, mengoordinasikan tugas dan memastikan bahwa setiap anggota tim menjalankan tanggung jawabnya dengan baik;
   b. Menentukan Strategi dan Rencana Kerja. Ketua Tim melakukan perumusan tujuan dan rencana kerja survei, serta menentukan metodologi yang akan digunakan dalam survei kepuasan masyarakat;
   c. Pengambilan Keputusan. Ketua Tim bertanggung jawab mengambil keputusan penting terkait dengan pelaksanaan survei serta rencana tindak lanjut hasil survei;
   d. Mewakili tim pengelola survei dalam rapat atau komunikasi dengan pihak eksternal, seperti rapat dengan Unit Pusat Pembina Survei Kepuasan Masyarakat;
   e. Memastikan bahwa pelaksanaan survei berjalan sesuai dengan jadwal, dan prosedur yang ditetapkan;
   f. Memonitor dan mereviu penyusunan laporan akhir hasil survei kepuasan masyarakat;

g. Menentukan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Berdasarkan hasil analisis survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2026, maka beberapa langkah kebijakan dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dilakukan dengan skala prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Waktu Pelayanan*)

Pengguna layanan mengajukan pelayanan diluar jam pelayanan sehingga petugas lambat merespon. Memberikan informasi kepada operator sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan pada waktu operasional kantor (08.00-16.00 WIB). Agar petugas dapat bekerja lebih cepat tanggap.

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan*)

Approval berjenjang pada proses sertifikasi dinilai lambat. Akan dilakukan Percepatan pelaksanaan approval berjenjang pada aplikasi SISAKA.

3. Sarana dan Prasarana

Kesulitan penggunana layanan dalam mengunggah dokumen pada aplikasi SISAKA (ada batas besaran ukuran dokumen yang menyulitkan pengguna aplikasi SISAKA). Akan ada pengembangan aplikasi untuk menunjang sertifikasi sarana KA.

4. Estimasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, pelaksanaan perbaikan akan dilakukan secara berkelanjutan selama periode tahun 2026 (pemantauan triwulan dan evaluasi tahunan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan, survei kepuasan masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas unit pelayanan pemerintah, tergantung kepada komitmen dan kesungguhan para pelaksana di masing-masing unit kerja instansi serta masyarakat. Masukan dan saran yang terkait dengan perbaikan layanan umum dan bersifat teknis terkait operasional fasilitas dan sifatnya langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian agar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

2. Masukan dan Saran

a. Kegiatan penyusunan laporan Tindak Lanjut Hasil Survei kepuasan Masyarakat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika memungkinkan survei dilakukan secara berkala minimal 3 bulan dan maksimal 1 Tahun secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya Direktorat Sarana Perkeretaapian;
b. Pengoptimalan penggunaan aplikasi 3AS *Case Survey Management System* dan pelaksanaan pengembangan fitur pembelajaran dalam rangka peningkatan hasil survei.

Demikian Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat kami simpulkan, semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian,

Ronald Jackson Simbolon
NIP 197903032005021002

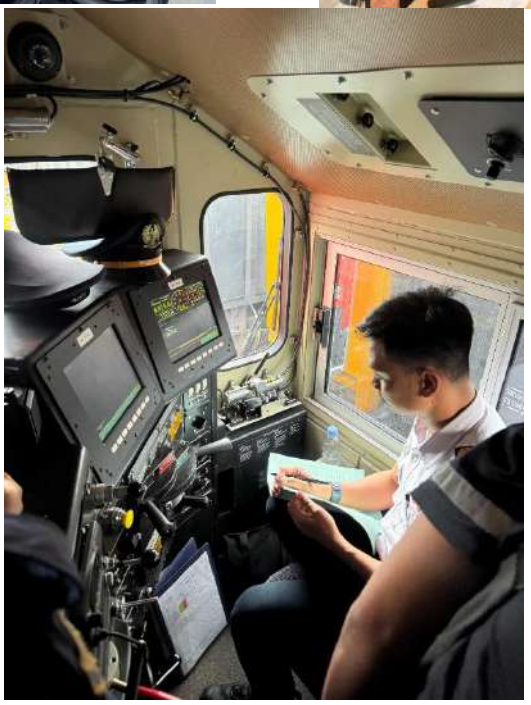
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

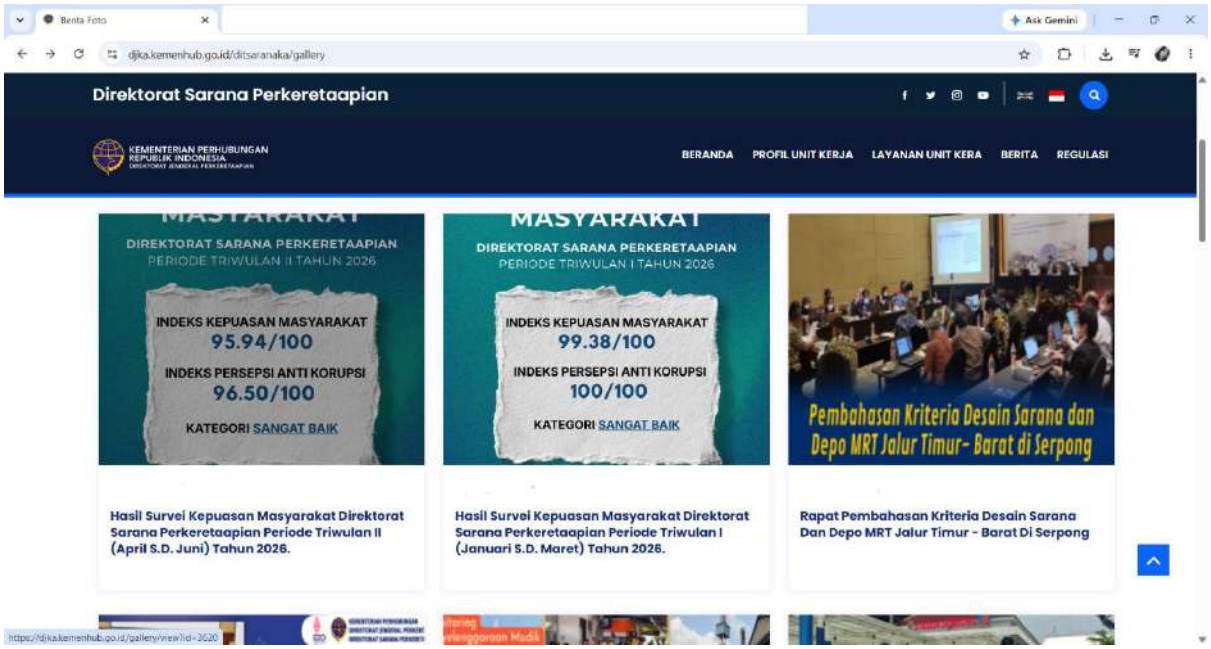






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. DOKUMENTASI PUBLIKASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5

Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026 DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2026

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

September 2026

RAPAT PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026 DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

A. DASAR PENUGASAN

Surat Undangan Koordinator/Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian Nomor: PR.205/148/K4/DJKA/2026 tanggal 14 September 2026 perihal Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Ruang Rapat Lt.13
2. Tanggal : Senin / 14 September 2026
3. Peserta Rapat
   a. Plt. Kasubdit Pengembangan Sarana;
   b. Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana;
   c. Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara;
   d. Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I;
   e. Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah II;
   f. PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

A. **EVALUASI KINERJA:** Rata-Rata Capaian Kinerja 106,25%

RESUME LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
1. Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	77,78	77,78	87,50	112,50*	• Pengendalian mutu, rancang bangun, dan rekayasa memiliki target 12 dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian yang disahkan. • Kegiatan pendukung meliputi: o Klarifikasi dan pembahasan dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian; o Validasi gambar teknis, tahapan produksi, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian; o Monitoring dan supervisi terhadap uji prototipe dan uji konstruksi sarana dalam rangka uji rancang bangun dan rekayasa; o Pengesahan terhadap dokumen spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana; o Pelaksanaan pembahasan, evaluasi, dan persetujuan dokumen spesifikasi teknis (spektek). • Terdapat 9 dokumen yang telah disahkan selama Triwulan II 2026: o Spesifikasi teknis rekayasa teknis kereta yang ditarik lokomotif menjadi kereta pembangkit;	• Penyesuaian distribusi target bulanan dan reviu terhadap target indikator sesuai mekanisme yang berlaku agar lebih realistis, terukur, serta selaras dengan kapasitas pelaksanaan dan proyeksi capaian hingga akhir tahun. • Evaluasi target Renstra 2025-2029, serta evaluasi terhadap hasil temuan di lapangan guna memastikan kesesuaian dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka implementasi rekomendasi hasil monitoring dan penguatan pengawasan berkala. • Koordinasi untuk memastikan perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian yang telah selesai disusun mendapatkan pengesahan. • Jabatan fungsional analis kebijakan dan dikoordinasikan dengan PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Respon serta Konsultasi dan Pengaduan. • Pada survei periode Triwulan II 2026 dilaksanakan dengan jumlah 14 responden. Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner QRCode dan *link* survei yang diisi langsung oleh responden setelah menerima pelayanan dari Direktorat Sarana Perkeretaapian. • Pada pelaksanaan survei periode Mei 2026 terdapat perubahan *QR Code* sehingga menyebabkan responden pada kuesioner SKM bulan Mei 2026 tidak terekap. • Rincian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: o Informasi Pelayanan (95 – Sangat Baik); o Persyaratan (95 – Sangat Baik); o Waktu Pelayanan (98,75 – Sangat Baik); o Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan (95 – Sangat Baik); o Tarif/Biaya (98,75 – Sangat Baik); o Sarana dan Prasarana (95– Sangat Baik); o Produk Layanan (-); o Respon/Perilaku Petugas (95 – Sangat Baik); o Penanganan Konsultasi, Sarana, dan Masukan) (97.50 – Sangat Baik).	diakses masyarakat dengan beberapa penyesuaian aktivitas diantaranya analisis hasil Survei IKM Tahun 2026 berdasarkan indikator pelayanan publik (respon, konsultasi, informasi, waktu penyelesaian, dan non diskriminasi). • Menyisipkan tautan survei IKM pada setiap kegiatan seperti supervisi kelaikan sarana, bimbingan teknis, pengujian sarana, dan *rampcheck* sarana perkeretaapian. • Sosialisasi survei dilakukan oleh pegawai dengan jabatan pranata hubungan masyarakat dan pegawai yang tercantum dalam SK Tim Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	88,85%	16,15%	29,26%	181,18*	• Jumlah sarana aktif periode Triwulan II 2026 adalah 14.217 unit; • Capaian kumulatif s.d. Juni 2026 sebanyak 4.160 sertifikat, dengan rincian 2.349 sertifikat di wilayah I dan 1.811 sertifikat di Wilayah II; • Supervisi pengujian sarana perkeretaapian di Depo dan Balai Yasa milik operator sarana perkeretaapian antara lain Depo KRL Depok,	• Koordinasi dengan pemohon/operator terkait kelengkapan data dukung proses sertifikasi seperti *checksheet* perawatan. • Koordinasi dan monitoring secara berkala mencakup sinkronisasi data sertifikasi (data pengujian sarana yang sudah diuji dan telah dan telah diupload aplikasi) dengan Balai Pengujian Perkeretaapian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					DAOP 2 Bandung, DAOP 7 Madiun, Depo LRT Jabodebek. • Kendala dalam pencapaian kinerja yaitu belum optimalnya pelaksanaan supervisi akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga berdampak dalam cakupan dan intensitas pelaksanaan pengendalian terhadap proses pengujian sarana belum secara maksimal. • Terdapat 2.055 permohonan yang berada pada tahap proses pembayaran biaya uji, 650 permohonan dalam proses verifikasi, 327 permohonan pada tahap pengujian sarana, serta 197 permohonan pada proses pembayaran PNBP sertifikasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *bottleneck* sertifikasi masih didominasi oleh tahapan administrasi dan pemenuhan kewajiban PNBP sebelum pengujian maupun penerbitan sertifikat. • Monitoring mingguan terhadap seluruh permohonan sertifikasi yang masih berada pada tahapan persetujuan administrasi, pembayaran biaya uji, pembayaran PNBP, pelaksanaan pengujian, dan proses verifikasi. • Koordinasi intensif dengan Balai Pengujian untuk percepatan pelaksanaan pengujian terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga waktu tunggu pengujian dapat dikurangi. • Koordinasi dengan BTP dalam pemutakhiran data sertifikat sarana yang akan habis masa berlaku sebagai dasar penyusunan prioritas pelayanan sertifikasi.	• Koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian untuk pengembangan/ perbaikan/sinkronisasi aplikasi SISAKA dan SIAPKA milik Balai Pengujian Perkeretaapian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					• Pendampingan kepada operator yang memiliki jumlah permohonan tertinggi, khususnya PT KAI agar percepatan pembayaran PNBP, kelengkapan dokumen, dan kesiapan pengujian dapat dilakukan secara paralel. • Evaluasi terhadap 250 permohonan yang ditolak untuk mengidentifikasi penyebab utama penolakan, menyusun rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta menyampaikan umpan balik kepada operator guna meningkatkan kualitas pengajuan sertifikasi. • Percepatan penyelesaian 136 dokumen yang masih menunggu Tanda Tangan Elektronik agar segera memasuki penerbitan sertifikat. • Menyusun laporan monitoring sertifikasi secara berkala sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam pengendalian pencapaian indikator kinerja.	
4. Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	59,25	37,03	37,03	100,00	• Pada Triwulan II 2026, Direktorat Sarana sudah mengesahkan 33 NSPK yang menjadi b*aseline* untuk perhitungan capaian indikator kinerja. • Berdasarkan DIPA Tahun 2026, Direktorat Sarana memiliki 17 kegiatan pendukung pemenuhan NSPK dengan progres diantaranya: o Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian (proses administrasi); o Reviu Peraturan tentang Standar Spektek Monorel (tahap kontrak dan penyusunan studi kebijakan oleh penyedia); o Reviu Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem (proses administrasi);	• Percepatan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi melalui penguatan koordinasi antara Direktorat Sarana Perkeretaapian, penyedia jasa, Tim Pengarah, dan Tim Pendamping. • *Kick-off meeting* bagi pekerjaan yang belum memulai tahapan substansi, penetapan Tim Pendamping pada kegiatan yang masih terkendala administrasi, serta pengumpulan dan validasi data teknis melalui koordinasi pemangku kepentingan. • Koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses administrasi kontrak sehingga seluruh kegiatan penyusunan studi/kajian dapat terealisasi sesuai jadwal.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					o Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian (proses administrasi); o Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan Komponen *Bearing* Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal (mulai pada April/Mei 2026); o Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian (mulai pada April/Mei 2026); o Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi (proses lelang); o Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur (kontrak pada 2 Maret 2026, progres saat ini dalam proses penyelesaian masukan hasil asistensi dan pemaparan laporan pendahuluan); o Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara (kontrak pada 2 April 2026); o Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian (proses administrasi); o Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (proses administrasi). • Secara umum pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi telah berjalan sesuai jadwal kontrak dan sebagian besar telah mencapai	• Percepatan pengumpulan data, analisis teknis, koordinasi secara berkala dengan penyedia jasa dan para pemangku kepentingan, serta pemantauan terhadap kemajuan masing-masing kegiatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					termin I melalui penyusunan serta pembahasan Laporan Pendahuluan. Beberapa kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan karena proses administrasi, seperti penetapan tim pendamping, penyampaian laporan pendahuluan oleh penyedia jasa, maupun kontrak yang baru efektif pada akhir Triwulan II 2026. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian *output* substansi belum dapat memasuki tahapan analisis secara optimal sehingga pada Triwulan III diperlukan percepatan koordinasi dan pengendalian terhadap jadwal kontrak agar target penyelesaian dapat tercapai.	
5. Persentase Pemenuhan Sarana Milik Negara Mendukung Keselamatan	71,01	24,46	146,01	596,93*	• Pada Tahun 2026 tidak ada pengadaan SMN. • Pengoperasian sarana menggunakan anggaran pengoperasian SMN sebanyak 50 unit. • Peningkatan pemanfaatan sarana sesuai kebutuhan operasional, serta penguatan monitoring terhadap tingkat utilisasi dan kondisi teknis setiap sarana. • Beberapa kegiatan untuk meningkatkan kehandalan sarana diantaranya perawatan sarana milik negara. Adapun perawatan meliputi perawatan bulanan (P1) dan perawatan dua belas bulan (P12). Selain itu, juga dilakukan perbaikan alat ukur kereta ukur sarana milik negara. • Menetapkan petugas penghubung khusus yang berkoordinasi langsung dengan Balai Teknik Perkeretaapian guna monitoring sarana milik negara.	• Penyusunan jadwal pengoperasian yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan prasarana di seluruh wilayah kerja. • Evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan SMN sebagai dasar penyempurnaan perencanaan kebutuhan sarana periode berikutnya, sehingga capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan dan pelayanan. • Pemeriksaan kondisi dan monitoring perawatan sarana milik negara bersama BTP di wilayah yang terdapat aset sarana milik negara agar kondisi sarana berada dalam kondisi laik operasional dan fungsi (SO).

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
6. Presentase Sarana Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil *Rampcheck*	94,60	94,60	97,79	103,37	• Terdapat 2 kegiatan yaitu *rampcheck* angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru bidang sarana serta *rampcheck* pemeriksaan kelaikan angkutan barang batubara; • Pemeriksaan di seluruh wilayah melibatkan personil Direktorat Sarana dan Balai Teknik Perkeretaapian dengan target 3.687 unit sarana terdiri dari 292 lokomotif, 1.876 kereta yang ditarik lokomotif, 86 kereta rel diesel, dan 1.433 kereta rel listrik. • Hasil *rampcheck* menunjukkan bahwa sebanyak 3.679 unit sarana berhasil diperiksa atau 99,78% dari target sarana 3.687 unit sarana. Rincian jenis sarana meliputi 291 unit lokomotif, 1.870 unit kereta yang ditarik lokomotif, 86 unit kereta rel diesel, dan 1.432 unit kereta rel Listrik. • Pada Triwulan I-II 2026 telah dilakukan kegiatan *rampcheck* angkutan lebaran dengan temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1.021 unit dari total temuan 1.044 unit. • Temuan utama didominasi oleh komponen keselamatan kritis, yaitu rem blok pada 354 sarana, *stop* blok pada 270 sarana, *washer* pada 81 sarana dan temperatur *bearing* pada 68 sarana. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian pada *end cap bearing*, APAR, alat komunikasi darurat, pemasir, lampu utama dan semboyan, *locking plate*. • Tindak lanjut teknis direkomendasikan melalui penggantian rem blok, perbaikan alat komunikasi darurat, penanganan *washer*, dan monitoring temperatur *bearing* berkala.	• Evaluasi terhadap hasil *rampcheck* yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan *rampcheck* selanjutnya serta yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik; • Pengawasan dan monitoring terhadap kondisi sarana perkeretaapian. • Penempatan pegawai guna mendukung pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					• Berdasarkan hasil tersebut, *rampcheck* sarana pada Angkutan Lebaran Tahun 2026 secara umum menunjukkan tingkat kesiapan yang sangat baik, namun komponen keselamatan kritis tetap memerlukan penanganan berkelanjutan.	
7. Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	100,00	-	100,00	100,00	• Pelaksanaan monitoring dan pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta dengan hasil dari monitoring tidak adanya temuan; • Pelaksanaan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT KAI antara lain Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring terdapat 1 temuan pada Balai Yasa Manggarai dengan tidak tersedianya alat *Load Bogie Test*. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT KAI telah mengajukan usulan pengadaan *Load Bogie Test* Tahun 2026; • Kegiatan monitoring terhadap pemeriksaan harian/*daily check* di beberapa depo.	• Pengawasan perawatan sarana untuk memastikan pengoperasian sesuai kemampuan dan instruksi pabrikan. • Evaluasi terhadap hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian. • Peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan agar dapat mengikuti tantangan teknologi yang semakin berkembang serta koordinasi dengan mitra kerja (operator dan manufaktur sarana). • Penempatan pegawai guna mendukung pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian.
8. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	80,80	-	-	-	• Belum ada capaian nilai AKIP pada Triwulan II. • Telah disusun dokumen: o SK Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026; o Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Berjenjang; o Kesesuaian Anggaran dan Kegiatan yang terdapat pada DIPA dan POK; o Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026; o Laporan Bulanan DIPA Januari s.d. Juni 2026;	• Monitoring kinerja periode selanjutnya. • Koordinasi dengan anggota Tim SK SAKIP terkait ketersediaan data kinerja berpedoman pada KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. • Pelaksanaan SAKIP menjadi tanggung jawab seluruh sub unit kerja, sehingga diperlukan penyusunan laporan sesuai format untuk mendukung capaian kinerja.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					o Penilaian mandiri meliputi pengisian kertas kerja dan data dukung pada aplikasi SILAKI. Adapun hasil penilaian mandiri internal Tahun 2026 adalah 83 dan telah dilakukan evaluasi lanjut di tingkat Eselon I adalah 81,50. • Telah ditugaskan pegawai dengan jabatan pranata komputer ahli pertama dan statistisi ahli pertama serta pegawai yang tercantum dalam SK SAKIP Tahun 2026 guna mendukung Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian.	
9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	13,75	-	-	-	• Belum ada capaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan II 2026. • Telah disusun dokumen: o SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP; o SK Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026; o SK UPR dan UMR Tahun 2026; o Piagam Manajemen Risiko Tahun 2026, serta Dokumen Manajemen Risiko (Penetapan Konteks, Profil Risiko, Rencana Penanganan, Selera Risiko); o SK UPG Tahun 2026 dan laporan UPG Triwulan I-II Tahun 2026; o Pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP Tahun 2026; o Laporan Triwulan UPR, UMR dan Pemilik Risiko.	• Pengisian pemantauan risiko pada aplikasi SIMARKO serta melakukan pengisian kertas kerja penilaian mandiri. • Penerapan manajemen risiko maupun pemantauan risiko agar berpedoman dengan Kepmenhub Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
10. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	86,75	40,17	47,12	117,30*	• Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 7,50 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 86,74.	• Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pengawasan pada setiap kegiatan. • Koordinasi dengan KPPN mengenai data capaian kinerja pada aplikasi Monev Kemenkeu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					• Realisasi anggaran Rp13.373.553.613 dari alokasi Rp68.090.836.000 berdasarkan DIPA Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 (Revisi ke 9). • Penugasan pegawai di unit keuangan untuk pengisian dan *update* SMART serta perhitungan NKA secara berkala.	• Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap anggaran serta optimalisasi penggunaan anggaran. • Revisi DIPA Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026.
11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	100,00	50,00	56,04	112,08*	• Capaian PNBP hingga bulan Juni 2026 sebesar Rp840.620.000 dari target sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi. Rincian perolehan per bulan sebagai berikut: o Januari: Rp 48.475.000; o Februari: Rp 125.975.000; o Maret: Rp 157.800.000; o April: Rp 279.370.000; o Mei: Rp 123.075.000; o Juni: Rp 105.925.000. • PNBP diperoleh dari beberapa kegiatan: o Sertifikasi kelaikan sarana; o Sarana milik negara yang di sewa pihak swasta/masyarakat umum; o Penomoran sarana perkeretaapian; o Persetujuan spesifikasi teknis. • Penugasan pegawai yang bertugas untuk pemungutan dan penyetoran PNBP.	• Pemantauan perolehan PNBP setiap periode. • Penagihan pembayaran PNBP secara berkala sehingga capaian perolehan PNBP sesuai target dan bisa meningkatkan perolehan PNBP.
12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	65,00	-	-	-	• Belum ada capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Triwulan II 2026. • Pada Tahun 2026 telah dilakukan penataan arsip inaktif dan penyusunan berita acara arsip Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2023 di Soreang, Bandung.	• Penataan arsip aktif dan inaktif serta memanfaatkan aplikasi SRIKANDI untuk persuratan. • Audit kearsipan internal dan pembinaan terhadap pengelola arsip di setiap unit.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II	RREALISASI TRIWULAN II	KINERJA TRIWULAN II (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENINGKATAN KINERJA
					• Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi pengawasan kearsipan internal dengan Biro Umum. • Pelaksanaan audit kearsipan internal dengan menggunakan metode pengisian formulir, wawancara dan pengamatan langsung dengan hasil sementara 79,97.	• Pelatihan dan sertifikasi dasar pengelolaan arsip bagi pegawai administrasi dan pengelola data guna memperkuat sinergi Tata Usaha dan Subdirektorat teknis dalam pengelolaan arsip kegiatan. • Penugasan pegawai dengan jabatan arsiparis.

**Catatan: Maksimal capaian kinerja diperhitungkan sebesar 110%*

CATATAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA:

- Monitoring berkala capaian indikator kinerja yang anomali/tidak memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90-110%) guna selanjutnya mengusulkan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026.

EVALUASI KELENGKAPAN LAPORAN:

No	KELENGKAPAN LAPORAN KINERJA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target		
	a. Rincian perhitungan realisasi kinerja secara matematis	Ada Sebagian	• Terdapat pada 7 IKK (IKK1, IKK2, IKK3, IKK4, IKK5, IKK6, IKK7) dari 9 IKK yang memiliki realisasi kinerja Triwulan II 2026, tidak terdapat pada IKK10 dan IKK11 • 3 IKK yaitu IKK8, IKK9, IKK12 tidak ada realisasi kinerja
	b. Perbandingan target triwulan/tahunan dan realisasi triwulan sesuai format	Ada	
2	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (target nasional)/internasional (*benchmark* kinerja)	Ada Sebagian	• Terdapat pada 4 IKK (IKK2, IKK4, IKK10, IKK11) dari 9 IKK yang memiliki realisasi kinerja Triwulan II 2026 (belum memenuhi *benchmarking* 50% jumlah IKK yang memiliki realisasi kinerja)

No	KELENGKAPAN LAPORAN KINERJA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
			• Data *benchmarking* IKK2 agar dilakukan dengan perbandingan kinerja unit kerja Eselon I • IKK1 dan IKK3 dapat dibandingkan dengan unit kerja Direktorat teknis lainnya • Agar dipertimbangkan penambahan *benchmarking* kinerja dengan kinerja internasional/negara lain/unit kerja sejenis/sub sektor/sektor lainnya
3	Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya		
	a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja termasuk upaya yang telah dilakukan dan hambatan/kendala	Ada	• Uraian analisis agar lebih didetailkan, diantaranya IKK4 (diuraikan progress penyiapan NSPK Tahun 2026), IKK7 (diuraikan beberapa hal pokok hasil pengawasan), IKK8, IKK9, IKK10, IKK11, IKK12 (lebih lengkap diuraikan tahapan/kendala/permasalahan/faktor pendukung lainnya)
	b. Uraian *crosscutting* kinerja	Ada Sebagian	• Hanya terdapat pada IKK1, IKK3, IKK4, IKK5, IKK6, IKK12, agar dilengkapi IKK lainnya
	c. Uraian penanganan risiko yang telah dilakukan	Ada Sebagian	• Hanya terdapat pada IKK6, agar dilengkapi IKK lainnya
4	Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja		
	a. Analisis efisiensi sumber daya anggaran sesuai format/rumus perhitungan	Ada	
	b. Analisis efisiensi sumber daya manusia sesuai format/rumus perhitungan	Ada	
5	Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi upaya perbaikan/peningkatan kinerja per indikator kinerja memuat penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran/organisasi/ pegawai)	Ada Sebagian	• Pada IKK4 tidak memuat penyesuaian strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, dan organisasi/ pegawai • Upaya peningkatan kinerja (penyesuaian strategis kebijakan kegiatan/anggaran, organisasi/pegawai) agar dipastikan lebih spesifik/tidak normatif, di*update*, serta menjelaskan langkah atau rekomendasi yang akan dilakukan pada periode berikutnya, bukan kegiatan yang telah dilakukan (cek IKK5, IKK6, IKK7, IKK8, IKK9, IKK10, IKK1, IKK12)
6	Capaian Lainnya		
	a. Penghargaan/prestasi unit kerja	Tidak Ada	
	b. Dukungan pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau capaian program strategis/prioritas lainnya	Tidak Ada	

No	KELENGKAPAN LAPORAN KINERJA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
7	Realisasi Anggaran		
	a. Realisasi anggaran unit kerja sesuai format	Ada Sebagian	• Cek format, agar dilengkapi dengan sandingan Pagu berdasarkan PK sesuai format
	b. Realisasi anggaran per indikator kinerja sesuai format	Ada	• Agar dilengkapi baris jumlah/total
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Pelaporan Periode Sebelumnya per Indikator Kinerja sesuai format	Ada	• Cek substansi rekomendasi apa sesuai dengan Laporan Triwulan I 2026 • Agar dilengkapi data dukung bukti tindak lanjut rekomendasi
9	Upaya perubahan/peningkatan budaya kinerja yang telah dilakukan sesuai format semula-menjadi	Ada Sebagian	• Format uraian perubahan budaya kinerja (semula – menjadi) agar dilengkapi kolom *outcome*/manfaat dari perubahan budaya kinerja bagi unit kerja. Selain itu, juga perlu dilengkapi data dukung bukti penerapan budaya kinerja
10	Lampiran:		
	a. Perjanjian Kinerja	Ada	
	b. Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja sesuai format	Ada	• Agar dicek target waktu menyesuaikan waktu penyelesaian rekomendasi (tidak semuanya target waktu selesai pada Triwulan III 2026) • Agar dicek kesesuaian rekomendasi antara upaya peningkatan kinerja pada uraian masing-masing IKK di Bab II
	c. Data dukung capaian kinerja yang valid bertanda tangan PIC/ Penanggungjawab	Ada	• Data dukung agar dipilah per indikator kinerja kegiatan • Cek kelengkapan tanda tangan PIC/penanggungjawab
	d. Monitoring rencana aksi per bulan	Ada Sebagian	• Kolom evaluasi dan rencana tindak lanjut tidak terisi lengkap • Isian matriks tidak dapat terbaca jelas/buram • Agar menggunakan fitur Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian
	e. Dokumentasi dan laporan pembahasan kinerja di internal unit kerja	Ada	
	f. Penyampaian capaian kinerja dari sub unit kerja kepada pimpinan unit kerja secara formal/nota dinas	Ada Sebagian	• Terdapat penyampaian capaian kinerja kepada Ketua Tim Tata Usaha, seharusnya kepada Direktur Sarana Perkeretaapian • Belum terdapat penyampaian capaian kinerja dari Ketua Tim Tata Usaha kepada Direktur Sarana Perkeretaapian

CATATAN PELAPORAN:

- Penyajian dan penulisan laporan agar diperbaiki/dirapikan/diperjelas, termasuk penyajian tabel dan gambar;
- Rincian perhitungan matematis capaian kinerja agar dilengkapi pada seluruh IKK yang memiliki realisasi kinerja;

- Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja) agar dilengkapi memenuhi 50% jumlah IKK yang memiliki realisasi kinerja. Beberapa IKK dapat dilakukan dengan perbandingan kinerja unit kerja Eselon I, unit kerja Direktorat teknis lainnya, serta dipertimbangkan penambahan *benchmarking* kinerja dengan kinerja internasional/negara lain/unit kerja sejenis/sub sektor/sektor lainnya;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada beberapa IKK agar diuraikan lebih detail, diantaranya lebih lengkap diuraikan terkait upaya/kegiatan pendukung yang telah dilakukan sesuai periode, termasuk tahapan/kendala/permasalahan/pendukung lainnya;
- Uraian *crosscutting* kinerja agar dilengkapi pada seluruh IKK serta dipastikan dilengkapi uraian pihak terkait dan bentuk hubungan/kerjasama/lainnya;
- Realisasi penanganan risiko agar dilengkapi pada seluruh IKK. Apabila belum/tidak ada/masih berproses realisasi penanganan risiko pada periode Triwulan II 2026, maka dapat dilengkapi dengan uraian pengendalian eksisting (*form* 5) yang telah dilaksanakan. Selain itu, uraian juga dapat dilengkapi dengan hasil pencatatan keterjadian risiko yang terkait pencapaian indikator kinerja;
- Upaya peningkatan kinerja (penyesuaian strategis kebijakan kegiatan/anggaran, organisasi/pegawai) agar dilengkapi seluruh IKK dan dipastikan lebih spesifik/tidak normatif, di*update*, serta menjelaskan langkah atau rekomendasi yang akan dilakukan pada periode berikutnya, bukan kegiatan yang telah dilakukan;
- Realisasi anggaran unit kerja agar dicek sesuai format dengan dilengkapi sandingan alokasi anggaran sesuai PK awal;
- Laporan agar dilengkapi juga dengan uraian dukungan pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai bidang tugas (KP, PP, ProP, lainnya);
- Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Pelaporan Periode Sebelumnya agar dicek substansi rekomendasi sesuai dengan Laporan Triwulan I 2026 serta dilengkapi data dukung bukti tindak lanjut rekomendasi;
- Format uraian perubahan budaya kinerja dilengkapi kolom *outcome*/dampak/manfaat dari perubahan budaya kinerja bagi unit kerja, serta juga dilengkapi data dukung bukti penerapan budaya kinerja;
- Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja agar dicek target waktu menyesuaikan waktu penyelesaian rekomendasi (tidak semuanya target waktu selesai pada Triwulan III 2026) serta rekomendasi sinkron dengan upaya peningkatan kinerja pada uraian masing-masing IKK di Bab II;
- Data dukung capaian kinerja agar dipilah per IKK dan dicek kembali kelengkapan tanda tangan PIC/penanggungjawab;
- Monitoring rencana aksi agar diisi lengkapi sesuai format, pastikan dapat terbaca jelas/tidak buram, serta selanjutnya penyusunan menggunakan fitur Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian;
- Penyampaian capaian kinerja agar dipastikan berupa nota dinas penyampaian capaian kinerja dari sub unit kerja ditujukan kepada pimpinan unit kerja (bukan kepada Ketua/Koordinator Tim Tata Usaha) serta agar dilengkapi dari seluruh sub unit kerja.

D. DOKUMENTASI





